

Arah Pendidikan:

Menuju Indonesia Emas 2045



Hak Cipta dan Legal

Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara Tanoto Foundation dan Tenggara Strategics untuk menyajikan gambaran besar tentang bagaimana sektor pendidikan telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun. Buku ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu penting, pembuat kebijakan, dan aktor relevan lainnya, termasuk organisasi filantropi, yang terlibat dalam semua tingkat pendidikan guna menavigasi potensi kebijakan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

© Diterbitkan oleh Tanoto Foundation, Tenggara Strategics, 2025

www.tanotofoundation.org

www.tenggara.id

**Tanoto
Foundation**

Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No.31

Jakarta 10230

+62 21 392 3189

info@tanotofoundation.org



Menguatkan Pikiran, Membentuk Bangsa

Menjelang seratus tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045, harapan besar untuk menjadi negara yang adil, makmur, dan berdaya saing global—Indonesia Emas 2045—bertumpu pada satu kekuatan utama: kualitas sumber daya manusia. Di jantung upaya membangun sumber daya manusia ini terdapat sistem pendidikan yang merata, siap menghadapi masa depan, dan mampu mengoptimalkan potensi setiap peserta didik di seluruh pelosok Nusantara.

Namun, pencapaian visi ini tidak cukup hanya dengan ambisi—ia menuntut tindakan nyata. Di Tanoto Foundation, kami meyakini bahwa reformasi pendidikan yang bermakna tidak cukup hanya dengan perubahan kebijakan. Diperlukan kemitraan publik-swasta yang kuat, pengambilan keputusan berbasis data, serta inovasi yang berakar secara lokal dan berkelanjutan. Sebagai organisasi filantropi yang berkomitmen untuk meningkatkan hasil belajar dan mengurangi ketimpangan, kami bangga mendukung dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan nasional dan daerah guna mendorong percepatan kemajuan pendidikan.

Dalam semangat ini, *Education Outlook: Towards Indonesia Emas 2045* hadir sebagai wujud komitmen kami terhadap percakapan nasional yang sangat penting ini. Disusun bersama Tenggara Strategics, publikasi ini merangkum hasil dari tiga studi yang dilaksanakan oleh mitra terpercaya atas penugasan dari Tanoto Foundation:

- ***Education Landscape in Indonesia***, oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS);
- ***Indonesia Education Policy Analysis***, oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS);
- ***Contribution of Philanthropy Organizations to Indonesia's Education Agenda***, oleh Filantropi Indonesia (FI).

Buku ini menyajikan refleksi komprehensif dan berbasis bukti mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini—pencapaiannya, tantangan yang masih bertahan, sekaligus peluang untuk melakukan transformasi. Buku ini juga menegaskan bahwa meskipun jalan ke depan penuh tantangan, dampak dari reformasi yang tepat arah bisa sangat besar. Dengan visi yang jelas, kolaborasi yang kuat, dan komitmen bersama, kemajuan yang berarti bukanlah hal yang mustahil.

Buku ini menguraikan prioritas reformasi yang ambisius sekaligus dapat diimplementasikan. Mulai dari penguatan pembelajaran dasar dan peningkatan kualitas guru, hingga penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan integrasi pendekatan inklusif berbasis teknologi—buku ini menawarkan peta jalan strategis yang dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lintas sektor. Tidak kalah pentingnya, buku ini menekankan pentingnya tata kelola yang responsif, mekanisme pendanaan yang efektif, serta penyelarasan strategi nasional dengan inovasi lokal.

Lebih dari sekadar laporan, *Education Outlook* adalah seruan untuk bertindak. Buku ini mengajak para pemimpin di pemerintahan, pendidikan, sektor filantropi, dan sektor swasta untuk membangun kemitraan yang lebih erat dan menyelaraskan upaya menuju satu tujuan bersama: menciptakan sistem pendidikan yang memberdayakan setiap anak Indonesia untuk berkembang dalam dunia yang semakin kompleks dan terus berubah.

Kami berharap publikasi ini menjadi kompas sekaligus katalisator—memberi arah bagi kebijakan, panduan bagi implementasi, dan inspirasi untuk kolaborasi—agar bersama-sama, kita dapat mewujudkan janji besar Indonesia Emas 2045 melalui investasi transformatif di bidang pendidikan.

Tanoto Foundation

Kata Pengantar	ii
Daftar Singkatan	iv
01 Arsitektur Pendidikan Indonesia	2
02 Dinamika Sektor Pendidikan Indonesia	20
03 Peran Aktor Non-Negara	66
04 Peran Organisasi Filantropi dan Inisiatif Kolaborasi	82
05 Visi Indonesia Emas 2045	98
06 Pemerintah Prabowo - Gibran	104
07 Kesimpulan dan Rekomendasi	110
Lampiran	120

Daftar Singkatan

1.	3T	:	Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
2.	ADB	:	Asian Development Bank
3.	ADB I	:	Asian Development Bank Institute
4.	AKS	:	Angka Kesiapan Sekolah
5.	AKSI	:	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
6.	AN	:	Asesmen Nasional
7.	APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8.	APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9.	APE	:	Alat Permainan Edukatif
10.	APK	:	Angka Partisipasi Kasar
11.	APM	:	Angka Partisipasi Murni
12.	ASN	:	Aparatur Sipil Negara
14.	BAN PAUD	:	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
15.	BAN PAUD-PNF	:	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
16.	BAN-S/M	:	Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah
17.	Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
18.	BCA	:	Bank Central Asia
19.	BGP	:	Balai Guru Penggerak
20.	Bidikmisi	:	Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi
21.	BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana/ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
22.	BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
23.	BNSP	:	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
24.	BOP	:	Bantuan Operasional Pendidikan
25.	BOP PAUD-ABK	:	Bantuan Operasional Pendidikan PAUD Anak Berkebutuhan Khusus
26.	BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
27.	BP	:	British Petroleum
28.	BPS	:	Badan Pusat Statistik
29.	BSKAP	:	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
30.	BSNP	:	Badan Standar Nasional Pendidikan
31.	CAT	:	Computer Assisted Test
32.	CECCEP	:	Centre for Early Childhood Care Education and Parenting
33.	CfDS	:	Center for Digital Society
34.	CIPS	:	Center for Indonesian Policy Studies
35.	CSIS	:	Centre for Strategic and International Studies
36.	CSR	:	Corporate Social Responsibility
37.	DAK	:	Dana Alokasi Khusus
38.	Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
39.	DAU	:	Dana Alokasi Umum
40.	DBH	:	Dana Bagi Hasil
41.	Ditjen GTK	:	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
42.	DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
43.	DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
44.	Dukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
45.	FSGI	:	Federasi Serikat Guru Indonesia
46.	GDP	:	Gross Domestic Product
47.	GIZ	:	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
48.	GK Indonesia	:	Gerakan Kepedulian Indonesia
49.	GNOTA	:	Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
50.	GPE	:	Global Partnership for Education
51.	GTK	:	Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan
52.	HR	:	Human Resources
53.	IGI	:	Ikatan Guru Indonesia
54.	IHF	:	Indonesia Heritage Foundation
55.	IISMA	:	Indonesian International Student Mobility Awards
56.	ISO	:	International Organization for Standardization
57.	K/L	:	Kementerian/Lembaga
58.	Kadin	:	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
59.	Kemenag	:	Kementerian Agama
60.	Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
61.	Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
62.	Kemendikbudristek	:	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
63.	Kemenko PMK	:	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
64.	Kemenpan RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
65.	Kemenristek	:	Kementerian Riset dan Teknologi
66.	KFP	:	Komunitas Filantropi Pendidikan
67.	KIP Sekolah	:	Kartu Indonesia Pintar Kuliah
68.	KK	:	Kartu Keluarga
69.	KM	:	Kampus Mengajar
70.	KPAI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
71.	KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
72.	KPPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

73.	LMS	:	Learning Management System
74.	LPTK	:	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
75.	LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
76.	MA	:	Madrasah Aliyah
77.	MAK	:	Madrasah Aliyah Kejuruan
78.	MBKM	:	Merdeka Belajar Kampus Merdeka
79.	MI	:	Madrasah Ibtidaiyah
80.	MKKS	:	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
81.	MSIB	:	Magang dan Studi Independen Bersertifikat
82.	MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
83.	NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
84.	OECD	:	Organisation for Economic Cooperation and Development
85.	P2MW	:	Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha
86.	PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
87.	PAUD-HI	:	Pendidikan Anak Usia Dini – Holistik Integratif
88.	Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
89.	PhD	:	Doctor of Philosophy
90.	PHTC	:	Program Hasil Terbaik Cepat
91.	PIRAC	:	Public Interest Research Advocacy Center
92.	PISA	:	Programme for International Student Assessment
93.	PJJ	:	Pembelajaran Jarak Jauh
94.	PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
95.	PKK Ormawa	:	Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan
96.	PKM	:	Program Kreativitas Mahasiswa
97.	PMM	:	Platform Merdeka Mengajar
98.	PMM	:	Pertukaran Mahasiswa Merdeka
99.	PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
100.	Pokjantal	:	Kelompok Kerja Operasional
101.	Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpadu
102.	PP	:	Peraturan Pemerintah
103.	PPDB	:	Penerimaan Peserta Didik Baru
104.	PPG	:	Pendidikan Profesi Guru
105.	PRIME SteP	:	Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Technology Parks Project
106.	PSF	:	Putera Sampoerna Foundation
107.	PSPK	:	Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan
108.	PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
109.	PTN-BH	:	Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum
110.	PUSKAPA UI	:	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia
111.	RA	:	Raudhatul Athfal
112.	RF	:	Rajawali Foundation
113.	RKAS	:	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
113.	RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
114.	RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
115.	Sakernas	:	Survei Angkatan Kerja Nasional
116.	SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
117.	SD	:	Sekolah Dasar
118.	SDGs	:	Sustainable Development Goals
119.	SEAMEO	:	Southeast Asian Ministers of Education Organization
120.	SI	:	Surya Institute
121.	SIGAP	:	Siapkan Generasi Anak Berprestasi
122.	SKKNI	:	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
123.	SMA	:	Sekolah Menengah Atas
124.	SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
125.	SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
126.	SNP	:	Standar Nasional Pendidikan
127.	SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
128.	SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
129.	SPN	:	Standar Pendidikan Nasional
130.	STEAM	:	Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics
131.	STEM	:	Science, Technology, Engineering, and Mathematics
132.	TBM	:	Taman Bacaan Masyarakat
133.	TBP	:	Taman Bacaan Pelangi
134.	TELADAN	:	Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan
135.	TFI	:	Teach for Indonesia
136.	TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
137.	TJSL	:	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
138.	TKNV	:	Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
139.	TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
140.	TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
141.	TVRI	:	TV Republik Indonesia
142.	UKG	:	Uji Kompetensi Guru
143.	UNDP	:	United Nations Development Programme
144.	UNESCO	:	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
145.	UNICEF	:	United Nations International Children's Emergency Fund

146.	UNICEF MICS-EAGLE	:	UNICEF Education Analysis for Global Learning and Equity
147.	UPT	:	Unit Pelaksanaan Teknis
148.	USAID	:	United States Agency for International Development
149.	UU	:	Undang-Undang
150.	WCP	:	World Class Professor
151.	WCU	:	World Class University
152.	WHO	:	World Health Organization
153.	WLF	:	William & Lily Foundation
154.	WMK	:	Wirausaha Merdeka
155.	World Bank GEPD	:	World Bank Global Education Policy Dashboard
156.	World Bank SABER	:	World Bank Systems Approach for Better Education Results
157.	WTT	:	We the Teachers
158.	WVI	:	Wahana Visi Indonesia
159.	YABB	:	Yayasan Anak Bangsa Bisa
160.	YAPB	:	Yayasan Pemimpin Anak Bangsa
161.	YCAB	:	Yayasan Cinta Anak Bangsa
162.	YDBA	:	Yayasan Dharma Bhakti Astra
163.	YISK	:	Yayasan Insan Sekolah Kasih
164.	YPH	:	Yayasan Pelita Harapan

Bab I

Arsitektur Pendidikan Indonesia



Arsitektur Pendidikan Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami transformasi dan berkembang seiring dengan proses reformasi berkelanjutan dalam rangka menjawab kebutuhan bangsa yang semakin beragam. Selama prosesnya, sistem ini telah bertransisi dari struktur yang sangat terpusat menuju desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menangani tantangan khas masing-masing wilayah. Pergeseran tersebut mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap keberagaman geografis, budaya, dan sosial-ekonomi Indonesia yang menuntut pendekatan pendidikan yang lebih disesuaikan dan fleksibel demi memenuhi kebutuhan spesifik setiap masyarakat.

Inti dari perkembangan pada sektor pendidikan adalah kemampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan, regulasi, dan program melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Upaya kolektif untuk meningkatkan pendidikan bukan hanya soal menjalankan strategi nasional, tetapi juga melibatkan otoritas lokal agar sistem pendidikan dapat merespons kondisi regional secara efektif.

Perjalanan ini masih akan terus berlangsung, dan akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Menjamin bahwa semua daerah, tanpa memandang lokasi geografis atau tingkat ekonomi, dapat mengakses pendidikan berkualitas tinggi adalah prioritas utama. Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dan memperkuat program-programnya dengan berusaha menyeimbangkan standar nasional dengan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk mengakomodasi perbedaan antar daerah. Dialog yang terus berlangsung antara otoritas pusat dan entitas lokal menyoroti pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yakni masyarakat yang berpendidikan dan berdaya.

Siapa Regulatornya?

Sistem pendidikan nasional diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang bertanggung jawab atas sekolah-sekolah berbasis agama. Pengawasan ganda ini dilaksanakan agar pendidikan sekuler maupun pendidikan agama mendapatkan perhatian dan sumber daya yang sesuai. Kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan di 38 provinsi serta 540 kabupaten dan kota, yang membutuhkan koordinasi di antara setidaknya sepuluh kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Catatan:

Pada tahun 2021, pemerintah resmi menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Beberapa regulasi yang masih berlaku merujuk pada peraturan Kemendikbud sebelum penggabungan, yang kemudian diikuti oleh regulasi Kemendikbudristek yang diberlakukan setelah penggabungan.

Apa Visinya?

Dalam pidato pelantikannya pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya membangun bangsa yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Ia menegaskan bahwa kunci masa depan yang makmur terletak pada pengembangan sumber daya manusia yang bergantung pada sistem pendidikan dan pelatihan yang kuat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia. Laporan Bank Dunia tahun 2020 menyoroti bahwa untuk mencapai tujuan ambisius ini, diperlukan penyesuaian antara hasil pendidikan dengan tujuan ekonomi dan pembangunan nasional.



Pendidikan bukan hanya menjadikan manusia Indonesia cerdas dan pintar, tapi upaya memanusiakan manusia.

- Ir. Joko Widodo



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 turut menggemakan visi ini, yang bertujuan untuk membangun “sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing” yang “sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.” Guna mencapai kesejahteraan, Indonesia membutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya, sekolah, lembaga pendidikan, dan para guru turut berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, orang tua, dan sektor swasta.

Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa buku ini disusun pada periode akhir pemerintahan Presiden Jokowi guna memberikan pemahaman mengenai pengembangan fondasi sistem pendidikan selama sepuluh tahun terakhir, yang akan menjadi bagian penting dalam membentuk lanskap pendidikan Indonesia di masa depan. Meskipun urusan pendidikan saat ini dikelola oleh setidaknya tiga kementerian utama—Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta Kementerian Agama—fokus buku ini adalah pada struktur dan program pendidikan yang dijalankan oleh Kemendikbudristek serta Kemenag dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi.

Sinergi Publik & Swasta

Lembaga pendidikan publik yang diatur oleh Kemendikbudristek dan Kemenag memainkan peran kunci dalam membentuk standar pendidikan nasional, merancang kurikulum, dan memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan mereka menjadi fondasi penting untuk menciptakan kesempatan belajar sepanjang hayat dan memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, lembaga pendidikan swasta membawa inovasi dan fleksibilitas ke dalam dunia pendidikan. Mereka sering kali menjadi garda terdepan dalam memperkenalkan metode pengajaran baru, mengintegrasikan teknologi canggih, dan menawarkan program-program khusus yang adaptif dengan kebutuhan zaman. Kehadiran sekolah swasta juga membantu mengurangi beban sistem pendidikan publik dengan menampung sebagian besar siswa di Indonesia.

Sinergi antara sektor pendidikan publik dan swasta sangat krusial. Lembaga pendidikan publik menjamin akses yang luas dan kesetaraan, sedangkan lembaga swasta mendorong peningkatan kualitas dan keragaman. Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana kedua sektor ini dapat berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan saling memperkuat guna membangun sistem pendidikan yang lebih solid dan dinamis.

Bab ini juga akan menyoroti peran strategis lembaga pendidikan publik dalam membentuk wajah pendidikan di Indonesia. Dengan menggali kontribusi unik dari masing-masing sektor serta upaya kolaboratif yang mereka lakukan, kita akan memahami bagaimana mereka bersama-sama mendorong tercapainya pendidikan berkualitas di Indonesia. Selain itu, bab ini akan membahas perjalanan Indonesia menuju desentralisasi pendidikan serta meninjau anggaran pendidikan dari tahun 2022 hingga 2024.




A. Kemendikbudristek & Kemenag

Sektor pendidikan di Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia, dengan 53,8 juta siswa terdaftar dalam jenjang pendidikan formal pra-perguruan tinggi. Tata kelola pendidikan melibatkan berbagai kementerian pusat dan pemerintah daerah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, menciptakan ekosistem pendidikan yang kompleks dengan banyak pemangku kepentingan yang terlibat.

Dua kementerian utama, yaitu Kemendikbudristek dan Kemenag, menjadi pengawas utama dalam ekosistem ini. Mayoritas anak Indonesia menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta yang berada di bawah pengelolaan kedua kementerian tersebut. Sekitar 15 persen dari jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah, atau sekitar 8 juta siswa, bersekolah di lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kemenag.



Tabel 1. Peran Kemendikbudristek & Kemenag

	Kemendikbudristek	Kemenag
 <p>Pengawasan & Manajemen Sekolah</p>	<p>Sekolah negeri dan swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengelola lembaga pendidikan negeri dan swasta, baik formal maupun informal Mengelola pendidikan K-12¹, pendidikan tinggi, dan pendidikan informal (pendidikan orang dewasa, pendidikan masyarakat) melalui direktorat jenderal terkait. Menerapkan tata kelola yang terdesentralisasi: Kemendikbudristek menetapkan standar nasional, sedangkan pemerintah daerah mengelola sekolah K-12. Menegakkan standar pendidikan di sekolah swasta melalui akreditasi dan bantuan dana bersyarat. 	<p>Sekolah negeri dan swasta berbasis agama</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengelola lembaga pendidikan agama formal dan informal dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, termasuk konten agama untuk siswa Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Menerapkan tata kelola terpusat: Kemenag menegakkan standar pendidikan untuk sekolah negeri berbasis agama. Memiliki kewenangan terbatas untuk menegakkan standar di sekolah dan lembaga pendidikan swasta berbasis agama.
 <p>Standar Pendidikan</p>	<p>Menetapkan Standar Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menentukan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditujukan untuk proses pembelajaran, infrastruktur, tenaga kependidikan, manajemen, dan pembiayaan. Merumuskan kebijakan nasional terkait budaya, sastra (termasuk Bahasa Indonesia dan bahasa daerah), film, serta ilmu pengetahuan dan teknologi 	<p>Mematuhi standar pendidikan Kemendikbudristek</p> <ul style="list-style-type: none"> Mematuhi standar pendidikan Kemendikbudristek, termasuk manajemen kurikulum dan tenaga pengajar Dapat melakukan penyesuaian kecil dalam pelaksanaannya melalui Keputusan Menteri. Menyesuaikan kurikulum dan durasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) sesuai dengan kebutuhan
 <p>Kurikulum Nasional</p>	<p>Mengembangkan kurikulum nasional dan berkoordinasi dengan Kemenag untuk mata pelajaran berbasis agama</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kurikulum nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaannya. Menetapkan mata pelajaran wajib yang harus dimasukkan dalam kurikulum nasional. 	<p>Melaksanakan kurikulum nasional dengan penyesuaian dan menetapkan konten agama untuk mata pelajaran sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan konten agama untuk mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam dan bahasa Arab dalam kurikulum nasional Memungkinkan madrasah untuk menyesuaikan beberapa aspek kurikulum: waktu pengajaran, materi agama, konten lokal, dan kegiatan ekstrakurikuler Sekolah berbasis Kristen dapat mengembangkan mata pelajaran umum dan lokal sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

¹ K-12 mengacu pada pendidikan dasar selama 12 tahun.

Kotak 1. Sekolah Negeri Berbasis Agama Dikelola Secara Terpusat di Bawah Kemenag

Berbeda dengan tata kelola desentralisasi yang diterapkan oleh Kemendikbudristek, yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah, Kemenag secara langsung mengawasi 52.576 lembaga pendidikan berbasis agama. Lembaga-lembaga ini mencakup pendidikan formal dan informal, serta menyajikan konten agama bagi siswa Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, dan Konghucu, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

Menariknya, 95 persen dari sekolah di bawah naungan Kemenag adalah swasta, yang menyumbang sekitar 11,8 persen dari total populasi siswa pra-perguruan tinggi di Indonesia. Madrasah menjadi kontributor terbesar terhadap jumlah pendaftaran siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh Kemenag

Madrasah menawarkan pendidikan formal dengan penekanan pada studi Islam di empat jenjang:

1. Raudhatul Athfal (RA): setara dengan pendidikan anak usia dini
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI): setara dengan tingkat dasar
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs): setara dengan tingkat menengah pertama
4. Madrasah Aliyah (MA): setara dengan tingkat menengah atas dan sekolah kejuruan

Sinergi Lintas Sektor

Mencapai keunggulan dalam dunia pendidikan memerlukan koordinasi yang mulus dan efektif. Berdasarkan Peraturan Kemendikbudristek No. 28 Tahun 2021, Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek memiliki peran sentral dalam menjembatani berbagai pihak. Mereka membangun jaringan antara kementerian, lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk memperkuat kemitraan pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya tentang mengelola hubungan di dalam kementerian, tetapi juga menciptakan sinergi lintas sektor yang komprehensif, dari level atas hingga bawah. Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik, semua pihak harus berbagi visi yang sama, program, kebijakan, dan rencana aksi harus terintegrasi secara harmonis.

Dalam lanskap pendidikan Indonesia, kolaborasi yang terjalin tidak hanya melibatkan Kemendikbudristek. Mereka juga bekerja erat dengan Kemenag untuk mengelola pendidikan sekuler dan agama, serta menghadapi beragam tantangan yang muncul. Kemendikbudristek terus menjalin kerja sama dengan kementerian lain untuk merekrut guru, mendorong transformasi pendidikan digital, meningkatkan pelatihan teknis dan vokasional, memperbarui fasilitas sekolah, dan memastikan kualitas pendidikan yang baik melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 2. Kementerian dan Lembaga Terkait yang Mendukung Kemendikbudristek

Kementerian	Program
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	SPM
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat & Kementerian Kesehatan	Sanitasi
Kementerian Agama	Pendidikan Berbasis Agama
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Konstruksi Sekolah
Kementerian Perindustrian	Pengembangan Tenaga Kerja (Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Vokasi)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian & Kementerian Ketenagakerjaan	Rekrutmen Guru

Kementerian	Program
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Digitalisasi dalam Pendidikan

Mendorong Transformasi Digital: Mengintegrasikan Program Antarkementerian melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 hadir untuk mempercepat transformasi digital, dengan fokus pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, terutama di sektor pendidikan dan layanan pemerintahan. Di bawah arahan ini, Kemendikbudristek berinovasi dengan mengembangkan platform Edtech dan meningkatkan kualitas konten pembelajaran digital.

Tabel 3. Program SPBE Kemendikbudristek

Kementerian	Target Hasil Pendidikan	Program SPBE
Kemendikbudristek 	Akses Pendidikan	TanyaBOS Mandiri Belajar
	Kualitas Pendidikan	Merdeka Belajar Rapor Pendidikan
	Peningkatan Sekolah	Akun Belajar.id SIPLah
	Pengembangan Tenaga Kerja	Kampus Merdeka Kedaireka
	Tata Kelola Pemerintah	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Strategi pengembangan SPBE di sektor pendidikan bertujuan untuk mengintegrasikan Dapodik dengan kementerian atau lembaga lain, seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 3. Dapodik berperan sebagai sumber data utama yang membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi pengelolaan sekolah dan merumuskan rencana pendidikan yang lebih baik di masa mendatang. Sistem ini sangat vital karena mendukung berbagai aspek dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan responsif.

Tabel 4. Pengintegrasian Dapodik Kemendikbudristek ke dalam Program di Kementerian Lain

Kementerian/Lembaga	Target Hasil Pendidikan	Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)	Akses Pendidikan	Mengintegrasikan data Nomor Induk Nasional untuk manajemen anak yang tidak bersekolah
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi		Dukungan data untuk program bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah/KIP Kuliah (sebelumnya biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi atau Bidikmisi) dan proses penerimaan mahasiswa
Kementerian Sosial		Memfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar kelayakan untuk program bantuan pendidikan

Kementerian/Lembaga	Target Hasil Pendidikan	Program
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)		Data mengenai kemiskinan ekstrem
Kemendikbudristek	Kualitas Pendidikan	Integrasi antara Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Informal (BAN PAUD-PNF) pada data akreditasi sekolah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)		Data pendukung untuk Jaga Sekolah (program anti-korupsi untuk sekolah yang dijalankan oleh KPK)
Badan Pusat Statistik (BPS)	Revitalisasi Sekolah	Menyediakan data dari Dapodik untuk publikasi Statistik Pendidikan
Kementerian Agama		Mengumpulkan data unit pendidikan agama melalui Dapodik dan mendukung Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang dimiliki Kemenag
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Data dan informasi mengenai rehabilitasi dan pembangunan sekolah
Kementerian Pertanian	Pengembangan Tenaga Kerja	Data SMK di bawah Kementerian Pertanian, program Kementerian Pertanian mencakup SMK di bawah Kemendikbudristek
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintah	Data dan informasi mengenai sekolah-sekolah di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan		Data dan informasi mengenai Unit Pendidikan yang memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (pada fase integrasi teknis) untuk mendukung program sanitasi (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs)











Membangun Ekosistem Pendidikan

Ada panggilan yang semakin kuat dari para praktisi dan ahli pendidikan untuk mengembangkan ekosistem pendidikan yang komprehensif ketika para pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan bidang keahlian dapat terlibat dalam kolaborasi yang bermakna. Ekosistem ini bertujuan untuk menghapus batasan yang ada dan mendorong kemitraan lintas sektor, menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi, dan holistik terhadap pendidikan. Dengan memperkuat komunikasi dan membangun koneksi antara pembuat kebijakan, pendidik, pelaku sektor swasta, pemimpin komunitas, dan orang tua, ekosistem ini berpotensi memanfaatkan kekuatan serta sumber daya dari setiap kelompok untuk menghadapi tantangan kompleks dalam sistem pendidikan.

Penciptaan ekosistem semacam itu akan melibatkan dialog yang berkelanjutan dan forum berbagi pengetahuan ketika para pemangku kepentingan dapat bertukar ide, wawasan, dan praktik baik. Misalnya, kolaborasi antara pemerintah nasional dan lokal, lembaga pendidikan, dan industri dapat menghasilkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga meningkatkan daya saing siswa. Selain itu, kemitraan publik-swasta dapat memberikan akses tambahan bagi sekolah ke sumber daya vital, seperti teknologi dan infrastruktur, yang esensial untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pada akhirnya, ekosistem ini akan menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif dan tangguh sehingga siap memenuhi beragam kebutuhan siswa dari berbagai wilayah dan latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda. Dengan mengoptimalkan keahlian dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan, ekosistem ini akan berkontribusi pada penciptaan lingkungan pendidikan ketika setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Menganalisis ekosistem pendidikan Indonesia melalui lensa ini mengungkapkan lima lapisan kemitraan dan interaksi yang mencakup tingkat nasional dan lokal (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Tabel 5. Skala Nasional dan Skala Lokal

Skala Nasional		Skala Lokal	
 <p>DPR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Kebijakan • Pengawasan kebijakan 	 <p>Pemerintah Lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan daerah • Kemitraan pemerintah dan swasta • Manajemen dan rekrutmen guru
 <p>Kemendikbudristek</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan • Kemitraan pemerintah dan swasta • Manajemen dan rekrutmen guru • Kemitraan internasional 	 <p>Sekolah Negeri/Swasta & Institusi Pendidikan Tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan daerah • Kemitraan pemerintah dan swasta • Manajemen dan rekrutmen guru • Meningkatkan otonomi daerah • Relasi dengan industri
 <p>Kemenag</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan • Kemitraan pemerintah dan swasta • Manajemen dan rekrutmen guru • Kemitraan internasional 	 <p>Kepala Sekolah dan Komite Sekolah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi sekolah • Kemitraan pemerintah dan swasta • Keterlibatan orang tua
 <p>Kementerian lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas sekolah • Pengembangan tenaga kerja • Perekrutan guru • Penyediaan infrastruktur (sanitasi, listrik, internet, dll) 	 <p>Guru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi sekolah • Kemitraan pemerintah dan swasta • Keterlibatan orang tua • Pengembangan Anak Usia Dini
 <p>Sektor swasta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan pemerintah dan swasta • Pengembangan kapasitas guru • Kemitraan internasional • Keterlibatan orang tua • Pembiayaan pendidikan 	 <p>Orang tua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi sekolah • Kemitraan pemerintah dan swasta • Keterlibatan orang tua • Pengembangan Anak Usia Dini

Hubungan antara skala nasional dan lokal dalam sektor pendidikan merupakan jalinan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang saling terhubung, berkontribusi dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan program, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Di tingkat nasional, lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kemendikbudristek, Kemenag, dan kementerian lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, menjalin kemitraan publik-swasta, mengelola pendidik, dan mengembangkan fasilitas pendidikan. Mereka juga berperan penting dalam membangun kemitraan internasional serta mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional.

Di sisi lain, pada tingkat lokal seperti pemerintah daerah, sekolah (baik negeri maupun swasta), perguruan tinggi, kepala sekolah, guru, dan orang tua berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat nasional. Mereka terlibat dalam perumusan kebijakan daerah, membangun kemitraan publik-swasta, serta mengelola dan merekrut pendidik, serta peningkatan otonomi sekolah. Otonomi ini memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, termasuk keterlibatan industri dan masyarakat. Selain itu, orang tua secara aktif juga berpartisipasi dalam pengembangan anak usia dini dan mendukung kegiatan sekolah, semua ini berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat lokal

Interaksi dinamis antara skala nasional dan lokal ini mencerminkan dinamika kebijakan nasional disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah, dengan setiap pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam ekosistem pendidikan yang kompleks.

B. Desentralisasi Pendidikan: Sinergi Pusat-Daerah

Desentralisasi telah menjadi agenda penting dalam gerakan reformasi pendidikan. Hal ini terlihat dari komitmen berkelanjutan Kemendikbudristek untuk memastikan pendidikan berkualitas, terutama sejak tahun 2019. Selama periode ini, sistem pendidikan Indonesia telah mengalihkan fokusnya dari penekanan pada akses menjadi prioritas pada kualitas. Transisi ini mencakup peningkatan dalam sumber daya manusia, layanan pendidikan, dan hasil belajar, dengan upaya yang didedikasikan untuk mempromosikan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.



Struktur Pendidikan Indonesia

Sambil bertindak sebagai katalisator untuk kemajuan pendidikan, pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek memiliki kewenangan yang lebih besar atas pendidikan pascasekolah menengah. Pemerintah kabupaten/kota fokus pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan informal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama, sementara pemerintah provinsi mengawasi pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus, yang setara dengan SMA dan pendidikan luar biasa. Dengan reformasi pendidikan ini, sekolah-sekolah telah mendapatkan otonomi yang lebih besar dalam mengelola entitas mereka untuk memastikan kualitas pendidikan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Struktur dan Fungsi Sistem Pendidikan Indonesia Setelah Desentralisasi

Manajemen Pendidikan			
Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/kota	Kepala Sekolah
<ol style="list-style-type: none"> Standar pendidikan nasional Pendidikan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan menengah atas Pendidikan khusus 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar Pendidikan menengah pertama Pendidikan anak usia dini dan pendidikan informal 	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen sekolah secara individu: perencanaan, penganggaran, evaluasi sekolah

Pengembangan Kurikulum			
Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kepala Sekolah
Kurikulum nasional untuk pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan informal	Kurikulum bermuatan lokal untuk pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus lokal	Kurikulum bermuatan lokal untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan informal	Implementasi kurikulum bermuatan lokal

Akreditasi
Pemerintah Pusat
Akreditasi untuk pendidikan tinggi, menengah, dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan informal

Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan			
Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kepala Sekolah
<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan pelatihan pendidik, perekrutan staf pengajar tetap, penerjemah pendidik, dan pengembangan karier pendidik Pemindahan atau transfer pendidik dan tenaga kependidikan antar provinsi 	Pemindahan atau transfer pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Pengalokasian dan pemindahan atau transfer pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu daerah kabupaten/kota Perekrutan guru kontrak di tingkat kabupaten/kota 	Perekrutan guru dengan kontrak sekolah

Lisensi atau Perizinan Pendidikan		
Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> Lisensi atau perizinan untuk universitas swasta Izin operasi untuk unit pendidikan asing 	<ol style="list-style-type: none"> Lisensi atau perizinan untuk pendidikan menengah swasta Lisensi atau perizinan untuk pendidikan khusus swasta 	<ol style="list-style-type: none"> Lisensi atau perizinan untuk pendidikan dasar swasta Lisensi atau pendidikan anak usia dini swasta dan pendidikan informal swasta

Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra		
Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Membina bahasa dan sastra Indonesia	Bahasa dan sastra lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi	Bahasa dan sastra yang penuturnya berada dalam wilayah kabupaten/kota

Penilaian		
Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Mengawasi dan mengimplementasikan penilaian keterampilan siswa berdasarkan basis populasi	Bekerja sama dengan sekolah untuk mengembangkan penilaian siswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja guru 2. Penilaian mandiri sekolah terhadap standar pelayanan minimal

Pendidikan Tinggi yang Diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	
Pemerintah Pusat	Kepemimpinan Pendidikan Tinggi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Otoritas tunggal dalam proses pengembangan dan perumusan kebijakan, serta proses pemantauan dan evaluasi untuk institusi pendidikan tinggi 2. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas bagi staf perguruan tinggi 3. Menerbitkan dan mencabut izin untuk institusi pendidikan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi pendidikan tinggi diberikan otonomi untuk menjalankan kebebasan akademik sesuai dengan Tridharma. 2. Institusi pendidikan tinggi memiliki otonomi untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri tetapi harus menawarkan mata kuliah wajib tentang agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. 3. Masyarakat/swasta dapat mendirikan perguruan tinggi swasta.

Pelaksanaan desentralisasi menekankan pentingnya peran vital kapasitas daerah dalam mencapai tonggak-tonggak pencapaian pendidikan. Untuk memberdayakan peran daerah dalam proses ini, pemerintah pusat berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk secara aktif melibatkan pemerintah daerah melalui transformasi fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan, yang dirancang untuk mendukung aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan desentralisasi. UPT memegang peran penting dalam mempromosikan kesetaraan pendidikan, mengatasi masalah pendanaan sekolah, serta bertindak sebagai jembatan antara sekolah dan orang tua murid untuk memfasilitasi desentralisasi yang dipimpin oleh pemerintah daerah.

Tantangan Desentralisasi Pendidikan

Namun, desentralisasi pendidikan menghadirkan segudang tantangan yang berasal dari kerumitan dalam mendistribusikan kewenangan dan sumber daya di berbagai daerah. Meskipun desentralisasi bertujuan untuk membuat sistem pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, desentralisasi sering kali menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal kapasitas, infrastruktur, dan tata kelola. Pemerintah dan lembaga-lembaga lokal mungkin kesulitan mengelola tanggung jawab yang datang dengan otonomi yang lebih besar yang mengarah pada inkonsistensi dalam implementasi kebijakan dan hasil pendidikan.

Gambar 2. Tantangan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia





Bantuan Keuangan yang Tidak Efektif

Dana dari pemerintah pusat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering kali tidak cukup untuk memperbaiki infrastruktur atau mendukung siswa secara memadai.



Ambiguitas Kewenangan

Pemerintah provinsi dan kota menghadapi kesulitan untuk memastikan transisi yang lancar dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah.



Kapasitas Pemerintah Daerah

Inovasi dalam kebijakan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan industri masih menjadi tantangan bagi banyak pemerintah daerah.



Hambatan Bahasa

Bahasa-bahasa asli di daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja siswa dalam penilaian yang dilakukan dalam bahasa Indonesia.



Keberlanjutan Kebijakan

Perubahan politik yang sering terjadi mengganggu kesinambungan kebijakan pendidikan, sehingga berdampak pada perencanaan dan implementasi jangka panjang.



Manajemen Sekolah Lokal

Perencanaan yang tidak memadai dan faktor politik sering kali mengganggu operasional sekolah lokal, dan keberhasilan sangat bergantung pada pemimpin sekolah yang proaktif.



Hak-hak Masyarakat Adat

Format pendidikan yang mengalami standarisasi sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan mengganggu cara hidup tradisional mereka.

(Tanoto Foundation & CIPS, 2024)

Kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan geografis yang beragam di berbagai daerah dapat menciptakan hambatan yang signifikan, sehingga mempersulit upaya untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa. Ketegangan antara mempertahankan standar nasional dan memberikan fleksibilitas kepada daerah sering kali menghasilkan sistem pendidikan yang terpecah-pecah sehingga efektivitas reformasi tidak merata, dan kemajuannya terhambat oleh tantangan-tantangan lokal. Bab II akan membahas lebih dalam tentang kompleksitas ini dalam sektor pendidikan Indonesia.

C. Regulasi yang Berlaku Saat Ini

Seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia, pendekatan pengelolaannya juga mengalami transformasi. Desentralisasi membawa perubahan yang signifikan, memungkinkan otonomi daerah yang lebih besar, namun juga mengungkapkan kebutuhan akan standar yang lebih kohesif untuk memastikan kualitas pendidikan yang konsisten.

Menyadari tantangan-tantangan ini, pemerintah terus menyempurnakan kerangka peraturannya, memperkenalkan, dan memperbarui kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kesenjangan dan menyelaraskannya dengan tolak ukur global. Komitmen Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan tercermin dalam evolusi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Garis waktu ini menangkap tonggak-tonggak legislatif yang telah membentuk lanskap pendidikan di Indonesia, mulai dari kebijakan-kebijakan dasar hingga kemajuan terbaru yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan standar internasional.

Menelusuri momen-momen penting ini mengungkapkan bagaimana pemerintah Indonesia berusaha menyediakan pendidikan terbaik dengan memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang. Retrospeksi ini tidak hanya merayakan pencapaian, tetapi juga menyoroti tantangan dan peluang yang sedang berlangsung untuk memajukan keunggulan pendidikan.

Gambar 3. Perjalanan melalui Momen-momen Penting yang Membentuk Kebijakan Pendidikan di Indonesia

2001
SPM pendidikan pertama kali diluncurkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001

2003

- Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 diterbitkan
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) didirikan

2004

- UU Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 diterbitkan
- SPM Pendidikan diperbaharui sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004

2005

- SNP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, untuk menegakkan UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, yang telah direvisi pada tahun 2013
- UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 diterbitkan (mengatur standar kualitas guru, profesionalisme, dan sertifikasi)

2006

- Standar pendidikan dasar dan menengah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 21 tahun 2016 (perubahan terakhir pada tahun 2016)
- Standar kompetensi lulusan diperbarui sesuai dengan Peraturan Menteri (perubahan terakhir pada tahun 2016)
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) dibentuk

2007

- Standar manajemen diluncurkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007
- Standar proses yang diterbitkan mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 41 tahun 2007 (perubahan terakhir pada tahun 2016)
- Standar sarana dan prasarana yang diterbitkan sesuai dengan Permendikbud No. 24 Tahun 2007
- Standar penilaian pendidikan yang diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 tahun 2007 (perubahan terakhir pada tahun 2016)
- Standar kualifikasi dan kompetensi guru yang diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007
- Standar kepala sekolah dan pengawas diperbarui sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 12 Tahun 2007

2010
SPM Pendidikan Dasar diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2010

2013

- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 diterbitkan untuk mengubah Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan No. 19 Tahun 2005
- Instrumen untuk mengukur pencapaian SPM Pendidikan Dasar yang diperbaharui setelah amandemen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013

2018

- Revisi SPM untuk berbagai sektor diterbitkan mengikuti Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018
- SPM pendidikan yang baru diluncurkan setelah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018

2021

- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan diterbitkan (direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022)
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 dicabut: Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

2022
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Sektor pendidikan di Indonesia dibangun di atas kerangka hukum yang kuat, dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai intinya. Peraturan pemerintah dan keputusan menteri semakin memperkuat kerangka kerja ini dengan menguraikan tujuan, kebijakan, dan rencana pendidikan utama. Undang-undang dasar ini membentuk struktur dan ruang lingkup pendidikan di Indonesia dengan mengategorikannya ke dalam aliran formal, informal, dan informal.

Pendidikan formal di Indonesia mengikuti jalur yang terstruktur dengan jelas, dimulai dari Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jenjang berikutnya adalah pendidikan menengah atas, yang mencakup berbagai pilihan, seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA), sebelum akhirnya memasuki dunia pendidikan tinggi. Sistem ini menawarkan beragam jenis pendidikan, mulai dari umum, kejuruan, akademik, profesional, teknik, agama, hingga pendidikan khusus.

Sementara itu, pendidikan informal hadir sebagai alternatif yang lebih fleksibel untuk pendidikan formal yang dirancang khusus memenuhi kebutuhan individu yang memerlukan pendidikan tambahan, pelengkap, atau pengganti guna mendukung pembelajaran seumur hidup. Jalur ini menawarkan program-program terstruktur di luar sistem tradisional, seperti pendidikan kesetaraan (Pendidikan Penyetaraan melalui Paket A, B, atau C), kursus-kursus, serta berbagai program pelatihan yang relevan.

Di sisi lain, pendidikan informal berkembang dalam lingkungan rumah dan komunitas sehingga pembelajaran terjadi secara organik melalui aktivitas sehari-hari. Tipe pendidikan ini mencakup pendidikan keluarga (*homeschooling*) dengan keluarga berperan aktif dalam menyediakan pengalaman belajar yang personal dan mandiri, mendorong rasa ingin tahu serta pertumbuhan yang melampaui batasan ruang kelas tradisional.



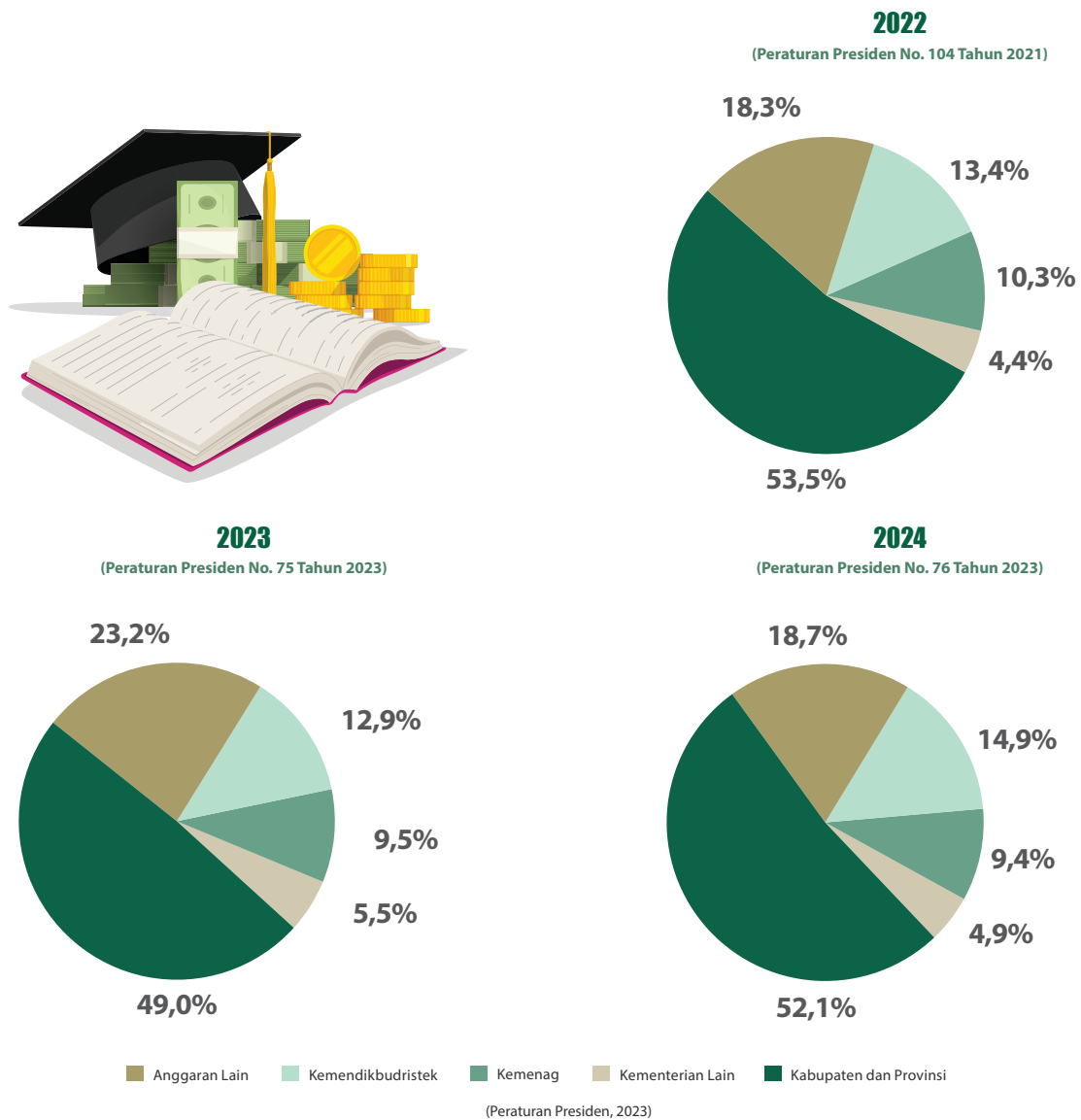
Tabel 7. Level Pendidikan Indonesia

Level	Formal	Non-Formal	Informal
Pendidikan Khusus	Akademi yang berafiliasi dengan pemerintah	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM)	
Pendidikan Tinggi	Diploma 1-4 (D1-4) / Gelar Sarjana (S1) / Gelar Magister (S2) / Gelar Doktor (S3)	Pendidikan Keterampilan/ Pelatihan Kerja	
Pendidikan Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas & Sekolah Kejuruan (SMA/SMK/MA)	Program Pendidikan Menengah Atas Informal (Paket C)	
Pendidikan Menengah Pertama	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Program Pendidikan Menengah Informal (Paket B)	Pendidikan Keluarga & Pendidikan berbasis Lingkungan
Pendidikan Dasar	Sekolah Dasar (SD/MI)	Program Sekolah Dasar Informal (Paket A)	
Pendidikan Anak Usia Dini	Taman Kanak-Kanak (TK/RA)	Kelompok Bermain (KB)	
Pendidikan Umum	Pendidikan Berbasis Agama (Pendidikan Diniyah, Pabbajja Samanera, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, Sekolah Minggu)		
		Tempat Penitipan Anak	

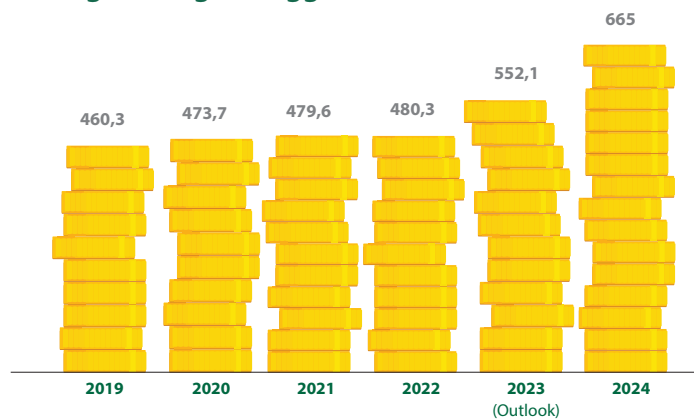
Mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta berbagai bentuk pendidikan khusus dan pendidikan berbasis agama, setiap tingkatannya memainkan peran penting dalam membentuk kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di era informasi ini. Secara signifikan, mereka berkontribusi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

D. Anggaran Pendidikan Indonesia Tahun 2022-2024

Gambar 4. Anggaran Pendidikan Indonesia Tahun 2022-2024



Pengembangan Anggaran Pendidikan 2019-2024



Peraturan & Tantangan: Bagaimana Kaitannya dengan Anggaran?

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 secara tegas menetapkan mandat bahwa setidaknya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk pendidikan. Dukungan terhadap hal ini muncul dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 49 ayat (1), yang menegaskan bahwa dana yang dialokasikan di luar gaji guru dan biaya administrasi juga harus mencapai 20 persen dari APBN dan APBD.

Namun, masalah muncul ketika Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 menciptakan kebingungan dengan menetapkan bahwa angka minimum 20 persen tersebut sudah termasuk gaji guru. Sehingga melalui keputusan ini memicu perdebatan yang hangat dan dilema di kalangan para pemangku kepentingan pendidikan.

Cakupan Kebutuhan Pendanaan

Pembangunan dan pengembangan sekolah (ruang kelas, lapangan olahraga, perpustakaan, laboratorium, kantin, tempat ibadah, jaringan internet)

Pendanaan biaya pendidikan (sekolah gratis, subsidi, beasiswa)

Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan (buku pelajaran, seragam, alat tulis, laptop, sarapan gratis)

Peningkatan profesionalisme guru (pelatihan, pengembangan profesi, uji kompetensi, sertifikasi)

Perincian Anggaran Pendidikan Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023, anggaran pendidikan tahun 2024 adalah sebesar Rp 665 triliun, dengan perincian sebagai berikut:

Gambar 5. Anggaran Pendidikan Indonesia tahun 2024



Transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana otonomi khusus.

Manajemen & Alokasi

Meskipun anggarannya cukup besar dan terus bertambah, mengelola dan mengalokasikan 20 persen yang diperuntukkan bagi pendidikan merupakan tantangan besar. Dana ini seharusnya mencakup segala hal, mulai dari infrastruktur sekolah dan fasilitas pembelajaran hingga pembiayaan pendidikan, sumber daya, dan pengembangan profesi berkelanjutan bagi para guru.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dan penyesuaian legislatif telah memicu perdebatan tentang apakah 20 persen tersebut sudah termasuk gaji guru atau membutuhkan dana tambahan sehingga memperumit penggunaan anggaran.

Selain itu, pendidikan bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkan dana sehingga menimbulkan kompromi yang dapat memengaruhi kualitas dan jangkauan sumber daya dan layanan pendidikan. Interpretasi yang luas dari belanja pendidikan tidak hanya mencakup pendidikan dasar, tetapi juga pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi yang sangat penting bagi tenaga kerja yang terampil dan pembangunan nasional.

Kualitas & Hasil

Kualitas pendidikan nasional terus diawasi oleh masyarakat yang aktif melakukan evaluasi tingkat kelulusan, kemampuan kerja lulusan, dan hasil pendidikan secara menyeluruh. Penilaian ini bukan hanya cermin dari seberapa efektif anggaran dialokasikan, tetapi juga menunjukkan seberapa baik kebijakan pendidikan berfungsi untuk memastikan akses yang adil bagi semua terhadap pendidikan berkualitas. Upaya ini penting untuk mempersiapkan generasi masa depan agar mampu bersaing dan beradaptasi di dunia yang semakin terhubung.

Bab II

Dinamika Sektor Pendidikan Indonesia



Dinamika Sektor Pendidikan Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia mencakup berbagai jenjang yang masing-masing memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Sistem ini dimulai dari pendidikan anak usia dini, dilanjutkan dengan pendidikan dasar (kelas 1-6), berlanjut ke pendidikan menengah pertama (kelas 7-9) dan pendidikan menengah atas (kelas 10-12), hingga pendidikan tinggi.

Sistem pendidikan ini dirancang untuk mendukung siswa di setiap tahap perjalanan akademis mereka sehingga mereka memiliki dasar yang kuat dan secara bertahap mengembangkan kemampuan belajar serta keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran krusial dalam proses ini dengan meletakkan landasan bagi pembelajaran di masa depan karena perkembangan otak yang pesat pada tahap ini sangat memengaruhi kemampuan kognitif dan sosial. Program-program ini mendidik anak-anak sejak dini serta mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan selanjutnya.

Di tingkat pendidikan dasar, siswa mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi yang penting, sekaligus menumbuhkan minat belajar, rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Ketika mereka berlanjut ke jenjang pendidikan menengah pertama, kurikulum diperluas untuk mencakup mata pelajaran yang lebih khusus, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi dan dunia kerja sambil mendorong eksplorasi dan membangun keterampilan dasar yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya.

Pendidikan menengah atas kemudian menawarkan jalur umum dan kejuruan yang disesuaikan dengan minat dan tujuan karier siswa. Melalui program seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), siswa menerima pendidikan akademis dan teknis sehingga membekali mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung memasuki dunia kerja.

Akhirnya, pendidikan tinggi menjadi puncak sistem yang berfokus pada studi lanjutan dan penelitian. Universitas dan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang inovatif dan adaptif, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial serta membentuk masa depan bangsa.

A. Lanskap Pendidikan Indonesia

Dalam lanskap sains dan teknologi yang berkembang pesat saat ini, tuntutan untuk memiliki kompetensi baru menjadi sangat penting. Era yang didorong oleh teknologi ini memerlukan perubahan dalam prioritas pendidikan kita sehingga mendorong kita untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat menangani tantangan kontemporer secara langsung. Kita berada di era informasi, dan ini membutuhkan seperangkat bakat dan keterampilan baru yang mampu mendorong kerja sama tim, inovasi, serta dibangun di atas pengumpulan informasi yang teliti, analisis yang menyeluruh, dan integrasi yang mulus. Dengan mengasah kemampuan ini, siswa akan lebih siap untuk menciptakan solusi praktis dan kreatif yang berdampak nyata pada bidang mereka.

Agar pendidikan Indonesia dapat mengikuti perkembangan, dibutuhkan transformasi. Sekolah dan universitas harus menyelaraskan pengajaran mereka dengan tren saat ini, standar internasional, kebutuhan regional, dan tujuan nasional. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memastikan bahwa siswa tidak hanya kompeten di tingkat lokal tetapi juga mampu bersaing secara global.

Meningkatkan hasil pendidikan melibatkan berbagai indikator, dan bagi para pembuat kebijakan, menetapkan target yang komprehensif dalam lingkup Kemdikbudristek dan Kemenag bisa menjadi sebuah tantangan. Berdasarkan dokumen perencanaan dari Kemdikbudristek serta kerangka internasional (*UNICEF MICS-Eagle*², *World Bank GEPD*³ & *SABER*⁴, *Organization for Economic Cooperation and Development [OECD] Education Policy Outlook*⁵), kita dapat mengategorikan hasil pendidikan ke dalam lima area utama (Tanoto Foundation & CIPS, 2024):

² UNICEF MICS-Eagle (*Education Analysis for Global Learning and Equity*) bertujuan untuk mengatasi masalah pendidikan melalui sudut pandang kesetaraan, termasuk melalui analisis gender, status sosial ekonomi, dan etnis.

³ *World Bank Global Education Policy Dashboard (GEPD)* berfokus pada mengidentifikasi hambatan sistemis dalam sistem pendidikan, yang mencakup politik, kebijakan, dan praktik.

⁴ *World Bank Systems Approach for Better Education Results (SABER)* menekankan pada kualitas kebijakan pendidikan dan lembaga yang memengaruhi sistem dan tujuan pendidikan negara.

⁵ *OECD Education Policy Outlook* mengawasi kebijakan terkait siswa, lembaga, dan sistem dalam ekosistem pendidikan untuk menawarkan perspektif komparatif tentang perubahan kebijakan, hasil, dan kesinambungan.

- 1 Akses pendidikan
- 2 Kualitas pendidikan
- 3 Revitalisasi sekolah

- 4 Pengembangan tenaga kerja
- 5 Tata kelola pemerintahan

Analisis pada bagian ini mengeksplorasi bagaimana kategori-kategori tersebut berlaku pada setiap jenjang pendidikan. Dengan menguraikan akses terhadap pendidikan, kualitas pembelajaran, peningkatan sekolah, pengembangan tenaga kerja, dan tata kelola, kita dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang dampaknya pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Pendekatan ini memastikan bahwa kita mampu menangani tantangan dan peluang unik di setiap jenjang pendidikan, menawarkan analisis yang komprehensif, dan mendalam.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia berfokus pada anak-anak sejak lahir hingga usia enam tahun. Upaya ini melibatkan stimulasi pendidikan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan spiritual serta mempersiapkan anak-anak untuk pendidikan di masa depan.

Untuk memastikan kualitas pendidikan anak usia dini, Pemerintah Indonesia menetapkan standar nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014. Sementara baru-baru ini, sebagai bentuk komitmen terhadap Agenda Pendidikan 2030, pemerintah memperkenalkan sebuah inisiatif yakni satu tahun pendidikan prasekolah wajib bagi semua anak Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017.

Pemerintah menekankan pentingnya mengubah unit-unit pendidikan anak usia dini menjadi lembaga berkualitas yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan esensial seperti kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI).

Selain itu, pemerintah turut mendorong setiap kota dan kabupaten untuk mendirikan unit PAUD yang memenuhi standar PAUD HI dengan bekerja sama dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk menyediakan layanan menyeluruh bagi anak-anak. Inisiatif ini mengikuti Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan PAUD HI berada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 204.678 unit PAUD di seluruh Indonesia, 56.193 unit telah memenuhi setidaknya enam indikator PAUD HI.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat kita amati dari lanskap pendidikan anak usia dini berdasarkan rencana strategis Direktorat PAUD 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Gambar 6. Lanskap Pendidikan Anak Usia Dini Akses Pendidikan



⁶ Sebagai catatan, angka partisipasi pendidikan anak usia dini diukur dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang kemudian diubah menjadi Angka Partisipasi Murni (APM).

Cakupan bantuan dana pendidikan	Kerangka pendanaan dalam rencana strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini untuk periode 2020-2024 membutuhkan dana sebesar Rp 571,06 miliar pada tahun 2024.
Ketersediaan sekolah	Indikator pembangunan sekolah disebutkan dalam Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2015. Tanggung jawab untuk ketersediaan sekolah diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah mengingat adanya desentralisasi pendidikan.

APA TANTANGANNYA?

Kesetaraan Akses	<ul style="list-style-type: none"> Akses layanan PAUD di Indonesia masih belum merata dengan masih banyaknya desa yang belum mendapatkan akses PAUD. Pada tahun 2020, masih terdapat 22.629 desa (26,85 persen) yang tidak memiliki fasilitas PAUD. Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat belum memiliki PAUD yang memadai dengan cakupan kurang dari 50 persen dari jumlah desa yang ada.
-------------------------	---

Kualitas Pendidikan

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

Pencapaian perkembangan anak usia dini	Rencana Strategis Kemendikbud 2020 menguraikan tonggak perkembangan penting bagi anak-anak termasuk penilaian yang ditargetkan untuk mereka yang berusia 5-6 tahun.										
Penyediaan layanan PAUD-HI	Satuan lembaga PAUD yang menyelenggarakan layanan PAUD-HI menunjukkan kinerja yang positif dengan capaian 100 persen yang memenuhi target 5.000 lembaga (Kemendikbudristek, 2023).										
Akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga pendidikan anak usia dini diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD). Unit yang terakreditasi telah meningkat lebih dari enam belas kali lipat dari tahun 2015 hingga 2021 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 50,53 persen selama periode ini. <p style="text-align: center;">Satuan PAUD Diakreditasi (Lembaga)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">102%</td> <td style="border-left: 1px dashed gray; padding-left: 10px;">Target</td> <td style="text-align: center;">45.777</td> <td style="border-left: 1px dashed gray; padding-left: 10px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">Rp 200,5 M</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(Kemendikbudristek, 2023)</td> <td style="border-left: 1px dashed gray; padding-left: 10px;">Realisasi</td> <td style="text-align: center;">46.717</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	102%	Target	45.777	Alokasi Anggaran	Rp 200,5 M	(Kemendikbudristek, 2023)	Realisasi	46.717		
102%	Target	45.777	Alokasi Anggaran	Rp 200,5 M							
(Kemendikbudristek, 2023)	Realisasi	46.717									
Penyediaan layanan Penggerak PAUD	<p style="text-align: center;">Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">115%</td> <td style="border-left: 1px dashed gray; padding-left: 10px;">Target</td> <td style="text-align: center;">3.182</td> <td style="border-left: 1px dashed gray; padding-left: 10px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">Rp 33 M</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(Kemendikbudristek, 2023)</td> <td style="border-left: 1px dashed gray; padding-left: 10px;">Realisasi</td> <td style="text-align: center;">3.646</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	115%	Target	3.182	Alokasi Anggaran	Rp 33 M	(Kemendikbudristek, 2023)	Realisasi	3.646		
115%	Target	3.182	Alokasi Anggaran	Rp 33 M							
(Kemendikbudristek, 2023)	Realisasi	3.646									
Peningkatan kualitas PAUD	<p style="text-align: center;">Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu (Lembaga)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">100%</td> <td style="border-left: 1px dashed gray; padding-left: 10px;">Target</td> <td style="text-align: center;">514</td> <td style="border-left: 1px dashed gray; padding-left: 10px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">Rp 88 M</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(Kemendikbudristek, 2023)</td> <td style="border-left: 1px dashed gray; padding-left: 10px;">Realisasi</td> <td style="text-align: center;">514</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	100%	Target	514	Alokasi Anggaran	Rp 88 M	(Kemendikbudristek, 2023)	Realisasi	514		
100%	Target	514	Alokasi Anggaran	Rp 88 M							
(Kemendikbudristek, 2023)	Realisasi	514									

Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif Masih Menjadi Tantangan

Pada tahun 2023, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat sekitar 26.657 anak usia dini berkebutuhan khusus yang terdaftar untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini reguler. Tahun ini, sebanyak 2.000 anak menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Anak Berkebutuhan Khusus (BOP PAUD-ABK) sebesar Rp 2 juta per anak (Paudpedia, 2023).

Situasi Saat Ini:



- **Kurangnya Inklusi:** Anak berkebutuhan khusus tidak menjadi komponen yang berdiri sendiri dalam rencana strategis pendidikan anak usia dini.
- **Peraturan Pemerintah:** Diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 (direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022) tetapi dengan implementasi yang terbatas.

Pemantauan dan Evaluasi:



- **Pengawasan:** Dikelola oleh Kemendikbud melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Penilaian Pendidikan.
- **Permasalahan:** Kriteria pemantauan yang tidak jelas untuk pendidikan prasekolah inklusif

Standar Kualitas:



- **Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2005:** Memastikan satu tahun pendidikan prasekolah yang berkualitas, namun tidak memiliki ketentuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
- **Perkembangan Tahun 2018:** Masih belum mencakup pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

Kurikulum dan Pelatihan Guru:



- **Kurikulum PAUD Tahun 2013:** Berfokus pada perkembangan holistik namun tidak memiliki ketentuan yang spesifik untuk anak berkebutuhan khusus.
- **Kesenjangan Pengetahuan Guru:** Banyak guru PAUD yang tidak yakin bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif

Mengatasi Tantangan:



- **Implementasi Ad Hoc:** Kurangnya standar kualitas dan pemantauan menyebabkan kualitas yang tidak konsisten
- **Inisiatif Pemerintah Daerah:** Menetapkan 'PAUD Inklusif' sering kali dilakukan tanpa dukungan dan jaminan kualitas yang memadai.

Masalah Utama:



- **Variasi Kualitas:** Perbedaan kualitas PAUD inklusif antar dan di dalam kabupaten/kota
- **Terbatasnya Dukungan Pemerintah:** Sumber daya dan dukungan yang tidak memadai untuk inisiatif pendidikan inklusif


Terlepas dari inisiatif pemerintah, pendidikan anak usia dini di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan termasuk masalah yang berkaitan dengan inklusi dan kesetaraan. Dalam mengelola PAUD, lembaga-lembaga publik masih dalam proses mengadopsi standar nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang menetapkan bagaimana anak-anak dengan Kebutuhan Pendidikan Khusus harus diikutsertakan. Sayangnya, masih ada kekurangan panduan kurikulum tentang pedagogi inklusif. Saat ini, sebagian besar PAUD menunjukkan ketidaksesuaian dalam kebijakan internal mereka dan memiliki struktur organisasi yang belum inklusif. Implementasi praktik inklusif bergantung pada profesionalisme dan juga latar belakang budaya.

Revitalisasi Sekolah

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?					
Reformasi kurikulum untuk pengetahuan pedagogis guru	Mereformasi langkah-langkah kurikulum untuk pendidikan profesi guru, khususnya memasukkan pengetahuan praktis dan pedagogis (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).				
Pendampingan karier guru	<p style="text-align: center;">Guru PAUD yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir (Orang)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">106%</h1> </div> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>Target</td> <td>2.275</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>2.404</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Alokasi Anggaran</p> <h2 style="font-size: 1.5em; margin: 0;">Rp 1,90 M</h2> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(Kemendikbudristek, 2023)</p>	Target	2.275	Realisasi	2.404
Target	2.275				
Realisasi	2.404				
Kepemimpinan & otonomi sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung guru dan kepemimpinan sekolah sebagai teladan dan agen perubahan (Guru Penggerak; Sekolah Penggerak) Indikator-indikator ini diluncurkan pada tahun 2020 dan dimasukkan sebagai bagian dari transformasi kepemimpinan tenaga kependidikan. 				
Ketentuan SPM	Permendikbud No. 32 Tahun 2022 telah memasukkan & memperluas SPM pendidikan yang berasal dari Permendagri No. 59 Tahun 2021.				
Lingkungan belajar ramah anak	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan fasilitas bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada lembaga PAUD untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan belajar. Berdasarkan Laporan Kinerja Kemendikbud Tahun 2020, sebanyak 410 lembaga PAUD telah menerima bantuan APE. 				
APA TANTANGANNYA?					
Peran keterlibatan orang tua	Setelah berlakunya Permendikbud No. 9 Tahun 2020, penekanan pada pendidikan orang tua telah berkurang dengan dihapuskannya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, termasuk Subdirektorat Pendidikan Orang Tua.				
Distribusi Guru	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2020, jumlah pendidik PAUD yang tercatat secara resmi dalam data pokok pendidikan anak usia dini mencapai 541.400 orang. Dari jumlah tersebut, 44,28 persen hanya berpendidikan SMA atau kurang dari itu, dan mayoritas merupakan pendidik PAUD nonformal sebesar 68,58 persen. Kondisi ini menjadi tantangan yang cukup serius karena menurut Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pendidik PAUD harus berpendidikan S-1 atau D-4. 				

APA TANTANGANNYA?	
Efektivitas proses pemantauan dan evaluasi guru	Pemantauan dan evaluasi kinerja guru serta program sertifikasi yang belum efisien di tingkat daerah
Keterlibatan orang tua ⁷	Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020, penekanan pada pendidikan orang tua telah berkurang dengan dihapusnya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, termasuk Subdirektorat Pendidikan Orang Tua. Namun, keputusan ini bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya pendidikan orang tua sebagai faktor penting dalam pendidikan siswa secara keseluruhan di semua tingkat pendidikan yang sebelumnya difokuskan pada tingkat PAUD.
Dukungan fasilitas TIK	Pemerintah masih menghadapi masalah dengan hambatan geografis dan ekonomi sehingga semakin menantang untuk mengimplementasikan TIK di luar penggunaan komputer secara merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tata Kelola Pemerintahan

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?	APA TANTANGANNYA?
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif	Pengelolaan rekrutmen guru
Kemitraan dengan pendidik swasta dan peningkatan melalui kerja sama internasional dan lokal di bidang pendidikan	Alokasi anggaran oleh pemerintahan daerah
	Akurasi basis data pendidikan untuk Dapodik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Implementasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi SPM Sekolah dan memberdayakan kepala sekolah serta guru dalam penggunaan Bantuan Operasional Sekolah secara efektif

Kerangka Kerja Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini dihadapkan pada kompleksitas faktor kelembagaan yang dapat menghambat atau mempercepat kemajuan. Pendidikan formal bagi anak usia 4-6 tahun, terutama usia 5-6 tahun, umumnya diselenggarakan di taman kanak-kanak. Sementara itu, kelompok bermain melayani anak usia 2-6 tahun, dengan fokus pada usia 3-4 tahun, sebagai bagian dari jalur pendidikan informal. Pemisahan antara pendidikan formal dan informal ini telah meningkatkan angka partisipasi meski masih terdapat ketimpangan dalam kesejahteraan guru dan mutu pendidikan anak usia dini. Masalah seperti pengembangan kurikulum, standar kualitas, pelatihan guru, kepemimpinan, tata kelola, dan partisipasi orang tua tetap menjadi tantangan (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Pendidikan Dasar

Struktur Pendidikan Dasar

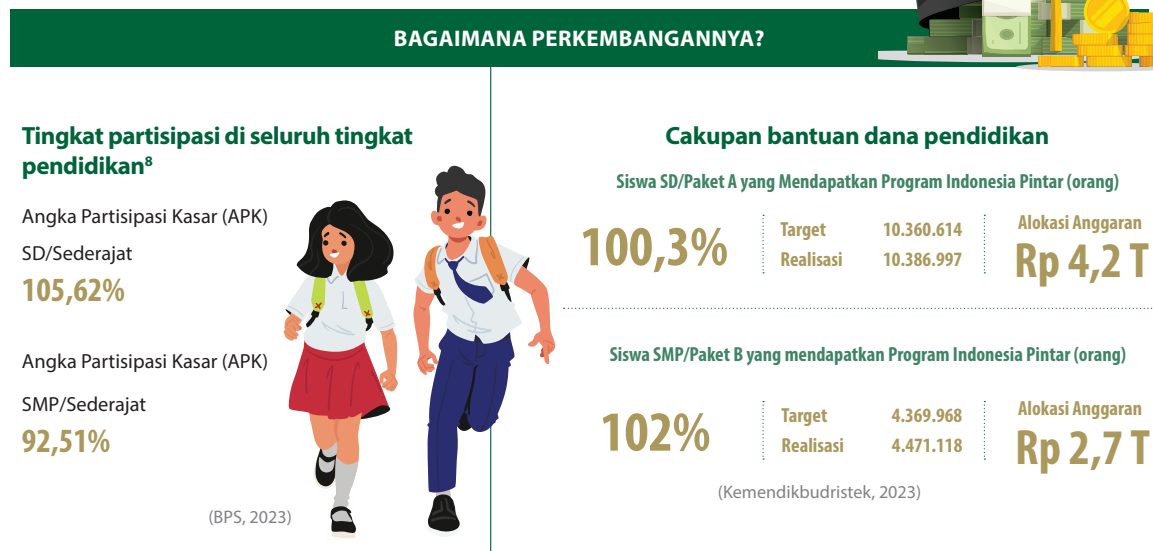
Pendidikan dasar di Indonesia berlangsung selama sembilan tahun, terdiri dari enam tahun di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs). Hal ini diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pendidikan ini bersifat wajib, gratis, dan didukung oleh pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat (Haryati, 2014).

⁷ Lihat Bab III untuk pembahasan lebih lanjut

Program wajib belajar sembilan tahun bertujuan memastikan semua anak berusia 6 hingga 15 tahun dapat mengakses pendidikan. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang seimbang, aktif di masyarakat, bertanggung jawab sebagai warga negara, berkontribusi untuk kemanusiaan, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pendidikan dasar berperan penting dalam memberikan pengetahuan serta keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk pembelajaran dan pengembangan pribadi di masa depan.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari lanskap Pendidikan Dasar berdasarkan rencana strategis Direktorat Pendidikan Dasar untuk tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan situasi saat ini.

Gambar 7. Lanskap Pendidikan Dasar Akses Pendidikan



APA TANTANGANNYA?

Memastikan akses daerah 3T⁹

Tersedianya akses alat dan jaringan transportasi menjadi salah satu kunci kehadiran guru dan siswa di sekolah, terutama di daerah 3T.

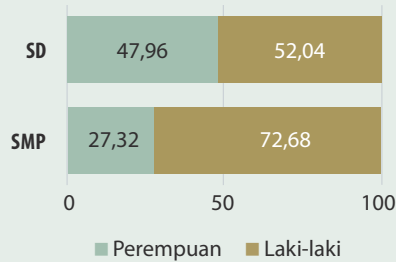
⁸ Sebagai informasi, berdasarkan Laporan Kinerja Kemendikbud tahun 2023, angka partisipasi untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menggunakan data Angka Partisipasi Sekolah. Untuk Angka Partisipasi Sekolah (usia 7-12 tahun), persentase realisasi sebesar 99,84 persen dengan tingkat realisasi aktual 99,16 persen jika dibandingkan dengan target 99,32 persen. Sementara itu, untuk Angka Partisipasi Sekolah (usia 13-15), persentase partisipasi mencapai 99,75 persen dengan tingkat realisasi 96,10 persen, dibandingkan dengan target yang sebesar 96,34 persen (Kemendikbudristek, 2023).

⁹ Data ini diambil dari wawancara yang dilakukan Tempo dengan kepala sekolah dasar dan menengah pertama di Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Papua, pada tahun 2016. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sekolah menyediakan perahu untuk mengantar dan menjemput anak-anak dan guru. Jika hal ini tidak dilakukan, mereka akan kesulitan untuk datang ke sekolah karena sulitnya akses di daerah tersebut (Tempo, 2023).

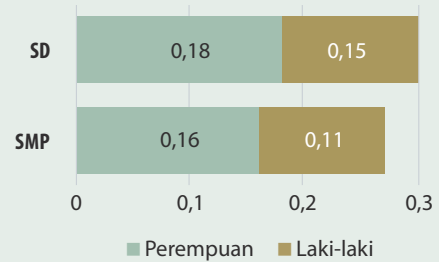
APA TANTANGANNYA?

Kesetaraan akses¹⁰

Persentase Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin 2022/2023



Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin 2022/2023



(Kemendikbudristek, 2023)

Kualitas Pendidikan

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

Penilaian pembelajaran berdasarkan Asesmen Nasional (AN)

AN 2023
SD/MI/Paket A/SDLB

98,46%

Populasi 174.255
Implementasi AN 171.568

AN 2023
SMP/MTs/Paket B/SMPLB

97,64%

Populasi 68.482
Implementasi AN 66.865

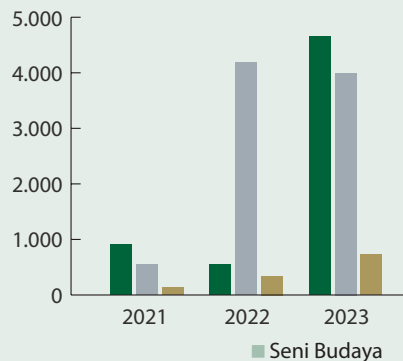
(Kemendikbudristek, 2023)

Perhatian pada pemikiran kritis melalui keterampilan literasi dan numerasi terapan

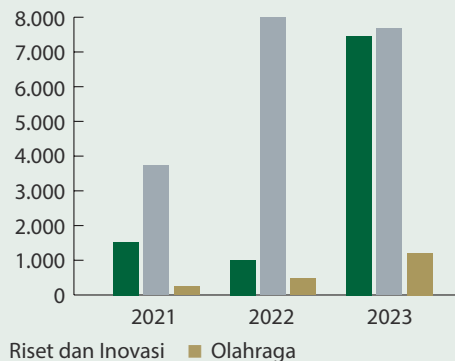
- Kurikulum Merdeka meningkatkan kualitas melalui kerangka kerja yang fleksibel yang menekankan pada pemikiran kritis dan pendidikan karakter.
- Hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2022 menunjukkan peningkatan dalam berpikir kritis, dengan kemampuan literasi dan numerasi mencapai 159,86 persen dan 125,24 persen untuk masing-masing target.

Prestasi siswa melalui kompetisi¹¹

Distribusi Peserta Didik Berprestasi (SD)



Distribusi Peserta Didik Berprestasi (SMP)



(Puspresnas, 2024)

¹⁰ Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020 tidak secara khusus memasukkan akses bagi siswa perempuan dalam pendidikan, tetapi menyebutkan partisipasi perempuan di sektor budaya Indonesia.

¹¹ Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan meliputi penilaian prestasi siswa melalui kompetisi nasional dan internasional di berbagai jenjang pendidikan dan bidang studi, membekali mereka dengan keterampilan dalam mata pelajaran seperti literasi dan numerasi, mengembangkan kurikulum yang inovatif dan kontekstual, serta memastikan akreditasi sekolah.

APA TANTANGANNYA?

<p>Pendidikan karakter dan pencegahan kasus perundungan¹²</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas kasus perundungan di lingkungan sekolah terjadi di SD dan SMP. • Dari 30 kasus perundungan yang dilaporkan pada tahun 2023, 50 persen terjadi di SMP, sementara 30 persen terjadi di SD. • Kasus perundungan pada tahun 2023 secara keseluruhan terjadi di 12 provinsi yang meliputi 24 kabupaten/kota, dengan jumlah kejadian terbanyak terjadi di Jawa Barat. Hal ini menandai peningkatan dari tahun 2022 ketika insiden perundungan terjadi di 11 provinsi dan 18 kabupaten/kota (Annur, 2024). • Pada Januari 2024, terdapat 299 korban dari sekolah menengah pertama dan 235 korban dari sekolah dasar yang mengalami kekerasan dari total 989 korban secara nasional (Aisyah, 2024).
<p>Mendorong digitalisasi¹³</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat banyak guru yang tidak menguasai sistem operasi komputer dengan 22,03 persen guru yang kurang terampil dalam bidang ini. • Kondisi ini diperparah khususnya dalam penggunaan program aplikasi (untuk pembelajaran dan administrasi sekolah) yang mencapai 44,07 persen sekolah yang belum memiliki guru yang menguasai program-program tersebut (Jakaria, 2024).

Revitalisasi Sekolah

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

<p>Kepemimpinan dan otonomi sekolah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung guru dan pemimpin sekolah sebagai teladan dan agen perubahan (Guru Penggerak; Sekolah Penggerak) (Tanoto Foundation & CIPS, 2024). • Indikator-indikator ini diperkenalkan pada tahun 2020, dan sejak saat itu telah diintegrasikan ke dalam transformasi kepemimpinan tenaga kependidikan.
<p>Ketentuan SPM</p>	<p>Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 telah memasukkan dan memperluas SPM pendidikan yang diuraikan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021.</p>

APA TANTANGANNYA?

<p>Distribusi guru¹⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meskipun rasio murid-guru secara nasional di tingkat sekolah dasar tidak melebihi batas ideal, tiga provinsi masih memiliki rasio di atas batas tersebut, yaitu Jawa Barat, Banten, dan Papua. • Rasio terendah terdapat di Provinsi Aceh ketika satu guru bertanggung jawab atas 10 murid, sementara di Provinsi Papua, satu guru bertanggung jawab atas 23 murid (BPS, 2023).
--	--

¹² Sebagai bentuk perhatian terhadap masalah ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 46 Tahun 2023 sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan di sekolah, yang mencakup mitigasi dan penanganan perundungan.

¹³ Berdasarkan hasil penelitian Kemendikbudristek pada tahun 2024 tentang pemetaan kemampuan teknologi informasi pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyatakan bahwa di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas, idealnya satu orang guru bertanggung jawab atas 20 peserta didik, sedangkan di tingkat SMK idealnya satu orang guru bertanggung jawab atas 15 peserta didik.

APA TANTANGANNYA?

Ketidakhadiran guru

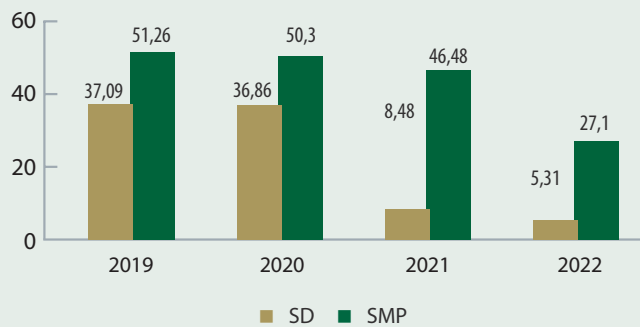
- Menurut data tahun 2020 dari Bank Dunia, tingkat ketidakhadiran guru dalam sistem pendidikan dasar di Indonesia cukup tinggi dengan hampir satu dari empat guru (23,5 persen) tidak hadir di kelas pada hari tertentu (World Bank, 2020).
- Sebagian besar ketidakhadiran ini diotorisasi secara resmi yang menunjukkan bahwa sistem mengakomodasi sejumlah besar ketidakhadiran guru.

Partisipasi Komite sekolah dan masyarakat

Banyak Komite Sekolah yang kesulitan untuk secara efektif mengawasi dan mendukung manajemen sekolah karena terbatasnya pengetahuan para anggotanya tentang peraturan terkait standar manajemen pendidikan, sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan Kemendikbudristek tahun 2020 (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Dukungan fasilitas TIK

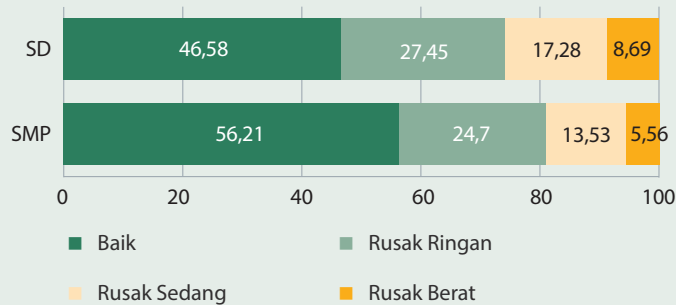
Proporsi Sekolah dengan Akses Komputer di Indonesia
2019-2022



(BPS, 2024)

Infrastruktur

Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi
2022/2023




(Kemendikbudristek, 2023)

Peningkatan peran orang tua

Sebanyak 80 persen orang tua tidak pernah memberikan masukan dalam pengambilan keputusan di sekolah, dan 30 persen tidak pernah berdiskusi dengan guru (Setiawan, 2017).

Tata Kelola Pemerintahan

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?	APA TANTANGANNYA?
Penyaluran BOS yang efektif	Pengelolaan rekrutmen guru
Kemitraan dengan pendidik swasta dan peningkatan melalui kerja sama internasional dan lokal di bidang pendidikan	Alokasi anggaran oleh pemerintahan daerah
	Akurasi basis data pendidikan untuk Dapodik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Implementasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi SPM Sekolah dan memberdayakan kepala sekolah dan guru dalam penggunaan Bantuan Operasional Sekolah secara efektif

Pendidikan Menengah

Sekolah menengah didirikan untuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut.

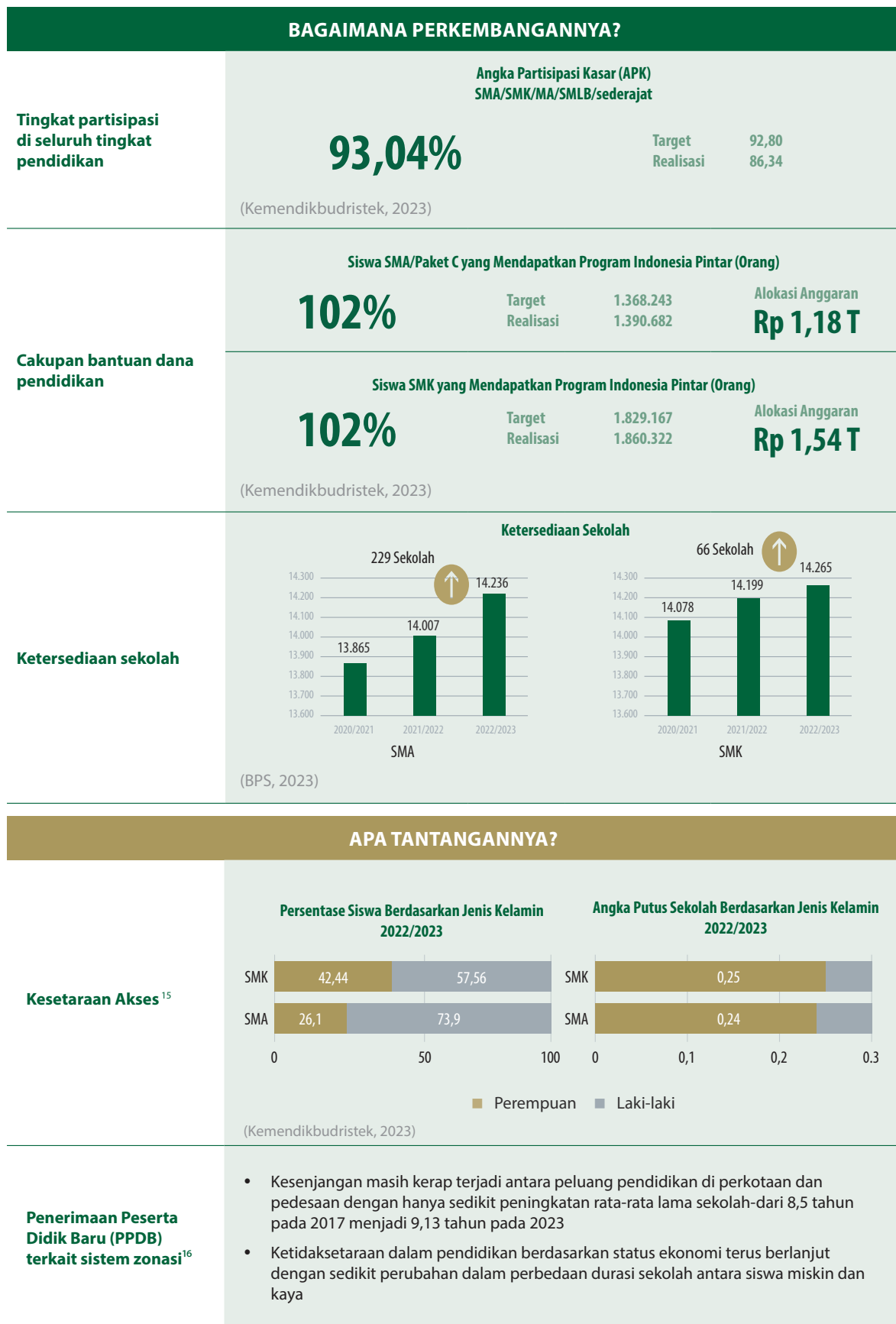
Tabel 8. Lembaga Pendidikan Menengah

Sekolah Menengah Atas (SMA)	Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa serta mempersiapkan mereka untuk pendidikan lebih lanjut
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan tertentu sehingga dapat mempersiapkan siswa untuk bekerja dan mengembangkan sikap profesional
Madrasah Aliyah (MA)	Berfokus pada penguasaan ajaran agama
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)	Mengasah keterampilan yang relevan dengan pekerjaan tertentu sehingga mampu mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan membentuk sikap profesional

Tujuan pendidikan menengah meliputi: (1) meningkatkan pengetahuan siswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta (2) meningkatkan kemampuan siswa menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat serta mampu menjalin hubungan timbal balik yang positif dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

Setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, banyak daerah mulai memperkuat peran mereka dalam sektor pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kini menjadi tanggung jawab provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota diarahkan untuk fokus pada pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama. Peraturan ini resmi diberlakukan pada tahun 2016. Rata-rata jumlah siswa di sekolah negeri dua kali lebih banyak dibandingkan sekolah swasta, sementara siswa Madrasah Aliyah hanya mencapai 11 persen dari total siswa sekolah menengah atas (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Gambar 8. Lanskap Pendidikan Menengah Akses Pendidikan



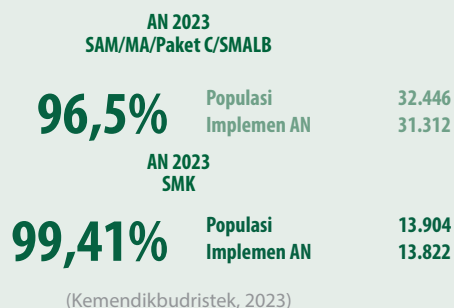
¹⁵ Rencana Strategis Kemendikbudristek tahun 2020 tidak secara khusus mencantumkan akses bagi siswa perempuan dalam pendidikan, tetapi menyebutkan partisipasi perempuan dalam sektor budaya Indonesia.

¹⁶ Lihat bagian Kasus Khusus untuk diskusi lebih lanjut

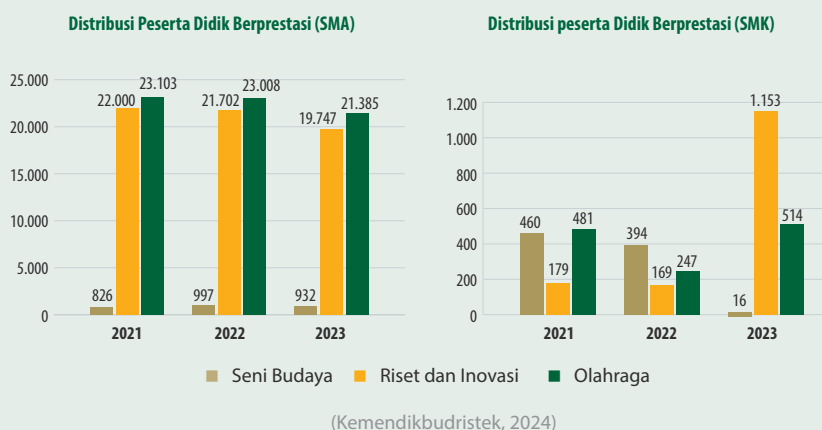
Kualitas Pendidikan

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

Penilaian pembelajaran dari AN¹⁷



Prestasi siswa melalui kompetisi



Pendampingan peningkatan mutu¹⁸



APA TANTANGANNYA?

Pendidikan karakter dan pencegahan perundunga¹⁹

- Dari 30 kasus perundungan pada tahun 2023 secara nasional, 10 persen terjadi di tingkat SMA, dan 10 persen di tingkat SMK (Annur, 2024).
- Kasus perundungan pada tahun 2023 secara keseluruhan terjadi di 12 provinsi, meliputi 24 kabupaten/kota, dengan jumlah insiden tertinggi dilaporkan di Jawa Barat. Hal ini menandai peningkatan dari tahun 2022 ketika insiden perundungan terjadi di 11 provinsi dan 18 kabupaten/kota (Annur, 2024).
- Pada Januari 2024, siswa SMA dan SMK mengalami kekerasan paling banyak di kalangan pelajar, dengan 342 korban dari total 989 korban secara nasional (Aisyah, 2024).

Kualifikasi dan kompetensi guru

- Guru belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengadopsi pendekatan yang interaktif, berpusat pada siswa, inovatif, dan kreatif.
- Pergeseran dari proses yang dipimpin oleh guru ke pendekatan yang lebih aktif berjalan lambat (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

¹⁷ Asesmen Nasional memetakan kualitas dan kesenjangan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan daerah. Pelaksanaan Asesmen Nasional ditargetkan untuk dapat mencapai seluruh target satuan pendidikan dalam memotret mutu pendidikan. Hasil dari Asesmen Nasional akan ditampilkan dalam platform Rapor Pendidikan, yaitu Rapor Pendidikan Daerah dan Rapor Satuan Pendidikan.

¹⁸ Sebagai catatan, tidak ada catatan tentang bantuan peningkatan mutu SMK dalam Laporan Kinerja Kemendikbudristek tahun 2023.

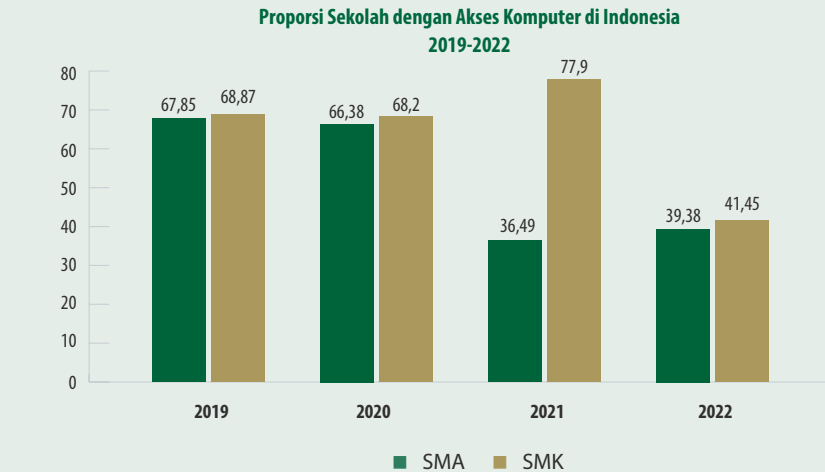
¹⁹ Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), terdapat 30 kasus perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 kasus. Sebanyak 80 persen kasus perundungan di tahun 2023 terjadi di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbud, dan 20 persen di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag. Sebagai bentuk perhatian terhadap masalah ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 46 Tahun 2023 sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan di sekolah yang mencakup penanggulangan dan penanganan perundungan.

APA TANTANGANNYA?

Standar dan akreditasi

Kurangnya panduan dan pengawasan dalam pelaksanaan standar pendidikan dan Kurikulum Merdeka di pendidikan menengah atas (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Mendorong digitalisasi²⁰



Revitalisasi Sekolah

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

Reformasi kurikulum untuk pengetahuan pedagogis guru

Melakukan reformasi terhadap langkah-langkah dalam kurikulum pendidikan profesi guru dengan menambahkan pengetahuan praktis dan pedagogis (Tanoto Foundation & CIPS, 2024)

Kepemimpinan dan otonomi sekolah

- Mendukung guru dan kepemimpinan sekolah sebagai teladan dan agen perubahan (Guru Penggerak; Sekolah Penggerak).
- Indikator-indikator ini diluncurkan pada tahun 2020 dan dimasukkan sebagai bagian dari transformasi kepemimpinan tenaga kependidikan (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Ketentuan SPM

Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 telah memasukkan dan memperluas SPM pendidikan yang diuraikan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021.

Partisipasi Komite Sekolah dan masyarakat

Mengoptimalkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat sekolah menengah termasuk memperkuat kemitraan regional yang mendukung wilayah Papua (Kemendikbudristek, 2023)

Lingkungan belajar yang ramah siswa

Peningkatan kapasitas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan bagi para pemangku kepentingan, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek di daerah, Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP, SMA, dan SMK, serta Komunitas Mitra Guru Kemendikbudristek (Kemendikbudristek, 2023)

²⁰ Berdasarkan hasil penelitian Kemendikbudristek pada tahun 2024 tentang pemetaan kemampuan teknologi informasi pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

APA TANTANGANNYA?

Distribusi guru ²¹	Di tingkat SMK, beberapa provinsi memiliki rasio murid-guru di atas batas ideal. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Provinsi Kalimantan Barat dan empat provinsi di Pulau Jawa yang cenderung padat penduduknya: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah (BPS, 2023).
Ketidakhadiran guru	Menurut analisis Bank Dunia, pada tahun 2015, kepala sekolah SMK melaporkan bahwa tingkat ketidakhadiran guru hampir mencapai 10 persen. Pada tahun 2018, angka ini meningkat menjadi sekitar 14 persen. Peningkatan serupa juga terjadi di SMA ketika tingkat ketidakhadiran guru meningkat dari sekitar 3 persen di tahun 2015 menjadi 6 persen di tahun 2018 (Ramadhan, 2020).
Dukungan fasilitas TIK	Kendala geografis dan ekonomi tetap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mendanai infrastruktur TIK sehingga sulit untuk menerapkan TIK secara merata di luar penggunaan komputer, khususnya di wilayah 3T. Meski begitu, dukungan TIK dari berbagai program lintas kementerian terus berupaya mengatasi tantangan ini (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Pengembangan Tenaga Kerja

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

	SMK yang Dikembangkan Berbasis 4.0 (Lembaga)		
Pengembangan SMK Berbasis Industri 4.0	258%	Target Realisasi	31 80 Alokasi Anggaran Rp 7,21 M
	(Kemendikbudristek, 2023)		
	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan (Lembaga)		
Pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan	100%	Target Realisasi	240 240 Alokasi Anggaran Rp 13,8 M
	(Kemendikbudristek, 2023)		
	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja (Orang)		
Sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja	100%	Target Realisasi	46.690 46.690 Alokasi Anggaran Rp 21,4 M
	(Kemendikbudristek, 2023)		

²¹ Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyatakan bahwa di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas, idealnya satu orang guru bertanggung jawab atas 20 siswa, sedangkan di tingkat pendidikan menengah kejuruan idealnya satu orang guru bertanggung jawab atas 15 siswa.

APA TANTANGANNYA?

Kerja sama dengan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah kejuruan tidak memiliki koneksi yang memadai dengan industri yang menyebabkan rendahnya tingkat keterserapan lulusannya. • Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2022 menunjukkan bahwa 22 persen dari pengangguran adalah lulusan SMK, yaitu sebesar 1,8 juta orang.
Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dikelompokkan berdasarkan jenis pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi ada pada lulusan SMK sebesar 9,42 persen, diikuti oleh lulusan SMA (8,57 persen), lulusan SD (5,95 persen), dan penduduk yang tidak bersekolah atau tidak bersekolah sama sekali (3,59 persen) (BPS, 2023).
Kurikulum	Kurikulum saat ini terlalu menekankan pada konten teoritis yang tidak selaras dengan tuntutan dunia kerja (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024)
Sekolah Kejuruan Negeri vs Sekolah Kejuruan Swasta ²²	Terdapat kesenjangan yang signifikan antara SMK swasta (74,1 persen) dan SMK negeri (25,9 persen), sedangkan SMA memiliki distribusi yang lebih seimbang.

Tata Kelola Pemerintahan

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

Penyaluran BOS yang efektif

Kemitraan dengan pendidik swasta dan peningkatan melalui kerja sama internasional dan lokal di bidang pendidikan

APA TANTANGANNYA?

Pengelolaan rekrutmen guru

Alokasi anggaran oleh pemerintahan daerah

Akurasi basis data pendidikan untuk Dapodik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Implementasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah memenuhi SPM Sekolah dan memberdayakan kepala sekolah serta guru dalam penggunaan Bantuan Operasional Sekolah secara efektif



Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi menetapkan bahwa tujuan pendidikan vokasi negara adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif, terampil, dan produktif. Peraturan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja atau menekuni usaha wirausaha. Peraturan ini menekankan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pasar tenaga kerja, komunitas bisnis dan industri, serta pemerintah pusat dan daerah. Namun, keterlibatan sektor swasta masih terbatas dibahas. Menurut Pasal 7 Ayat 3 dalam peraturan ini, keterlibatan sektor swasta secara spesifik didefinisikan sebagai (1) pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bersama dengan pemberi kerja, asosiasi profesi/industri, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); serta (2) koordinasi dengan kementerian terkait.

²² Sejak tahun 1999 terdapat fokus pada pendidikan kejuruan dengan pergeseran rasio SMA dan SMK dari 30 persen menjadi 70 persen untuk distribusi yang lebih seimbang.




Masalah lain adalah keterlibatan berbagai kementerian teknis dalam pendidikan vokasi. Pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan menilai penerapan pendidikan serta pelatihan vokasi secara terintegrasi dan langsung. Yang menarik, tim ini hanya berfokus pada pendidikan vokasi dan beroperasi pada tingkat eselon 1. Struktur organisasi dan prosedur operasional Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dijelaskan dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Peraturan ini menunjuk Kemenko PMK sebagai pimpinan eksekutif tim dengan tim pengarah yang terdiri dari menteri koordinator bidang investasi dan kemaritiman serta menteri koordinator bidang perekonomian.

Akibat dari adanya struktur ini, peran penting Kemendikbudristek dalam membentuk kebijakan pendidikan vokasi menjadi berkurang. Tanggung jawab Kemendikbudristek sekarang mencakup pengembangan proses pengakuan pembelajaran sebelumnya, penyesuaian standar pembelajaran dan pelatihan vokasi, peningkatan metode pembelajaran, penyusunan kurikulum, penetapan persyaratan minimum infrastruktur dan fasilitas untuk setiap kompetensi, serta pengembangan kurikulum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Pasal 12 (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Pendidikan Tinggi

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Lembaga-lembaga ini dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Tabel 9. Lembaga Pendidikan Tinggi

 <p>Pendidikan Akademik</p>	<p>Program ini mencakup jenjang sarjana dan pascasarjana, dengan fokus utama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu. Jenis program ini meliputi gelar sarjana (S1), gelar magister (S2), dan gelar doktor (S3).</p>
 <p>Pendidikan Profesional</p>	<p>Pendidikan tinggi yang ditempuh setelah menyelesaikan program sarjana dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam meniti karier yang memerlukan keterampilan khusus.</p>
 <p>Pendidikan Vokasi</p>	<p>Pendidikan tinggi ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam bidang keterampilan terapan hingga tingkat sarjana. Jenis pendidikan ini lebih menitikberatkan pada pengalaman praktis daripada teori dan mencakup program Diploma I (D1), Diploma II (D2), Diploma III (D3), serta Diploma IV (D4).</p>

Visi Indonesia 2045 menekankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan bagi semua kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi. Secara lebih spesifik, Pasal 31 UUD 1945 yang telah diubah dalam Amandemen Keempat menguraikan tiga misi utama pendidikan tinggi, yakni: memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara, membangun sistem yang mendukung pengembangan karakter sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

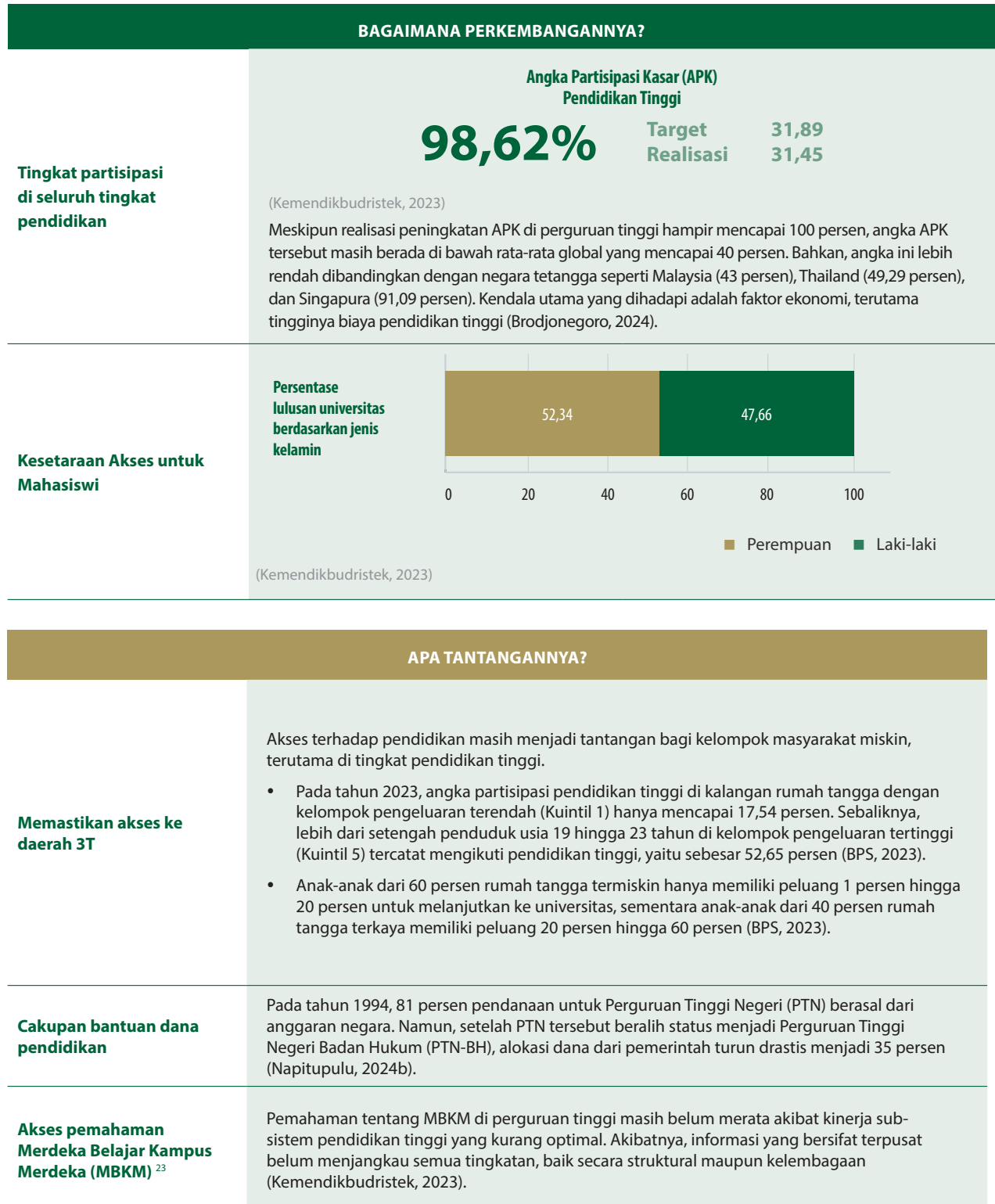
Saat ini, pendidikan tinggi sangat penting untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, diharapkan hasil-hasil penelitian dapat berhasil dialihkan ke dalam sektor ekonomi. Perkembangan menuju model universitas kewirausahaan menekankan pentingnya inovasi dan pembangunan ekonomi melalui kolaborasi lima pemangku kepentingan utama atau disebut *penta-helix*: universitas, bisnis/industri, masyarakat, media, dan pemerintah. Masing-masing pemangku kepentingan ini harus berperan aktif sambil mendorong kolaborasi yang konstruktif.

Pendidikan Tinggi merupakan komponen inti dari Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Menurut UU No. 20 Tahun 2003, SPN adalah jaringan komponen pendidikan yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan untuk memajukan kehidupan bangsa sehingga menjadikan Institusi Pendidikan Tinggi sangat penting dalam meningkatkan pengembangan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Institusi Pendidikan Tinggi juga berkontribusi pada pembangunan peradaban yang lebih maju di tengah perubahan global yang cepat. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diuraikan dalam UU No. 12

Tahun 2012, mencakup tiga pilar: (1) pendidikan, (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat. Pilar-pilar ini mendukung misi konstitusional SPN dan selaras dengan Visi Indonesia 2045.

Gambar 9. Lanskap Pendidikan Tinggi

Akses Pendidikan



²³ Kekayaan dan keberagaman wilayah Indonesia yang luas belum dianggap sebagai kondisi yang tidak homogen sehingga penerapan kebijakan tidak bisa bersifat "satu ukuran untuk semua" dan setiap daerah menghadapi tantangan yang berbeda (Kemendikbudristek, 2023).

APA TANTANGANNYA?

Ketersediaan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa²⁴

Perguruan Tinggi Negeri	Perguruan Tinggi Swasta	Tenaga Pendidik Negeri	Tenaga Pendidik Swasta	Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta
125	2.982	85.612	183.713	3.379.828	4.495.453
3.107		269.325		7.875.281	

Distribusi Regional Perguruan Tinggi di Indonesia

Jawa	1.477 unit
Sumatera	768 unit
Sulawesi	365 unit
Kalimantan	187 unit
Bali & Nusa Tenggara	180 unit
Maluku & Papua	130 unit

(BPS, 2023)

Kualitas Pendidikan

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

Penjaminan mutu

Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi (Lembaga)

222%

Target 3.048
Realisasi 6.794

Alokasi Anggaran
Rp 18,49 M

(Kemendikbudristek, 2023)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka²⁵

MBKM adalah program terobosan yang bertujuan untuk mentransformasi Standar Pendidikan Nasional melalui empat pilar berikut:

1. Membuka program studi baru,
2. Sistem akreditasi pendidikan tinggi,
3. Badan hukum pendidikan tinggi, dan
4. Hak untuk belajar di luar program studi.

Dalam praktiknya, perguruan tinggi mengelola dan mendanai program MBKM mereka secara mandiri tanpa dukungan dari Kemendikbudristek. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan pengalaman mahasiswa di luar kampus yang membangun dasar yang kuat untuk karier mereka di masa depan. Mahasiswa yang menerima beasiswa *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) melalui program MBKM mendapatkan akses ke jaringan global kontak akademik dan profesional. Ini memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas internasional terkemuka dan mengembangkan keterampilan lintas budaya yang penting untuk pasar kerja global.

²⁴ Secara keseluruhan, jumlah perguruan tinggi tertinggi pada tahun 2022 berada di Jawa Barat, dengan total 388 unit. Sementara itu, provinsi dengan jumlah perguruan tinggi paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan hanya 10 unit. Jawa Barat memimpin dalam jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia pada tahun 2022 dengan total 376 unit. Di sisi lain, Jawa Timur memiliki jumlah perguruan tinggi negeri tertinggi dengan 17 unit (Annur, 2023).

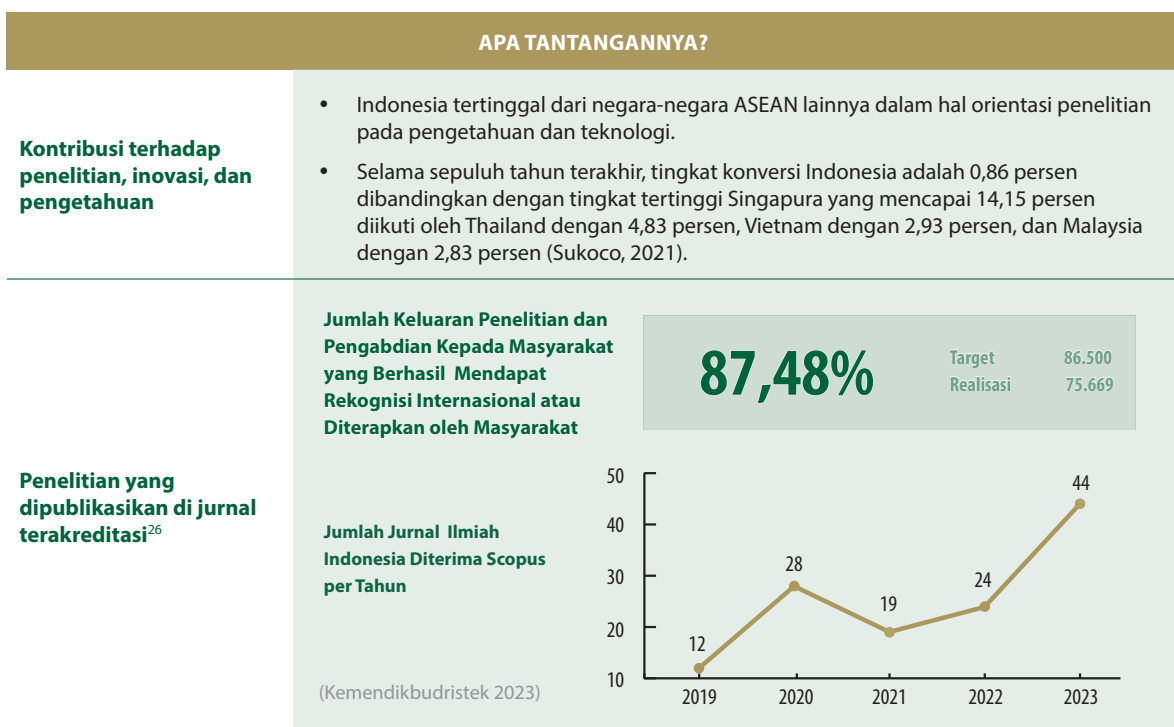
²⁵ MBKM terdiri dari dua tingkatan, yaitu MBKM Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri yang merupakan sebuah inisiatif dari Kemendikbudristek untuk mendorong setiap perguruan tinggi melaksanakan MBKM secara mandiri. Selain itu, Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 menekankan SPN yang mengatur MBKM sebagai bentuk kegiatan pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya, peraturan ini telah dijelaskan lebih lanjut dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang membahas Penjaminan Mutu dalam Pendidikan Tinggi.

Program praktisi pengajaran MBKM mendorong kolaborasi antara pendidik dan profesional industri dalam rangka memastikan mahasiswa mendapatkan manfaat dari perpaduan antara teori di kelas dan pengalaman dunia nyata. Inisiatif ini menawarkan keuntungan signifikan bagi semua pihak yang terlibat—mahasiswa, instruktur, universitas, profesional, dan sektor bisnis. Bagi mahasiswa, kegiatan ini berkontribusi pada pengetahuan yang terkini melalui pengalaman praktis, peluang jaringan, tawaran pekerjaan atau magang yang potensial, dan pengakuan atas prestasi.

Lebih dari itu, program ini membantu mahasiswa meningkatkan keterampilan non-teknis mereka. Melalui tujuan yang terdefinisi dengan baik dan konten yang komprehensif, mahasiswa MBKM dapat mengharapkan untuk memperoleh sekitar lima keterampilan profesional (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).


- 1. Komunikasi Publik:** Menguasai keterampilan komunikasi baik lisan maupun tulisan, termasuk mendengarkan dengan aktif, melakukan presentasi yang efektif, serta menulis laporan dan korespondensi dengan baik.
- 2. Kerja Sama Tim dan Kolaborasi:** Mengembangkan kemampuan untuk berbagi ide, mencapai kesepakatan, memecahkan masalah, dan menyelesaikan konflik.
- 3. Manajemen Waktu:** Belajar untuk memprioritaskan tugas, menetapkan tujuan yang jelas, mengoptimalkan jadwal, serta menyeimbangkan tanggung jawab pribadi dan akademik.
- 4. Kecerdasan Emosional:** Membangun empati, kesadaran diri, dan ketahanan untuk dapat sukses di lingkungan kerja yang dinamis dan kompetitif.

Tidak kalah penting, komponen pengajaran praktis memungkinkan praktisi industri untuk mengidentifikasi dan merekrut mahasiswa berbakat. Perusahaan yang berpartisipasi pada kegiatan ini mendapatkan akses ke talenta baru yang menjanjikan, berkontribusi pada kemajuan pendidikan, dan membangun kemitraan yang positif.



²⁶ Terdapat penurunan dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk proses penerbitan artikel di jurnal internasional terkemuka yang memakan waktu lebih lama dan penurunan kualitas artikel yang menyebabkan banyak artikel ditolak (Kemendikbudristek, 2023). Distribusi institusi pendidikan tinggi berkualitas tinggi yang tidak merata menimbulkan kekhawatiran tentang hasil penelitian. Institusi publik mencakup sembilan dari sepuluh institusi dengan publikasi dengan indeks SCOPUS terbanyak, namun hanya mewakili kurang dari 2 persen dari semua institusi pendidikan tinggi di Indonesia (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Perguruan tinggi terakreditasi	Pada tahun 2019, hanya 2 persen institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang menerima akreditasi dengan nilai terbaik "A", sementara 32 persen memiliki akreditasi "C", dan sekitar setengahnya tidak terakreditasi.
Kompetensi dan kesejahteraan dosen	Kompetensi dosen juga menjadi masalah dengan hanya 15,4 persen yang memiliki gelar Doktor (PhD) jika dibandingkan dengan 37 persen di Malaysia.
Kesejahteraan dosen²⁷	<ul style="list-style-type: none"> Kebanyakan dosen memiliki penghasilan kurang dari Rp 3 juta per bulan, bahkan setelah enam tahun masa kerja. Dosen pegawai negeri sipil dengan gelar PhD dan status asisten profesor mendapatkan gaji pokok yang berkisar antara Rp 2,6 juta hingga Rp 4,4 juta. Mereka dapat menerima tambahan sebesar Rp 2,8 juta per bulan setelah tiga tahun memiliki sertifikasi dosen (Napitupulu, 2024c). Dosen di universitas swasta memiliki risiko yang lebih besar dengan kemungkinan tujuh kali lipat untuk mendapatkan penghasilan kurang dari Rp 2 juta per bulan.



Revitalisasi Perguruan Tinggi

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

Kesiapan infrastruktur perguruan tinggi	Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN) (Paket)	182,76%	Target 29 Realisasi 53	Alokasi Anggaran Rp 180,72 M
	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN) (unit)	100%	Target 8 Realisasi 8	Alokasi Anggaran Rp 530,32 M
Penguatan kualitas yang terstandarisasi oleh industri	Pendidikan Tinggi Vokasi yang Menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri (Lembaga)	183%	Target 142 Realisasi 256	Alokasi Anggaran Rp 104,28 M
	SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi (Orang)	106%	Target 380 Realisasi 784	Alokasi Anggaran Rp 4,38 M

(Kemendikbudristek, 2023)

²⁷ Karena masa kerja yang terbatas, banyak dosen baru tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi dan tunjangan tambahan. Biasanya, setelah 2-3 tahun, mereka menerima tunjangan awal sekitar Rp 375.000 saat dipromosikan menjadi Asisten Ahli. Akibatnya, mereka mencari pendapatan tambahan melalui kegiatan lain, seperti pekerjaan komite, hibah penelitian, atau peran struktural di universitas mereka.

APA TANTANGANNYA?

Kualitas dan kapasitas anggota fakultas	Petugas layanan di layanan terpadu memiliki pengetahuan terbatas tentang pembaruan kebijakan Kemendikbudristek (Kemendikbudristek, 2023).
Beban kerja dosen	Penilaian beban kerja dosen dianggap tidak adil dan membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan kapasitas yang berdampak negatif pada jenjang karier dan kesejahteraan mereka. Kondisi ini dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan masyarakat (Napitupulu, 2023b).
Proses pemantauan dan evaluasi guru yang efektif	Masalah ini menjadi perhatian pemerintah dan akan diatasi melalui penilaian kinerja guru baru oleh Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek tahun 2024 (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).
Kesenjangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta	<ul style="list-style-type: none"> Hanya sekitar 10 persen atau sekitar 300 perguruan tinggi swasta di Indonesia yang beroperasi dengan baik, sementara 90 persen sisanya atau sekitar 2.800 dari 3.128 perguruan tinggi swasta berada dalam kondisi buruk. Perguruan tinggi swasta saat ini mendidik sebanyak 72 persen siswa menimbulkan perlunya perhatian yang lebih baik terhadap kualitas lembaga tersebut. Dukungan atau bantuan yang dialokasikan untuk perguruan tinggi swasta kurang dari 6 persen dari anggaran negara, sementara perguruan tinggi negeri menerima sekitar 94 persen dari total anggaran (Prastiwi & Ihsan, 2022).
Dukungan fasilitas TIK	Pemerintah masih menghadapi masalah dengan hambatan geografis dan ekonomi sehingga semakin sulit untuk menerapkan TIK secara merata di luar penggunaan komputer dasar, terutama di daerah 3T (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Pengembangan Tenaga Kerja

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

Kampus Merdeka untuk pembelajaran inovatif di luar program studi	<ol style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)²⁸ Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)²⁹ Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)³⁰ Wirausaha Merdeka (WMK)³¹ Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)³² Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA)³³ Kampus Mengajar (KM)³⁴ Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)³⁵
Pembangunan kapasitas sains, inovasi, dan teknologi melalui Techno Parks³⁶	Pengembangan dan implementasi <i>Science Techno Parks</i> yang saat ini sedang berlangsung di empat perguruan tinggi negeri: Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia (Romanti, 2023).

²⁸ P2MW adalah program pengembangan bisnis bagi mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan pendanaan pengembangan dan pendampingan dengan memberikan bantuan bisnis dan pelatihan kepada mahasiswa yang berpartisipasi dalam P2MW.

²⁹ PKM meningkatkan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa pendidikan tinggi untuk menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memperkaya budaya nasional.

³⁰ Program ini memperkuat kapasitas organisasi mahasiswa melalui serangkaian proses pendampingan organisasi mahasiswa oleh perguruan tinggi yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

³¹ Program Kewirausahaan Merdeka bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berpartisipasi untuk mendorong pembelajaran kewirausahaan, meningkatkan semangat kewirausahaan, menambah pengalaman langsung dalam kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing lulusan. Program ini bertujuan untuk membangkitkan minat mahasiswa dalam kewirausahaan, mengembangkan pola pikir dan keterampilan kewirausahaan, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan pendidikan tinggi secara keseluruhan.

³² Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang atau mengikuti mata kuliah dengan proyek akhir di perusahaan-perusahaan kelas dunia.

³³ Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan hak dan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan serta memberikan pengalaman studi di perguruan tinggi luar negeri.

³⁴ Program ini menawarkan mahasiswa menjadi mitra pengajar di unit pendidikan dasar dan menengah yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset berdasarkan hasil pemetaan yang mengacu pada data Dapodik dan Penilaian Nasional tahun 2022.

³⁵ Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka berorientasi untuk memberikan pengalaman pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia dan mengalami keragaman melalui kegiatan Modul Nusantara untuk menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme Indonesia.

³⁶ Kemendikbudristek mendukung pendirian Techno Parks di perguruan tinggi Indonesia melalui peluncuran Proyek Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Technology Parks (PRIME SteP) 2023-2027 melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk pengembangan Science Techno Parks di empat Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

Keterampilan kerja lulusan ³⁷	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapat Minimum 1x UMP		
	106,4%	Target Realisasi	45% 47,88 %
	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun dan mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2x UMP)		
	156,2%	Target Realisasi	20% 31,24%
	(Kemendikbudristek, 2023)		
Pengembangan inovasi kewirausahaan	Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha (Orang)		
	151,64%	Target Realisasi	5.000 7.582
	(Kemendikbudristek, 2023)		
Inovasi model pembelajaran vokasi	Inovasi Model Pembelajaran Vokasi Mengacu pada Dunia Kerja (Kajian)		
	179%	Target Realisasi	14 25
	(Kemendikbudristek, 2023)	Alokasi Anggaran Rp 1,82 M	
Kurikulum Link and Match	Program Studi Vokasi yang Menerapkan Kurikulum Link and Match dengan Dunia Kerja (Lembaga)		
	291,67%	Target Realisasi	12 35
	(Kemendikbudristek, 2023)	Alokasi Anggaran Rp 9,5 M	

APA TANTANGANNYA?	
Pengembangan soft skills	Pendidikan vokasi kurang memiliki keterampilan bahasa Inggris dan <i>soft skills</i> yang diperlukan untuk pasar kerja (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).
Penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan kerja dan industri	Banyak peserta dalam bimbingan kurikulum berbasis industri belum mampu merumuskan hasil belajar sesuai dengan program studi mereka berdasarkan pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 (Kemendikbudristek, 2023).
Kolaborasi dengan sektor swasta	Pendidikan vokasi di Indonesia juga memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan kerja dan industri karena pelatihan, pengembangan profesional, dan desain siap industri sangat penting. Untuk mengatasi kebutuhan ini, pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan pendidikan vokasi (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

³⁷ Meskipun data menunjukkan bahwa kondisi melebihi batas target Kemendikbudristek setiap tahun, tingkat keterampilan lulusan masih rendah di bawah 50 persen. Hal ini juga disertai dengan penurunan persentase lulusan pendidikan tinggi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari satu tahun, yaitu 4,65 persen dari tahun 2022 dengan total pencapaian sebesar 35,89 persen.

APA TANTANGANNYA?

Kurangnya pendidikan kewirausahaan

Hanya beberapa universitas yang telah mengimplementasikan Program Kewirausahaan Merdeka. Pada tahun 2023, sebanyak 34 universitas berhasil melaksanakan program tersebut yang merupakan sekitar 1,14 persen dari semua universitas (Kemendikbudristek, 2023).

Persepsi dan akses terhadap pendidikan vokasi³⁸

- Pendidikan vokasi sering dipersepsikan sebagai pendidikan untuk siswa yang secara ekonomi kurang beruntung dan/atau secara akademis kurang mampu.
- Upaya signifikan untuk mengatasi persepsi publik ini termasuk survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek bekerja sama dengan MarkPlus yang mengungkapkan bahwa mayoritas responden menyadari dan tertarik untuk mengikuti pendidikan vokasi (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Tata Kelola Pemerintahan

BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?

Penyaluran BOS yang efektif

APA TANTANGANNYA?

Pengelolaan rekrutmen guru

Alokasi anggaran oleh pemerintahan daerah

Akurasi basis data pendidikan untuk Dapodik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Implementasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi SPM Sekolah dan memberdayakan kepala sekolah dan guru dalam penggunaan BOS secara efektif



Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama pendidikan berhubungan positif dengan kenaikan upah di pasar tenaga kerja (Arbi, 2024). Hal ini menekankan bahwa pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam meningkatkan status sosial ekonomi individu. Seiring dengan perkembangan masyarakat, pentingnya melanjutkan pendidikan tinggi untuk mencapai mobilitas keluarga ke atas semakin terlihat jelas.

Pendidikan tinggi berfungsi sebagai jalur krusial untuk membangun generasi yang maju. Investasi jangka panjang ini memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk peran pemerintah dalam mendidik warganya. Meskipun pendidikan tinggi saja tidak dapat menjadi solusi untuk masalah ketenagakerjaan, hal ini merupakan sarana kuat untuk meningkatkan kesejahteraan individu, membantu orang keluar dari kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Mewujudkan Indonesia yang makmur pada tahun 2045 memerlukan investasi jangka panjang, dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur. Oleh karena itu, pendidikan tinggi telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat dalam membangun negara yang maju.

³⁸ Sebanyak 82,05 persen responden tertarik untuk melanjutkan jenjang SMK dan 78,6 persen tertarik melanjutkan ke pendidikan tinggi vokasi terutama karena peluang kerja yang ditawarkan (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

B. Tantangan di Sektor Pendidikan

Pendidikan Indonesia menghadapi hambatan di setiap tingkatannya, namun ada masalah spesifik yang harus diatasi untuk memastikan bahwa bangsa kita dapat mencapai tujuannya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berikut adalah beberapa perhatian utama yang memengaruhi upaya membangun sektor pendidikan yang kuat:

Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan antara daerah maju dan kurang berkembang masih menjadi tantangan utama. Kualitas pendidikan di Indonesia sangat bervariasi, dengan daerah perkotaan yang biasanya memiliki fasilitas yang lebih memadai, tenaga pengajar yang lebih berkualitas, dan metode pengajaran yang lebih modern. Di sisi lain, banyak sekolah di daerah pedesaan, terpencil, atau tertinggal mengalami kekurangan sumber daya penting, seperti buku pelajaran, laboratorium, bahkan tenaga pengajar yang kompeten.

Sebagai contoh, meskipun rata-rata nasional lama sekolah adalah 9,08 tahun, Jakarta memiliki rata-rata tertinggi dengan 11,3 tahun, sedangkan Provinsi Papua tertinggal dengan hanya 7,31 tahun. Kesenjangan ini diperburuk oleh faktor geografis: penduduk perkotaan mengikuti pendidikan tinggi dua kali lebih banyak dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Hambatan keuangan, yang dipicu oleh kemiskinan struktural dan pendapatan yang rendah, sering kali mendorong keluarga di daerah pedesaan untuk lebih mengutamakan pendapatan langsung daripada pendidikan yang pada akhirnya meningkatkan angka putus sekolah.

Siswa berkebutuhan khusus juga menghadapi tantangan lebih besar dengan tingkat partisipasi pendidikan mereka hanya sepertiga dari siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah biaya pendidikan dan mendorong inklusivitas yang lebih besar dalam pendidikan tinggi.

Hambatan lainnya adalah kurangnya lembaga pendidikan tinggi berkualitas di provinsi-provinsi timur dan terpencil Indonesia. Institusi-institusi terbaik umumnya terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatra, sementara provinsi-provinsi yang lebih jauh harus puas dengan institusi yang kualitasnya lebih rendah. Selain itu, rendahnya hasil belajar di tingkat dasar dan menengah semakin memperkecil peluang siswa di daerah ini untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga memperparah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Guna mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan dukungan bagi orang dewasa dan siswa yang putus sekolah dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dan intelektual. Jalur pendidikan di perguruan tinggi komunitas dan program penghubung menjadi krusial untuk mempersiapkan mereka melanjutkan pendidikan pasca-sekolah menengah. Asosiasi Pendidikan dan Guru Indonesia juga mendorong adanya jalur yang jelas serta opsi transfer kredit untuk mempermudah transisi menuju pendidikan tinggi (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Tantangan di Wilayah 3T

Wilayah 3T—terpencil, tertinggal, dan terbelakang—telah mengalami kemajuan dalam reformasi pendidikan, tetapi masih menghadapi banyak hambatan yang mengganggu kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

Masalah Implementasi

Para pendidik dan organisasi nonprofit di wilayah 3T menemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka mengalami kesulitan, sebagian karena pelaksanaan yang terlalu dini. Faktor-faktor penting seperti ketersediaan energi, konektivitas internet, dan kesiapan guru belum sepenuhnya teratasi. Laporan dari International Telecommunication Union (ITU) menyebutkan bahwa 42.159 sekolah, atau 19 persen dari total sekolah di Indonesia, tidak memiliki akses internet, dengan wilayah timur menghadapi kesenjangan konektivitas terbesar. Selain itu, ketersediaan listrik masih sangat terbatas di Jawa dan Bali.

Upaya sosialisasi juga terbatas dan berbeda-beda antar jenjang kelas sering kali bergantung pada keputusan kantor pendidikan setempat. Beberapa kantor publik lokal lebih fokus meningkatkan status Laporan Pendidikan Lokal dengan mendaftarkan sekolah ke Kurikulum Merdeka dan platform *EdTech*-nya, PMM, tanpa memberikan dukungan teknis atau pelatihan yang memadai.

Relevansi Budaya

Kurikulum pendidikan sering kali mengabaikan nilai-nilai budaya tradisional dan praktik-praktik adat, terutama dalam pendidikan formal. Kurikulum yang didesain dengan konteks perkotaan kurang membekali siswa dengan keterampilan hidup yang mereka perlukan di desa asal mereka, seperti kemampuan bertani. Ketidaksiharian ini menyebabkan pengangguran setelah siswa kembali ke desa, sementara banyak di antara orang tua merasa terasing dari sistem pendidikan yang tidak menghargai pengetahuan budaya dan bahasa daerah mereka.

Tantangan Literasi

Pengajaran literasi di wilayah 3T diperumit dengan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak mengakomodasi keragaman bahasa daerah. Banyak masyarakat 3T tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama mereka, sehingga tes standar seperti PISA tidak mencerminkan konteks lokal. Penelitian INOVASI tahun 2020 menemukan bahwa 81 persen siswa laki-laki dan 71 persen siswa perempuan yang bahasa ibu mereka adalah bahasa daerah tidak mencapai tingkat kemahiran literasi yang disyaratkan. Hambatan bahasa ini, ditambah dengan isu anak berkebutuhan khusus, secara signifikan menghalangi pencapaian literasi.

Hambatan Keuangan

Anggaran dan kendala keuangan menjadi faktor utama yang mempengaruhi akses ke sekolah. Keluarga dari latar belakang ekonomi rendah mungkin lebih mengutamakan penghasilan langsung daripada pendidikan karena biaya seperti uang komite, transportasi, dan makan siang yang belum dibayar. Sekolah di daerah terpencil, yang sering kali kurang mampu mendapatkan pendanaan, sangat terpengaruh oleh kondisi ini.

Kesempatan Pendidikan Non-Formal

Siswa yang putus sekolah menengah dapat melanjutkan pendidikan mereka melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tingginya angka putus sekolah di daerah pedesaan sebagian disebabkan oleh penekanan yang lebih besar pada mencari nafkah daripada pendidikan karena manfaat finansial jangka pendek dianggap lebih bernilai daripada pendidikan jangka panjang.

Akses Pendidikan Tinggi

Akses ke pendidikan tinggi di daerah pedesaan secara signifikan lebih rendah, dengan angka partisipasi kasar sebesar 22,04 persen dibandingkan dengan 37,44 persen di daerah perkotaan. Siswa di pedesaan lebih sering putus kuliah dengan kendala finansial menjadi faktor utama. Institusi pendidikan tinggi di daerah terpencil sering kali kesulitan mendapatkan pendanaan dan sumber daya yang memadai, serta kurang memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mengimplementasikan program modern seperti Kampus Merdeka.

Pendidikan Anak Usia Dini

Partisipasi pendidikan anak usia dini di daerah 3T secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Di daerah terpencil, akses ke pendidikan anak usia dini dan kegiatan ekstrakurikuler terkait sangat terbatas. Statistik Indonesia menunjukkan bahwa dukungan pendidikan anak usia dini dua kali lebih banyak tersedia di komunitas perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Pemahaman orang tua tentang nilai pendidikan anak usia dini dan kendala finansial sering mempengaruhi tingkat pendaftaran. Banyak orang tua di pedesaan percaya bahwa pendidikan usia dini tidak memberikan manfaat langsung, sehingga enggan berinvestasi di dalamnya.

Lingkungan Belajar Berbahaya

Lingkungan belajar yang berbahaya banyak ditemukan di wilayah 3T dipengaruhi oleh kerusuhan politik dan praktik hukuman fisik yang masih berlangsung. Survei pada tahun 2019 melaporkan bahwa disiplin fisik digunakan oleh orang tua di beberapa daerah jika siswa tertinggal di sekolah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap anak-anak di desa-desa terpencil yang mempengaruhi pengalaman belajar mereka.

Pengaruh Politik

Keputusan politik pemerintah daerah sangat memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Keputusan mengenai pendanaan dan pengangkatan guru sering kali dipengaruhi oleh nepotisme sehingga berdampak pada efektivitas inisiatif pendanaan. Keputusan untuk mendukung sekolah sering kali didasarkan pada koneksi politik daripada kebutuhan sehingga memengaruhi dampak bantuan tersebut.

Hambatan Geografis

Lokasi geografis tetap menjadi hambatan utama, terutama di daerah kepulauan. Siswa dan guru di daerah dengan medan sulit sering belajar di bangunan darurat. Jarak antara rumah dan sekolah, rata-rata 149 kilometer atau lima jam perjalanan, memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengawasi sekolah secara efektif. Tingginya biaya transaksi dan jarak tempuh yang jauh membuat guru enggan pindah ke daerah pedesaan sehingga tingkat ketidakhadiran mereka tinggi.

Pernikahan Anak dan Isu Gender

Statistik Indonesia melaporkan bahwa 15 hingga 20 persen perempuan berusia 20 hingga 24 tahun di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi menikah sebelum usia 18 tahun. Tradisi terkait gender dan pengabaian orang tua berkontribusi pada pernikahan anak di daerah pedesaan. Orang tua yang miskin sering kali bekerja berjam-jam dan mungkin tidak mengawasi anak-anak mereka dengan baik sehingga meningkatkan risiko kehamilan remaja di luar nikah. Selain itu, keyakinan bahwa pendidikan kurang penting bagi perempuan setelah mereka bisa membaca mengurangi partisipasi perempuan di pendidikan menengah.

Akses Pendidikan Agama

Akses ke pendidikan agama sangat bervariasi di setiap provinsi tergantung pada faktor budaya yang sistemis. Kelompok adat dan etnis minoritas mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan agama yang mereka inginkan, sementara sekolah negeri sering kali hanya memiliki pendidik Muslim atau, kadang-kadang, Kristen. Selain itu, siswa minoritas mungkin harus mengikuti kelas agama yang tersedia sehingga memengaruhi pengalaman pendidikan mereka.

Fasilitas Fisik

Fasilitas pendidikan yang memadai sangat penting untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Namun, banyak sekolah masih kekurangan kebutuhan dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan konektivitas internet, yang secara signifikan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan.

Selama periode 2018–2019, Kemendikbudristek melaporkan bahwa 969.817 ruang kelas memerlukan renovasi. Jumlah ini meningkat sebesar 26 persen pada 2019–2020, mencapai tambahan 250.000 unit. Sebagai contoh, SD Negeri 02 Jampang di Jawa Barat memiliki atap yang rusak, dimakan rayap, dan tidak memiliki plafon. Meskipun ada kekhawatiran dari orang tua tentang keselamatan anak-anak mereka, pihak sekolah tidak dapat segera menangani masalah tersebut. Meskipun sekolah telah mengajukan perbaikan kepada pihak berwenang setempat, proses renovasi diperkirakan memakan waktu lama. Menurut data Kemendikbudristek, hanya 14 persen dari 1.413.523 ruang kelas di Indonesia yang ditemukan dalam kondisi baik pada tahun 2021 (BBC Indonesia, 2021).

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan jumlah gedung sekolah yang tidak dapat digunakan antara 2020 dan 2022. Khususnya, gedung SD menunjukkan persentase tertinggi dari kerusakan sedang pada 2021–2022 (Putri, 2023). Beberapa sekolah menghadapi tantangan berat karena lokasi mereka yang sulit dijangkau. Misalnya, SD Negeri 132 Lubuk Linggau di Sumatera Selatan terletak di daerah pegunungan dengan jalanan terjal dan rawan longsor. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 2,2 triliun pada tahun 2023 melalui Kemendikbudristek untuk menangani 22.023 ruang kelas dengan kerusakan sedang yang terdapat di sekolah tersebut (Dewan Perwakilan Rakyat, 2023).

Seiring dengan perkembangan pendidikan di era digital, kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan. Banyak sekolah di pedesaan kekurangan teknologi dan konektivitas internet yang memadai. Meskipun demikian, dengan integrasi pembelajaran elektronik dan sumber daya digital, teknologi memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Terdesentralisasi

Kebijakan desentralisasi Indonesia bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah dengan memberikan kendali lebih besar dalam pengelolaan pendidikan, khususnya dalam mengatasi masalah lama seperti pemeliharaan bangunan yang buruk dan ketidaksetaraan di wilayah 3T. Meskipun tujuannya adalah untuk membuat pendidikan lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal, desentralisasi juga memperkenalkan tantangan baru. Tidak semua daerah memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk mengelola pendidikan secara efektif yang mengakibatkan kesenjangan regional yang signifikan. Di Indonesia, terdapat 552 otoritas lokal di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Meskipun otoritas lokal memiliki kendali yang signifikan atas pendidikan, kemajuan menuju penyediaan pendidikan berkualitas yang relevan secara lokal masih terbatas. Pada dasarnya, desentralisasi dimaksudkan untuk mendorong praktik pendidikan inovatif yang disesuaikan dengan konteks lokal. Namun, upaya saat ini cenderung berfokus pada isu-isu yang menarik perhatian, seperti gaji guru dan peningkatan bantuan siswa. Misalnya, di Jakarta, otoritas lokal dan SMERU Research Institute bekerja untuk meningkatkan profesionalisme guru berdasarkan kekuatan dan keterbatasan unik mereka yang mencerminkan pendekatan yang matang terhadap desentralisasi (Napitupulu, 2023a).

Manajemen pendidikan yang terdesentralisasi juga mendapat tantangan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Koordinasi yang tidak efektif sering kali mengurangi keefektifan program pendidikan.

Selain itu, tata kelola sektor pendidikan rawan dipolitisasi karena hubungannya dengan isu politik tingkat tinggi. Politisasi yang berlebihan dapat menguras sumber daya yang sebetulnya relatif terbatas (Napitupulu, 2024a) sehingga menghalangi upaya membangun sektor pendidikan yang tangguh, menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, dan berpotensi menjadi penghambat lain bagi kemajuan pendidikan.

Mengelola Sumber Daya Keuangan yang Terbatas

Meskipun pemerintah telah berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan, distribusi dana sering kali tidak merata. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, kesulitan mendapatkan pendanaan yang memadai untuk operasional harian dan perbaikan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang membutuhkan renovasi besar, terutama yang rusak akibat bencana alam, menghadapi tantangan dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan pada tahun 2022 bahwa terdapat kurang dari 20 persen anggaran tahunan dari 105 otoritas provinsi, kabupaten, dan kota dialokasikan untuk sektor pendidikan, jauh di bawah mandat konstitusional sebesar 20 persen (Lie, 2023).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam pendanaan pendidikan, dengan rata-rata 75 persen dana dialokasikan untuk pengeluaran terkait gaji. Dalam beberapa kasus, hingga 90 persen pendanaan pendidikan di 32 daerah digunakan untuk gaji guru. Alokasi ini menyisakan sumber daya yang sangat sedikit untuk pengeluaran non-gaji, seperti pelatihan guru, beasiswa siswa, dan hibah tambahan sekolah, yang menjadi kunci untuk pengembangan pendidikan secara keseluruhan.

Akibatnya, dari tahun 2018 hingga 2019, pengeluaran rata-rata pemerintah daerah untuk biaya non-gaji hanya Rp 2 juta per siswa per tahun. Pendekatan anggaran ini lebih memprioritaskan masukan, seperti gaji, dari pada hasil seperti hasil belajar siswa dan kinerja sekolah. Praktik alokasi dan penganggaran saat ini membatasi potensi peningkatan kualitas dan dampak terhadap pendidikan yang signifikan (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Manajemen Sekolah

Sekolah-sekolah di Indonesia sering kali dianggap hanya sebagai pelaksana kebijakan daripada peserta aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya keterlibatan ini membatasi otonomi dan efektivitas mereka. Tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah-sekolah kesulitan untuk menjalankan otonomi mereka secara efektif. Mereka juga menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi masalah belajar siswa dan mengembangkan program untuk mengatasinya.

Salah satu hambatan signifikan untuk pendidikan tinggi di Indonesia adalah keterjangkauan. Ketimpangan dalam tingkat partisipasi antara rumah tangga di atas dan di bawah garis kemiskinan menjadi perhatian. Kendala keuangan menghalangi banyak orang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya, hanya 8 persen individu di kuintil pendapatan terendah yang mampu mengakses pendidikan tinggi dibandingkan dengan setengah dari mereka yang berada di kuintil pendapatan tertinggi.

Guru

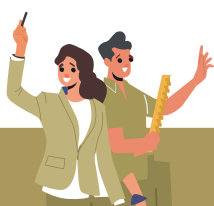
Kekurangan guru, terutama di daerah terpencil, masih menjadi tantangan besar. Banyak guru enggan menerima penempatan di lokasi-lokasi ini karena keterbatasan transportasi, fasilitas yang minim, dan insentif yang kurang memadai. Akibatnya, banyak sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru atau tidak memiliki pengajar untuk mata pelajaran tertentu.

Proses pengambilan keputusan untuk distribusi dan perekrutan guru melibatkan pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Sayangnya, rekrutmen guru yang dipolitisasi masih sering terjadi dan sering mengabaikan kualifikasi guru. Koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah daerah memperburuk masalah ini sehingga menyebabkan manajemen pengetahuan dan pertukaran data yang tidak efisien. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian ketika guru ditempatkan secara berlebihan atau kurang di lokasi atau mata pelajaran tertentu sehingga banyak guru mengajar di luar bidang keahlian mereka.

Kualitas guru sangat penting untuk kesuksesan pendidikan, namun pada kenyataannya masih banyak guru di Indonesia yang kurang kompeten, baik dalam materi pelajaran maupun metode pengajaran. Meskipun upaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program pelatihan dan sertifikasi terus dilakukan, kualitas pengajaran masih di bawah standar. Selain itu, meskipun program pelatihan guru pra-jabatan dan dalam-jabatan telah diperluas untuk mencakup pengetahuan akademis, pelatihan TIK, dan pengalaman praktis di kelas, banyak pendidik masih belum mencapai standar kompetensi minimum. Penilaian kompetensi guru menunjukkan bahwa sebagian besar guru mendapatkan skor di bawah 50 dari 100 dalam pengetahuan pedagogi dan tidak memenuhi ambang batas skor minimal 80 persen dalam mata pelajaran seperti matematika dan bahasa.

Guru membutuhkan pemahaman mendalam tentang kurikulum pengajaran. Namun, banyak dari mereka belum sepenuhnya memanfaatkan otonomi dan fleksibilitas yang meningkat yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka. Adopsi dan sosialisasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan panduan pengajaran Kurikulum Merdeka sebagian besar bergantung pada inisiatif pemerintah daerah dan umumnya ditawarkan secara daring. Kondisi ini menyebabkan disparitas yang signifikan dalam kesiapan guru untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif.

Selain itu, perubahan pada konten dan penyampaian pelatihan guru pra-jabatan dan dalam-jabatan belum memberikan peningkatan yang signifikan dalam kualitas guru. Meskipun program pendidikan profesi guru (PPG) dan pelatihan dalam-jabatan telah diperluas untuk mencakup lebih banyak pengetahuan akademis, pelatihan TIK, dan pengalaman langsung di kelas, banyak pendidik di sekolah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag), baik sekolah negeri maupun swasta, masih belum memenuhi standar minimum. Sebagian besar guru tidak mencapai skor minimal 80 persen dalam penilaian matematika dan bahasa, dan banyak yang mendapatkan skor di bawah 50 dari 100 dalam penilaian pengetahuan pedagogi (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).



Tabel 10. Pengetahuan Minimum Guru tentang Mata Pelajaran dan Skor Ujian untuk Bahasa, Matematika, dan Pedagogi Berdasarkan Survei Indikator Kinerja (SDI) 2019-2020

	Kemenag (Islam)	Kemendikbud	Kemenag (Non-Islam)	Publik	Swasta	Perkotaan	Pedesaan
APA YANG PENYEDIA KETAHUI							
Pengetahuan minimum (% guru yang mencapai 80% dalam bahasa dan matematika)	15,6	13,9	43,3	18,6	15,2	17,8	14,4
Nilai Tes (dari 100 untuk bahasa, matematika, dan pedagogi)	39,6	41,6	50,7	41,1	39,4	41,7	38,5

Selain itu, meskipun ada masuknya kepala sekolah dan guru baru, kemajuan dalam memperkenalkan paradigma pengajaran inovatif dan pola pikir pengembangan masih sedikit. Siswa tetap kurang termotivasi karena guru lebih banyak bertindak sebagai penyedia informasi daripada fasilitator pembelajaran. Adopsi TIK di kelas lambat karena keengganan dan kurangnya dukungan untuk keterampilan digital guru yang lebih tua.

Di sisi lain, guru belum sepenuhnya memanfaatkan otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar dari Kurikulum Merdeka. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong penggunaan Platform Merdeka Mengajar, sebuah platform teknologi pendidikan (*Edtech*), namun peningkatan keterampilan digital guru secara nasional masih belum merata. Akibatnya, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam kesiapan guru untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Selain itu, penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah kurang dilengkapi dengan panduan yang jelas tentang bagaimana mengintegrasikan karakteristik khas pendidikan agama.

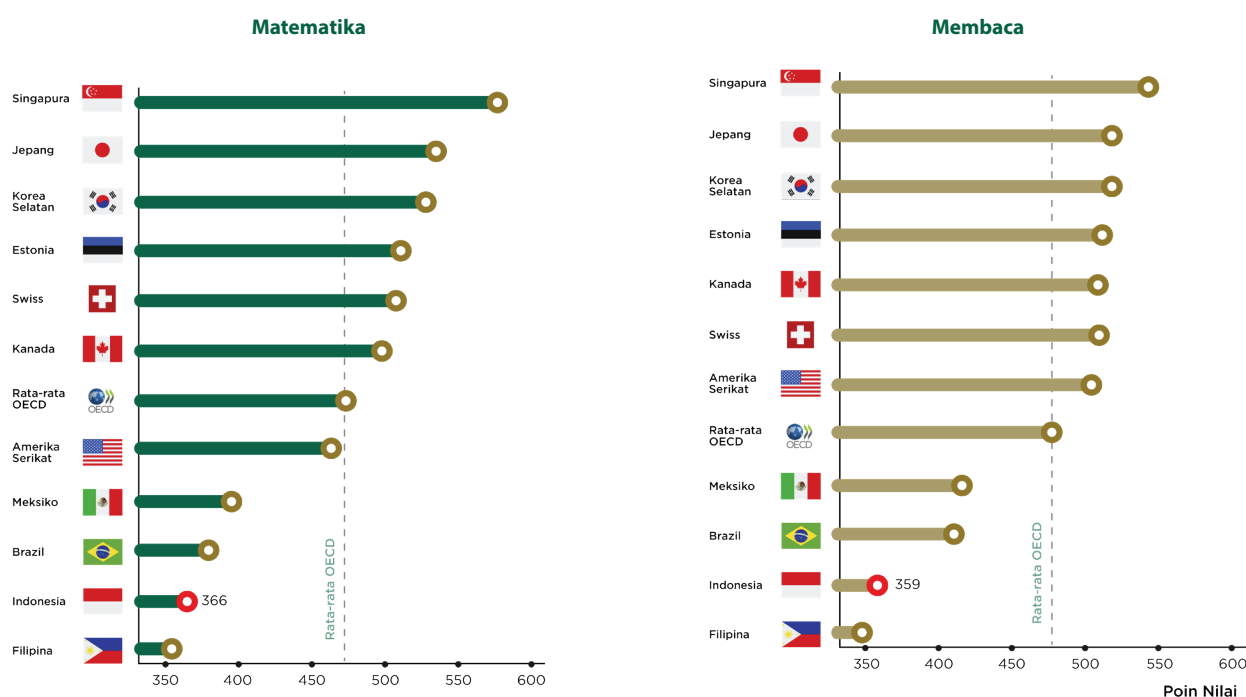
Kesenjangan Hasil Belajar Siswa

Meskipun Kurikulum Prototipe dan Merdeka Belajar diterapkan untuk meningkatkan pendidikan, data terbaru menunjukkan penurunan rata-rata hasil PISA untuk matematika, membaca, dan sains dari tahun 2018 hingga 2022. Walaupun terdapat sedikit penurunan kesenjangan pencapaian antara 10 persen siswa teratas dan terbawah dalam mata pelajaran tersebut, perbedaan yang signifikan tetap ada.

Bank Dunia menyoroti pada tahun 2020 bahwa sistem pendidikan menghasilkan hasil belajar yang tidak memadai untuk kebutuhan saat ini. Hanya 30 persen anak yang mencapai skor minimum membaca dalam PISA, dan banyak siswa tidak mencapai kompetensi minimum dalam membaca dan matematika. Ketidaksiharian ini juga meluas ke pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan yang kurikulumnya sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tuntutan Industri 4.0. Akibatnya, lulusannya sering kali kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pasar tenaga kerja yang mengarah pada pekerjaan dengan gaji rendah dan menunjukkan indikasi bahwa proses pendidikan belum sepenuhnya optimal.

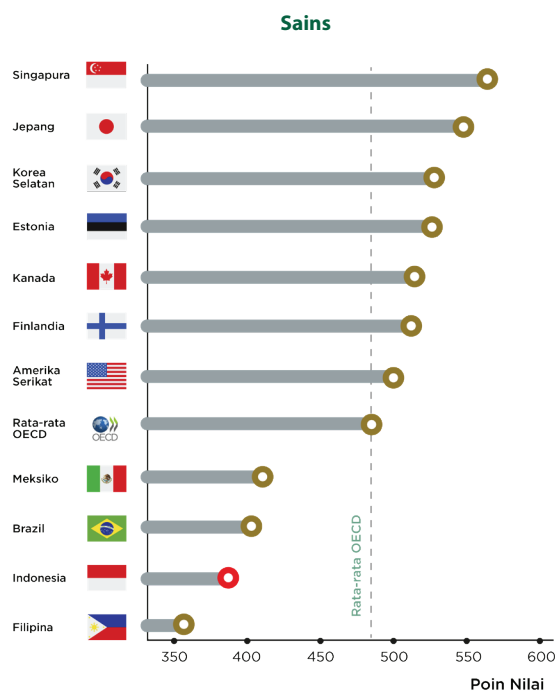
Hasil PISA 2022 menunjukkan penurunan skor sains, matematika, dan membaca dibandingkan dengan tahun 2018, meskipun telah dilakukan reformasi besar melalui Kurikulum Prototipe dan Merdeka Belajar. Harapannya, Indonesia mampu mempertahankan kualitas pendidikan selama pandemi, namun kesenjangan pencapaian antara 10 persen siswa teratas dan terbawah dalam matematika tetap mengecil, sementara dalam membaca dan sains masih signifikan.

Gambar 10. Skor PISA 2022 untuk Indonesia, Rata-rata OECD, dan Negara Pembandingan Terpilih



Faktor sosial-ekonomi menjadi faktor prediksi penting dalam pencapaian siswa yang memiliki keuntungan secara sosial-ekonomi (25 persen teratas) mengungguli mereka yang kurang beruntung (25 persen terbawah) dengan selisih 34 poin skor, atau hampir 6 persen dari semua variasi skor matematika.

Di samping kekurangan dalam sistem pendidikan, kekerasan dan pelecehan anak di sekolah masih menjadi isu yang sangat serius. Penerapan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 pada Agustus 2023 bertujuan untuk menangani kekerasan, termasuk kekerasan seksual di sekolah, dengan memberikan definisi yang jelas dan langkah-langkah pencegahan. Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan adanya 2.355 kasus pelecehan anak antara Januari dan Agustus 2023, dengan 861 kasus terjadi di lingkungan sekolah. Beberapa faktor yang terkait dengan tata kelola yang berkontribusi terhadap kekerasan di sekolah termasuk kurangnya pendidikan karakter dalam kurikulum, manajemen dan pengawasan kekerasan yang buruk, serta minimnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. KPAI telah menyerukan adanya upaya terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keluarga, masyarakat sipil, serta lembaga pendidikan. Mereka juga mendesak Kemendikbudristek untuk segera mengimplementasikan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dengan membentuk satuan tugas, meningkatkan kesadaran publik, dan menyediakan mekanisme pengaduan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga mendukung pembentukan satuan tugas lokal untuk menangani masalah ini secara lebih efektif.



Hasil yang Belum Optimal dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kurikulum pendidikan Indonesia sering kali mendapat kritik karena kurang relevan dengan pasar kerja dan perkembangan terkini. Banyak yang berpendapat bahwa kurikulumnya terlalu teoretis dan tidak membekali siswa dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan setelah lulus. Pergantian kurikulum yang sering menyebabkan ketidakstabilan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, kurikulum Kemendikbudristek dari 2015 hingga 2019 mendapat perhatian khusus karena terlalu kaku sehingga membatasi kemampuan guru untuk berinovasi.

Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara lulusan pendidikan tinggi di Asia Tenggara, setelah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Menurut OECD, hal ini disebabkan oleh keraguan pengusaha terhadap kualitas lulusan Indonesia. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, sekitar 40 persen perusahaan Indonesia kesulitan mengisi peran profesional seperti posisi manajerial.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan adanya ketidaksesuaian keterampilan yang signifikan di antara pekerja Indonesia ketika terdapat 51,5 persen pekerja kurang berkualifikasi dan 8,5 persen terlalu berkualifikasi. OECD menekankan pentingnya keterampilan lunak seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas untuk kesuksesan di pasar kerja modern. Namun, terbatasnya kesempatan pengembangan kapasitas membuat tenaga pengajar kesulitan dalam menerapkan metode pengajaran yang lebih interaktif. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing, serta beralih ke sektor yang lebih produktif dan bergaji tinggi, jalur pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pengembangan keterampilan harus ditingkatkan.

Salah satu tantangan utama dalam ekspansi sekolah kejuruan yang pesat adalah menjaga kualitas sambil mengelola pertumbuhan. Proses perekrutan untuk sekolah menengah kejuruan dan sekolah umum biasanya serupa, sehingga tenaga pengajar yang lebih terampil cenderung memilih sekolah umum yang dianggap lebih bergengsi dan menawarkan gaji lebih tinggi. Akibatnya, banyak guru kejuruan memiliki

pengalaman mengajar terbatas serta pengalaman kerja yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, terdapat kekurangan tenaga pengajar kejuruan yang berpengalaman dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi, terutama di daerah pedesaan.

Sekolah kejuruan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan kurang berkembang, sering menghadapi masalah fasilitas yang kurang memadai, termasuk laboratorium teknis yang tidak lengkap. Ketimpangan dalam akses laboratorium di berbagai provinsi memperburuk perbedaan prestasi akademik antar wilayah. Hal ini membuat sulitnya menyediakan pendidikan kejuruan yang efektif yang sangat bergantung pada praktik langsung.

Lebih jauhnya, sekolah kejuruan di Indonesia juga telah lama dianggap sebagai lembaga “kelas dua” yang umumnya menampung siswa dari latar belakang sosial ekonomi dan akademis yang lebih rendah. Persepsi ini diperkuat dengan anggapan bahwa sekolah kejuruan swasta adalah “pilihan terakhir” bagi siswa dengan nilai ujian yang rendah. Hambatan struktural juga menghalangi mobilitas siswa antara jalur SMA dan SMK ketika lulusan SMA lebih mudah melanjutkan pendidikan daripada rekan-rekan mereka dari SMK.

Di sisi lain, pendidikan politeknik sering kali dianggap sebagai opsi sekunder bagi lulusan kejuruan. Praktik manajemen yang kaku di institusi politeknik menyebabkan berbagai masalah kualitas, seperti penempatan kerja yang tidak teratur, kurangnya pendanaan, dan minimnya interaksi dengan sektor bisnis. Hal ini membatasi kesempatan siswa kejuruan untuk melanjutkan pendidikan atau mengembangkan karier mereka.

Banyak perusahaan di Indonesia khawatir dengan adanya kesenjangan antara keterampilan karyawan tingkat pemula, terutama lulusan kejuruan baru, dan kualifikasi yang diperlukan untuk bekerja. Sebuah studi gabungan oleh *Oxford Policy Management* dan UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa pengusaha sangat menghargai *soft skills* seperti pengendalian diri, keandalan, ketekunan, dan komunikasi, selain kemampuan analitis. Namun, rendahnya keterampilan teknis di kalangan pekerja tingkat pemula menjadi tantangan besar, terutama dengan meningkatnya permintaan untuk kompetensi kejuruan khusus dan kemahiran teknologi digital.

Guna mengatasi ketidaksesuaian keterampilan yang serius di antara lulusan sekolah kejuruan, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja lokal menjadi krusial. Kemendikbudristek, bersama Kemenaker dan Kementerian Perindustrian, bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengembangan standar pendidikan kejuruan serta kurikulumnya. Pemerintah provinsi dapat menyesuaikan kurikulum nasional untuk memenuhi kebutuhan lokal meski pendekatan yang terfragmentasi ini sering menyulitkan pelaksanaan dan penyesuaian dengan tren pasar tenaga kerja yang terus berubah.

Tanpa adanya konsultasi yang memadai dengan industri atau analisis tren tenaga kerja, spesialisasi di setiap sekolah sering kali ditentukan oleh minat siswa lokal. Kolaborasi antara sektor komersial dan sekolah biasanya sporadis sehingga siswa sering kali membuat keputusan yang kurang tepat dalam pendidikan kejuruan mereka. OECD mencatat bahwa hanya sebagian kecil siswa yang memilih bidang seperti pariwisata, agribisnis, dan studi kelautan, sementara lebih dari 60 persen memilih jurusan teknologi, teknik, bisnis, dan TIK, yang sudah terlalu padat.

Keterlibatan sektor swasta sangat penting untuk menjaga standar tinggi di lembaga pendidikan teknis dan pelatihan kejuruan (*Technical Vocational Education and Training /TVET*), mengoordinasikan sertifikasi agar lulusan diakui, serta menyelaraskan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Namun, resistensi dari industri sering muncul karena kekhawatiran akan biaya sertifikasi dan potensi gangguan pada operasi bisnis. Selain itu, program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang mendukung pendidikan kejuruan masih sedikit. Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan keterlibatan industri dalam infrastruktur TVET serta jaminan kualitas perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap sistem insentif dan peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan kejuruan (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

C. Kasus Khusus

Lanskap pendidikan Indonesia yang terus berkembang telah memunculkan beberapa situasi unik yang menonjol sebagai pusat perubahan dan kebijakan. Ketimpangan pembelajaran yang semakin berkembang akibat pandemi COVID-19 serta kompleksitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah dua kasus yang mencerminkan tantangan khusus yang dihadapi oleh sistem pendidikan negara ini yang memerlukan strategi yang disesuaikan untuk memastikan akses yang adil dan pembelajaran berkualitas bagi semua siswa.

Mengatasi Ketimpangan Pembelajaran Pasca COVID-19

Sebelum pandemi COVID-19, sistem pendidikan Indonesia sudah berjuang dengan masalah akses yang tidak merata dan kualitas pendidikan yang belum optimal (Alhumami, 2020). Tantangan ini memerlukan upaya simultan dan berkelanjutan untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak di seluruh negeri. Pandemi yang berlangsung dari 2020 hingga 2022 memperburuk situasi ini serta menjadikannya tantangan yang semakin kompleks dan menyoroti kebutuhan akan kebijakan dan strategi inovatif guna mencegah dampak negatif jangka panjang.

Selama penutupan sekolah akibat *lockdown*, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mendukung 68 juta siswa dari tingkat PAUD hingga pendidikan tinggi yang mendadak harus belajar dari rumah. Pada Hari Guru Nasional 2020, Kemendikbudristek meluncurkan sejumlah kebijakan dan program untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, seperti penyediaan kuota internet, penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel, serta penerapan kurikulum darurat. Selain itu, terdapat inisiatif lain seperti program Guru Belajar, platform Guru Berbagi, serta penyelenggaraan pelajaran melalui siaran televisi nasional (Adit, 2020).

Pada tahun 2021, pemerintah meluncurkan program digitalisasi dengan menyediakan 473.987 laptop berbasis Chrome OS. Namun, karena Chrome OS sangat bergantung pada akses internet yang stabil, hal ini menjadi kendala di wilayah 3T di Indonesia sehingga mempertegas adanya kesenjangan digital (Pramudya, 2021). Kesenjangan ini berdampak pada banyak siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak-anak berkebutuhan khusus, atau yang tinggal di daerah terpencil yang kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, inklusivitas menjadi tantangan selama pandemi karena tidak semua siswa dapat mengakses pendidikan berbasis teknologi (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Siswa dari kelompok rentan menghadapi tantangan besar, seperti akses internet yang terbatas dan minimnya dukungan dari guru dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak dengan anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan tambahan dari orang tua atau pengasuh yang sering kali belum siap, sementara banyak guru tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengajar secara daring dengan efektif. Akibatnya, ketertinggalan dalam kegiatan pembelajaran menjadi masalah serius ketika siswa tidak hanya tertinggal dalam materi baru, tetapi juga melupakan pengetahuan yang sudah mereka kuasai sebelumnya. Bank Dunia memproyeksikan bahwa kehilangan pembelajaran ini akan memperparah kesenjangan antara kelas sosial ekonomi serta di antara siswa dengan tingkat akses internet dan perangkat digital yang bervariasi.

Pada tingkat PAUD, anak-anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dengan pembelajaran daring dan membutuhkan dukungan dari orang tua atau pengasuh yang mungkin tidak memiliki kemampuan atau sumber daya yang diperlukan. Selain itu, banyak guru kurang memiliki keterampilan untuk memberikan pelajaran inklusif secara daring.

Sebagai dampaknya, kehilangan pembelajaran menjadi masalah utama kedua selama pandemi, setelah dampak dari penutupan sekolah dan angka putus sekolah. Siswa kehilangan atau melupakan pengetahuan yang telah mereka dapatkan sebelumnya, dan Bank Dunia memperkirakan bahwa tren kehilangan pembelajaran ini akan terus meningkat akibat penutupan sekolah sehingga memperluas kesenjangan antara kelas sosial ekonomi serta di antara siswa dengan akses internet yang bervariasi.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh INOVASI dan Kemendikbudristek pada 2021, siswa kelas 1 dan 2 mengalami kehilangan pembelajaran setara dengan 5 bulan dalam numerasi dan 6 bulan dalam literasi selama 12 bulan pembelajaran dari rumah. Lebih mengkhawatirkan lagi, siswa kelas 4 kehilangan keterampilan matematika setara 11,2 bulan dan keterampilan bahasa setara 10,8 bulan setelah 18 bulan belajar dari rumah. Studi ini juga menyoroti adanya kesenjangan gender ketika siswa laki-laki mengalami kerugian lebih besar dalam keterampilan bahasa, sedangkan siswa perempuan lebih terdampak dalam keterampilan matematika.

Selain itu, pembelajaran jarak jauh menghadapi berbagai hambatan akibat keterbatasan fasilitas dan dukungan teknologi yang berdampak pada efektivitas proses belajar. Dalam beberapa keluarga, kondisi ini memicu masalah seperti gangguan kesehatan mental, peningkatan tekanan psikologis, dan, dalam kasus ekstrem, kekerasan terhadap anak.

Pembelajaran jarak jauh juga memunculkan beberapa masalah teknis, seperti kurangnya bimbingan dari orang tua, akses terbatas ke sumber daya daring, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, serta kesenjangan digital akibat minimnya perangkat untuk pembelajaran virtual.

Selain itu, manfaat dari pembelajaran digital dan daring tidak tersebar secara merata di seluruh sistem pendidikan. Mahasiswa perguruan tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik ke infrastruktur digital, serta fakultas yang lebih siap untuk menyelenggarakan pelajaran yang efektif dibandingkan dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah. Akibatnya, mahasiswa lebih sering menggunakan perangkat teknologi dalam studi mereka. Di sisi lain, Kemendikbudristek mencatat bahwa hanya 7,80 persen sekolah dasar dan 43,68 persen sekolah menengah memiliki akses ke laboratorium komputer dengan angka yang jauh lebih tinggi di sekolah menengah atas yaitu 73,31 persen.

Di sisi lain, guru di tingkat sekolah dasar dan menengah menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan alat digital ke dalam pengajaran karena kurangnya keterampilan digital dan pengetahuan pedagogis sehingga mengakibatkan pelajaran yang kurang efektif. Penolakan terhadap teknologi juga terlihat di kalangan guru yang lebih tua.

Kesenjangan digital semakin terlihat di berbagai wilayah memperburuk dampak kehilangan pembelajaran selama pandemi. Akses internet dan perangkat teknologi menjadi faktor penentu penting dalam kualitas hasil pembelajaran sebagaimana diungkapkan dalam studi Bank Dunia 2023. Selain itu, banyak guru meremehkan dampak serius dari kehilangan pembelajaran dan merasa bingung dalam mengenali siswa yang terdampak.

Meskipun teknologi telah dimanfaatkan dengan baik di pendidikan tinggi, universitas di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai target Rencana Strategis 2020-2024 Kemendikbudristek, yaitu menempatkan setidaknya lima universitas di peringkat 500 besar *QS World University Rankings*. Pada tahun 2022, target publikasi penelitian tercapai dengan 102.993 karya, namun peringkat universitas masih didominasi oleh perguruan tinggi negeri sehingga perlunya peningkatan kualitas di perguruan tinggi swasta. Banyak perguruan tinggi swasta menghadapi hambatan seperti kekurangan dosen bergelar doktor, sulitnya menyesuaikan kurikulum internasional, dan keterbatasan kegiatan institusi.

Selain itu, tingkat ketenagakerjaan bagi lulusan lembaga pendidikan menjadi isu yang semakin mendesak, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk tantangan yang ada dalam sektor pendidikan. Menurut Laporan Kinerja Kemendikbudristek 2022, hal ini memengaruhi semua tingkat pendidikan. Menanggapi kondisi ini, Kemendikbudristek mengimplementasikan program Kedaireka sebagai bagian dari kerangka Kampus Merdeka untuk memfasilitasi kolaborasi antara industri dan lembaga pendidikan tinggi. Kedaireka adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah untuk mendorong inovasi serta mengatasi tantangan nasional. Program ini juga bertujuan untuk mengatasi tingkat ketenagakerjaan lulusan pendidikan tinggi yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya melalui platform ketika penelitian dan pengembangan teknologi dapat menjembatani kesenjangan antara penelitian dan penerapan dunia nyata, terutama dalam mempromosikan pertumbuhan dan kemajuan teknologi di Indonesia.

Data tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hanya 10,18 persen angkatan kerja yang merupakan lulusan pendidikan tinggi, jauh lebih rendah dari 18,87 persen lulusan pendidikan menengah atas dan 17,76 persen lulusan pendidikan menengah pertama. Bahkan lulusan pendidikan dasar memiliki tingkat ketenagakerjaan yang lebih tinggi yaitu 37,69 persen.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa pengembalian investasi dalam pendidikan vokasi lebih tinggi sebesar 16,3 persen dibandingkan dengan pendidikan menengah atas. Lulusan pelatihan vokasi memperoleh pendapatan yang 9,24 persen lebih tinggi daripada mereka yang tidak mengikuti pelatihan tersebut sehingga menunjukkan dampak positif pada pengembangan keterampilan dan peluang kerja. Namun, untuk mempertahankan tingkat pengembalian investasi yang tinggi ini, lulusan vokasi perlu terus meningkatkan keterampilan mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, lulusan vokasi masih memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah atas. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi kesenjangan pembelajaran pasca-COVID-19, Bappenas menekankan pentingnya program *reskilling* dan *upskilling* bagi orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan keterampilan yang terus berkembang dan mengurangi ketidakcocokan keterampilan.

Selama periode ini, terjadi perubahan signifikan dalam standar pendidikan, kurikulum, dan peran sekolah serta guru sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut yang menguraikan kebijakan, program untuk pelaksanaan, serta kekurangan, dan kelemahannya.

Tabel 11. Daftar Kebijakan Pemerintah Semasa Pandemi

Capaian Pendidikan	Fokus Area	Program Relevan	Catatan Masalah
Akses Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan sekolah dan SLB untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh darurat. Ketersediaan PAUD untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh darurat. Ketersediaan pendidikan tinggi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh darurat. Mengatasi kesiapan sekolah untuk pembelajaran digital dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merencanakan penyediaan 4.200 Base Transceiver Stations (BTS) pada tahun 2021. Melalui program Kuota Belajar, Kemenristekdikti menyediakan kuota belajar bagi siswa dan guru. Peraturan Pemerintah No.13/2020 mengharuskan institusi pendidikan melakukan penyesuaian yang sesuai (termasuk pendidikan digital) untuk mendukung pendidikan berkualitas bagi siswa dengan disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan dan panduan untuk orang tua dalam mengatur pembelajaran jarak jauh di rumah. Memastikan literasi digital yang memadai (termasuk kompetensi digital, keamanan digital, dan etika digital) bagi guru, siswa, dan orang tua. Bantuan untuk SLB dan PAUD dalam melaksanakan pembelajaran daring.
Kualitas pendidikan	<p>Menyederhanakan kurikulum dan konten pembelajaran untuk memprioritaskan kompetensi dasar.</p>	<p>Keputusan Menteri Pendidikan No. 719/P/2020 memungkinkan pelaksanaan Kurikulum Darurat atau Kurikulum Prototipe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman tentang konsep ketertinggalan pembelajaran (learning loss) masih terbatas di kalangan guru, dan beberapa di antaranya kesulitan mengidentifikasi learning loss pada siswa. Guru juga cenderung meremehkan sejauh mana siswa mereka mengalami ketertinggalan pembelajaran.
Revitalisasi sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pedagogi guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh Darurat (Emergency Remote Teaching/ERT). Kemampuan kepala sekolah dalam memimpin pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Darurat. Keterlibatan orang tua yang lebih besar dalam menentukan pengaturan pembelajaran anak mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> Melalui program Guru Belajar, Kemendikbudristek menyelenggarakan serangkaian webinar pada tahun 2020 yang ditujukan untuk guru, kepala sekolah, pengawas, kantor pendidikan lokal, dan orang tua. Webinar ini memberikan panduan teknis dan dukungan terkait pembelajaran jarak jauh. Sejak Desember 2021, orang tua atau wali dapat memilih apakah anak mereka akan kembali ke pembelajaran tatap muka atau melanjutkan pembelajaran jarak jauh. 	<ul style="list-style-type: none"> Program pelatihan belum sepenuhnya mengatasi teknofobia dan resistensi dari guru, terutama guru senior dan kepala sekolah, terhadap penerapan teknologi baru. Beberapa guru menggunakan teknologi hanya pada tingkat minimum (misalnya, menggunakan aplikasi pesan instan untuk mendistribusikan tugas dan koordinasi pengajaran) dan tetap terputus dari skema pembelajaran jarak jauh. Tidak semua orang tua memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah, yang sangat bergantung pada Komite Sekolah masing-masing.

Capaian Pendidikan	Fokus Area	Program Relevan	Catatan Masalah
Pengembangan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong keterkaitan yang lebih besar, penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan teknologi antara perguruan tinggi dengan industri, sebagai upaya menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan kompetitif. 	<ul style="list-style-type: none"> Kampus Merdeka bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa perguruan tinggi untuk mengikuti magang kerja, praktik kerja industri, memperoleh pengalaman kerja langsung dari mitra industri, mengambil mata kuliah di luar program studi mereka, dan berpartisipasi dalam pertukaran pelajar baik secara nasional maupun internasional. Program ini merupakan bagian dari skema Merdeka Belajar. Kedaireka (Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta) adalah sebuah platform yang memfasilitasi kemitraan komersial antara sektor pendidikan tinggi dengan sektor industri dan bisnis. Program ini juga didukung oleh skema matching fund yang dikelola oleh Kemendikbudristek. 	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program Kampus Merdeka sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan perguruan tinggi tersebut serta akses terhadap sumber daya yang dimiliki. Penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi yang beroperasi di wilayah terpencil atau pedesaan memiliki keterbatasan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur untuk memfasilitasi kemitraan dengan industri. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan dalam mengonversi kredit mata kuliah mahasiswa sesuai dengan skema Kampus Merdeka.
Tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan finansial melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kebutuhan operasional sekolah yang mendesak akibat pandemi dan untuk mendukung pembelajaran. Integrasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kemendikbudristek No. 20/2020: Dana BOS sekarang dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan perlengkapan protokol kesehatan seperti masker, sabun, dan termogun. Melalui Keputusan Presiden No. 72/P/2021, Kemendikbud dan Kemendikbudristek diintegrasikan menjadi satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Integrasi ini bertujuan memperkuat pemanfaatan penelitian dan teknologi dalam pendidikan tinggi serta mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat melalui inovasi penelitian dan teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Sekolah swasta, terutama sekolah swasta berbiaya rendah, menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk meningkatkan pembelajaran karena sebagian besar dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru. Dengan menurunnya partisipasi dan penerimaan siswa, alokasi dana BOS (yang sangat bergantung pada jumlah siswa) untuk sekolah swasta menyusut, menyebabkan banyak sekolah swasta berisiko ditutup. Integrasi kementerian tidak mengubah tujuan terkait produktivitas penelitian, karena inisiatif untuk meningkatkan produktivitas penelitian tetap didukung melalui program World Class Professor dan program universitas yang diprakarsai oleh Kemendikbud. Keberhasilan dalam hal ini dievaluasi berdasarkan masuknya perguruan tinggi dalam QS World Rankings.

Implementasi pendidikan berbasis standar telah berkembang dari penegakan keseragaman menjadi pendekatan berbasis kerangka kerja yang memungkinkan fleksibilitas dan kontekstualisasi di sekolah-sekolah lokal. Kemendikbudristek menegaskan bahwa standar pendidikan harus mencakup baik proses maupun hasil untuk secara langsung meningkatkan proses dan hasil pembelajaran daripada hanya berfokus pada masukan sekolah seperti fasilitas.

Selama pandemi, standar ketat untuk persyaratan fisik gedung sekolah dan fasilitas dilonggarkan untuk mengatasi tantangan geografis khusus yang dihadapi oleh sekolah-sekolah terpencil, seperti yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional dan PP No. 4 tahun 2022 yang direvisi. Selain itu, perubahan dalam kebijakan pendidikan, seperti Kurikulum Merdeka, memperkuat standar-standar baru ini.

Sebagai kerangka dasar untuk berbagai reformasi dalam pendidikan K-12 dan pendidikan tinggi, Merdeka Belajar berfokus pada peningkatan kompetensi inti dalam literasi, numerasi, pembentukan karakter, dan transformasi digital.

Kurikulum Merdeka dikembangkan untuk mendorong lingkungan pembelajaran yang lebih adaptif dan menyederhanakan Kurikulum 2013 yang sebelumnya kaku dan berat secara konten. Di bawah Kurikulum Merdeka, guru didorong untuk merancang rencana pelajaran mereka sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap siswa dengan kebebasan yang lebih besar dalam pembuatan dan penyampaian pelajaran. Kurikulum baru ini sangat mempromosikan penggunaan TIK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum Merdeka diperkenalkan secara sukarela mulai tahun 2023.

Tabel 12. Perubahan Kurikulum Selama 2017-2023

Aspek Kurikulum	Kurikulum 2013 (diterapkan sejak 2013)	Kurikulum Prototipe (Darurat) (2020-2021)	Kurikulum Merdeka (Februari 2022, diadopsi oleh Kementerian Agama pada April 2022)
Kerangka Dasar	Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Standar Nasional Pendidikan (SNP).	Sisdiknas, SNP.	Sisdiknas, SNP, pengembangan Profil Pelajar Pancasila.
Target Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah menetapkan ruang lingkup dan urutan yang diperlukan untuk mencapai Standar Isi. Empat Kompetensi Dasar (Kompetensi Dasar atau KD) dikelompokkan berdasarkan kompetensi intinya (Kompetensi Inti atau KI): Spiritual, Sosial, Pengetahuan, dan Keterampilan. Kompetensi Dasar (KD) kemudian diorganisir setiap tahun sesuai dengan kompetensi inti (KI) yang diperlukan. Kompetensi Dasar untuk Pendidikan Khusus (Pendidikan Khusus) dikembangkan oleh orang-orang dengan disabilitas dan merujuk pada pendidikan reguler (Pendidikan Reguler). Siswa dengan kebutuhan khusus dan/atau disabilitas intelektual dapat menggunakan Kompetensi Dasar yang sama dari pendidikan reguler melalui kurikulum yang dimodifikasi. 	Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti (KD-KI) yang disederhanakan disepakati oleh setiap satuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pembelajaran disusun dan didasarkan pada fase (Fase Dasar untuk PAUD, Fase A, B, C untuk SD dan yang setara, Fase D untuk SMP dan yang setara, Fase E dan F untuk SMA dan yang setara). Hasil pembelajaran disusun dalam bentuk paragraf, merinci pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai dan memperkuat kompetensi yang dituju.

Aspek Kurikulum	Kurikulum 2013 (diterapkan sejak 2013)	Kurikulum Prototipe (Darurat) (2020-2021)	Kurikulum Merdeka (Februari 2022, diadopsi oleh Kementerian Agama pada April 2022)
Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Jam Pelajaran ditentukan setiap minggu dan diulang untuk setiap semester. Satuan pendidikan didorong untuk menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan mata pelajaran sekolah. Struktur kurikulum yang kaku mencakup tiga kategori mata pelajaran: (1) Mata pelajaran wajib yang ditetapkan secara nasional; (2) Mata pelajaran wajib yang ditetapkan secara regional; (3) Mata pelajaran berdasarkan spesialisasi (kejuruan). 	<p>Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti (KD-KI) yang disederhanakan disepakati oleh setiap satuan pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jam Pelajaran ditentukan setiap tahun. Satuan pendidikan dapat mengalokasikan waktu pembelajaran dengan fleksibilitas lebih besar untuk memenuhi jam pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum disusun untuk memenuhi dua jenis kegiatan: (1) Kegiatan pembelajaran intrakurikuler; dan (2) proyek untuk memperkuat Pancasila. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran mereka berdasarkan mata pelajaran, tematik, atau melalui integrasi semua aspek. [Mata Pelajaran SD] Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam digabung menjadi satu mata pelajaran (IPAS), bahasa Inggris tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib. [Mata Pelajaran SMP] TIK merupakan mata pelajaran wajib. [Mata Pelajaran SMA] Penyediaan pilihan bagi siswa untuk mendaftar pada mata pelajaran berdasarkan minat mereka. Menghasilkan sebuah esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. [Mata Pelajaran SMK] Mata pelajaran wajib yang ditetapkan secara lokal telah dihapus. Kurikulum berbasis pada mata pelajaran umum dan berbasis spesialisasi. Mata pelajaran juga mencakup kewirausahaan, kerja lapangan, dan proyek kreatif.
Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan pendekatan ilmiah untuk semua mata pelajaran. Terpusat pada pembelajaran tatap muka. Kegiatan ko-kurikuler dapat dialokasikan hingga 50% dari waktu pembelajaran non-tatap muka tetapi tidak diwajibkan dan diserahkan pada kebijakan dan kreativitas masing-masing guru. 	<ul style="list-style-type: none"> Disederhanakan sesuai dengan kurikulum yang disepakati. Terpusat pada pembelajaran yang esensial dan kontekstual untuk memastikan hasil pembelajaran juga dapat dicapai di rumah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembelajaran yang dibedakan berdasarkan kemajuan siswa saat ini. Kombinasi pembelajaran intrakurikuler (70-80% dari jam pembelajaran) dan kegiatan ko-kurikuler melalui pelajaran Pancasila berbasis proyek (20-30% dari jam pembelajaran). Menawarkan opsi pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan kesetaraan. Asesmen diagnostik (menentukan usia mental, fase belajar, dsb.) sangat dianjurkan untuk pembelajaran di tingkat pendidikan khusus dengan dukungan psikolog profesional dalam kondisi tertentu.

Aspek Kurikulum	Kurikulum 2013 (diterapkan sejak 2013)	Kurikulum Prototipe (Darurat) (2020-2021)	Kurikulum Merdeka (Februari 2022, diadopsi oleh Kementerian Agama pada April 2022)
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian formatif dan sumatif dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan dan hasil pembelajaran serta perbaikannya. • Penilaian dibagi menjadi kategori sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disederhanakan sesuai dengan kurikulum yang disepakati. • Penilaian dibagi menjadi kategori sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat penilaian formatif dan mendorong penggunaan hasil penilaian untuk merumuskan rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan hasil pembelajaran tertentu. • Memperkuat bentuk penilaian yang autentik, khususnya untuk Pancasila. • Penilaian tidak dibagi ke dalam kategori sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Alat Pembelajaran yang Disediakan oleh Pemerintah	Buku teks dan buku non-teks.	Satuan pendidikan dapat mengadaptasi buku teks dan buku non-teks.	Buku teks dan buku non-teks, modul spesifik disediakan (Modul Pengajaran, Modul Kurikulum Operasional, Proyek untuk Profil Siswa Pancasila, dsb.).
Alat Kurikulum	Buku panduan untuk pelaksanaan kurikulum, buku panduan untuk penilaian, buku panduan untuk pembelajaran di setiap tingkat pendidikan.	Buku panduan untuk pelaksanaan kurikulum, buku panduan untuk penilaian, buku panduan untuk pembelajaran di setiap tingkat pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Buku panduan untuk pembelajaran dan penilaian, buku panduan untuk mengembangkan kurikulum operasional sekolah, buku panduan untuk pembelajaran berbasis proyek, buku panduan untuk mengelola pendidikan inklusif, buku panduan untuk merumuskan Program Pembelajaran Individu, buku panduan untuk layanan konseling. • Buku panduan spesifik bagi guru untuk memilih dan mengembangkan materi, media, dan metode pembelajaran di tingkat pendidikan khusus.

Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak adalah program yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek untuk mendukung guru dan sekolah dalam menerapkan reformasi Merdeka Belajar. Alih-alih berfokus pada keterampilan manajerial dan administratif tradisional, program ini menekankan pada peningkatan peran sekolah sebagai agen perubahan dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dengan penekanan yang lebih kuat pada perbaikan hasil belajar melalui inovasi di kalangan profesional pendidikan. Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah yang berfungsi sebagai katalisator untuk inspirasi dan perubahan di dalam komunitas lokal.

Selain kurikulum baru dan program-program yang diperkenalkan selama pandemi, anggaran pendidikan meningkat sebesar 19 persen dibandingkan tahun 2019 karena lonjakan pengeluaran nasional yang disebabkan oleh COVID-19. Pada tahun 2021, anggaran pendidikan memberikan penekanan lebih pada pembiayaan dan program beasiswa serta memperkuat program *Link and Match* di tingkat politeknik dan vokasi untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Selain itu, penggabungan antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menciptakan Kemedikbudristek mengarah pada integrasi anggaran pengembangan riset dan teknologi dengan anggaran pendidikan. Meskipun terjadi perubahan ini, proporsi keseluruhan anggaran pendidikan tetap tidak berubah dengan pemerintah daerah memegang bagian terbesar.

Guna meningkatkan upaya dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memperbaiki hasil pendidikan, Standar Pendidikan Nasional (SPN) yang disederhanakan telah diharmonisasikan dengan Pemantauan Kinerja Pencapaian (APM) pemerintah daerah. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) No. 311 tahun 2022, Kemendikbudristek dan Kemendagri telah menyetujui delapan indikator prioritas untuk hasil pendidikan regional.

Sebagai bagian dari penilaian kinerja untuk Standar Pendidikan Nasional, pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi sekarang bertanggung jawab dalam mencapai metrik prioritas tersebut. Progres tersebut akan dipantau melalui portal Rapor Pendidikan. Peralihan dari penekanan pada *input* ke fokus pada *output* bertujuan untuk mendorong perencanaan dan pendanaan pendidikan daerah guna mencapai hasil pendidikan yang lebih baik.



Tabel 13. Indikator Prioritas SPM

TINGKAT PROVINSI	TINGKAT KABUPATEN/KOTA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2. Kompetensi Literasi 3. Kompetensi Berhitung 4. Kemampuan kerja lulusan SMK 5. Kepuasan dunia kerja terhadap kualitas lulusan SMK 6. Keamanan sekolah 7. Nilai-nilai Pancasila di sekolah 8. Inklusivitas sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2. Kompetensi Literasi 3. Kompetensi Berhitung 4. Proporsi unit PAUD dengan akreditasi minimal B 5. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi sarjana dan diploma (S1 dan D-IV) 6. Keamanan sekolah 7. Nilai-nilai Pancasila di sekolah 8. Inklusivitas sekolah.

Dua pelajaran terpenting yang diambil dari pandemi COVID-19 terkait kehilangan pembelajaran di Indonesia adalah perlunya fleksibilitas dalam mendefinisikan hasil pembelajaran dan kebutuhan akan kemajuan teknologi dalam pendidikan. Strategi Merdeka Belajar telah diterapkan melalui pendekatan hibrida mencakup berbagai inisiatif seperti Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, Rapor Pendidikan, Pengajar Praktik, dan Platform Merdeka Mengajar. Strategi ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk fokus pada kompetensi esensial dan terbukti mempercepat serta memperluas pelaksanaan Kurikulum Merdeka selama pandemi.

Penerapan TIK yang meluas dalam pendidikan merupakan akibat dari kebijakan pembelajaran jarak jauh, baik yang disengaja maupun tidak. Beragam alat TIK digunakan, termasuk *Learning Management Systems* (LMS) untuk keperluan administratif seperti pengumpulan tugas, pelacakan absensi siswa, dan pemantauan kehadiran dalam kelas. *Smartphone* dan komputer juga dimanfaatkan untuk berbagi konten multimedia serta berkomunikasi. Walaupun teknologi ini memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan, efektivitas pembelajaran digital sangat bergantung pada keterampilan siswa dan guru dalam menggunakan alat-alat tersebut. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 67 persen pendidik menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan alat digital dan mengelola lingkungan pembelajaran daring.

Orang tua di Indonesia semakin terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka melalui pembelajaran jarak jauh di rumah. Mereka harus menyediakan atau mengunggah pekerjaan rumah ke platform daring, berkolaborasi dengan guru dalam merencanakan pelajaran dan tugas, serta kadang-kadang mengajarkan materi pelajaran secara langsung. Saat pandemi mereda dan pengajaran tatap muka secara bertahap dilanjutkan, orang tua diberikan pilihan untuk mengembalikan anak-anak mereka ke sekolah atau melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Hasil survei menunjukkan bahwa orang tua umumnya puas dengan pilihan ini, meskipun kesiapan sekolah untuk pengajaran tatap muka bervariasi tergantung pada ketersediaan fasilitas yang higienis dan tingkat vaksinasi di antara guru dan siswa.

Pilihan ini juga menegaskan kembali otoritas dan tanggung jawab orang tua dalam membuat keputusan penting berkaitan dengan pendidikan anak-anak mereka. Namun, terdapat ketimpangan dan kesenjangan mengingat perbaikan tidak didistribusikan secara merata di seluruh program dan daerah geografis.

Saat pengajaran tatap muka dilanjutkan pada akhir 2021, beberapa pergeseran dan kesinambungan dalam sistem pendidikan Indonesia menjadi jelas. Keuntungan penggunaan TIK dalam pengajaran dan pembelajaran sangat signifikan, dan beberapa metode digital tetap digunakan di dalam kelas. Pemerintah terus mempromosikan integrasi TIK dalam pendidikan melalui Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.

Para guru dan dosen menemukan konten multimedia sebagai cara yang efektif untuk melibatkan siswa. Platform seperti YouTube dan TikTok sering digunakan untuk berbagi video, sementara alat digital digunakan untuk membuat materi presentasi. Selain itu, teknologi konferensi video memberikan pendidik cara baru untuk terhubung dengan siswa di seluruh dunia, memfasilitasi pelajaran pengganti dan sesi bimbingan tesis. Menurut UNESCO, teknologi ini memungkinkan guru menjangkau siswa yang sulit diakses, mengatasi tantangan seperti lokasi terpencil, sumber daya terbatas, dan masalah fungsional. Dampak pembelajaran daring pada siswa dewasa sangat signifikan karena membantu mereka mengatasi hambatan seperti pekerjaan, tanggung jawab keluarga, keterbatasan finansial, dan jadwal yang tidak nyaman. Para dosen juga mencatat bahwa platform LMS telah menyederhanakan tugas administratif dan dokumentasi sehingga meningkatkan kenyamanan melalui digitalisasi (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pada tahun 2017, pemerintah pusat memperkenalkan kebijakan PPDB, yang ditetapkan melalui Permendikbud No. 17 tahun 2017 dan No. 14 tahun 2018 (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024). Landasan hukum untuk kebijakan penerimaan siswa berbasis zonasi ini terdapat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 11 ayat (1) yang mewajibkan pendidikan yang adil dan tidak diskriminatif bagi semua warga negara. Kebijakan ini didukung lebih lanjut oleh berbagai peraturan dari Kemendikbudristek dan Kemendag.

Tujuan utama dari kebijakan zonasi adalah untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan berdasarkan distribusi geospasial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, mengatasi ketidaksetaraan dalam fasilitas sekolah, infrastruktur, dan tenaga pengajar, sekaligus memerangi diskriminasi dan memastikan keadilan dalam layanan pendidikan.

Kebijakan ini berfokus pada pengurangan disparitas dalam partisipasi pendidikan dan pencapaian ujian antar provinsi dalam rangka upaya untuk menyeimbangkan kualitas dan kuantitas sekolah di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Meskipun upaya ini dilakukan, kesenjangan antara peluang pendidikan di perkotaan dan pedesaan tetap hadir. Rata-rata jumlah tahun sekolah meningkat hanya sedikit—dari 8,5 tahun pada tahun 2017 menjadi 9,13 tahun pada tahun 2023. Selain itu, ketidaksetaraan berdasarkan status ekonomi juga tetap ada dengan perubahan minimal dalam perbedaan durasi pendidikan antara siswa miskin dan kaya.

Memberikan akses yang setara terhadap pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan, bahkan dengan adanya sistem zonasi. Pada tahun 2017, rata-rata tahun sekolah adalah 9,53 tahun di daerah perkotaan dibandingkan dengan 7,3 tahun di daerah pedesaan. Perkiraan untuk tahun 2023 memprediksi sedikit perbaikan, dengan 9,99 tahun di daerah perkotaan dan 7,91 tahun di daerah pedesaan. Namun, kesenjangan pendidikan tetap signifikan, dengan perbedaan 2,08 tahun pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2,23 tahun pada tahun 2017. Sistem zonasi belum secara signifikan mengurangi perbedaan pencapaian pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Begitu pula kebijakan zonasi juga dianggap belum berhasil mengatasi perbedaan pencapaian pendidikan yang didasarkan pada status ekonomi. Meskipun rata-rata lama pendidikan secara nasional meningkat kurang dari satu tahun, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin masih terlihat. Siswa dengan dukungan finansial yang lebih baik cenderung mendapatkan durasi pendidikan yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Akibatnya, siswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki rata-rata masa belajar yang lebih singkat dibandingkan dengan siswa dari keluarga yang lebih sejahtera.

Secara teknis, sistem zonasi rentan terhadap masalah seperti penipuan, termasuk jual beli kursi sekolah, pemalsuan Kartu Keluarga (KK), dan manipulasi penempatan siswa oleh otoritas daerah. Para ahli berpendapat bahwa klaim pemerintah tentang peningkatan kesetaraan dan aksesibilitas pendidikan terhambat oleh ketidaksetaraan yang terus hadir dalam kualitas akademik antar daerah dan pelaksanaan undang-undang zonasi yang tidak konsisten. Kondisi ini tentunya menciptakan tantangan tambahan bagi sektor pendidikan.

Sebuah laporan dari Asosiasi Pendidikan dan Guru, yang diliput oleh BBC Indonesia, menyoroti bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah di Jakarta tidak dapat menghadiri sekolah negeri karena kriteria zonasi yang tidak jelas, meskipun rumah mereka hanya berjarak 500-meter dari sekolah yang ditentukan. Sistem zonasi juga telah berkontribusi pada manipulasi Kartu Keluarga (KK) secara luas, termasuk jual beli kursi sekolah untuk mendapatkan penerimaan.

Tabel 14. Perbandingan Kebijakan Kuota Zonasi 2018-2021

	Permendikbud No. 51 Tahun 2018	Permendikbud No. 20 Tahun 2019	Permendikbud No. 44 Tahun 2019	Permendikbud No. 1 Tahun 2021
Persentase Kuota Zonasi	Minimum 90 persen dari daya tampung sekolah (termasuk kuota untuk siswa yang kurang beruntung dan anak berkebutuhan khusus)	Minimum 80 persen dari daya tampung sekolah	Minimal 50 persen dari daya tampung sekolah	Diferensiasi sistem zonasi di tingkat sekolah <ul style="list-style-type: none"> SD: min. 70 persen dari daya tampung sekolah. SMP: min. 50 persen dari daya tampung sekolah SMA/SMK: min. 50 persen dari daya tampung sekolah Afirmasi siswa (siswa kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus): 15 persen dari daya tampung sekolah
Persentase untuk Kategori Prestasi Siswa	Maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah	Maksimal 15 persen dari daya tampung sekolah	Kuota yang tersisa	Kuota yang tersisa
Persentase untuk Kategori Relokasi Tugas Orang Tua	Maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah	Maksimal 15 persen dari daya tampung sekolah	Maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah	Maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah
Lainnya			Afirmasi siswa (siswa kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus): min. 15 persen dari daya tampung sekolah	

Regulasi PPDB telah mengalami beberapa perubahan antara tahun 2018 hingga 2021 yang berdampak pada kuota dan jalur siswa serta mengindikasikan kurangnya standar yang jelas dalam penerimaan siswa baru. Kuota jalur zonasi telah dikurangi dari 90 persen pada tahun 2018 menjadi 50 persen pada tahun 2021 sementara alokasi untuk jalur prestasi mengalami fluktuasi signifikan sepanjang tahun. Meski demikian, masalah dalam implementasi masih kerap terjadi, termasuk penerapan kebijakan PPDB yang tidak konsisten di berbagai daerah, tantangan dalam standarisasi, penyediaan aplikasi daring, dan sosialisasi.

Dampak terbatas dari kebijakan zonasi terhadap peningkatan indikator pendidikan menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan ini berdasarkan kondisi lokal. Siswa baru sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan tempat di sekolah akibat distribusi sekolah negeri yang tidak merata di berbagai daerah. Selain itu, banyak sekolah negeri masih memiliki kapasitas pendaftaran yang terbatas, yang menyulitkan proses penerimaan. Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan kapasitas sekolah di setiap daerah, di mana jumlah siswa tidak selalu sebanding dengan jumlah sekolah yang ada. Orang tua juga terus berperan dalam memilih sekolah berdasarkan kapasitas, fasilitas, dan standar pengajaran yang berbeda-beda.

Secara umum, terdapat variasi dalam metodologi dan metrik di berbagai daerah. Standarisasi proses PPDB sering kali menghadapi tantangan akibat perbedaan dalam sumber daya manusia dan masalah lokal, seperti kesulitan dalam menyediakan aplikasi PPDB daring, meskipun pengawasan dari Kemendikbudristek dilakukan dengan seksama. Selain itu, sosialisasi kebijakan ini tidak berjalan dengan baik, terbukti dari banyaknya orang tua dan siswa yang tidak mengetahui detail penting seperti peta zonasi sekolah, jumlah lulusan, kepadatan penduduk, usia sekolah yang diharapkan, kapasitas sekolah, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kuota penerimaan baru.

Untuk memastikan bahwa kebijakan zonasi tidak berdampak negatif pada kualitas pendidikan, para pemangku kepentingan di sektor pendidikan harus melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan ini. Penelitian dan pengukuran yang akurat harus menjadi dasar dalam penentuan kuota.

Tantangan dalam manajemen pendidikan dapat dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia yang bervariasi di pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan terkait pendidikan dasar dan menengah telah didelegasikan kepada pemerintah daerah dan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan yang wajib. UU Pemerintah Daerah memberikan regulasi yang lebih rinci tentang pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pendidikan, termasuk manajemen pendidikan, penentuan kurikulum, akreditasi, tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra.

Tabel 15. Pembagian Urusan Pendidikan Pemerintah Pusat dan Daerah

Isu	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi.	Manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus.	Manajemen pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional untuk pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal.	Kurikulum muatan lokal untuk pendidikan menengah dan khusus.	Kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Akreditasi	Akreditasi semua jenjang Pendidikan.	-	-
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian formasi pendidik, transfer pendidik, dan pengembangan karir pendidik.	Pemerintah provinsi dapat melakukan pemindahan pendidik lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.	Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahan pendidik dalam kabupaten/kota.

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (5) tentang Guru dan Dosen menjelaskan persyaratan untuk pengawasan pendidikan di daerah menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat secara umum bertanggung jawab dalam mengelola dan memberikan pendidikan formal. Selain itu, UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) menekankan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan, menjamin infrastruktur, dan mempertahankan pendidikan yang berkualitas tinggi. Ayat (2) lebih lanjut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memperoleh dana yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan bagi semua warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Stunting di Pendidikan Anak Usia Dini

Kesehatan anak merupakan fondasi penting dalam pendidikan anak usia dini, dan tengkes (stunting) menjadi perhatian utama. Dampak stunting terbukti berlangsung lama, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memengaruhi kebutuhan digital siswa di masa depan (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Stunting adalah prediktor kuat dari ketidaksetaraan pendidikan di masa depan dan ketahanan pangan. Survei rumah tangga nasional sering kali mengukur tingkat stunting, dan data terbaru menunjukkan bahwa pandemi telah lebih dari dua kali lipat meningkatkan risiko kelangkaan pangan akut di 53 negara. Upaya lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengatasi kelaparan dalam keluarga dan mencegah tantangan belajar yang dihadapi anak-anak yang terkena stunting.

Beberapa kebijakan mendukung inisiatif ini, termasuk UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif, dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang dimulai pada tahun 2017. Ini mencakup mobilisasi tenaga pengembangan manusia di tingkat desa dan penyediaan materi serta buku panduan tentang stunting untuk para guru (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian adalah kurangnya pengetahuan orang tua tentang stunting. Distribusi tenaga kesehatan masyarakat yang tidak merata menyebabkan beberapa anak tidak mendapatkan intervensi kesehatan dasar. Orang tua sering kali tidak menyadari pentingnya serta komposisi makanan bergizi, dan stunting lebih terkait dengan kurangnya gizi yang memadai daripada sekadar kekurangan makanan.

Laporan Bank Dunia mengenai Pendidikan Orang Tua di Indonesia menyoroti sumber daya yang dapat diakses oleh orang tua dan memberikan wawasan tentang cara mendisiplinkan anak serta dampaknya terhadap pengembangan karakter di Indonesia. Laporan ini menekankan bahwa tantangan dalam pengasuhan tidak hanya terbatas pada perbaikan perilaku, tetapi juga mencakup isu kesehatan dan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung sejak usia dini. Selain itu, laporan ini mengulas tentang *Nurturing Care Framework* dari *World Health Organization* (WHO) yang menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak melalui lima komponen kunci, termasuk kesehatan yang baik dan nutrisi yang tepat.

Pengasuh anak usia dini memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan fisik dan emosional anak-anak yang mereka rawat. Mereka harus memenuhi kebutuhan dasar anak dengan penuh perhatian dan melindungi mereka dari risiko di rumah dan lingkungan. Kesehatan fisik dan emosional pengasuh sangat terkait dengan perilaku esensial ini. Memprioritaskan pencegahan stunting sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan anak-anak. Pendekatan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang nutrisi yang tepat di Indonesia.

Kesehatan ibu dan anak sangat terkait dengan nutrisi yang memadai mengingat pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi sejak tahap prenatal. Ibu hamil harus memprioritaskan berbagai pilihan makanan untuk memastikan anak yang belum lahir mendapatkan diet yang sehat. Kementerian Kesehatan merekomendasikan ASI eksklusif untuk bayi hingga enam bulan, memastikan asupan protein hingga usia dua tahun, dan mempertahankan nutrisi ibu selama kehamilan dan menyusui. Studi Status Gizi Indonesia 2021 mendukung pendekatan ini dalam rangka menunjukkan bahwa stunting dimulai pada awal masa kehamilan dan meningkat secara signifikan antara usia 6 hingga 12 bulan (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Bab III

Peran Aktor Non-Negara



Peran Aktor Non-Negara

Dalam upayanya untuk memperbaiki sistem pendidikan, Indonesia telah menyadari bahwa pencapaian pendidikan berkualitas tinggi tidak dapat sepenuhnya hanya mengandalkan pemerintah. Meskipun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memegang peran sentral dalam merumuskan kebijakan dan mengelola sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Entitas non-negara, seperti guru, orang tua, pelaku bisnis, *corporate social responsibility* (CSR), dan organisasi masyarakat, sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktiknya. Pengetahuan dan sumber daya lokal mereka memperkaya sistem pendidikan yang sudah ada sehingga dapat memastikan reformasi sektor pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa.

Desentralisasi pendidikan semakin menekankan pentingnya kemitraan antar lembaga pemerintah dan aktor non-negara. Pemerintah daerah dan organisasi lokal memiliki posisi unik untuk menghadapi tantangan daerah sehingga kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-negara menjadi krusial untuk mencapai hasil pendidikan yang bermakna. Bab ini mengeksplorasi peran spesifik para kontributor non-negara dengan fokus khusus pada bagaimana guru, orang tua, pelaku bisnis, dan organisasi masyarakat yang berperan penting dalam membentuk masa depan pendidikan di Indonesia.



Dunia pendidikan tak lepas dari para pengajar alias guru, para pejuang tulus tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

- Ki Hajar Dewantara

A. Guru

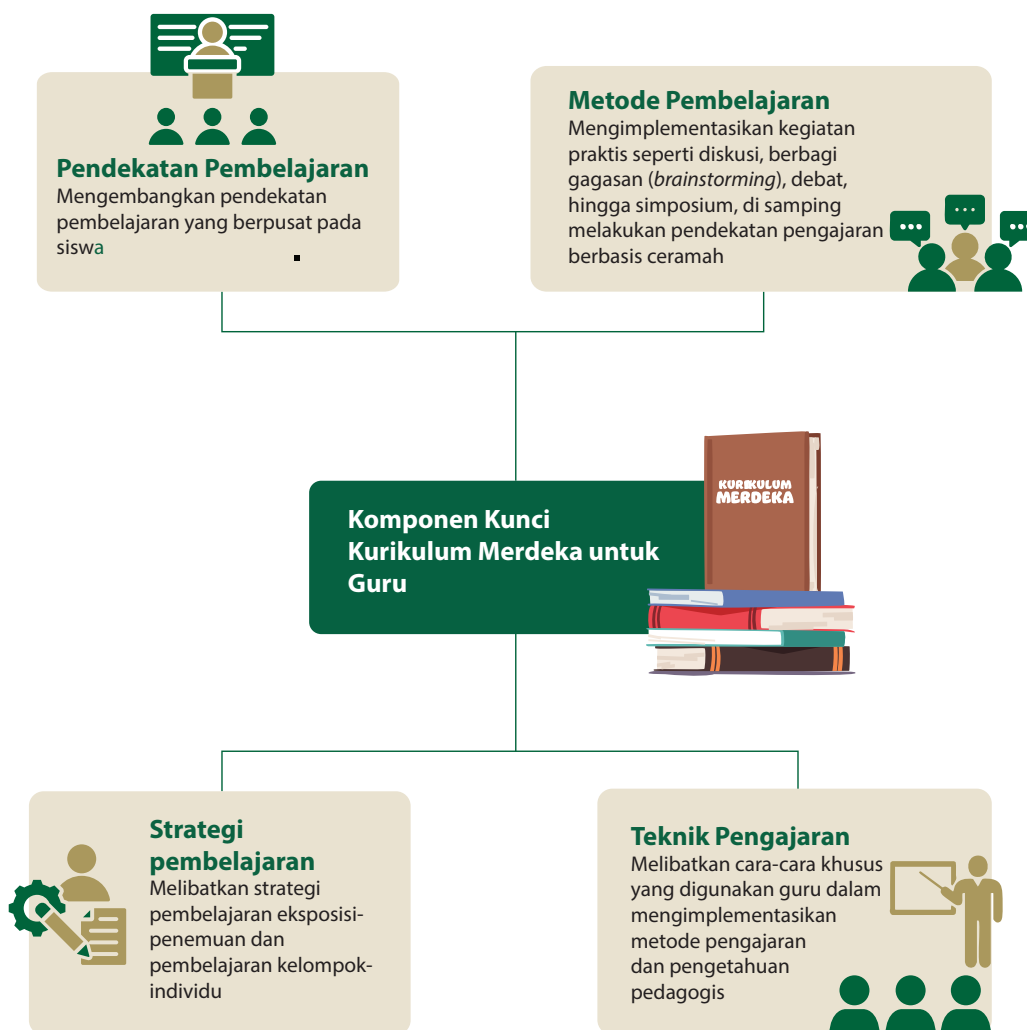
Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam dunia pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Mereka berada di garis terdepan, membentuk masa depan dengan memberikan pendidikan dengan standar mutu yang semakin tinggi. Melalui wawasan dan pengalaman mereka, guru menjadi jembatan yang menghubungkan para pembuat kebijakan dengan realitas di kelas dalam rangka membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan. Mereka memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan siswa dan meningkatkan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Sejak Kemendikbudristek memperkenalkan Kurikulum Merdeka, semakin jelas bahwa guru adalah penggerak utama dalam pelaksanaan kurikulum ini. Oleh karena itu, prioritas utama harus diberikan pada ketersediaan guru dan menjaga standar pengajaran yang tinggi. Di era teknologi yang berkembang pesat, pendidik dan staf sekolah juga diharapkan mahir menggunakan infrastruktur TIK dan mengikuti perkembangan teknologi.

Guru memiliki peran kunci dalam membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dalam kerangka Kurikulum Merdeka dengan mengidentifikasi minat dan kebutuhan belajar siswa. Kurikulum ini menekankan pentingnya kemampuan guru untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian siswa. Menurut Kemendikbudristek, guru harus memiliki keterampilan kreatif untuk mengimplementasikan kurikulum ini.

Sejak diperkenalkannya Kurikulum Merdeka, semakin terlihat bahwa guru berada di garis depan dalam revolusi pendidikan ini. Memprioritaskan ketersediaan guru sambil menjaga standar pengajaran yang tinggi sangat penting sangat perlu untuk dilaksanakan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pendidik dan staf sekolah juga harus menguasai infrastruktur TIK.

Gambar 11. Kerangka Kurikulum Merdeka



(Tanoto Foundation & CIPS, 2024)

Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, guru memainkan peran penting dalam membantu siswa membuka potensi penuh mereka dengan memahami minat dan kebutuhan belajar. Kurikulum inovatif ini sangat menekankan kemampuan guru untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian siswa. Menurut Kemendikbudristek, komponen kreatif sangat dibutuhkan oleh guru untuk mengajarkan kurikulum ini dengan efektif, sebagaimana dijelaskan dalam gambar 11.

Pendekatan ini menekankan bahwa tanggung jawab guru tidak hanya terbatas pada mendorong kreativitas, memfasilitasi pembelajaran aktif, dan memperkuat karakter—mereka juga memiliki tugas penting untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada para siswa. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan konteks lokal sehingga memungkinkan siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan lingkungan mereka sendiri. Guru berperan vital dalam menumbuhkan kemandirian siswa sehingga membantu mereka menjadi pembelajar mandiri yang mampu mengelola sumber pelajaran mereka sendiri.

Dengan dorongan Kemendikbudristek untuk lebih banyak berinovasi dalam kegiatan pembelajaran, keberhasilan pengajaran semakin bergantung pada kreativitas para pendidik, terutama dalam memanfaatkan alat digital dan multimedia. Pergeseran ini menyoroti kebutuhan akan guru yang terampil, yang mampu mengintegrasikan elemen interaktif dan multimedia ke dalam pelajaran mereka sehingga meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan siswa. Namun, proses seleksi guru saat ini menghadirkan tantangan signifikan dalam menghasilkan pendidik berkualitas tinggi.

Terdapat beberapa isu memengaruhi kontribusi guru Indonesia terhadap sektor pendidikan, termasuk proses rekrutmen, uji kompetensi, dan pemeliharaan kualitas. Isu-isu ini perlu mendapatkan perhatian untuk menentukan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada peningkatan pendidikan di Indonesia.

Rekrutmen Guru: Faktor Pendorong Perubahan

Seiring dengan prioritas Indonesia pada pembangunan ekonomi, perlu ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas rekrutmen guru. Calon guru sekolah negeri diwajibkan untuk lulus tes rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan secara lokal oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Pada tahun 2013, sistem tes berbasis komputer (*computer assisted test/CAT*) menggantikan ujian berbasis kertas. Meskipun sistem ini menyederhanakan proses rekrutmen dan mengurangi potensi korupsi, sistem ini tidak memperhitungkan kebutuhan beragam dari berbagai daerah yang berbeda-beda.

Semua pelamar pegawai negeri, tanpa memandang profesi, harus mengikuti tes kompetensi dasar yang sama, seperti kewarganegaraan, psikologi, dan kecerdasan umum, dengan nilai kelulusan yang sama. Tiga kandidat teratas dari setiap seleksinya akan dilanjutkan ke tahap tes spesifik bidang dengan calon guru mengikuti ujian tentang pedagogi dan pengetahuan konten. Namun, proses ini masih mengalami kekurangan khususnya dalam hal penilaian praktis seperti *micro-teaching* atau wawancara. Pada akhirnya, pencetak skor tertinggi diangkat sebagai guru PNS magang yang berpotensi mendapatkan masa jabatan seumur hidup.

Meskipun langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan, kekurangan guru masih terjadi di banyak wilayah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengakali regulasi dengan membiarkan sekolah merekrut guru secara mandiri yang mayoritasnya melalui kontrak. Berbeda dengan guru PNS yang harus melalui serangkaian tes untuk mendapatkan pekerjaan, guru kontrak direkrut secara informal oleh sekolah. Guru kontrak dibayar dari anggaran sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang diterima sekolah langsung dari pemerintah pusat. Namun, gaji guru kontrak masih lebih rendah dibandingkan dengan guru PNS, meski memiliki tanggung jawab yang sama (Huang, Revina, Fillaili, & Akhmadi, 2020).

Bagaimana Regulasi Diterapkan?

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepenuhnya mengubah proses rekrutmen dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), pemerintah daerah, dan sekolah-sekolah. Upaya kolaboratif ini memastikan kekosongan guru diisi melalui berbagai proses seleksi, kriteria, dan sumber pendanaan untuk gaji. Rekrutmen mencakup pengangkatan PNS dan guru "honoror" yang sayangnya menerima gaji lebih rendah.

Perubahan signifikan dalam pendanaan terjadi, seperti peningkatan alokasi Dana BOS untuk rekrutmen guru dari yang awalnya sebesar 15 persen menjadi 50 persen (Permendikbud No. 8 Tahun 2020). Selain itu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dan Permendikbud No. 20 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota dan provinsi untuk menilai kebutuhan mereka akan guru PNS dan tenaga pendidik. Langkah-langkah legislatif, termasuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, Permendikbud No. 8 Tahun 2009 dan No. 87 Tahun 2013, menetapkan standar baru untuk pelatihan pra-jabatan guru dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berfungsi sebagai mekanisme penjaminan kualitas (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Apa Saja Hambatannya?

Kompleksitas manajemen guru di Indonesia sangat terkait dengan tantangan lebih luas yang dihadapi oleh sistem pendidikan negara ini. Efektivitas sistem ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor mendasar yang secara kolektif membentuk bagaimana guru dikelola, direkrut, dan didistribusikan di seluruh wilayah. Sebagai tulang punggung kualitas pendidikan, guru memainkan peran penting dalam membentuk masa depan generasi muda bangsa, namun kerangka kerja yang mengatur manajemen mereka saat ini mengungkapkan banyak area yang memerlukan perbaikan. Area-area ini tidak hanya mencakup proses dan struktur yang ada, tetapi juga kebijakan yang mengarahkan tata cara rekrutmen, pengembangan, dan distribusi guru. Berbagai hambatan yang menghalangi manajemen guru menunjukkan adanya area yang perlu ditingkatkan dalam manajemen guru dan pendidikan. Hambatan-hambatan tersebut termasuk:

Tabel 16. Hambatan Manajemen Guru

<p>Pemantauan dan Evaluasi yang Tidak Efisien</p>	<p>Kinerja guru dan program sertifikasi tidak secara konsisten dipantau atau dievaluasi di tingkat daerah. Kurangnya pengawasan ini menyulitkan upaya untuk memastikan bahwa para guru memenuhi standar yang disyaratkan dan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan mereka.</p>
<p>Politisasi Proses Rekrutmen</p>	<p>Perekrutan guru PNS sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan dikoordinasikan oleh lima kementerian. Kemendikbud berfokus pada perekrutan guru umum, sementara Kemenag menangani perekrutan khusus untuk guru madrasah. Selain itu, Kemendikbud juga mengawasi perekrutan guru honorer dengan berkolaborasi dengan KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri.</p>
<p>Kekurangan Guru dan Nepotisme</p>	<p>Distribusi guru tidak secara efektif mengatasi kekurangan guru, yang sering kali disebabkan oleh penunjukan guru yang dipolitisasi di tingkat daerah yang didasarkan pada nepotisme. Hal ini menyebabkan beberapa daerah kelebihan guru, sementara daerah lain mengalami kekurangan guru yang signifikan sehingga berdampak pada kualitas pendidikan.</p>
<p>Tumpang Tindih Peraturan</p>	<p>Terdapat banyak peraturan yang tumpang tindih dan ambigu terkait status kepegawaian informal (guru honorer dan guru kontrak), serta promosi dan distribusi guru. Kerumitan ini melemahkan upaya untuk mengatasi kekurangan guru yang diperburuk dengan penunjukan guru yang dipolitisasi dan didorong oleh nepotisme di tingkat lokal.</p>

(Tanoto Foundation & CIPS, 2024)

Selain itu, terdapat kekurangan guru berkualifikasi di kelas. Jumlah lulusan dari program pendidikan guru di universitas yang rendah telah menyebabkan penurunan jumlah pengajar bersertifikat. Untuk diakui oleh pemerintah sebagai tenaga pendidik profesional—yakni, memperoleh gelar sarjana dan menyelesaikan program pendidikan guru—guru harus mendapatkan sertifikasi ini. Lebih lanjut, hal ini juga berdampak pada kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan sertifikasi sebesar satu bulan gaji pokok, asalkan mereka memenuhi standar beban kerja yang ditetapkan.

Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa sekitar 70.000 guru pensiun setiap tahun. Dari tahun 2009 hingga 2021, sebanyak 30.898 guru lulus dari program pendidikan guru, yang kini tersebar di seluruh Indonesia³⁹. Akibatnya, jumlah guru bersertifikat menurun menjadi 1.274.486 guru pada tahun 2023, dari 1.392.155 guru pada tahun 2019 (Napitupulu, 2024).

Selain itu, program pendidikan guru memiliki beberapa keterbatasan. Motivasi mahasiswa menurun karena Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajabatan) lebih banyak berfokus pada metode pengajaran daripada pembelajaran siswa. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) belum diatur secara optimal untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan serta memulai pemberian bantuan teknis dan konsultasi kepada guru yang baru direkrut. Peserta PPG merasa bahwa program ini belum cukup meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan membuat materi pembelajaran serta evaluasi untuk meningkatkan keterampilan membaca dan numerasi siswa. Kekurangan ini berdampak besar pada hasil kemampuan membaca dan numerasi siswa Indonesia (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

³⁹ Data dari Kemendikbudristek pada tahun 2024 menunjukkan bahwa secara nasional terdapat kekurangan guru sebanyak 150.095 orang, termasuk 140.845 guru untuk sekolah negeri dan 9.250 guru untuk sekolah swasta. Untuk mengatasi kekurangan ini, terutama di sekolah negeri, pemerintah merekrut guru pemerintah berbasis kontrak dari kalangan guru honorer. Ketika mengganti guru yang pensiun, prioritas diberikan kepada lulusan program pendidikan guru pra jabatan (Napitupulu, 2024).

Kotak 2. Uji Kompetensi Guru

UJI KOMPETENSI GURU

Guru dalam Jabatan

Sejak Uji Kompetensi Guru dilakukan terpusat pada tahun 2018 berakhir, guru dalam jabatan harus menghadapi sistem pelatihan yang terfragmentasi melalui berbagai inisiatif. Tes terpusat tersebut telah digantikan oleh beberapa langkah: pemantauan kualitas pengajaran dan lingkungan sekolah melalui Asesmen Nasional (AN), evaluasi kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPG dalam Jabatan), serta tes kompetensi yang dipimpin oleh pemerintah daerah. Biro Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), telah meluncurkan tes terstandar tambahan yang berfokus pada karakter dan ideologi untuk guru dalam jabatan. Namun, skema pelatihan profesional utama menargetkan kepala sekolah dan 'champions'—individu berkinerja tinggi seperti mereka yang ada dalam program Guru Penggerak.

Guru Prajabatan

Penilaian guru prajabatan dikelola melalui program PPG Prajabatan. Tantangan utamanya bukanlah uji kemampuan, melainkan mencocokkan peserta PPG dengan kebutuhan lokal secara efisien serta menarik pelamar terbaik. Selain itu, guru prajabatan harus menjalani ujian terstandar yang dikembangkan oleh Biro Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Tes ini berfungsi sebagai alat penyaringan awal sebelum pendidikan profesional dan sebagai pemeriksaan kompetensi setelahnya, yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi mengajar.

Meskipun terdapat penilaian terstruktur ini, Pendidikan Prajabatan melalui PPG masih kesulitan meningkatkan keterampilan pedagogi guru secara lengkap, terutama dalam menciptakan materi pembelajaran yang relevan yang menghadapi tantangan masa depan dalam hal literasi, numerasi, keterampilan digital, serta kompetensi abad ke-21 lainnya, termasuk komunikasi dan pemikiran kritis. Masalah ini semakin diperburuk dengan efektivitas terbatas LPTK dalam mengawasi penerapan praktis keterampilan ini di lapangan, serta memberikan bimbingan dan konsultasi yang diperlukan bagi para pendidik baru. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam persiapan guru yang tidak hanya menilai kompetensi, tetapi juga mendukung pengembangan profesional berkelanjutan dan adaptasi terhadap tuntutan pendidikan yang terus berkembang.

(Tanoto Foundation & CIPS, 2024)

Apa Saja Peluangnya?

Dalam ekosistem pendidikan, guru adalah fondasi dalam membentuk generasi masa depan yang terampil dan kompetitif. Tanpa guru berkualitas, pendidikan bagaikan hidangan tanpa rasa. Pengajaran yang efektif adalah dasar dari kemajuan pendidikan. Untuk meningkatkan standar pendidikan, pemerintah harus memprioritaskan investasi pada guru dengan fokus pada rekrutmen, distribusi, pengembangan profesional, dan kemajuan karier.

Sudah saatnya semua tingkatan pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya penting guna meningkatkan kualitas guru. Investasi ini harus dilihat sebagai kebutuhan mendesak, bukan hanya sekadar pos anggaran. Membangun sumber daya manusia, terutama guru, sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Investasi pada guru dapat dilakukan dengan tiga cara:

- 1. Memberikan Kompensasi yang Memadai:** Memastikan gaji dan tunjangan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka
- 2. Meningkatkan Keterampilan Profesional:** Memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan mereka
- 3. Menjamin Perlindungan Hukum:** Memastikan perlindungan hukum yang jelas bagi guru dalam menjalankan tugasnya (Oktavian, 2024)



Urgensi Meningkatkan Kualitas Guru

Kualitas pendidikan terhambat oleh beberapa faktor, termasuk kredensial guru, komposisi, dan kebutuhan untuk pengajaran lebih dari satu kelas. Hanya 18 persen kepala sekolah dan 34 persen guru yang memiliki ijazah sekolah menengah atas. Selain itu, tenaga pengajar juga terbagi antara 40 persen guru tetap berstatus pegawai negeri dan 40 persen guru kontrak jangka pendek (42,5 persen direkrut oleh sekolah dan 15,8 persen oleh kabupaten/kota atau provinsi).

Guru kontrak, yang direkrut oleh sekolah, hanya mendapatkan sekitar Rp 600.000 per bulan, sedangkan guru tetap menghasilkan rata-rata sekitar Rp 9.000.000. Guru kontrak sering kali kurang memiliki kualifikasi dan mungkin bekerja di beberapa pekerjaan di luar sekolah. Rasio perbandingan antara jumlah kelas dan siswa memang sudah sesuai dengan aturan nasional (20 siswa di daerah yang disurvei dibandingkan dengan 23 secara nasional), namun guru sering menggantikan rekan kerja yang absen dan diharuskan mengajar beberapa kelas (25 persen sekolah) meskipun tidak memiliki pelatihan yang memadai.

Menurut laporan Bank Dunia, 25 persen kelas di semua sekolah di Indonesia tidak memiliki guru. Dalam beberapa kasus, siswa diminta menyalin pekerjaan rumah matematika untuk teman-teman mereka saat guru tidak hadir. Ketidakhadiran guru secara signifikan menghambat pembelajaran siswa, menjadikannya masalah yang kritis. Kunjungan mendadak ke sekolah-sekolah yang disurvei mengungkapkan bahwa 17 persen guru absen pada hari tertentu, dan 25 persen kelas tidak memiliki guru (Susanti, Priebe, & Bah, 2020).

Meningkatkan jumlah guru tidak akan meningkatkan hasil pembelajaran jika kualitas guru tetap rendah. Bukti dari daerah yang lebih maju menunjukkan bahwa peningkatan jumlah guru tidak selalu meningkatkan hasil pembelajaran karena masukan pendidikan yang tidak berubah (Das, et al., 2013). Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru harus dimulai dengan mengorganisir lembaga pelatihan guru, rekrutmen berbasis prestasi, dan distribusi guru yang merata. Meskipun pelatihan guru sangat penting, pelatihan tersebut harus terkait erat dengan peningkatan kinerja dan hasil pembelajaran. Pelatihan tentang pemahaman kurikulum dan metode pengajaran yang efektif harus disesuaikan dengan kapasitas beragam para guru (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Kotak 3. Pendidikan ‘Guru Penggerak’

Pendidikan ‘Guru Penggerak’

Pendidikan Guru Penggerak adalah program kepemimpinan dinamis yang dirancang untuk menciptakan guru sebagai pelopor pembelajaran. Inisiatif ini mencakup perpaduan antara pelatihan daring, lokakarya interaktif, konferensi inspiratif, dan enam bulan pendampingan langsung bagi para calon Pemimpin Guru. Sepanjang program, para pendidik tetap melanjutkan peran mengajar mereka sehingga pertumbuhan mereka sejalan dengan komitmen yang berkelanjutan kepada siswa.

Selaras dengan perkembangan program ini, Kemendikbudristek telah mengeluarkan Peraturan No. 40 tahun 2021 dan No. 26 tahun 2022 yang menjadikan Pendidikan Guru Penggerak sebagai landasan utama dalam membina pemimpin pendidikan, khususnya kepala sekolah dan pengawas.

Pelatihan ini memberdayakan para pendidik untuk membangun lingkungan yang mendukung pengembangan siswa secara holistik dan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Program ini mendukung prinsip-prinsip penting seperti andragogi, pembelajaran berdasarkan pengalaman, kolaborasi, dan refleksi.

Pendidikan Guru Penggerak berfokus pada tiga area utama: pembelajaran yang terdiferensiasi, komunitas praktisi, dan pembelajaran sosial-emosional. Evaluasi meliputi tugas, praktik peserta, umpan balik dari rekan sejawat, fasilitator, dan kepala sekolah, serta peningkatan hasil belajar siswa.

Pada tahun 2024 (Angkatan ke-8), Indonesia telah membina 49.733 Guru Penggerak dan 43.930 calon Guru Penggerak dengan lebih dari 9.000 di antaranya melangkah maju sebagai kepala sekolah dan pengawas. Bayangkan jika masa depan ketika setiap pemimpin sekolah menjadi agen perubahan—memecahkan masalah, berkolaborasi dengan efektif, mengedepankan pembelajaran seumur hidup, memperjuangkan kesetaraan, dan berjuang tanpa henti demi siswa. Jika hal tersebut terwujud maka lanskap pendidikan kita tentu akan bersinar.

(Kemendikbudristek, n.d.)



B. Partisipasi Orang Tua

Pembelajaran dimulai dari rumah ketika lingkaran utama kehidupan seorang anak menjadi ajang bagi proses pendidikan dan perkembangan dini. Fondasi ini diperkuat di prasekolah ketika interaksi dan pengalaman awal membentuk dasar pembelajaran dasar. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting saat anak-anak mereka memulai prasekolah dan melangkah ke jenjang sekolah dasar.

Orang tua berada di pusat perkembangan optimal anak-anak mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih, mereka tidak hanya membuat anak-anak merasa aman, tapi juga mendorong pertumbuhan fisik dan emosional yang sehat. Keterlibatan aktif dalam permainan dan kegiatan belajar di rumah sangat penting untuk memicu perkembangan otak anak.

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan orang tua yang terlibat dalam keseharian mereka cenderung memiliki kehadiran yang lebih baik, perilaku yang lebih baik, kinerja akademik yang lebih tinggi, keterampilan sosial yang lebih kuat, dan adaptasi sekolah yang lebih baik secara keseluruhan. Ketika orang tua terlibat, siswa lebih kecil kemungkinannya untuk membolos sekolah, menunjukkan perilaku yang lebih baik, dan membangun hubungan positif dengan guru yang semuanya meningkatkan prestasi siswa dan berkontribusi pada pengambilan keputusan sekolah yang lebih efektif.

Nutrisi juga sama pentingnya bagi pertumbuhan anak. Orang tua perlu memastikan anak-anak mereka mendapatkan makanan bergizi, olahraga teratur, dan tidur yang cukup untuk mendukung perkembangan mereka.

Di Indonesia, hubungan orang tua-anak sering menekankan kepatuhan dan harmoni sosial. Keterikatan keluarga yang kuat adalah hal yang umum, dengan kakek-nenek sering membantu mengasuh anak saat orang tua bekerja. Warisan budaya memainkan peran penting ketika orang tua fokus menanamkan rasa identitas melalui nilai-nilai dan norma-norma komunitas. Meskipun faktor geografis, ekonomi, dan budaya memengaruhi setiap keluarga, tren umum ini konsisten dalam banyak evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kualitas pola asuh dalam keluarga Indonesia sangat penting bagi perkembangan anak usia dini. Perilaku pengasuhan yang positif memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik anak, bahkan sering kali lebih besar daripada tingkat pendidikan atau kekayaan orang tua (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Bagaimana Regulasi Diterapkan?

Pada tahun 2015, Kemendikbudristek meluncurkan divisi baru: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Divisi ini bertugas mengawasi masalah pendidikan keluarga dan pengasuhan anak. Berdasarkan wewenang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Peraturan Mendikbud No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga bertanggung jawab atas berbagai program utama, termasuk mengatasi perundungan, membimbing remaja melalui tantangan, meningkatkan prestasi akademik, memberikan pendidikan keterampilan hidup, membina pengembangan karakter, serta mendidik tentang perilaku yang merugikan.

Keterlibatan keluarga dalam pendidikan sangat penting, terutama pada tahap anak usia dini. Pada tahun 1965, pemerintah berperan penting dalam mendirikan *Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (CECCEP)*. Badan regional ini mempromosikan kerja sama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya di seluruh Asia Tenggara. SEAMEO CECCEP berfokus pada memajukan praktik terbaik dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keluarga melalui penelitian, peningkatan kapasitas, dan advokasi.

Pada periode 2017-2020, Indonesia memiliki fokus yang signifikan dalam meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan melalui Peraturan Mendikbud No. 30 Tahun 2017. Peraturan ini menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam mencapai pendidikan berkualitas, baik di sekolah maupun di rumah (Tanoto Foundation & CIPS, 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai lima tujuan utama: mendorong tanggung jawab bersama antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat; memperkuat pendidikan karakter; meningkatkan kesadaran dan keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak-anak mereka; mempromosikan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat; serta memastikan lingkungan sekolah yang aman.

Untuk mencapai tujuan ini, peraturan tersebut menguraikan sepuluh kegiatan utama untuk keluarga, di antaranya:

Menghadiri rapat sekolah	Bergabung dalam komite sekolah
Berpartisipasi dalam lokakarya pengasuhan anak	Berpartisipasi dalam program komite sekolah
Menjadi pembicara atau sukarelawan dalam acara sekolah	Terlibat dalam inisiatif untuk mencegah tindak kekerasan
Ikut serta dalam program sekolah pada tahun sebelumnya	Ikut serta dalam pencegahan pornografi dan penyalahgunaan zat
Terlibat dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler	Berpartisipasi dalam kegiatan Program Pembinaan Karakter Anak di satuan

Pendekatan yang komprehensif ini menyoroti peran penting keterlibatan orang tua dalam mencapai keberhasilan pendidikan dan membangun komunitas kolaboratif yang berdedikasi untuk pengembangan siswa.

Dengan diberlakukannya Peraturan Mendikbud No. 9 Tahun 2020, penekanan pada pendidikan orang tua mengalami perubahan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, termasuk Sub Direktorat Pendidikan Orang Tua, telah dibubarkan. Perubahan ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pendidikan orang tua sebagai komponen penting dalam pembelajaran siswa di semua jenjang pendidikan, termasuk melampaui fokus sebelumnya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Peran Orang Tua dalam Perkembangan Anak Usia Dini

Pendidikan dan pengasuhan dari lahir hingga usia enam tahun tidak hanya penting untuk memaksimalkan dampak pendidikan yang dapat diberikan PAUD, tetapi juga vital dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, gizi, dan perlindungan di rumah. Hal ini menyoroti perlunya program pengasuhan yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan optimal setiap anak. Program-program ini harus meningkatkan perkembangan motorik dan emosional sambil memastikan kesejahteraan secara menyeluruh ketika anak-anak mencapai tonggak perkembangan penting.

Namun, masih ada hambatan signifikan dalam penerapan program Perkembangan Anak Usia Dini. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami pentingnya PAUD sebagai landasan masa depan anak-anak mereka dikarenakan tantangan ekonomi dan kurangnya pemahaman. Koordinasi antarlembaga yang efektif serta pendekatan yang sensitif secara budaya sangat penting untuk meningkatkan akses dan efektivitas program-program ini di berbagai wilayah.

Tantangan seperti stunting dan kebutuhan kesehatan ibu yang belum terpenuhi menekankan perlunya pendekatan holistik dalam pendidikan dan kesehatan anak usia dini. Orang tua memainkan peran penting yang tidak hanya terbatas pada pendidikan tetapi juga dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan seluruh keluarga.

Oleh karena itu, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam PAUD tidak hanya tentang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dini, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki akses yang setara terhadap lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Gambar 12. Faktor Kunci untuk Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Indonesia



- 1 Kehangatan dalam kaitannya dengan menghabiskan waktu berkualitas secara teratur dengan anak-anak
- 2 Konsistensi yang merefleksikan frekuensi anak mengabaikan hukuman ketika orang tua mendisiplinkan anak mereka
- 3 Permusuhan yang mengukur frekuensi marah kepada anak Anda (Andina, 2015)

Tabel 17. Apa Saja Tantangannya?

Ketidakpastian Otonomi Komite Sekolah	Komite sekolah sering kali tidak memiliki otonomi yang jelas dan dianggap sejalan dengan keputusan institusi, sehingga membatasi keefektifan mereka dalam melibatkan orang tua.
Kontribusi Orang Tua yang Terabaikan terhadap Kurikulum	Masukan potensial dari orang tua ke dalam kurikulum sekolah sering kali diabaikan, sehingga membatasi keterlibatan mereka hanya pada dukungan di rumah, dan kendala bahasa semakin menghambat keterlibatan orang tua yang tidak fasih berbahasa Inggris.
Dampak Tantangan Sosial Ekonomi	Orang tua yang memiliki komitmen kerja dan kesulitan sosial-ekonomi sering kali mengurangi keterlibatan mereka di rumah yang berdampak negatif pada retensi sekolah anak-anak mereka.
Perlunya Revitalisasi Pendidikan Keluarga⁴⁰	Meningkatkan pendidikan keluarga sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya belajar dalam keluarga yang sangat penting untuk PAUD dan perkembangan anak secara keseluruhan.
Tantangan dalam Partisipasi PAUD	Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya PAUD berdampak negatif pada tingkat partisipasi. Meskipun beberapa orang tua memahami dan mendaftarkan anak-anak mereka dalam program-program ini, orang tua lainnya menganggap program-program ini sebagai program non-formal dan meremehkan pentingnya program ini. Kesenjangan ini berdampak pada partisipasi dan kemajuan menuju Visi Indonesia Emas 2045 secara keseluruhan.

(Tanoto Foundation & CIPS, 2024)

Pendidikan pengasuhan sangat penting karena orang tua memegang peran yang langsung dan berpengaruh dalam kesejahteraan anak-anak mereka, jauh melebihi guru, teman, atau pengasuh lainnya. Agar anak-anak dapat berkembang secara optimal, mereka membutuhkan setidaknya satu orang dewasa yang penuh perhatian dan kasih sayang, yang menghargai dan mendukung tumbuh kembang mereka. Pengasuh utama ini haruslah seseorang yang dapat dipercaya dan diandalkan anak untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan perkembangannya. Kepedulian yang sejati tidak hanya mencakup menjaga anak tetap aman, tetapi juga merawat kesehatan fisik dan emosional mereka, terlibat dalam interaksi yang bermakna, memberikan kasih sayang, serta menyediakan peluang untuk eksplorasi, rasa ingin tahu, dan pemecahan masalah. Interaksi-interaksi ini membantu anak-anak mengembangkan keterampilan penting seperti kemampuan fisik, kompetensi sosial-emosional, bahasa, keterampilan kognitif, nilai-nilai moral, dan spiritualitas. Dalam konteks ini, "orang tua" mencakup ibu, ayah, nenek, atau pengasuh utama yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

Ketika memperbaiki kehidupan anak-anak sangat penting, tidak kalah pentingnya untuk mengakui bahwa orang tua juga memerlukan perhatian dan dukungan. Orang tua sering kali menghadapi tantangan dan ketidakpastian sehingga membutuhkan bantuan terlepas dari lokasi, pendidikan, atau kekayaan mereka. Mereka yang paling kurang beruntung memerlukan dukungan paling besar. Investasi pada orang tua—melalui sumber daya finansial,

⁴⁰ Dengan demikian, satuan PAUD dapat membina kerja sama dengan orang tua melalui unit-unit layanan masyarakat seperti Posyandu, Puskesmas, Bina Keluarga Balita, dan sebagainya.

bimbingan intelektual, dan dukungan emosional—memberikan manfaat langsung kepada mereka. Ketika orang tua memperkuat hubungan mereka, membangun kepercayaan diri, dan meningkatkan keterampilan mereka, mereka memberikan dampak positif pada kehidupan anak-anak mereka, memperkuat keluarga mereka, dan mengangkat komunitas mereka baik saat ini maupun di masa depan (Andina, 2015).

Mendukung Perjalanan Menuju Pendidikan Lanjut: Peran Orang Tua yang Tak Lekang oleh Waktu

Ketika anak-anak melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah dasar, keterlibatan orang tua bergeser pada pemilihan sekolah yang tepat dan memastikan anak-anak mereka beradaptasi dengan baik terhadap pendidikan formal. Mereka membantu menetapkan rutinitas yang mendukung keberhasilan akademik, berkomunikasi secara teratur dengan guru, dan memantau kemajuan anak-anak mereka. Orang tua juga turut terlibat dalam kegiatan seperti membantu pekerjaan rumah, menghadiri acara sekolah, dan berpartisipasi dalam pertemuan orang tua-guru. Dukungan yang mereka tunjukkan tersebut membantu memperkuat pembelajaran yang terjadi di kelas dan menangani tantangan perkembangan atau pendidikan sejak dini.

Di jenjang pendidikan menengah, peran orang tua lebih terfokus pada membimbing anak-anak mereka menghadapi kompleksitas masa remaja dan pengambilan keputusan akademik. Orang tua membantu memilih program sekolah menengah yang sesuai dengan minat dan aspirasi karier anak-anak mereka, baik itu melalui jalur akademik khusus maupun pelatihan kejuruan. Mereka perlu terus mendukung pembelajaran anak-anak mereka dengan mendorong kebiasaan belajar yang efektif, mengelola stres, dan memberikan motivasi. Orang tua juga terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang memainkan peran penting dalam pengembangan keseluruhan anak-anak mereka dan persiapan untuk masuk perguruan tinggi.

Saat siswa mendekati pendidikan tinggi, peran orang tua beradaptasi dengan memberikan nasihat mengenai pilihan perguruan tinggi atau pelatihan kejuruan membantu proses aplikasi, dan mendukung perencanaan keuangan keluarga mereka secara keseluruhan untuk masa selanjutnya. Mereka dapat memberikan dukungan emosional selama periode transisi yang kritis ini dalam rangka membantu anak-anak mereka mengatasi tantangan pendidikan tinggi dan perencanaan karier. Keterlibatan berkelanjutan ini sangat penting karena memengaruhi pilihan, ketangguhan, dan kesuksesan siswa dalam mengejar pendidikan akademik dan profesional mereka.

Sepanjang setiap tahap pendidikan, mulai dari PAUD hingga pendidikan lanjutan, partisipasi aktif orang tua memiliki dampak signifikan pada pencapaian akademik dan pertumbuhan pribadi anak-anak mereka. Dengan tetap terlibat dan mendukung, orang tua membantu anak-anak mereka membangun fondasi yang kuat untuk pembelajaran sepanjang hayat dan kesuksesan.

Apa Saja Peluangnya?

Orang tua semakin penting untuk menjadi aktor kunci dalam mendorong keterlibatan komunitas dalam pendidikan berkat ekosistem pendidikan Indonesia yang menekankan kerja sama antar pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, sekolah, dan orang tua. Seiring dengan semakin umumnya penggunaan pembelajaran jarak jauh, keterlibatan orang tua meningkat dengan orang tua secara aktif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah dan membangkitkan minat mereka terhadap pendidikan.

Tingginya angka putus sekolah dan meningkatnya angka pernikahan anak menunjukkan dampak dari kurangnya keterlibatan orang tua, terutama di daerah 3T. Kurangnya keterlibatan ini tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga dapat menghambat perkembangan anak secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, Kemendikbudristek mendorong orang tua untuk mengamati dan mendiskusikan peraturan sekolah yang memengaruhi anak-anak mereka. Dengan kata lain, komite sekolah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi keterlibatan ini (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Orang tua, anggota komunitas, dan spesialis pendidikan sering kali membentuk komite sekolah yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Awalnya, peran komite sekolah terbatas pada upaya penggalangan dana. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan manajemen berbasis sekolah, tanggung jawab komite berkembang untuk mencakup pengembangan aspirasi, mendorong keterlibatan komunitas, dan mendukung administrasi yang transparan atas sumber daya pendidikan.

Menurut Peraturan Mendikbudristek No. 75 Tahun 2016, peran Komite Sekolah secara eksplisit diuraikan yang termasuk partisipasi dalam pengambilan kebijakan sekolah, penggalangan dana, mengawasi layanan pendidikan, dan menanggapi masukan dari siswa, orang tua/wali, dan masyarakat.

Studi Bank Dunia tentang “Pendidikan Orang Tua di Indonesia” memberikan rekomendasi untuk menanamkan disiplin pada anak dan dampaknya terhadap pengembangan karakter dalam konteks Indonesia. Rekomendasi tersebut meliputi:

Gambar 13. Pendidikan Orang Tua di Indonesia: Rekomendasi Bank Dunia dalam Menanamkan Disiplin pada Anak dan Pengembangan Karakter



Masalah pengasuhan anak lebih dari sekadar mendisiplinkan anak, tetapi juga mencakup kesehatan dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung, yang harus dipupuk sejak usia dini. Untuk mengeksplorasi aspek ini lebih jauh, penelitian ini mengkaji Kerangka Kerja Pengasuhan yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kerangka kerja ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak melalui lima komponen utama pengasuhan:

Gambar 14. Kerangka Kerja Pengasuhan



C. Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Sektor bisnis memiliki peran penting dalam meningkatkan pendidikan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kemitraan dengan sekolah, lembaga pemerintah daerah, dan kementerian. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah Indonesia bertugas mengawasi pendidikan sesuai dengan mandat hukum dengan mengalokasikan setidaknya 20 persen dari anggaran negara untuk tujuan ini setiap tahunnya.⁴¹ Namun, dana ini saja tidak memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Kesenjangan ini membuka peluang bagi keterlibatan sektor swasta melalui inisiatif CSR.

Pengenalan pedoman ISO 26000 oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (*International Organization for Standardization*) pada tahun 2010 telah menyederhanakan proses bagi organisasi untuk memahami dan menangani isu-isu CSR. ISO 26000 menekankan keterlibatan dan manfaat komunitas, seperti memberikan beasiswa atau program pendidikan publik. Melalui CSR, sektor swasta dapat mengatasi tantangan pendidikan secara langsung. Dengan menyediakan peluang pendidikan atau beasiswa, perusahaan dapat memberikan dampak yang signifikan dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Syam, 2021).

Bagaimana Regulasi Diterapkan?

CSR diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. CSR adalah janji perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, dan lingkungan. Hal ini memberikan manfaat bagi perusahaan, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut peraturan Indonesia, CSR di bidang pendidikan mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan dan melaksanakan program CSR yang terstruktur dengan baik dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan komunitas, perencanaan program yang relevan, melaksanakan kegiatan, dan menilai dampaknya. CSR lebih dari sekadar alat pemasaran atau peningkatan citra, namun juga menawarkan manfaat yang nyata dan jangka panjang bagi komunitas dan lingkungan.

Perusahaan didorong untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan—badan pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas lokal—ketika merancang dan melaksanakan inisiatif CSR mereka. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut memenuhi kebutuhan dan kondisi yang nyata, serta mendorong sinergi antara sektor swasta dan publik untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Tabel 18. Apa Saja Tantangannya

Terbatasnya dukungan di area dengan aktivitas bisnis yang rendah	<ul style="list-style-type: none">• Inisiatif dan kemitraan CSR sering kali bersifat jangka pendek, terfokus pada sektor-sektor yang terkait dengan bisnis, dan terbatas pada area-area yang memiliki kegiatan bisnis.• Hal ini mengakibatkan kurangnya dukungan untuk sektor pendidikan dan area dengan aktivitas bisnis yang minim.
Tantangan dalam menavigasi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi	<ul style="list-style-type: none">• Banyak inisiatif EdTech swasta oleh Kemendikbudristek yang gagal karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah.• Kemitraan pemerintah-swasta di tingkat daerah sering kali menghadapi penolakan dari pemerintah pusat yang mengindikasikan tantangan dalam menavigasi sistem pendidikan Indonesia yang terdesentralisasi.

⁴¹ Lihat bagian Anggaran Pendidikan Indonesia 2022-2024 di Bab I untuk penjelasan lebih lanjut

Saluran kemitraan yang tidak jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan antara perusahaan swasta dan sekolah sering kali dibentuk secara ad-hoc, diprakarsai oleh pemerintah atau perusahaan swasta. • Banyak pendidik yang mencari dukungan dari sektor swasta namun tidak memiliki pengetahuan teknis dan pemahaman tentang persyaratan hukum sehingga mereka lebih memilih untuk bermitra dengan sekolah-sekolah yang sudah memiliki hubungan bisnis.
Dampak jangka pendek dan terbatas dari inisiatif CSR	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif dan kemitraan CSR biasanya bersifat jangka pendek, sering kali hanya untuk satu tahun fiskal. • Program pelatihan biasanya hanya berlangsung satu kali dengan pemantauan dan evaluasi yang terbatas sehingga dampaknya tidak berkelanjutan dan berkurang setelah program berakhir.

(Tanoto Foundation & CIPS, 2024)

Apa Saja Peluangnya?

Secara historis, program CSR telah berfokus pada pelatihan guru, pembangunan sekolah, renovasi, dan penyediaan bahan serta peralatan pembelajaran seperti buku dan laboratorium komputer (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Namun, dengan munculnya pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, perhatian telah beralih untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan literasi digital. Saat ini, kolaborasi CSR dan sektor swasta berfokus pada penyediaan infrastruktur digital—seperti laptop, akses internet, dan dukungan teknologi untuk EdTech. Sektor swasta telah menyambut inisiatif ini, dan perusahaan EdTech telah bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk menawarkan sumber daya pendidikan gratis sebagai bagian dari program pembelajaran jarak jauh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga telah bergabung dengan raksasa teknologi seperti *Google* dan *Microsoft* untuk menyelenggarakan sedaring tentang keterampilan TIK dan strategi pengajaran.

Peralihan ke Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi semakin terintegrasi dengan dunia bisnis dan industri, memainkan peran penting dalam mempersiapkan profesional terampil dan calon pengusaha masa depan. Kolaborasi ini memastikan bahwa lulusan siap untuk langsung memasuki dunia kerja dan telah dilengkapi dengan kemampuan untuk memulai usaha mereka sendiri. Menyadari hal ini, pemerintah telah memperkenalkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, termasuk program pemetaan yang menghubungkan institusi pendidikan dengan kebutuhan industri.

Perubahan regulasi terbaru juga telah mendorong perusahaan untuk lebih terlibat dalam pendidikan vokasi. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019 menawarkan pengurangan pajak sebesar 200 persen bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan berbasis kompetensi, magang, dan inisiatif pendidikan vokasi lainnya. Insentif ini bertujuan untuk memotivasi perusahaan agar aktif berkontribusi pada pengembangan tenaga kerja dengan menyelaraskan kegiatan pendidikan dengan permintaan industri.

Kemitraan antara institusi pendidikan dan bisnis, yang sering kali didorong oleh inisiatif CSR, biasanya melibatkan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan standar industri. Penyesuaian ini memastikan bahwa siswa menerima pelatihan yang relevan dengan pasar kerja. Selain itu, kolaborasi semacam ini sering menyediakan peluang praktis melalui magang siswa dan instruktur, pelatihan kerja, dan pabrik pengajaran, memberikan pengalaman langsung kepada siswa serta paparan terhadap tren dan teknologi industri terkini (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

D. Bangkitnya Institusi Pendidikan Tinggi Asing di Indonesia

Dengan universitas lokal di Indonesia yang menghadapi masalah seperti pengajaran, penelitian, dan tata kelola yang kurang memadai, serta keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia, institusi pendidikan tinggi asing menawarkan peluang emas bagi mahasiswa Indonesia untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi di dalam negeri—sesuatu yang sebelumnya tidak terjangkau. Institusi-institusi ini dapat menginspirasi universitas lokal untuk meningkatkan standar mereka dan bertindak sebagai mitra kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Untuk memaksimalkan manfaat institusi pendidikan tinggi asing, Kemendikbudristek harus secara aktif mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi asing dan universitas dalam negeri. Kolaborasi ini sangat penting untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi serta untuk meningkatkan ekosistem penelitian Indonesia

melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Selain itu, Kemendikbudristek juga harus fokus pada penguatan keterampilan staf universitas lokal untuk memastikan kolaborasi yang efektif dengan institusi pendidikan tinggi asing (Zahra, 2023).

Dengan mendirikan universitas kelas dunia (*World Class University/WCU*), Kemendikbudristek bertujuan untuk meningkatkan posisi global Indonesia dalam pendidikan, memberikan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi mahasiswa Indonesia di dalam negeri, dan meningkatkan daya saing di sektor pendidikan tinggi negeri tersebut. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memotivasi perguruan tinggi lokal untuk meningkatkan kualitas dan layanannya. Pengenalan institusi pendidikan tinggi asing diharapkan dapat menghasilkan efek yang menguntungkan, termasuk peningkatan kinerja perguruan tinggi lokal melalui kemitraan yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan inovasi (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Bagaimana Regulasi Diterapkan?

Pemerintah telah membuka jalan bagi institusi pendidikan tinggi asing untuk mendirikan kampus fisik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendikbudristek No. 53 Tahun 2018. Peraturan penting ini menetapkan landasan bagi pendirian institusi pendidikan tinggi asing di negara ini, yang dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021, yang memungkinkan institusi-institusi ini untuk mendirikan kampus di Kawasan Ekonomi Khusus.

Selain itu, ketentuan Peraturan Mendikbud No. 53 Tahun 2018 mengenai institusi pendidikan tinggi asing di Kawasan Ekonomi Khusus telah diperbarui dan diperluas dalam Peraturan Mendikbud No. 10 Tahun 2021. Peraturan ini menguraikan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk perizinan usaha berbasis risiko bagi unit pendidikan formal di kawasan tersebut. Mengingat kompleksitas yang terlibat dalam kemitraan semacam itu, peran Mendikbudristek dalam memfasilitasi kolaborasi ini sangat penting.

Perlu dicatat bahwa institusi pendidikan tinggi asing juga diwajibkan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal untuk melaksanakan penelitian, pengajaran, dan kontribusi masyarakat yang mencakup tiga pilar pendidikan tinggi Indonesia (*Tridharma* perguruan tinggi).

Menurut peraturan, institusi pendidikan tinggi asing harus menawarkan setidaknya dua program dalam bidang sains, teknologi, teknik, seni, atau matematika dan menyertakan mata kuliah nasional yang wajib seperti Pancasila, studi agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Persyaratan ini berlaku untuk program sarjana, seperti yang ditentukan dalam Peraturan Mendikbud No. 10 Tahun 2021. Selain itu, kualitas pendidikan dan infrastruktur di institusi pendidikan tinggi asing harus sebanding dengan yang ada di negara asal mereka dalam rangka memastikan mahasiswa memperoleh kualifikasi yang setara dengan yang diberikan oleh institusi di luar negeri. Kerangka regulasi ini menekankan bahwa institusi pendidikan tinggi asing di Indonesia memberikan akses yang lebih baik bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan kelas dunia tanpa perlu belajar di luar negeri (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Tabel 19. Apa Saja Tantangannya?

Konsentrasi di perkotaan	Sebagian besar program dan penyedia pendidikan terkonsentrasi di daerah perkotaan, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Tantangan bagi Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa	Program-program seperti <i>World Class Professors (WCP)</i> memiliki persyaratan akreditasi yang ketat (minimal nilai B) yang menjadi hambatan bagi institusi pendidikan tinggi di luar Jawa, terutama institusi swasta dan yang belum terakreditasi.
Terbatasnya kapasitas Perguruan Tinggi lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Institusi pendidikan tinggi lokal, terutama yang swasta dengan akreditasi yang belum baik, kerap kesulitan untuk memulai dan mempertahankan kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi asing dan terlibat dengan komunitas penelitian internasional. • Tantangan yang dihadapi antara lain adalah kemampuan bahasa Inggris yang terbatas dan kapasitas manajerial internal.

Resistensi terhadap program bantuan internasional	Program bantuan internasional dapat menghadapi penolakan dari pemerintah jika tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan politik serta kebutuhan spesifik dari negara penerima bantuan dan tingkat pendidikan.
Tantangan keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan program bantuan internasional sering kali terhalang oleh keputusan politik pemerintah. • Donor internasional harus menavigasi saluran kemitraan yang tidak jelas di tingkat lokal dan pusat.

(Tanoto Foundation & CIPS, 2024)

Apa Saja Peluangnya?

Kehadiran institusi pendidikan tinggi asing di Indonesia memberikan peluang untuk menjembatani kesenjangan pendidikan dan memberikan akses bagi mahasiswa Indonesia terhadap pendidikan kelas dunia di dalam negeri. Dengan menyelenggarakan institusi bergengsi ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan posisinya di kancah pendidikan global dan memperlihatkan ekonominya yang modern (Lane, 2011).

Institusi pendidikan tinggi asing juga menjanjikan peningkatan persaingan dan mendorong universitas lokal untuk meningkatkan kualitas dan layanan mereka. Seperti yang diuraikan dalam Peraturan Mendikbud Pasal 2 No. 53 Tahun 2018, institusi-institusi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan dan perguruan tinggi Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, kehadiran institusi pendidikan tinggi asing diprediksi akan memicu kolaborasi antara universitas lokal dan asing, memberikan kesempatan bagi institusi Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan reputasi mereka. Kemitraan ini diharapkan dapat berdampak positif pada universitas lokal melalui transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan keterampilan, serta adopsi inovasi (Farole, 2011).

Bab IV

Peran Organisasi Filantropi dan Inisiatif Kolaborasi



Peran Organisasi Filantropi dan Inisiatif Kolaborasi

Organisasi Filantropi

Filantropi sering kali dikaitkan dengan organisasi yang memberi hibah atau individu yang berbagi sumber daya untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama (Filantropi Indonesia, 2024). Pasal 1(10) Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendefinisikan filantropi sebagai setiap orang perseorangan atau lembaga yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi tantangan berkelanjutan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Kata *philanthropy* sendiri berasal dari bahasa Yunani, *philos* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia atau kemanusiaan. Dengan demikian, kata ini dapat diartikan sebagai cinta kasih sesama manusia. Sementara itu, bentuk sumber daya filantropi bisa berupa uang, barang, ide, pemikiran, tenaga, dan jaringan kemitraan.

Seiring waktu, upaya filantropi semakin banyak menysar daerah 3T (terpencil, tertinggal, terluar) serta daerah pedesaan di berbagai daerah di luar Jawa. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah yang mudah dijangkau dan wilayah terpencil serta mendukung prinsip “*no one left behind*” yang merupakan prinsip utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dengan menyelaraskan kegiatan filantropi dengan SDGs, Indonesia telah menjadi salah satu dari empat negara yang berpartisipasi dalam *SDG Philanthropy Platform*. Saat ini SDGs menjadi fokus utama kegiatan filantropi keluarga dan perusahaan di Indonesia yang mendorong investasi yang berorientasi pada dampak sebagai solusi persoalan pembangunan.

Studi tahun 2020 yang dilakukan oleh Filantropi Indonesia dan Public Interest Research Advocacy Center (PIRAC) mengategorikan komunitas filantropi menjadi tiga kelompok: pemberi hibah, perantara, dan pelaksana (Tanoto Foundation & CIPS, 2024). Perantara memainkan peran ganda dalam memberikan hibah dan melaksanakan program serta menghubungkan para donor dengan pelaksana.

Para filantropis juga dapat dikategorikan berdasarkan peran operasional mereka dalam mendanai dan melaksanakan program serta apakah mereka terlibat dalam lobi legislatif. Di Indonesia, organisasi filantropi umumnya berbentuk yayasan keluarga, yayasan independen, media massa, lembaga keagamaan, dan inisiatif perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*.

Dalam organisasi-organisasi ini, pekerjaan advokasi dan tugas operasional seperti pelaksanaan program dan/atau pendanaan mewakili bidang spesialisasi yang berbeda. Di Indonesia, sebagian besar yayasan keluarga berperan sebagai pemberi hibah (*grantmakers*) dan perantara yang mengumpulkan dana dari perusahaan lain maupun dari usaha keluarga mereka sendiri. Beberapa yayasan keluarga yang mengelola kontribusi keagamaan, seperti zakat dan infak, juga berfungsi sebagai pelaksana program dan/atau operator.

Berdasarkan survei tahun 2022 yang dilakukan oleh Filantropi Indonesia, organisasi filantropi yang berfokus pada pendidikan umumnya menekankan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dari 89 organisasi filantropi yang bergerak di sektor pendidikan, 77,5 persen telah melatih dan mendukung para pengelola sekolah dan guru, sementara 55,1 persen memberikan bantuan keuangan dan beasiswa langsung kepada siswa atau sekolah. Sementara untuk kegiatan advokasi masih jarang dilakukan dengan hanya 23,6 persen organisasi yang terlibat dalam program tersebut.

Studi ini juga menyoroti beberapa inisiatif yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan:

Menyediakan pengajaran gratis bagi anak-anak kurang mampu atau anak-anak terdampak bencana

Mendirikan perpustakaan atau taman bacaan di daerah terpencil

Memberikan beasiswa pendidikan

Menempatkan guru di daerah terpencil

Merenovasi gedung sekolah

Mengembangkan kurikulum untuk sekolah-sekolah

Tren terkini menunjukkan bahwa filantropi korporasi dan yayasan keluarga semakin berfokus pada pendidikan vokasi dan pelatihan. Ini mencakup program di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, dan pusat pelatihan vokasi informal. Kegiatan relawan, baik formal maupun informal, juga berperan penting dalam menyediakan pendidikan informal di daerah terpencil serta wilayah terdampak bencana.

Organisasi filantropi yang berfokus pada pendidikan di Indonesia menawarkan beragam bentuk intervensi guna meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Misalnya, Yatim Mandiri memberikan dukungan pendidikan bagi anak-anak yatim, sementara Yayasan Usaha Mulia dan Bina Swadaya berupaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga yang kurang mampu. Selain itu, organisasi seperti Yayasan Guru Belajar dan Yayasan INSPIRASI berperan dalam mendukung pengembangan kapasitas guru dan kepemimpinan di sekolah-sekolah.

Organisasi berbasis isu juga turut mengatasi berbagai kebutuhan pendidikan. Misalnya, Yayasan Hati Gembira Indonesia membangun dan melengkapi sekolah tahan gempa di Indonesia Timur untuk meningkatkan akses pendidikan. Ancora Foundation menyediakan beasiswa tahunan untuk pendidikan tinggi bagi siswa kurang mampu. Sementara itu, INOVASI melakukan penelitian, mempublikasikan hasil temuan, dan meluncurkan inisiatif yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan abad ke-21 bagi para siswa.

Organisasi filantropi yang berfokus pada pendidikan menangani berbagai isu dan minatnya. Tujuan mereka mencakup:

- 1. Akses terhadap Pendidikan:** Meliputi pendidikan non-formal, kesiapan sekolah, faktor sosial ekonomi, ketersediaan sekolah, serta variabel budaya dan persepsi
- 2. Kualitas Pendidikan:** Berfokus pada pengembangan kurikulum, konten, pedagogi, teknologi, lingkungan belajar mengajar, kinerja siswa dalam STEM, literasi, numerasi, dan penelitian pendidikan
- 3. Revitalisasi Sekolah:** Menargetkan kualitas dan ketersediaan guru, pengembangan kepemimpinan sekolah, keterlibatan orang tua, penyediaan infrastruktur, manajemen keuangan sekolah, ketahanan terhadap bencana nasional dan perubahan iklim
- 4. Pengembangan Tenaga Kerja:** Mencakup pengembangan keterampilan lingkungan, bimbingan karir, dan pencocokan antara pekerjaan dan keterampilan
- 5. Tata Kelola Pemerintahan:** Terlibat dalam pengembangan model sekolah, membantu pengelolaan pendidikan lokal, serta mendukung reformasi pendidikan melalui advokasi kebijakan

Sebagian besar organisasi filantropi yang berfokus pada pendidikan bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan dan memperbaiki sekolah-sekolah. Saat ini, banyak organisasi yang terlibat dalam inisiatif reformasi sekolah fokus pada pengembangan kepemimpinan sekolah dan peningkatan kualitas guru. Terdapat minat yang berkembang untuk inisiatif masa depan terkait penyediaan infrastruktur, manajemen keuangan sekolah, dan ketersediaan guru dengan perhatian yang signifikan pada program-program yang menangani bencana nasional dan perubahan iklim.

Klaster Filantropi Pendidikan (KFP) merupakan sebuah platform kolaborasi dan kreasi bersama pegiat filantropi yang dikoordinasikan secara sinergis bagi perbaikan ekosistem pendidikan Indonesia (Filantropi Indonesia, 2024). Anggota pendiri KFP terdiri dari Ancora Foundation, Arsitek86 Foundation, Yayasan Bakti Barito, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Dompot Dhuafa, Yayasan Indocement, Putera Sampoerna Foundation, Tanoto Foundation, Wahana Visi Indonesia, William & Lily Foundation, dan YAPPIKA-ActionAid, bersama dengan Filantropi Indonesia. Hingga saat ini, KFP telah berkembang hingga memiliki 55 lebih anggota yang terdiri dari yayasan dan perusahaan.

KFP didirikan dengan tiga pokok prinsip dasar:

Kepemilikan	Peran aktif dan komitmen menjalankan kegiatan kluster sesuai kesepakatan
Kolaboratif	Berbagi peran dan bekerja sama
Transparansi	Keterbukaan dan pertanggungjawaban setiap kegiatan

Sebelum terbentuknya KFP, para filantropis sering kali melakukan intervensi pendidikan berdasarkan tujuan organisasinya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini sering kali menyebabkan tumpang tindih inisiatif dan menyisakan kesenjangan dalam pembangunan pendidikan yang belum disentuh oleh filantropis. Oleh karena itu, guna memaksimalkan dampak filantropi terhadap pendidikan Indonesia dan mendorong kolaborasi serta kemitraan antara pegiat pendidikan, KFP dibentuk dengan tiga pilar inti.

Pilar pertama fokus pada penguatan kapasitas lembaga filantropi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program, serta melaksanakan program strategis yang telah disepakati bersama.

Pilar kedua melibatkan pertukaran praktik baik melalui berbagai forum diskusi, platform digital, dan kunjungan kolaboratif ke area operasional anggota. Pilar ini bertujuan untuk memetakan intervensi, mengatasi masalah strategis dalam ekosistem pendidikan, berbagi pendekatan program yang efektif, dan mengisi kesenjangan dukungan melalui kerja tim. Sejak pembentukan kluster ini, lembaga-lembaga filantropi pendidikan secara gotong royong melaksanakan program pembangunan pendidikan yang terarah pada tujuan ke-4 SDGs, yaitu tercapainya kualitas pendidikan yang merata melalui proyek pengembangan pendidikan kolaboratif.

Beberapa upaya filantropi telah mencapai tonggak penting dalam memajukan pendidikan berkualitas. Upaya-upaya tersebut antara lain:

Memberikan donasi fasilitas atau peralatan pendidikan	Meningkatkan kualifikasi dan mutu pengajar
Mendirikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu atau korban bencana	Mendirikan taman bacaan di wilayah yang kurang mendapatkan pelayanan
Menyediakan beasiswa	Berkontribusi dalam pengembangan kurikulum untuk lembaga pendidikan
Meningkatkan fasilitas infrastruktur pendidikan	Menugaskan guru ke daerah terpencil

Guna menginstitusikan dan menjustifikasi intervensi program dari organisasi amal, pemerintah juga perlu merencanakan serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk setiap tahun anggaran. Upaya ini penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari inisiatif tersebut. Selain itu, organisasi amal sering kali melakukan penelitian berbasis data, seperti kajian dasar, sebelum melaksanakan intervensi. Studi-studi ini berfungsi sebagai acuan penetapan tujuan dan penilaian program serta membantu memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Namun, tidak semua pemerintah daerah dapat memprioritaskan atau sepenuhnya memahami kebutuhan ini. Oleh karena itu, pilar ketiga yaitu advokasi kebijakan menjadi pilar yang sangat penting. Pilar ini melibatkan identifikasi masalah dan mengadvokasi kebijakan yang bermanfaat bagi pendidikan dengan melibatkan serta meyakinkan pemangku kepentingan yang relevan.

Peran Penting Advokasi Organisasi Filantropi

Organisasi filantropi memainkan peran penting dalam mendukung reformasi yang berkaitan dengan pendidikan, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat umum, dan organisasi non-pemerintah (Tanoto Foundation & CIPS, 2024). Upaya advokasi mereka sering kali melibatkan kerja sama dengan tokoh berpengaruh seperti para ahli, pemimpin agama, dan individu terkenal dari sektor publik dan swasta. Di antara mereka, para ahli adalah pemimpin opini kunci yang paling dihargai karena keterlibatan mereka yang rutin dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Pemimpin agama juga penting, sementara pemberi pengaruh (*influencer*) memiliki peran yang lebih rendah dengan tingkat signifikansi yang dianggap moderat.

Banyak organisasi filantropi mengungkapkan keprihatinan mereka tentang keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari inisiatif mereka. Kemauan politik pemerintah merupakan faktor kritis dalam adopsi dan kelanjutan program-program ini. Untuk mengatasi hal ini, kampanye advokasi dan dialog dengan pemerintah bertujuan untuk menyelaraskan aktivitas filantropi dengan kebutuhan dan sumber daya yang pemerintah miliki. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah selama proses desain dan perumusan program dapat meningkatkan kepemilikan pemerintah sehingga meningkatkan kemungkinan program ini diadopsi dan dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang.

Advokasi kebijakan dapat secara signifikan memperluas dampak sebuah program dengan mengaudiensikan pembuat kebijakan untuk mengusulkan intervensi atau perubahan yang mengatasi akar penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi program. Sebagai contoh, berbagai organisasi filantropi yang berfokus pada program peningkatan kualitas guru sepakat bahwa reformasi institusional yang substansial diperlukan, khususnya di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Advokasi adalah strategi kunci bagi kelompok filantropi yang bertujuan membujuk pemerintah untuk mengintegrasikan program mereka ke dalam agenda nasional dan sub nasional. Inklusi ini penting untuk memastikan dampak jangka panjang program dan meningkatkan kesinambungannya.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan geografis, kompleksitas sistem pendidikan, dan keterbatasan sumber daya, advokasi menjadi strategi penting bagi organisasi yang ingin memperluas dampak mereka. Kerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan, kualitas, serta perluasan jangkauan program.

Untuk melakukan advokasi kebijakan yang efektif, para filantropis perlu perhatian pemangku kepentingan pemerintah. Membangun hubungan yang solid dengan pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sangat krusial. Hubungan ini harus dibangun atas dasar kemitraan dan saling menghormati agar pemangku kepentingan pemerintah melihat organisasi filantropi sebagai mitra yang setara dan bernilai.

Selain itu, untuk mendorong rasa kepemilikan pemerintah dan memastikan komitmen yang kuat terhadap inisiatif filantropi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan pemerintah sangat diperlukan. Penting untuk menjaga intervensi yang efisien biaya dan mudah diimplementasikan oleh pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan program filantropi. Advokasi merupakan langkah awal untuk menyoroti manfaat dari koneksi pemerintah tersebut.

Kesenjangan dalam penyediaan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas tetap menjadi tantangan besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Organisasi filantropi memainkan peran vital dalam mengatasi hambatan birokrasi, meningkatkan akses layanan pendidikan, mengembangkan pembelajaran berbasis konteks, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan infrastruktur pendidikan, membangun kapasitas pengelola pendidikan, mempersiapkan transisi siswa dari kelas ke dunia kerja, serta terlibat dalam kegiatan advokasi.

Organisasi filantropi yang secara langsung memberikan layanan kepada penerima manfaat—dikenal sebagai pelaksana—juga perlu terlibat dalam advokasi untuk memperluas pengaruh mereka. Para pelaksana ini, yang memiliki hubungan erat dengan komunitas dan pemahaman mendalam tentang masalah di tingkat lokal, dapat memberikan umpan balik yang berharga dalam membentuk kebijakan pendidikan yang komprehensif. Kelompok dengan skala lebih kecil dapat secara efektif memengaruhi pembuatan kebijakan dengan mengintegrasikan advokasi ke dalam peran mereka. Hal ini dapat tercapai melalui kolaborasi ketika pelaksana berbagi keahlian dengan kelompok advokasi khusus, atau melalui aksi kolektif, dengan membentuk aliansi untuk mendukung tujuan tertentu.

Advokasi memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan program filantropi dengan memperoleh dukungan pemerintah daerah untuk dampak jangka panjang. Program-program tersebut harus diselaraskan dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah dengan mengutamakan intervensi yang dapat diperluas dan efisien secara biaya. Penting untuk mengevaluasi dan merancang program berdasarkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan praktik berkelanjutan untuk adopsi kebutuhan pendidikan lokal secara efektif, perlu dilakukan pendekatan yang lebih terfokus pada area tertentu. Selain itu, melibatkan pemerintah daerah dalam menilai kapasitas komunitas dan kebutuhan pendidikan selama tahap perancangan program sangat krusial untuk mencapai hasil yang bermakna dan berkelanjutan.

Pendekatan Organisasi Filantropi terhadap Pendidikan Berkelanjutan

Sumber daya manusia erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi karena investasi dalam bidang pendidikan mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang mendorong produktivitas (Filantropi Indonesia, 2024). Pencapaian pendidikan yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan upah individu dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Pendidikan tidak hanya memberdayakan individu, menciptakan peluang, dan mengubah kehidupan, tetapi juga mempromosikan kesejahteraan dan martabat nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan identitas Indonesia, bukan hanya berfokus pada persiapan tenaga kerja untuk industri.

Namun, Indonesia masih menghadapi krisis literasi yang signifikan. Laporan menunjukkan masalah yang meluas: sebuah studi SMERU tahun 2020 yang mengutip data *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2018 oleh OECD, yang menempatkan Indonesia di peringkat 71 dari 77 negara. Studi tersebut menemukan bahwa 70 persen siswa mendapatkan nilai di bawah level 2 dalam membaca sehingga siswa-siswa tersebut kesulitan dalam mengidentifikasi gagasan utama atau informasi kunci dalam teks pendek. Selain itu, 3,65 persen penduduk Indonesia di atas usia 15 tahun mengalami buta huruf. Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) juga menyoroti kekhawatiran serupa dengan 77,13 persen siswa kekurangan keterampilan matematika, 46,83 persen kekurangan keterampilan membaca, dan 73,61 persen kekurangan keterampilan sains. Sosiolog Ignas Kleden mencatat bahwa literasi di Indonesia masih berada pada tingkat fungsional dasar, bukan pada tingkat budaya membaca.

Krisis literasi ini disebabkan oleh kurangnya program nasional yang memadai dan diperparah oleh kurangnya akses pada perpustakaan. Menurut SMERU, hanya 6 persen perpustakaan tingkat kabupaten yang dibutuhkan dan yang tersedia dengan sebagian besar terletak di Jawa. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) melaporkan bahwa hanya 61,45 persen sekolah dasar yang memiliki perpustakaan, dan hanya 19 persen dari perpustakaan tersebut dalam kondisi baik. Kekurangan ini juga memengaruhi buku dan pustakawan. Laporan Perpustakaan Nasional 2016 menunjukkan bahwa hanya 20 persen perpustakaan yang dibutuhkan dan yang tersedia. INOVASI melaporkan adanya masalah signifikan dalam akses buku di daerah yang kurang beruntung. Selain itu, pandemi juga memperburuk masalah ini hingga mengurangi kunjungan ke perpustakaan dan penggunaan taman bacaan komunitas. Pada tahun 2021, hanya 3,74 persen populasi berusia 5 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan, sebuah penurunan signifikan dari 13,02 persen pada 2018.

INOVASI telah mengidentifikasi dua masalah utama yang berkontribusi pada rendahnya tingkat literasi di kalangan anak-anak: kurangnya materi bacaan yang menarik dan terbatasnya akses ke buku, khususnya di daerah terpencil dan kurang terlayani.

Untuk mengatasi tantangan ini, INOVASI telah memulai inisiatifnya dalam mendistribusikan buku cerita ke daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Inisiatif ini dimulai dengan bekerja sama dengan penulis, ilustrator, dan penerbit untuk memilih buku yang menarik dan sesuai usia untuk anak-anak dan merancang format yang relevan dan ramah pengguna untuk guru. Selain itu, INOVASI juga memberikan pelatihan kepada guru untuk mengintegrasikan buku-buku ini secara efektif dalam pengajaran mereka.

Selain itu, INOVASI mendukung Platform Merdeka Mengajar yang meningkatkan kemampuan guru dalam mengajarkan keterampilan membaca dasar menggunakan suku kata fonetik.

Selain mengembangkan perpustakaan, menciptakan lingkungan kelas yang interaktif dan dinamis juga sangat penting. Wahana Visi Indonesia, sebagai filantropi pelaksana, beroperasi dengan model proyek inti yang dikenal sebagai *Unlock Literacy*, bagian dari kemitraan global yang bertujuan untuk mengatasi tantangan literasi awal di wilayah 3T, termasuk Kalimantan Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Flores. Komponen program ini meliputi penilaian kemampuan membaca siswa, pelaksanaan inisiatif literasi, dan analisis hasilnya. Salah satu masalah utama adalah pengajaran bunyi huruf (fonik) yang sering kali diabaikan oleh para guru, sehingga anak-anak kesulitan dalam memahami bacaan akibat penggunaan materi bacaan yang cenderung bias terhadap bahasa Ibu Kota Negara.

Untuk menumbuhkan minat membaca dan melibatkan baik pengajar maupun siswa, sangat penting untuk menyediakan bahan bacaan yang lokal, sesuai usia, dan relevan secara budaya. Ini memerlukan kerangka pendidikan yang kontekstual. Misalnya, di Papua ketika dialek daerah memengaruhi pelafalan huruf, pendidik harus menyesuaikan metode mereka. Mereka bisa menggunakan alat pengajaran yang memiliki makna budaya, seperti busur dan anak panah, untuk menggambarkan kosakata sambil mengajarkan penulisan huruf, penggunaan kata, dan penyusunan kalimat dengan cara yang konsisten dengan budaya lisan Papua yang dominan.

Modul dan pelatihan yang disesuaikan untuk mengajarkan membaca dasar di wilayah 3T harus disediakan untuk para guru karena metode ini sangat berbeda dengan yang digunakan di daerah perkotaan. Di kota, anak-anak sering terpapar kosakata yang lebih luas melalui interaksi awal dengan keluarga, media, dan lingkungan sekitar mereka.

Mengingat tradisi lisan yang kaya di daerah-daerah seperti Papua, bahan ajar dan sumber daya pengajaran yang kontekstual sangat penting untuk pendidikan yang efektif. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Wahana Visi Indonesia (WVI) telah mengembangkan buku bacaan yang menampilkan cerita daerah dan mendorong penggunaan sumber daya pendidikan lokal didukung oleh alat peraga edukasi (APE) sebagai media pembelajaran utama. Pendekatan ini membantu anak-anak berproses dari belajar membaca menjadi menggunakan membaca sebagai alat untuk pembelajaran lebih lanjut. Penelitian WVI menunjukkan bahwa 35 persen anak-anak yang tidak melek huruf pada kelas 4 dan 5 cenderung putus sekolah yang menunjukkan pentingnya inisiatif literasi. Selain itu, UNICEF juga menemukan alasan putus sekolah lain di usia dini, seperti pernikahan anak, kemiskinan, dan disabilitas, serta bekerja untuk mereintegrasi anak-anak yang sudah tidak bersekolah.

Yayasan William & Lily peduli dengan masalah literasi dan numerasi di banyak sekolah dasar ketika siswa sering kali memiliki kekurangan keterampilan dasar yang diperlukan untuk jenjang kelas mereka. Yayasan ini bertujuan untuk meningkatkan akses anak-anak di kelas awal terhadap program membaca dan numerasi berkualitas tinggi di Indonesia Timur melalui kemitraan strategis. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan kemampuan pendidik dan pengelola sekolah, memanfaatkan koneksi yang ada, dan melibatkan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, yayasan ini mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan literasi dasar, mengatasi tantangan khusus terkait literasi kelas awal, dan bekerja sama dengan mitra daerah untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan Indonesia Timur.

Selain itu, Dompot Dhuafa turut serta menyelesaikan masalah literasi dengan kegiatan pendampingan sekolah menengah pada 2018–2019. Melihat tantangan yang dihadapi oleh siswa mereka, mereka bekerja sama dengan Room to Read untuk mengembangkan program Ceruk Ilmu. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca siswa kelas awal, membimbing mereka dari membaca dasar ke pemahaman, dan menceritakan kembali. Ceruk Ilmu menyediakan bahan bacaan yang sesuai usia (bukan buku pelajaran) untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, meningkatkan minat, dan meningkatkan keterampilan pemahaman serta bercerita.

Untuk menjaga motivasi anak-anak agar tetap tertarik membaca dan memaksimalkan dampak dari sumber daya Ceruk Ilmu, Dompot Dhuafa menyediakan pelatihan guru untuk merangsang literasi anak. Pendekatan ini memastikan agar anak-anak tidak hanya berinteraksi memegang dan melihat buku, tetapi juga memperluas kosakata mereka dan meningkatkan pemahaman. Para guru, yang diberdayakan oleh pelatihan tersebut, turut memperkenalkan kursus literasi mingguan yang menjadi tempat anak-anak membaca dan menceritakan kembali melalui berbagai media, seperti bercerita atau menggambar. Praktik ini diperluas ke tingkat komunitas melalui perpustakaan desa sehingga secara bertahap menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan literasi dasar.

Sejalan dengan program Merdeka Belajar, pada 2023 Tanoto Foundation mendukung inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait program Buku Bacaan Bermutu dengan mendistribusikan lebih dari 76.000 buku untuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD) yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Selain itu, YAPPIKA-ActionAid dalam upaya memperkuat literasi melalui inisiatifnya yakni Bale Belajar yang mempererat hubungan antara komunitas dan sekolah. Meskipun sekolah menawarkan jam belajar tambahan, ada kekhawatiran dari orang tua mengenai keselamatan anak-anak mereka sehingga mendorong pengajaran tambahan secara sukarela di komunitas, terutama pada sore hari, oleh guru atau aktivis lokal.

Literasi tetap menjadi tantangan besar di Indonesia. Mengatasi masalah ini perlu melibatkan penyediaan bahan bacaan yang menarik dan pelatihan guru. Selain itu, ada peluang besar untuk meningkatkan

literasi nasional melalui media digital. Oleh karena itu, memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital dan meningkatkan literasi digital untuk semua pemangku kepentingan pendidikan menjadi sangat penting. Meskipun terdapat beragam tantangan, inisiatif yang dilakukan oleh organisasi filantropi yang fokus pada pendidikan memberikan harapan untuk meningkatkan keterampilan membaca anak-anak di seluruh negeri.

Pengembangan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk mengembangkan kemampuan belajar anak sepanjang hidup mereka dan memegang peran sentral dalam sistem pendidikan (Filantropi Indonesia, 2024). UNESCO menekankan bahwa delapan tahun pertama kehidupan anak adalah masa yang krusial untuk perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial mereka hingga dapat menawarkan jendela penting terhadap peluang pendidikan. Hampir semua organisasi dalam KFP sepakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini mengingat hal tersebut esensial demi mempersiapkan generasi mendatang menuju pendidikan tinggi.

KFP mendukung keyakinan bahwa investasi dalam pendidikan anak usia dini memberikan hasil yang paling tinggi pada tahap pendidikan berikutnya. Investasi di pendidikan anak usia dini dapat berdampak besar pada masyarakat dengan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, mengurangi ketimpangan, dan mendorong kemakmuran di masa depan sebagaimana ditekankan dalam laporan Asia Philanthropy Circle. Oleh karena itu, program-program harus menekankan pada gizi, pendidikan pengasuh, dan pengembangan literasi dini. Komponen-komponen ini telah terbukti meningkatkan kinerja akademik siswa, kesiapan sekolah, dan kesuksesan akademik jangka panjang.

UNICEF dan Bappenas mendukung kebijakan Pemerintah mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013. Kolaborasi mereka mencakup 200 sekolah PAUD di berbagai daerah, termasuk Asmat, Nabire, dan Sarmi yang menjadi tempat mereka mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi nasional yang mengintegrasikan pendidikan dengan pengasuhan, kesejahteraan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.

Kegiatan utama dalam pendekatan ini termasuk lokakarya pengasuhan, pembuatan alat permainan edukatif (APE), dan pelatihan guru PAUD dan SD. Model komprehensif ini berfungsi sebagai alat advokasi berbasis bukti yang bertujuan untuk mengamankan anggaran dan dukungan regional untuk inisiatif PAUD. Penelitian UNICEF menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti program PAUD menunjukkan keterampilan literasi dan numerasi dasar yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman sebaya mereka yang tidak mengikuti program tersebut yang menunjukkan kesiapan yang lebih baik untuk pendidikan dasar. Dengan demikian, penerapan inisiatif PAUD-HI sangat penting untuk meningkatkan kesiapan anak-anak dalam menghadapi tahapan pendidikan selanjutnya.

Selama pandemi COVID-19, UNICEF, Yayasan Genius, WVI, Plan, Save the Children, dan Kemendikbudristek melakukan kajian terhadap pembelajaran jarak jauh untuk memastikan efektivitas program PAUD-HI. UNICEF dan Kemendikbudristek bekerja sama mengembangkan pedoman untuk pembelajaran jarak jauh dan membuat sumber daya pendidikan yang dapat diunduh yang tersedia melalui situs web Kemendikbudristek untuk mendukung siswa di seluruh Indonesia.

Meskipun sumber daya ini bermanfaat bagi siswa dan guru yang memiliki akses internet yang andal, sumber daya ini kurang efektif di daerah 3T mengingat infrastruktur internet di daerah tersebut sering kali tidak memadai. Guna mengatasi kondisi ini, pendanaan dan APE disediakan untuk sekitar 100 lembaga PAUD di Nusa Tenggara Timur. Alat-alat ini mendukung pembelajaran berbasis permainan dalam literasi dan numerasi pra-sekolah yang membantu siswa mengejar ketertinggalan mereka setelah kembali belajar pasca-pandemi.

Program PAUD-HI juga mendapat dukungan dari organisasi filantropi lainnya, seperti:

- William & Lily Foundation (WLF): Lembaga ini mendukung program ini dengan mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan sosial, termasuk pelatihan untuk penyedia layanan dan menciptakan lingkungan positif bersama otoritas setempat.
- Yayasan Adaro Bangun Negeri: Organisasi ini fokus pada Program Pendidikan Holistik Berbasis Karakter yang menekankan pengembangan fisik, mental, dan spiritual anak, bersama dengan peningkatan keterampilan guru pendidikan anak usia dini. Pendekatan ini telah menyebabkan perubahan perilaku positif dan peningkatan pendaftaran siswa.

Studi kolaboratif tahun 2018 Menembus Batas Potensi Belajar Anak, yang diterbitkan oleh Filantropi Indonesia, menekankan peran penting PAUD yang berkualitas dalam meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Temuan kunci dari studi tersebut meliputi:

- Pentingnya pendidikan prasekolah berkualitas: Menghadirkan prasekolah berkualitas tinggi secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa di semua jenjang pendidikan.
- Manfaat investasi dini: Investasi dalam pengembangan anak usia dini memberikan hasil terbaik, terutama untuk anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah. Periode dari lahir hingga usia lima tahun diidentifikasi sebagai masa yang paling krusial untuk memaksimalkan manfaat perkembangan.
- Faktor yang memengaruhi: Studi ini menyoroti bahwa dukungan, semangat, dan teknik pengasuhan yang efektif adalah elemen-elemen penting yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Studi ini menegaskan pentingnya PAUD dan kebutuhan akan intervensi yang tepat sasaran untuk mendukung perkembangan anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung.

Intervensi-intervensi ini menunjukkan pendekatan yang menyeluruh terhadap PAUD, masing-masing dengan fokus yang berbeda tetapi bersatu dalam tujuan untuk meletakkan dasar yang kokoh untuk pembelajaran di masa depan.

- Dompot Dhuafa: Dengan mengoperasikan PAUD Pengembangan Insani, Dompot Dhuafa memastikan PAUD yang terstruktur yang melayani berbagai kelompok usia dengan menyediakan lingkungan pembelajaran profesional dan inklusif bagi anak-anak dari latar belakang yang berbeda.
- Pertamina Foundation: Melalui TK Patra, mereka menekankan pendidikan dasar yang kuat bagi anak-anak muda yang membangun dari fokus awalnya yang terletak pada anak-anak pegawai Pertamina untuk selanjutnya melayani komunitas yang lebih luas. Upaya mereka bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak dalam transisi ke pendidikan dasar dengan awal yang solid.
- Putera Sampoerna Foundation: Pendekatan berbasis permainan yang dilaksanakan mendorong perkembangan bahasa, kognitif, fisik, dan sosio-emosional sehingga mendorong pembelajaran dan keterlibatan mandiri. Dengan mengintegrasikan permainan dalam pendidikan, mereka berusaha membuat pembelajaran lebih relevan dan menyenangkan yang dapat membantu menumbuhkan kecintaan belajar seumur hidup.
- Tanoto Foundation: Menyadari bahwa meningkatkan hasil belajar siswa adalah upaya utama, Tanoto Foundation berinvestasi pada PAUD di bawah pilar Pengembangan Lingkungan Pembelajaran. Beberapa program yang mereka jalankan meliputi pendidikan orang tua tentang pentingnya gizi, merangsang perkembangan otak anak—terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan, pelatihan anggota komunitas lokal di daerah mitra, dan meningkatkan kualitas guru PAUD.

Pendekatan setiap yayasan menjadi saling melengkapi, dengan masing-masing menangani kebutuhan dan aspek berbeda dalam PAUD, mulai dari lingkungan belajar yang terstruktur hingga strategi pengembangan berbasis permainan.

Kolaborasi antara organisasi filantropi dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini dan mencapai peningkatan jangka panjang. Berikut ringkasan inisiatif beserta dengan rekomendasinya:

- Fokus Filantropi: Organisasi seperti Plan International Indonesia, Rumah Zakat, Yayasan Bakti Barito, Yayasan Arsitek86 Peduli, WVI, dan Ancora Foundation berperan penting dalam merevitalisasi PAUD. Kolaborasi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar siswa sekolah dasar dengan menekankan pentingnya pendidikan prasekolah.
- Studi Yayasan Bakti Barito: Penelitian komprehensif mengenai sistem PAUD di Tiongkok, Singapura, Filipina, dan Indonesia ini membantu para pemangku kepentingan memahami kebijakan kontemporer dan membentuk pengembangan ke depan. Studi ini menyoroti terbatasnya akses terhadap PAUD, terutama bagi populasi yang kurang beruntung dan daerah terpencil.

Rekomendasi Bank Dunia untuk Indonesia:

- Keharusan mengikuti prasekolah: Mewajibkan dua tahun pendidikan prasekolah pada 2030
- Dukungan publik yang lebih besar: Meningkatkan pendanaan publik untuk PAUD dan mengeksplorasi sumber pendanaan tambahan
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Mendukung program PAUD berkualitas tinggi dengan dana khusus
- Inisiatif pendaftaran dan keterlibatan: Meluncurkan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan dalam PAUD
- Pengumpulan data dan kolaborasi: Meningkatkan pengumpulan data dan memperkuat kolaborasi di antara pemangku kepentingan PAUD
- Kolaborasi pemerintah dan filantropi: Advokasi yang efektif dan pengembangan pendidikan anak usia dini membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan organisasi filantropi. Kemitraan ini penting untuk memformulasikan rekomendasi dan memastikan bahwa sistem pendidikan anak usia dini bersifat inklusif, berkualitas tinggi, dan dapat diakses oleh semua orang.

Upaya-upaya ini secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan hasil PAUD yang secara signifikan dapat memengaruhi keberhasilan akademik siswa di masa depan dan perkembangan secara keseluruhan.

Tantangan Masa Depan bagi Organisasi Filantropi

Organisasi filantropi menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk memaksimalkan alokasi sumber daya, membangun kredibilitas, mendapatkan saluran pendanaan yang berkelanjutan, dan memperluas jaringan serta kolaborasi (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Untuk memaksimalkan alokasi sumber daya, organisasi filantropi sering kali mengalami kesulitan dalam hal memperluas cakupan dan fungsi mereka akibat keterbatasan dana. Memperluas tanggung jawab dan menangani tugas baru membutuhkan tambahan tenaga kerja. Namun, sangat penting bagi organisasi filantropi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang mereka miliki. Guna mengatasi masalah ini, diperlukan rencana strategis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Membentuk kemitraan dengan entitas terkait, seperti lembaga pendidikan atau industri bisnis, dapat membantu memastikan tenaga kerja yang cukup dan hasil berkualitas tinggi yang keduanya penting bagi keberhasilan program. Pendekatan ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif sambil membangun hubungan dengan pemangku kepentingan di sektor pendidikan yang mendukung tujuan program.

Organisasi filantropi harus memiliki rekam jejak yang menunjukkan keahlian dan kemahirannya dalam bidang yang menjadi fokus mereka. Untuk mengadvokasi tujuan mereka secara efektif, organisasi filantropi harus dianggap andal dan dihormati oleh audiens targetnya. Tanpa rekam jejak yang solid, pejabat dan pemangku kepentingan mungkin akan meragukan atau mengabaikan rekomendasi mereka.

Agar sebuah program dapat berkelanjutan, sangat penting bagi masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintahan untuk memandang filantropis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara positif. Hal ini mencakup pemahaman dan apresiasi mendalam terhadap peran yang dimainkan LSM dalam masyarakat. Kredibilitas dan opini publik secara signifikan turut memengaruhi kemampuan LSM untuk menarik penyandang dana dan mitra sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

Sebagian besar organisasi filantropi mengandalkan donasi atau sumber pendapatan nirlaba lainnya untuk mendanai program-program mereka. Seiring dengan perkembangan kegiatan dan fungsinya, pendanaan tambahan menjadi diperlukan. Mengambil peran atau proyek baru juga dapat meningkatkan pengeluaran dan risiko, terutama jika filantropis merambah ke area dan bidang yang belum pernah mereka jalani sebelumnya.

Keberlanjutan finansial dicapai dengan mendiversifikasi sumber pendanaan, yang mengurangi ketergantungan pada satu sumber pembiayaan, meminimalkan risiko finansial, dan memastikan kelangsungan operasional program. Strategi ini melibatkan upaya pencarian dana tambahan di luar sumber daya internal organisasi, terutama bagi kelompok filantropi yang bertindak sebagai perantara. Penyandang dana tambahan yang potensial untuk kegiatan filantropi perantara termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan asing, dan entitas swasta lain dalam industri terkait.

Organisasi filantropi yang melakukan advokasi perlu terlibat secara aktif dalam forum diskusi kebijakan dan komunitas pembuat kebijakan. Selain itu, organisasi filantropi juga dapat memanfaatkan platform, jaringan, dan keahlian mereka untuk mengadvokasi tujuan mereka yang secara signifikan dapat memengaruhi pembuatan kebijakan. Membangun hubungan antara pemerintah daerah dan sumber pendanaan yang tepat sangat penting untuk memperluas jaringan karena hal ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hubungan ini penting untuk membina kerja sama, meningkatkan pemahaman bersama, dan berpotensi mengarah pada kolaborasi produktif serta inisiatif masyarakat yang terkoordinasi menuju tujuan bersama.

Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam proyek-proyek tertentu merupakan cara yang efektif untuk membangun jaringan. Banyak kantor pemerintah daerah mengakui peran penting yang dimainkan oleh filantropi, terutama dalam memberikan umpan balik dan berbagi tanggung jawab dalam pengembangan inisiatif pendidikan. Kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan organisasi filantropi dapat menciptakan lingkungan kerja sama yang menggabungkan perspektif, sumber daya, dan keahlian yang beragam. Kolaborasi ini dapat meningkatkan lanskap pendidikan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Dengan melibatkan kantor-kantor pemerintah daerah, organisasi filantropi dapat menyesuaikan program-programnya dengan lebih baik untuk menjawab tantangan-tantangan spesifik di masyarakat. Pemerintah juga dapat memperluas cakupan dan dampak inisiatif pendidikan mereka dengan memanfaatkan wawasan dan pendanaan tambahan yang diberikan oleh kemitraan filantropi.

Namun, meningkatkan pendidikan masih menghadirkan tantangan yang signifikan bagi organisasi filantropi di Indonesia (Filantropi Indonesia, 2024). Organisasi-organisasi ini sering kali kesulitan dalam mengelola operasi dan mencapai keberhasilan program akibat cakupan geografi yang luas, kondisi yang parah, dan konteks sosial-budaya yang beragam. Pandemi COVID-19 semakin memperparah tantangan-tantangan ini sehingga membutuhkan solusi dan adaptasi yang inovatif. Memastikan keberlanjutan program pendidikan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang inisiatif ini dan masyarakat yang mereka layani.

Tantangan penting pertama yang dihadapi oleh organisasi filantropi adalah menyediakan layanan yang adil dan mudah diakses di semua wilayah. Memastikan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas bagi populasi yang terpinggirkan—khususnya mereka yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang kurang beruntung di wilayah 3T—adalah hal yang sangat penting. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pembelajaran, dan fasilitas dasar seperti listrik serta air bersih. Sumber daya keuangan dan sumber daya manusia organisasi filantropi juga kerap kali membatasi jangkauan mereka. Modal ini memengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat dengan pemerintah, ruang lingkup program, lokasi yang dapat mereka jangkau, serta konsistensi dan keberlanjutan program yang berdampak pada efektivitas keseluruhan inisiatif mereka.

Kedua, memahami kebutuhan dan tantangan pendidikan lokal sangat penting. Program-program harus relevan bagi semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan finansial, dan harus selaras dengan konteks sosial serta budaya di setiap daerah. Keterlibatan yang efektif dengan masyarakat dan pemerintah lokal juga sangat penting untuk menyesuaikan program dan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Selain itu, organisasi filantropi juga tetap harus melibatkan komunitas sosial yang ada di lingkungan tertentu untuk menumbuhkan rasa memiliki dan memastikan relevansi serta dampak program.

Ketiga, memastikan kolaborasi yang efektif di antara pemangku kepentingan dapat menjadi tantangan. Perbedaan dalam prioritas dan kebijakan organisasi dapat menghambat koordinasi dalam pelaksanaan program pendidikan. Banyak kegiatan filantropi menghasilkan dampak yang terbatas karena beroperasi secara terpisah. Kolaborasi yang lebih besar antar entitas dan pendekatan yang lebih terintegrasi sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dan efisien.

Sektor pendidikan menghadapi kurangnya sinergi antara komunitas lokal, perusahaan, akademisi, organisasi filantropi, masyarakat sipil, serta pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan dana sering kali menjadi kendala dalam merencanakan dan mendukung kegiatan kolaboratif, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan kurikulum, dan pelatihan bagi guru. Untuk menjawab tantangan ini, organisasi filantropi kerap berperan sebagai pelaksana, perantara, dan pemberi dana hibah, mengoordinasikan upaya mereka demi memaksimalkan efektivitas dan memastikan inisiatif-inisiatif yang saling melengkapi.

Tantangan keempat adalah mencapai efektivitas dan kreativitas dalam merancang inisiatif pendidikan. Kurikulum, metode pengajaran, pelatihan, dan teknik pelayanan perlu dikembangkan dengan pendekatan yang inovatif. Terdapat dua syarat utama dalam mendorong inovasi, di antaranya:

- Kesiapan sumber daya manusia: Kemampuan untuk mempelajari dan menerapkan teknik serta konsep baru
- Resistensi terhadap perubahan: Individu yang terbiasa dengan metode tradisional mungkin enggan untuk menerima pendekatan baru

Keterbatasan anggaran juga dapat menghambat pengembangan inisiatif pendidikan yang kreatif dan efektif, kondisi ini dikarenakan inovasi sering kali membutuhkan investasi.

Kelima, memastikan keberlanjutan program dan mengukur dampaknya juga tak kalah penting. Reformasi pendidikan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang pada masyarakat, seperti peningkatan akses, peluang ekonomi, serta pembentukan karakter dan pengembangan mental. Memastikan keberlanjutan bisa menjadi tantangan karena adanya perubahan dalam tujuan dan strategi pemerintah, keterbatasan sumber daya finansial dan sumber daya manusia, serta kebutuhan akan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Memperoleh dan mempertahankan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan juga tidak kalah penting. Penelitian yang dapat diukur adalah aset berharga bagi organisasi filantropi karena membantu mereka mengevaluasi pencapaian, dampak, dan area yang perlu ditingkatkan. Penelitian kolaboratif dalam pendidikan telah terbukti memfasilitasi pembuatan kebijakan yang akurat dan berbasis data.

Peran Tanoto Foundation

Sejak didirikan pada tahun 1981, Tanoto Foundation telah berdedikasi dalam upaya memberdayakan individu dan komunitas melalui berbagai inisiatif pendidikan. Upaya ini, baik di tingkat pusat maupun lokal, didorong oleh keyakinan bahwa pendidikan dapat membawa dampak mendalam bagi masyarakat. Tanoto Foundation memanfaatkan sumber daya finansial, mendorong solusi inovatif, berkolaborasi dengan berbagai mitra, dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan tujuan utama meningkatkan kesempatan dan hasil pendidikan, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan atau hambatan struktural.

Tanoto Foundation hadir untuk menjembatani kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil melalui pendanaan proyek-proyek di daerah kurang mampu atau kurang terlayani. Program pendidikan Tanoto Foundation mencakup intervensi di pendidikan anak usia dini (Program PINTAR), pendidikan dasar dan menengah (Program SIGAP), serta pendidikan tinggi yang berfokus pada kepemimpinan (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Salah satu inisiatif utama Tanoto Foundation adalah mendorong pengembangan literasi di kalangan anak-anak. Dengan menyediakan bahan bacaan bertingkat, Tanoto Foundation membantu anak-anak dalam meningkatkan keterampilan membaca. Bahan-bahan ini, yang digunakan dalam sesi membaca terpandu atau kegiatan membaca bersama dan dirancang untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kecintaan terhadap membaca. Tanoto Foundation juga menekankan pentingnya membudayakan membaca dengan menyadari bahwa akses terhadap bahan bacaan berkualitas sangat penting dalam upaya ini.

Untuk lebih mendukung kualitas literasi, program “Budaya Membaca” didirikan untuk membantu guru dan kepala sekolah dalam menumbuhkan minat baca di kalangan siswa. Sebagai bagian dari inisiatif ini, dan sejalan dengan program Merdeka Belajar, Tanoto Foundation berkontribusi pada program Buku Bacaan Berkualitas Kemendikbudristek pada tahun 2023 dengan menyediakan lebih dari 76.000 buku ke sekolah dasar dan fasilitas PAUD di 12 kabupaten dan kota.

Tanoto Foundation juga fokus pada peningkatan PAUD sebagai bagian dari pilar Pengembangan Lingkungan Belajar. Inisiatif ini mencakup edukasi kepada orang tua tentang pentingnya nutrisi dan perkembangan otak, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan serta peningkatan kualitas tenaga pendidik anak usia dini. Upaya ini didasari oleh temuan Bank Dunia, WHO, dan UNICEF, yang menunjukkan bahwa 80 persen otak anak berkembang pada usia tiga tahun. Hal ini menegaskan misi Tanoto Foundation untuk meningkatkan hasil perkembangan anak dengan meningkatkan kualitas pola pengasuhan anak usia dini (usia 0–3 tahun) (Afriansah & Kusumaningrum, 2024).

Katalisator dan Advokat dalam Memerangi Stunting

Stunting merupakan indikator krisis pangan yang serius dan berkaitan erat dengan kesenjangan pendidikan secara jangka panjang. Data global menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk tingkat kelangkaan pangan akut di 53 negara, dengan peningkatan lebih dari dua kali lipat yang kemungkinan meningkatkan angka stunting pada anak-anak. Anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih besar menghadapi hambatan dalam perkembangan belajar saat memulai pendidikan, sebuah masalah yang dapat diatasi melalui intervensi untuk mengurangi kelaparan pada keluarga dan anak-anak.

Tanoto Foundation berperan sebagai katalis dalam upaya penurunan stunting dengan fokus pada nutrisi dan perkembangan anak. Pada awalnya, yayasan ini mendanai inisiatif *Alive and Thrive* yang bertujuan meningkatkan gizi bagi ibu, bayi, dan anak kecil. Inisiatif ini kemudian diperluas untuk menjangkau masyarakat dan remaja. Selain itu, Tanoto Foundation juga bekerja sama dengan USAID dan organisasi terkemuka lainnya untuk mendukung program nasional pemerintah dalam penurunan stunting. Yayasan ini juga berkolaborasi dengan Bill & Melinda Gates Foundation melalui *Multi-Donor Trust Fund* (MDTF) dari Bank Dunia guna memperkuat upaya Indonesia dalam menangani stunting.

Tanoto Foundation adalah advokat utama dalam memerangi stunting di Indonesia. Pendekatannya melibatkan strategi multi-aspek untuk mengatasi penyebab utama stunting, seperti gizi yang buruk, kurangnya edukasi tentang perkembangan sehat, dan keterlibatan komunitas. Melalui kemitraan dengan organisasi global seperti USAID dan Bill & Melinda Gates Foundation, serta para pemangku kepentingan lokal, yayasan ini mendukung program-program yang dipimpin pemerintah untuk mengurangi tingkat stunting. Dukungan mereka memungkinkan peningkatan program nutrisi, pendidikan yang terfokus, dan keterlibatan masyarakat, yang semuanya sangat penting untuk mengurangi dampak stunting terhadap hasil kesehatan dan pendidikan. Dengan memperkuat upaya ini, Tanoto Foundation berperan penting dalam menjembatani kesenjangan dalam perkembangan anak dan pencapaian pendidikan jangka panjang (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

SIGAP

Tanoto Foundation mengembangkan program Siapkan Generasi Anak Berprestasi (SIGAP) untuk mendukung transisi dari PAUD memasuki sekolah dasar. Program ini fokus pada anak-anak usia empat hingga enam tahun dan memberikan pelatihan serta pendampingan kepada para guru PAUD dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak siap secara mental untuk memasuki sekolah dasar dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka sesuai dengan tahap usia. Saat ini, program SIGAP dilaksanakan di 22 lembaga PAUD dalam rangka membantu anak-anak Indonesia membangun kesiapan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk transisi yang sukses ke pendidikan dasar (Afriansah & Kusumaningrum, 2024).

Program SIGAP berkomitmen untuk memastikan setiap anak mencapai potensi maksimal mereka dan siap memasuki sekolah dasar. Inisiatif utama dari program ini, yang beroperasi pada tingkat nasional, lokal, dan global, menangani bidang penting seperti masalah stunting, pengasuhan, stimulasi awal bagi anak usia 0 hingga 3 tahun, dan PAUD untuk usia 3 hingga 6 tahun. Sebagai bagian dari strategi pengasuhan untuk anak-anak usia 0 hingga 3 tahun, SIGAP mendirikan *SIGAP Center Based Learning*. Pusat ini memberikan pendidikan dan sumber daya kepada orang tua untuk stimulasi efektif guna mendukung perkembangan awal yang optimal.

Tanoto Foundation secara strategis memfokuskan intervensinya pada periode usia 0–3 tahun karena perhatian pemerintah yang terbatas dan sedikitnya program yang tersedia untuk tahap penting ini. Dalam tahapan programnya, *SIGAP Center Based Learning 1.0* dan *SIGAP Center Based Learning 2.0*, dirancang untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Pilar “Meningkatkan Lingkungan Pembelajaran” dari program ini mencakup pendidikan dan pengembangan anak usia dini, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidik anak usia dini, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran awal, serta meningkatkan nutrisi selama tahap pembelajaran penting bagi anak-anak usia 0 hingga 6 tahun (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

PINTAR

Tanoto Foundation menjadikan bonus demografis sebagai indikator penting untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan program-programnya, terutama di sektor pendidikan dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia berkualitas pada tahun 2045. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Tanoto Foundation melakukan beberapa modifikasi operasional pada program-programnya. Pendekatan ini tercermin dalam program Pelita Pendidikan 2010 yang menekankan kolaborasi multi-pemangku kepentingan dan bersifat intensif secara operasional. Pada tahun 2018, program ini berkembang menjadi program PINTAR (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dengan cara memperbaiki pengajaran dan pembelajaran, kepemimpinan dan manajemen sekolah, serta kemampuan membaca dan matematika. Untuk mencapai tujuan ini, Program PINTAR fokus pada empat variabel pengembangan utama. Tujuan program ini meliputi membantu Indonesia untuk masuk dalam lima besar negara dengan skor PISA tertinggi pada tahun 2030 dan mendukung pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Guna memastikan keselarasan tujuan dan prioritas pemerintah, Tanoto Foundation bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kementerian Agama (Kemendikbudristek), serta pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah lokal.

Pada tahun 2018, program PINTAR telah aktif di 14 kabupaten dan kota di lima provinsi: Sumatra Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Program ini juga bekerja sama dengan 10 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Program PINTAR meningkatkan kapasitas sistem dan pemangku kepentingan melalui perencanaan berbasis riset, investigasi, dan survei. Tiga komponen utama dalam program PINTAR meliputi partisipasi dalam Program Organisasi Penggerak (POP), memperkenalkan e-PINTAR, platform pembelajaran mandiri daring gratis untuk guru di seluruh Indonesia, dan mempromosikan inovasi di LPTK untuk memperbaiki prosedur pelatihan guru prajabatan (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Melalui program PINTAR, Tanoto Foundation memiliki tujuan untuk melatih dan mendukung kepala sekolah, guru, pengawas, dan komite sekolah di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, dan mitra LPTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, dan budaya membaca. Program ini turut membantu kepala sekolah mengembangkan kepemimpinan dalam pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah, termasuk otonomi, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi, untuk memastikan kesuksesan pendidikan. Selain itu, kepala sekolah juga dilatih untuk secara konsisten menerapkan strategi pembelajaran aktif dan manajemen berbasis sekolah yang efektif.

Menurut Tanoto Foundation, sekolah memerlukan administrator dengan kepemimpinan dan visi luar biasa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi guru dan siswa. Penelitian menunjukkan bahwa guru yang telah mengikuti pelatihan termotivasi untuk memanfaatkan sumber daya pribadi, keterampilan profesional, dan kemampuan pedagogis mereka. Kompetensi emosional, ketahanan kerja, dan efikasi diri mendorong mereka untuk menyesuaikan metode pengajaran guna memenuhi kebutuhan siswa dan meningkatkan motivasi mereka. Mereka juga antusias dalam mempertahankan disiplin, bekerja sama, dan menghadapi perubahan pendidikan dengan sikap optimis.

Menghadapi kesenjangan pendidikan dan terbatasnya fasilitas pelatihan bagi guru di Indonesia, Tanoto Foundation mengembangkan program PINTAR pada tahun 2018 sebagai evolusi dari program Pelita Pendidikan. Kini, program PINTAR telah diimplementasikan di lima provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Program PINTAR fokus pada tiga pendekatan utama: 1) mencontohkan praktik baik dalam pengajaran dan kepemimpinan sekolah sambil mendorong keterlibatan orang tua dalam pembelajaran siswa; 2) memperkuat kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk merencanakan program pendidikan dan menyebarkan praktik baik; dan 3) mendukung LPTK dalam menawarkan pendidikan guru prajabatan berkualitas dan pelatihan guru inovatif.

Tanoto Foundation melatih dan membimbing fasilitator nasional dan daerah untuk membantu pemerintah kota dan daerah mendirikan pusat keunggulan. Fasilitator ini kemudian bertindak sebagai agen perubahan, berbagi model dan praktik pengajaran terbaik dengan sekolah non-mitra dan daerah lain. Pada tahun 2022, inisiatif PINTAR telah memberikan manfaat bagi sekitar 47.367 pendidik (kepala sekolah dan guru) di seluruh Indonesia. Program ini berdampak positif pada sekitar 250.000 sekolah di Indonesia, 910.231 siswa, dan 23.591 pendidik mitra. Para penerima manfaat ini tersebar di tujuh provinsi: Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Afriansah & Kusumaningrum, 2024; Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Program-program yang dijalankan oleh Tanoto Foundation diharapkan memberikan dampak signifikan dalam mendukung inisiatif pemerintah dengan mengatasi kesenjangan, mendorong kreativitas, dan bertujuan untuk perbaikan jangka panjang dalam pendidikan. Kolaborasi dan penanggulangan ketidaksetaraan adalah komponen penting dari filantropi pendidikan yang efektif. Salah satu program PINTAR yang menonjol adalah mengatasi tantangan kualitas pendidikan yang tidak memadai. Dengan meningkatkan metode pengajaran melalui teknologi digital, PINTAR meningkatkan kapasitas guru di luar batas pelatihan tradisional.

“Tanoto Foundation memberikan bantuan teknis kepada Dinas Pendidikan mitra dalam merancang dan melaksanakan inovasi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap daerah. Misalnya, selama pandemi, kami mendukung penyebaran praktik terbaik kepada guru dan kepala sekolah melalui platform digital yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kendal, Tebo, dan Siak”—Laporan PINTAR, 2020.

Kerja sama antara Tanoto Foundation dan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota memperkuat perencanaan program pendidikan, pembuatan kebijakan, dan penyebarluasan praktik baik untuk pertumbuhan sekolah. Pemerintah daerah telah mengakui manfaat dari inisiatif Tanoto Foundation. Misalnya, perwakilan dari Provinsi Riau mencatat bahwa Program PINTAR telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan praktik efektif di madrasah dan sekolah serta memfasilitasi penyebaran baik tersebut ke lembaga lainnya. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada lebih banyak pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas pengajaran, pembelajaran, dan manajemen sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan standar pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan bermoral.

Kontribusi Tanoto Foundation yang signifikan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan lingkungan pembelajaran. Pada tahun 2022, yayasan ini mengumpulkan total dana sebesar US\$27 juta, dengan US\$11,6 juta berasal dari Tanoto Foundation. Melalui inisiatif seperti PINTAR, Tanoto Foundation memiliki tujuan untuk menutup kesenjangan pendidikan dan mempromosikan perkembangan holistik di seluruh Indonesia (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

e-PINTAR

Ketika pembelajaran tatap muka dihentikan akibat adanya pandemi COVID-19, Tanoto Foundation memperkenalkan solusi inovatif: program e-PINTAR. Kegiatan ini merupakan program pelatihan jarak jauh yang membantu para guru mengatasi tantangan pandemi. Demi aksesibilitas untuk semua pendidik Indonesia, serta sekolah mitra dan sekolah yang didanai oleh yayasan, e-PINTAR dirancang untuk mendukung praktik mandiri dan pengembangan pembelajaran, baik secara digital maupun tatap muka, melalui platform sistem manajemen pembelajaran. Dalam hal pengembangan sekolah, platform e-PINTAR memberikan manfaat kepada 15.932 guru dan kepala sekolah pada tahun 2022. Selain itu, program ini mendukung 27.380 calon guru dari 79 lembaga pendidikan, yang meningkatkan pendidikan calon guru (Afriansah & Kusumaningrum, 2024).

TELADAN

Salah satu inisiatif utama Tanoto Foundation dalam membentuk generasi pemimpin masa depan yang mampu memberikan dampak positif bagi Indonesia adalah Program Transformasi Pendidikan untuk Menghasilkan Pemimpin Masa Depan (TELADAN). Program ini menargetkan mahasiswa semester pertama dari sembilan universitas mitra yang memberikan mereka tidak hanya beasiswa untuk biaya kuliah dan tunjangan hidup, tetapi juga sistem dukungan yang komprehensif dan bertingkat untuk pengembangan kepemimpinan.

TELADAN menawarkan peluang untuk pengembangan diri global, pengabdian masyarakat, fasilitas kolaboratif, dan jaringan yang luas. Program ini mencakup kegiatan sosial, kesempatan jaringan, magang, dan pengembangan keterampilan dengan tujuan meningkatkan rasio partisipasi bruto Indonesia di pendidikan tinggi yang tercatat sebesar 33,7 persen pada tahun 2017.

Beasiswa TELADAN bertujuan untuk membekali pemimpin masa depan Indonesia dengan pengetahuan, tanggung jawab, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk memberikan dampak sosial yang berarti. Para penerima beasiswa menerima dukungan studi dan pelatihan kepemimpinan yang terstruktur dari semester kedua hingga kedelapan. Pelatihan ini mencakup peluang penelitian, program sosial, jejaring, magang, dan pengembangan keterampilan yang semuanya dirancang untuk membantu mereka mewujudkan potensi penuh mereka sebagai pemimpin masa depan. Program ini menyediakan beasiswa penuh, tunjangan bulanan, serta sistem pelatihan dan pemantauan yang terorganisir untuk meningkatkan *soft skills*.

Komponen yang signifikan dari program TELADAN untuk para *Tanoto Scholars* di semester ketujuh dan kedelapan adalah modul Persiapan Profesional. Program ini berfokus pada mempersiapkan mahasiswa untuk karier mereka dengan etika profesional. Modul ini mencakup literasi keuangan, wawasan bisnis untuk menyempurnakan keterampilan kewirausahaan, serta sikap profesional, termasuk mengelola profil LinkedIn, menyusun resume yang efektif, negosiasi gaji, dan memahami pajak terkait gaji.

Di akhir program, acara *job dating* diselenggarakan untuk menghubungkan para *scholar* dengan calon pemberi kerja. Acara ini memungkinkan para mahasiswa untuk berinteraksi dengan staf *Human Resources* (HR) profesional dari perusahaan yang berpartisipasi dan menjelajahi berbagai jalur karier. Tanoto Foundation juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan organisasi terkemuka untuk menawarkan peluang magang yang berharga bagi *Tanoto Scholars* yang memberikan mereka paparan praktis ke dunia profesional.

Dalam hal pencapaiannya, program TELADAN telah mendukung 612 *Tanoto Scholars* aktif, menunjuk 175 *scholar* baru, memfasilitasi paparan internasional untuk 87 *scholar*, dan memungkinkan 282 inisiatif sosial yang dipimpin oleh para *scholar*. Antara tahun 2006 dan 2020, program ini mendukung 579 proyek penelitian terapan dan memiliki total 7.825 *Tanoto Scholars*. Sepuluh kampus mitra saat ini menjadi bagian dari program beasiswa TELADAN (Afriansah & Kusumaningrum, 2024).

Komitmen Tanoto Foundation terhadap SDGs

Salah satu upaya Tanoto Foundation untuk memajukan SDGs adalah pendirian SDG Academy Indonesia yang bekerja sama dengan Bappenas dan UNDP. Inisiatif ini menargetkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk entitas pemerintah, lembaga akademik, komunitas bisnis, organisasi amal, kelompok masyarakat sipil, dan media. SDG Academy Indonesia didedikasikan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sambil membangun kapasitas dalam tata kelola, kebijakan, pemecahan masalah kreatif, serta pemantauan dan pelaporan yang efektif (Afriansah & Kusumaningrum, 2024).

Gambar 15. Tanoto Foundation: SDG Academy Indonesia



Tanoto Foundation: SDG Academy

Tanoto Foundation, Bappenas, dan UNDP mendirikan akademi pertama di Indonesia, yaitu SDG Academy Indonesia, untuk meningkatkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, termasuk SDG 4 yang berfokus pada isu pendidikan. SDG Academy Indonesia bertujuan membantu para pelaku dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pencapaian SDGs pada tahun 2030, sesuai kesepakatan PBB.

Tanoto Foundation mengatasi tantangan utama agar program-programnya dapat secara efektif mendukung pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan pendidikan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pendidikan di berbagai daerah. Memahami konteks regional dan melakukan penyelidikan mendalam sangat penting untuk merancang inisiatif yang disesuaikan dengan masing-masing daerah yang akan menghasilkan perbaikan substansial dan perubahan positif bagi masyarakat. Untuk memastikan bahwa program-program Tanoto Foundation memberikan dampak yang berkelanjutan dan tetap relevan, sangat penting untuk menjelajahi cara-cara untuk meningkatkan dan mengoptimalkan inisiatif-inisiatif tersebut.

Bab V

Visi Indonesia Emas 2045



Visi Indonesia Emas

Di tengah upaya yang dilakukan oleh organisasi filantropi dalam membangun sektor pendidikan di Indonesia, Indonesia telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai panduan pembangunan jangka panjangnya. Dengan kerangka kerja khusus untuk mencapai tujuan tersebut, sektor pendidikan menjadi krusial dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang menekankan paradigma pembelajaran sepanjang hayat. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan tugas besar yang perlu dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan di negara ini, termasuk organisasi filantropi dan lembaga pemerintah.

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2045. Rencana ini mencakup lima tujuan utama: (1) pendapatan tinggi per kapita; (2) nol kemiskinan; (3) kepemimpinan internasional; (4) sumber daya manusia yang kompetitif; dan (5) emisi nol bersih.

Bappenas telah merumuskan delapan agenda strategis untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045:

1	Transformasi sosial	5	Ketahanan sosial dan ekologi
2	Transformasi ekonomi	6	Pembangunan yang merata
3	Transformasi manajemen	7	Fasilitas publik yang berkualitas dan ramah lingkungan
4	Penguatan stabilitas nasional	8	Pembangunan berkelanjutan

Agenda-agenda ini sangat berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang menentukan hasil dari visi Indonesia Emas 2045 (Indonesia Emas 2045, 2024).

Lebih lanjut lagi, sektor pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung empat misi lainnya karena sektor ini berhubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan, memastikan partisipasi bermakna dalam urusan global, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Pada intinya, keberhasilan lima misi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kemampuan sektor pendidikan dalam meningkatkan kualitas warga negara Indonesia yang menjadi pusat kemajuan negara.

Sumber Daya Manusia yang Kompetitif

Sektor pendidikan memainkan peran kunci dalam mencapai misi keempat Indonesia Emas 2045: menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif melalui penguasaan teknologi canggih serta pengembangan kreativitas. Untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, sektor pendidikan perlu meningkatkan Indeks Modal Manusia menjadi 0,73, sesuai target yang ditetapkan oleh Bappenas untuk Indonesia Emas 2045 (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 2045 yang menargetkan Indeks Modal Manusia sebesar 73 persen—peningkatan signifikan dari tingkat tahun 2020—diketahui bahwa hasil HCI tahun 2020 menunjukkan produktivitas individu, dalam hal kesehatan dan pendidikan, hanya mencapai 54 persen dari kapasitas ideal mereka. Inisiatif pendidikan di masa depan harus sesuai dengan karakteristik dan aspirasi generasi yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Ini memerlukan penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi yang berfokus pada pengembangan pribadi serta menanggapi karakteristik generasi milenial Indonesia yang ditandai dengan ketergantungan pada internet, loyalitas yang rendah, preferensi transaksi non-tunai, serta kebiasaan kerja yang efisien. Selain itu, mereka juga mahir melaksanakan banyak tugas sekaligus, menyukai jadwal liburan yang fleksibel, memiliki minat politik yang minim, aktif berbagi, dan memiliki rasa solidaritas yang kuat.

Inisiatif Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk merevisi undang-undang dan peraturan pendidikan mencerminkan komitmen untuk meningkatkan standar dan aksesibilitas pendidikan Indonesia. Menyadari keterbatasan undang-undang dan kebijakan yang ada, rencana ini mencakup revisi dan implementasi strategi baru, seperti peningkatan efektivitas guru dan hasil pembelajaran (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Pemangku kepentingan publik perlu bekerja memenuhi kebutuhan yang diperlukan agar sektor pendidikan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Misalnya, Bappenas tengah merumuskan strategi untuk meningkatkan akses, kualitas, lingkungan sekolah, dan kesiapan tenaga kerja di sektor pendidikan. Unsur utama strategi Bappenas meliputi:

1. **Meningkatkan Akses Pendidikan:** Meningkatkan angka partisipasi untuk memastikan akses pendidikan yang merata dari sektor publik, masyarakat, dan swasta.
2. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan:** Mendorong pembelajaran digital, budaya membaca, serta pendidikan karakter.
3. **Revitalisasi Sekolah:** Mengembangkan peningkatan profesionalisme guru dan membangun budaya sekolah yang mendukung melalui kemitraan yang kuat antara orang tua, kepala sekolah, dan guru.
4. **Pengembangan Tenaga Kerja:** Mempersiapkan tenaga kerja untuk Indonesia Emas 2045 dengan menambah jumlah individu berpendidikan dan wirausaha, meningkatkan kemampuan berbahasa asing, melestarikan bahasa daerah, mempromosikan pendidikan vokasional, memperluas disiplin STEAM (sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika), dan membentuk pusat pendidikan tinggi yang unggul (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Selain Bappenas, pemangku kepentingan utama seperti Kemendikbudristek dan Komisi X DPR RI juga memainkan perannya dalam menggunakan berbagai metode untuk memperkuat sektor pendidikan, termasuk peninjauan regulasi, optimalisasi anggaran, dan penguatan pendidikan kewarganegaraan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2020).

Meskipun upaya-upaya ini bertujuan memberikan pendekatan komprehensif terhadap pendidikan dalam konteks Indonesia Emas 2045, diperlukan kolaborasi di antara banyak pemangku kepentingan untuk mengatasi cakupan luas sektor pendidikan secara efektif. Ini mencakup tidak hanya entitas publik tetapi juga organisasi swasta, seperti kelompok filantropi, yang berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kepemimpinan Internasional

Pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi mengidentifikasi dua faktor kunci bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045: mengoptimalkan bonus demografi dan memperoleh kepercayaan internasional (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi semakin penting mengingat Indonesia dihadapkan bonus demografi yang harus dikelola secara efektif untuk menjamin pertumbuhan berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang.

Konkretnya, Presiden Jokowi menyoroti pencapaian pemerintah di bidang ini, termasuk penurunan angka stunting dari 37 persen pada 2014 menjadi 21,6 persen pada 2022. Selain itu, peningkatan juga tercatat pada Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 72,9 dan Indeks Pemberdayaan Gender yang mencapai 76,5 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023).

Presiden Jokowi mengatakan, "Sumber daya manusia yang kita kembangkan harus berkontribusi pada produktivitas nasional, menciptakan sektor ekonomi baru yang menawarkan peluang kerja dan memberikan nilai tambah yang signifikan."

Selain itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa peran Indonesia sebagai presiden G20 pada 2022 dan ketua ASEAN pada 2023, serta keterlibatannya dalam isu internasional seperti perlindungan hak asasi manusia, upaya kemanusiaan, kesetaraan, dan manajemen krisis global, telah memperkuat citra internasional Indonesia. Presiden Jokowi yakin bahwa dengan reputasi global yang positif, Indonesia akan berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang internasional dan bergerak menuju Indonesia Emas 2045 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023).

Pendapatan Tinggi per Kapita & Nol Kemiskinan

Kepala Bappenas periode masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2019-2024, Suharso Monoarfa, menekankan bahwa perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada peningkatan pendidikan, mengingat tingkat pendidikan pekerja saat ini rata-rata hanya setingkat sekolah dasar. Suharso menyatakan bahwa pendidikan berkualitas yang merata adalah komponen kunci transformasi sosial yang diuraikan dalam RPJPN 2025-2045. Menurut Suharso, teknologi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Sinaga, 2023).

Kepala Bappenas Suharso mengatakan, "Mengapa tidak pada masa PAUD (pendidikan anak usia dini) ke SD (sekolah dasar) anak-anak diajarkan untuk menguasai minimal bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa *coding*. Kalau kita memampukan mereka lebih awal, ini membuat lebih optimistis."

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) juga menyoroti sektor pendidikan sebagai pilar vital untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Sektor ini berkontribusi pada ketahanan nasional dengan mengembangkan talenta khusus untuk pasar kerja, serta menciptakan pemimpin masa depan yang siap, melek digital, inovatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan (Tanoto Foundation & CIPS, 2024).

Keselarasan antara hasil pendidikan dan kebutuhan industri, terutama dalam pendidikan vokasi, telah menjadi prioritas pemerintah. Pendidikan vokasi berada di bawah Kemendikbudristek, sedangkan pelatihan vokasional dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pengaturan ini memastikan bahwa kegiatan, kurikulum, program magang, dan rencana pelatihan selaras dengan kebutuhan industri, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022.

Selain itu, pemerintah turut melibatkan pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional, untuk memberikan wawasan dan menentukan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja. Hal ini membantu lembaga vokasional untuk lebih memahami pasar kerja masa depan dan menyesuaikan program mereka (Tempo, 2020; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022). Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah bermitra dengan *The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ) dalam Proyek Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Teknis Vokasi 2.0 (TSR) pada Juni 2024 yang bertujuan untuk mendukung reformasi utama dalam TVET (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024).

Sumber daya manusia berkualitas, yang dikembangkan melalui pendidikan, juga memainkan peran penting dalam mencapai visi nol kemiskinan. Pendidikan berkualitas cenderung menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Pada 2022, meskipun sektor pendidikan mengalami tingkat pertumbuhan terendah kedua di antara semua sektor, yaitu 0,42 persen, sektor ini tetap menjadi kontributor tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, melampaui sektor-sektor dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi.

Meskipun demikian, Indonesia menghadapi angka kemiskinan ekstrem yang mengkhawatirkan, dengan 5,59 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2022, angka yang hanya sedikit mengalami perbaikan dari sekitar 5,8 juta pada tahun sebelumnya. Kemajuan yang lambat ini sangat mengkhawatirkan, mengingat tujuan ambisius Indonesia untuk mencapai nol kemiskinan pada 2045 dan nol kemiskinan ekstrem pada 2030 menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan negara-negara maju tidak selalu disebabkan oleh keunggulan sumber daya alam, yang sebenarnya melimpah di Indonesia, tetapi lebih kepada institusi inklusif yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang. Hal ini menekankan bahwa keterbatasan sumber daya bukanlah satu-satunya penjelasan untuk kemiskinan yang terus-menerus. Faktor seperti kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan, memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan.

Akses terhadap pendidikan dasar sangat penting untuk meningkatkan kehidupan secara global sebagai dasar untuk keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun pendidikan tinggi bermanfaat untuk jalur karier tertentu atau pengetahuan khusus, pendidikan dasar adalah hal mendasar yang memberikan individu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang penting untuk membuat keputusan yang bijaksana, memecahkan masalah, dan berinteraksi secara efektif.

Pentingnya pendidikan dasar dalam memutus rantai kemiskinan terlihat nyata. Penelitian di daerah pedesaan Zimbabwe menunjukkan korelasi yang kuat antara perangkap kemiskinan dan terbatasnya akses ke pendidikan dasar dengan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada kelompok dengan akses pendidikan terendah.

Di Indonesia, anak-anak dari keluarga miskin sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan dasar yang menyebabkan isolasi dan terbatasnya peluang ekonomi. Situasi ini sejalan dengan kondisi sosial-ekonomi yang stagnan karena individu-individu ini dipaksa untuk tumbuh dan menikah dalam strata sosial-ekonomi yang sama. Akibatnya, kurangnya akses pendidikan tidak hanya membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tetapi juga menjebak mereka dalam siklus kemiskinan (Haidir & Setyari, 2023).

Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan ekonomi hijau sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan untuk mencapai emisi nol bersih dan mengatasi isu-isu iklim memberikan peluang besar sekaligus tantangan. Indonesia, yang kaya akan sumber daya seperti pariwisata berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi hijau. Guna mewujudkan visi ini, sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan Indonesia agar lebih siap menghadapi langkah-langkah yang perlu dilakukan serta konsekuensi yang harus ditangani bersama oleh seluruh lapisan masyarakat.

Energi terbarukan adalah bidang utama yang dapat dicapai oleh Indonesia. Negara ini diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti sinar matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Pemanfaatan sumber daya ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca.

Dalam bidang pertanian, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengganggu siklus nutrisi dan pertumbuhan tanaman dengan mencemari air permukaan dan air tanah. Selain itu, pestisida dapat merusak mikroorganisme tanah yang penting untuk menjaga keseimbangan ekologis. Peralihan ke praktik pertanian organik, pengelolaan air yang efisien, dan penggunaan pupuk organik dapat mengurangi masalah ini dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia.

Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pariwisata berkelanjutan. Beragamnya lanskap alam, warisan budaya, dan situs sejarah di Indonesia memiliki potensi untuk mendorong pariwisata ramah lingkungan yang menguntungkan komunitas lokal dan melestarikan lingkungan. Pengelolaan yang efektif, termasuk penegakan hukum yang kuat terhadap perburuan liar dan deforestasi, serta perlindungan yang ketat terhadap flora dan fauna endemik, sangat penting untuk pariwisata berkelanjutan. Komunitas lokal harus mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata melalui peluang kerja dan bisnis kecil dengan perencanaan yang inklusif dan partisipatif untuk memastikan distribusi manfaat yang adil.

Namun, Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam mengejar ekonomi hijau. Paradigma ekonomi yang berlaku, struktur kelembagaan, kerangka peraturan, dan keterbatasan keuangan menjadi kendala. Model ekonomi konvensional yang dominan masih mempengaruhi norma-norma masyarakat, dan dibutuhkan lebih banyak edukasi publik tentang energi hijau. Regulasi pemerintah dan inefisiensi kelembagaan, termasuk biaya transaksi yang tinggi dan kebijakan yang tumpang tindih merumitkan kemajuan.

Investasi dalam infrastruktur ekonomi hijau membutuhkan biaya yang besar dengan kebutuhan sebesar Rp 3.799 triliun hingga 2030. Namun faktanya, investasi dalam energi baru dan terbarukan sebelumnya tidak pernah mencapai target. Misalnya, target investasi energi terbarukan sebesar US\$2,02 miliar pada tahun 2020 hanya sebagian tercapai dengan realisasi sebesar US\$1,36 miliar. Begitu pula, target tahun 2021 sebesar US\$2,04 miliar tidak terpenuhi, hanya mencapai US\$1,51 miliar. Pada pertengahan 2022, hanya US\$0,67 miliar yang terealisasi dari rencana US\$3,93 miliar.

Transisi ke ekonomi hijau juga membawa risiko *stranded assets*. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil, infrastruktur transportasi, dan aset lainnya yang bergantung pada energi tak terbarukan bisa menjadi usang atau kehilangan nilai seiring pergeseran ekonomi menuju energi yang terbarukan dan berkelanjutan. Perubahan kebijakan yang mengurangi emisi gas rumah kaca dapat semakin mengurangi nilai aset ini. Misalnya, jika pembangkit listrik berbahan bakar fosil dihentikan tanpa langkah-langkah pemanfaatan kembali yang tepat, mereka dapat menjadi aset yang terabaikan (Qalbie & Rahmaniah, 2023).

Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, sektor pendidikan dapat berperan penting dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas serta biaya transisi menuju ekonomi hijau, pendidikan dapat berkontribusi dalam mencapai emisi nol bersih dan mengelola perubahan iklim. Meskipun proses transisi energi memerlukan upaya yang besar, hal ini menjanjikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan serta berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan bagi semua spesies.

Mencapai Indonesia Emas 2045 melalui Perguruan Tinggi

Visi Indonesia 2045, yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pedoman kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi. Pasal 31 UUD 1945, yang direvisi pada amandemen keempat, menguraikan tiga misi utama untuk pendidikan tinggi: (1) menyediakan akses pendidikan yang luas bagi seluruh

warga negara, (2) mengembangkan sistem pendidikan yang selaras dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, dan (3) memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban, dan kesejahteraan umum.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, peran pendidikan tinggi juga turut berkembang. Saat ini, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama melalui alih hasil penelitian ke dalam bidang ekonomi. Pergeseran menuju model universitas kewirausahaan menekankan kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah—model *triple helix*. Pendekatan ini mengharuskan setiap sektor mengoptimalkan perannya sambil bekerja secara sinergis.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional mencakup semua komponen pendidikan yang saling terkait dan bertujuan mencapai tujuan nasional. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan pengembangan manusia, kemampuan teknologi, dan peradaban di tengah lanskap global yang berubah cepat.

Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, terdiri dari tiga pilar: (1) pendidikan, (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat. Pilar-pilar ini mendukung misi konstitusional dan Visi Indonesia 2045 dengan mendorong pembangunan nasional dan kemajuan pendidikan.

Program Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2021 menjadi pusat panduan bagi perguruan tinggi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Program ini menawarkan pengalaman belajar yang transformatif yang mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi dan menjadi pembelajar seumur hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, program ini bertujuan mencapai targetnya dalam 15 tahun ke depan.

Merdeka Belajar berfokus pada peningkatan ekosistem pendidikan, termasuk guru, lingkungan belajar, kurikulum, dan sistem penilaian. Program ini mempromosikan pergeseran dari pembelajaran yang berfokus pada ujian ke penguasaan pengetahuan. Lebih lanjut lagi, program ini menekankan kedalaman daripada luasnya kurikulum dan mendukung guru dengan pelatihan untuk menyesuaikan kurikulum berdasarkan karakteristik sekolah dan kebutuhan siswa.

Teknologi memainkan peran penting dalam transformasi pendidikan terkini dengan kemajuan dalam realitas virtual serta meningkatkan pengalaman belajar interaktif. Seiring pendidikan yang semakin mudah dijangkau, institusi mengintegrasikan teknologi *mobile* untuk menyediakan guru dengan berbagai alat pembelajaran. Studi Bernard Marr di Forbes mengindikasikan bahwa arah pengembangan pendidikan telah menuju pada teknologi pendidikan futuristik, termasuk Sekolah Masa Depan Google untuk Pendidikan dan Model Masa Depan Ruang Kelas.

Sementara program Merdeka Belajar menetapkan hasil untuk 15 tahun ke depan, pemerintah harus memastikan kesiapan kelembagaan, pemahaman guru, dan kesiapan untuk implementasi kegiatan tersebut di lapangan. Infrastruktur yang kuat sangat penting untuk memanfaatkan teknologi pendidikan secara efektif, terutama untuk pembelajaran jarak jauh. Ahli berpendapat bahwa kerangka kerja program saat ini mungkin tidak cukup mengatasi keragaman wilayah, kualitas pendidik, dan manajemen unit pendidikan. Program ini juga kurang memuat ketentuan untuk penyandang disabilitas, guru honorer, layanan non-diskriminatif untuk pendidikan negeri dan swasta, serta alokasi anggaran khusus. Selain itu, karakteristik dan kompetensi siswa Pancasila yang diharapkan dalam peta jalan yang telah dibuat masih kurang jelas. Rentang waktu program yang hanya sampai tahun 2035 juga menimbulkan pertanyaan tentang keselarasan dengan target 2045 untuk Indonesia Emas 2045 (Hendytio, Perkasa, Fernandes, Fahrizal, & Subowo, 2024).

Bab VI

Pemerintahan Prabowo - Gibran



Pemerintahan Prabowo - Gibran



“Semua anak-anak bangsa kita bisa sekolah dan menuntut ilmu terbaik dengan lancar. Semua guru tekun mencerdaskan bangsa dan hidupnya dijamin pemerintah.”

- Prabowo & Gibran

Dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045, kebijakan pendidikan hadir sebagai prioritas utama bagi Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Reformasi pendidikan yang mereka usulkan berpotensi mendorong transformasi mendalam, tidak hanya dalam menghasilkan lulusan yang unggul secara akademis, tetapi juga dalam membentuk karakter nasional yang tangguh dan adaptif untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang.

Revolusi pendidikan yang diusung oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran hendak menanamkan etos budaya baru yang menempatkan proses pembelajaran sebagai komponen penting dalam kehidupan. Pergeseran budaya ini diharapkan dapat mendefinisikan ulang pendidikan, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai investasi krusial bagi masa depan bangsa sekaligus meningkatkan daya saing global Indonesia.

Komitmen mereka terhadap pendidikan dijabarkan secara eksplisit dalam dokumen Visi-Misi dan Program untuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Pendidikan menjadi pilar utama agenda mereka yang dijelaskan dalam poin keempat dari Asta Cita. Poin ini menekankan dedikasi mereka untuk memajukan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, program mereka mencakup sembilan inisiatif utama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dua puluh program yang didedikasikan untuk memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, 2023). Gambaran umum inisiatif pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran disajikan dalam Tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20. Arah Kebijakan Pendidikan di Masa Depan

FOKUS PROGRAM	PRABOWO-GIBRAN
Akses Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa untuk anak-anak dari beragam profesi • Memperluas cakupan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga ke perguruan tinggi dan pesantren • Menyediakan beasiswa bagi anak-anak petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat sarjana hingga doktoral
Revitalisasi Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten dan merenovasi sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan
Pengembangan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan bersertifikat • Mendorong perusahaan untuk menyediakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas
Kesejahteraan Guru	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan jalur cepat untuk guru honorer dengan segera melakukan transisi guru honorer kategori 2 (K2)⁴² menjadi pegawai negeri sipil • Beasiswa pendidikan S1 hingga S3 untuk guru • Penetapan upah minimum bagi guru PAUD, madrasah, dan yayasan swasta • Meningkatkan kesejahteraan peneliti, dosen, dan seluruh tenaga kependidikan

⁴² Tenaga honorer kategori dua (K2) adalah tenaga honorer yang diangkat oleh instansi pemerintah pusat atau daerah setelah tanggal 1 Januari 2005, namun tidak menerima gaji dari APBN atau APBD. Mereka biasanya mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber non-budgeter, seperti dana komite sekolah, BOS, dana bantuan pemerintah pusat, atau sumbangan masyarakat. Sebaliknya, honorer K2 belum mendapatkan kepastian status sebagai calon pegawai negeri sipil melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005.

Kualitas Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang berdaya saing • Menanamkan budaya maritim dalam pendidikan nasional • Meningkatkan literasi digital untuk mendukung ekonomi digital
Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pengesahan Undang-Undang Disabilitas melalui Peraturan Presiden • Menghentikan marjinalisasi disabilitas melalui kesadaran • Mempromosikan pendidikan inklusif dan aksesibilitas untuk kesempatan yang sama di berbagai sektor bagi penyandang disabilitas
Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Makan bergizi gratis di sekolah dan madrasah, serta bantuan nutrisi untuk balita dan ibu hamil
Madrasah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dana untuk beasiswa • Mengembangkan sumber daya manusia di pesantren dan LSM • Mengakui ijazah pesantren • Mengembangkan kewirausahaan • Meningkatkan fasilitas dengan dukungan pemerintah
Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Merevitalisasi balai latihan kerja dan sekolah di berbagai bidang keahlian • Bermitra dengan perusahaan swasta untuk beasiswa dan magang bagi lulusan SMK dan perguruan tinggi • •Pembenahan Balai Latihan Kerja untuk kerajinan tangan dan seni yang terampil untuk tenaga kerja yang kompetitif
Institusi Pendidikan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dana penelitian dan inovasi untuk mencapai 1,5 hingga 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam waktu lima tahun
Informal dan non-formal	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas program pendidikan formal dan non-formal yang inklusif, praktis, dan humanis untuk mengembangkan potensi penuh penyandang disabilitas

(Tanoto Foundation & CIPS, 2024)

Prabowo-Gibran juga meluncurkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Inisiatif utama dalam program ini adalah penyediaan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah dan pesantren yang dilengkapi dengan pendirian sekolah-sekolah unggulan terpadu di setiap kabupaten untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas.

Program Makan Bergizi Gratis

Indonesia menghadapi tantangan gizi yang cukup signifikan, dengan 21 juta orang—sekitar 7 persen dari populasi—mengalami malnutrisi dan asupan kalori harian per kapita yang berada di bawah standar Kementerian Kesehatan, yaitu 2.100 kilokalori (kcal). Selain itu, 21,6 persen anak di bawah usia lima tahun dilaporkan mengalami stunting pada tahun 2023, sementara 7,7 persen mengalami wasting⁴³ yang ditunjukkan dengan rasio berat terhadap tinggi badan yang rendah (Usman, 2024).

Untuk mengatasi masalah mendesak ini, pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menanggulangi malnutrisi dengan tujuan mengurangi stunting pada anak dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 14 persen pada tahun 2024, dan wasting pada anak dari 10,2 persen menjadi 7 persen dalam periode yang sama sesuai dengan peta jalan pembangunan nasional 2017 (The Jakarta Post, 2024).

Sebagai tanggapan, program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran telah dinantikan oleh masyarakat Indonesia, meskipun diskusi mengenai pendanaannya masih berlangsung hingga saat ini. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat, dengan tujuan ambisius untuk mencapai cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Inisiatif ini menyediakan makan bergizi gratis harian untuk siswa di berbagai tingkat pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan lembaga berbasis agama (pesantren). Dukungan gizi juga diperluas kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan hasil kesehatan dan memperkuat ekonomi keluarga (Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, 2023).

⁴³ Wasting adalah kondisi berat badan anak lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badannya. Ini merupakan bentuk malnutrisi yang mengancam jiwa dan dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan, penyakit, serta kematian.

Berdasarkan pengalaman dari banyak negara, program makan bergizi gratis memiliki berbagai efek positif, termasuk perbaikan gizi anak, peningkatan partisipasi sekolah, dan penguatan karakter siswa (Prasetyantoko, 2024). Misalnya, program makan bergizi gratis di Finlandia yang komprehensif mencakup dari pra-sekolah hingga sekolah menengah, tidak hanya menekankan manfaat gizi tetapi juga mengintegrasikan makanan sehat ke dalam kurikulum nasional dan mendukung pertumbuhan anak-anak melalui kegiatan yang menyenangkan.

Tiongkok juga menjadi contoh lain dari program makan bergizi gratis. Negara ini telah menerapkan kebijakan makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah di daerah pedesaan yang miskin sejak 2011. Program Peningkatan Gizi (*Nuntrition Improvement Program*, NIP), yang awalnya menargetkan 699 kabupaten di 21 provinsi, secara signifikan telah meningkatkan asupan gizi anak sekolah selama dekade terakhir (Theodora, 2024).

Sekolah Unggul Terintegrasi

Guna meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, Prabowo-Gibran mengusulkan sebuah inisiatif ambisius untuk mendirikan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Institusi-institusi ini akan mengikuti model yang mencakup format sekolah non-asrama dan asrama.

Sekolah unggul terintegrasi akan menawarkan perjalanan pendidikan yang mulus dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah sehingga memastikan pengalaman belajar yang komprehensif dan berkelanjutan bagi siswa dari anak usia dini hingga remaja. Setiap sekolah tidak hanya akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan mutakhir, tetapi juga fasilitas yang dirancang untuk mendukung lingkungan belajar yang optimal agar siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka.

Selain memperkenalkan model sekolah baru, Prabowo-Gibran juga mengakui kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sekolah-sekolah yang saat ini berkinerja buruk atau dalam kondisi rusak. Banyak lembaga pendidikan di seluruh Indonesia mengalami kerusakan ruang kelas dan fasilitas yang tidak memadai. Program ini akan menangani kekurangan tersebut dengan merenovasi sekolah-sekolah yang ada dalam rangka memastikan semua siswa memiliki akses ke lingkungan belajar yang aman dan kondusif (Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, 2023).

STEM menjadi STEAM

Salah satu inisiatif strategis yang diusulkan oleh Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah memperluas kurikulum Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) yang ada untuk memasukkan elemen seni, sehingga mengubahnya menjadi STEAM (Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, 2023). Program ini menargetkan sektor pendidikan formal dan non-formal, sejalan dengan visi dan misi mereka, dengan penekanan khusus pada bimbingan pekerja dan komunitas seni. Tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya kewirausahaan dalam ranah seni, budaya, dan kreativitas, mengakui bahwa bidang-bidang ini merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kemajuan budaya.

Melalui inisiatif ini, Prabowo-Gibran berupaya untuk membina generasi seniman baru yang tidak hanya unggul dalam karya kreatif mereka, tetapi juga memiliki keterampilan kewirausahaan yang kuat. Dengan menanamkan pola pikir kewirausahaan di kalangan seniman, mereka berupaya memberdayakan mereka untuk mencapai pendapatan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi substansial terhadap ekonomi kreatif bangsa.

Selain itu, Prabowo-Gibran berencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, terutama di bidang yang terkait dengan industri kreatif dan seni budaya. Inisiatif ini mencerminkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa siswa memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Dengan meningkatkan standar pendidikan vokasi, mereka bertujuan untuk mempersiapkan siswa lebih baik untuk karier yang sukses di sektor kreatif dan budaya.

Meningkatkan Penelitian di Indonesia

Menyadari peran penting yang dimainkan oleh pendidikan berkualitas tinggi dan keahlian dalam sains dan teknologi bagi kemajuan suatu negara, Prabowo-Gibran telah memasukkan fokus ini dalam salah satu dari tujuh belas program prioritas mereka (Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, 2023). Untuk mendorong inovasi dan memajukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka berencana untuk meningkatkan pendanaan penelitian dan inovasi hingga 1,5-2 persen dari PDB dalam lima tahun ke depan.

Kebijakan pemerintah yang meningkatkan investasi di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk memperkuat kemandirian nasional. Prabowo-Gibran bertujuan untuk mencapainya dengan mendirikan dana abadi bagi lembaga pendidikan, pesantren, organisasi budaya, dan lembaga non-pemerintah.

Selain meningkatkan pendanaan, proposal Prabowo-Gibran mencakup reformasi komprehensif kurikulum universitas, vokasi, dan politeknik untuk memastikan bahwa mereka didorong oleh penelitian, inovatif, praktis, dan selaras dengan kebutuhan industri. Prabowo-Gibran bermaksud untuk mendorong universitas fokus pada penelitian dan pengetahuan yang mendukung strategi pembangunan dan mendorong kemitraan dengan bisnis.

Bab VII

Kesimpulan dan Rekomendasi



Kesimpulan

Seiring dengan kemajuan Indonesia menuju visi ambisius “Indonesia Emas 2045,” transformasi sistem pendidikan menjadi sangat penting untuk menciptakan negara yang makmur, inovatif, dan berdaya saing global. Visi ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu aktor utama di kancah global pada peringatan 100 tahun kemerdekaannya, menitikberatkan pada revitalisasi dan modernisasi berbagai sektor, dengan pendidikan sebagai pilar utamanya. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana utama untuk mengembangkan keterampilan, nilai-nilai, dan kompetensi yang diperlukan bagi terciptanya masyarakat yang siap menyongsong masa depan.

Namun, jalan menuju sistem pendidikan yang merata dan berkualitas masih dihadang oleh beberapa tantangan keberagaman sosial-ekonomi, budaya, dan geografis Indonesia. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, distribusi guru yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur memadai, terutama di daerah terpencil dan terbelakang, menjadi hambatan besar dalam mewujudkan akses pendidikan berkualitas secara universal. Meskipun desentralisasi telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk menyesuaikan solusi dengan kebutuhan lokal, hal ini juga mengungkapkan keterbatasan kapasitas dan kelemahan tata kelola yang memperumit implementasi kebijakan serta menghambat reformasi sistem pendidikan secara menyeluruh.

Meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia telah dirumuskan secara terpusat untuk memastikan keseragaman dalam pengelolaan, tantangan dalam pelaksanaannya masih tetap hadir. Minimnya inovasi di tingkat daerah dan ketidaksesuaian antara program pusat dan kondisi lokal dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan otoritas daerah. Dengan mendukung inovasi lokal dan menyesuaikan program nasional dengan kebutuhan spesifik tiap daerah, sistem pendidikan dapat menjadi lebih responsif. Pendekatan ini akan membantu menjembatani kesenjangan dalam pelaksanaan dan memastikan bahwa inisiatif pendidikan tetap efektif dan relevan di berbagai konteks lokal.

Alokasi dan pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif juga menjadi sangat penting. Tantangannya terletak pada penyeimbangan kebutuhan pendanaan—seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan sumber daya, dan upah guru—sembari memastikan pengembangan profesional guru. Tuntutan persaingan dari sektor lain serta kebutuhan akan manajemen keuangan dan akuntabilitas yang lebih baik di tingkat lokal mempersulit pemanfaatan dana yang efektif.

Masalah mendesak lainnya adalah integrasi teknologi dalam pendidikan. Peralihan global menuju pembelajaran digital menyoroti kebutuhan akan literasi digital dan infrastruktur yang kokoh. Mengembangkan infrastruktur ini, bersama dengan pelatihan guru dalam penggunaan teknologi, sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari wilayahnya, siap menghadapi tuntutan era digital.

Selain itu, menyelaraskan pendidikan dengan pengembangan tenaga kerja sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Memperkuat kemitraan antara sekolah, universitas, dan sektor swasta dapat membantu menciptakan jalur bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman praktis, mengembangkan keterampilan yang relevan, dan mempermudah transisi mereka ke dunia kerja.

Komitmen terhadap pendidikan inklusif juga sama pentingnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan dan kurang terlayani. Membangun sistem pendidikan yang inklusif membutuhkan perubahan sistemis, seperti pelatihan guru dalam pedagogi inklusif, penyediaan kurikulum yang relevan secara budaya, dan pengembangan kebijakan yang mendukung keragaman linguistik dan budaya Indonesia.

Kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi filantropi, sangat penting untuk mendukung reformasi yang komprehensif. Filantropi dapat menyediakan sumber daya tambahan, mendorong inovasi, dan memfasilitasi kemitraan yang memperkuat ekosistem pendidikan. Tanoto Foundation memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan di beberapa wilayah, membantu mengatasi tantangan lokal yang kritis. Untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan inisiatifnya, Tanoto Foundation juga terlibat dalam menyesuaikan programnya dengan konteks lokal melalui analisis mendalam.

Keberlanjutan program menjadi kunci karena intervensi dan investasi dalam pendidikan membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil yang nyata. Perluasan program yang sukses juga penting untuk memastikan dampak yang lebih luas. Kerangka hukum yang mendorong tanggung jawab pemerintah dan dukungan keuangan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program-program ini. Keberhasilan harus diukur tidak hanya melalui peningkatan kualitas pendidikan secara langsung tetapi juga melalui keberlanjutan jangka panjang dari program-program tersebut.

Melihat ke Masa Depan

Masa depan sistem pendidikan Indonesia harus dipandu oleh visi yang mengutamakan kesetaraan, kualitas, dan relevansi. Untuk mencapai tujuan “Indonesia Emas 2045,” pendidikan harus berkembang menjadi sistem dinamis yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan tetapi juga mendorong pemikiran kritis, merangsang inovasi, dan menumbuhkan nilai-nilai empati, ketahanan, dan kewarganegaraan global. Perjalanan ini memerlukan investasi berkelanjutan dalam pengembangan guru, kepemimpinan sekolah, inovasi kurikulum, dan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada siswa yang mendorong kreativitas dan kolaborasi.

Pemerintahan yang baru memainkan peran kunci dalam memajukan reformasi sektor pendidikan terkini. Sangat penting untuk membangun kerangka kerja yang ada, mengatasi tantangan sistemis, dan tetap adaptif terhadap kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Upaya yang berkelanjutan akan diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang konsisten di seluruh daerah, mengamankan pendanaan yang cukup, dan menjaga fokus yang kuat pada peningkatan hasil pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, otoritas daerah, entitas non-negara, dan organisasi filantropi dapat menjadi kunci untuk menavigasi visi ini dengan sukses.

Sebagai kesimpulan, sistem pendidikan Indonesia berada pada titik krusial. Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang menggabungkan desentralisasi, reformasi kurikulum, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, bangsa ini dapat menciptakan generasi inovator, pemikir kritis, dan warga dunia. Ketika kita melihat tahun 2045, keberhasilan reformasi pendidikan Indonesia akan menentukan tidak hanya kemajuan ekonomi dan sosial negara ini, tetapi juga posisinya Indonesia di kancah global. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kepemimpinan visioner, pendidikan dipastikan akan menjadi dasar perjalanan Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan daya saing global.

Rekomendasi

Arsitektur Pendidikan Indonesia

Meskipun sistem pendidikan Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat, tantangan yang signifikan masih ada, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dari tahun 2017 hingga 2023. Pendekatan kebijakan pendidikan yang seragam terbukti tidak efektif dalam mengatasi tantangan ini. Untuk menutup kesenjangan ini, para pembuat kebijakan harus merancang program yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. Hal ini memerlukan penilaian kontekstual yang mendalam dan kolaborasi aktif antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan pemerintah daerah. Selain itu, komitmen untuk meningkatkan infrastruktur di masyarakat terpencil agar setara dengan daerah perkotaan sangat penting dalam rangka memastikan kualitas dan ketersediaan sumber daya pendidikan.

Para pembuat kebijakan juga harus melakukan audit rutin terhadap demografi prasekolah dan usia sekolah di daerah terpencil ini untuk mengumpulkan informasi terkini tentang kebutuhan infrastruktur. Data ini akan memandu alokasi dana tingkat tinggi untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Bersama dengan itu, pemerintah pusat dan daerah harus membina kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan adat serta penyedia layanan. Selain itu, penguatan kompetensi budaya dan keterlibatan masyarakat di sekolah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem pendidikan.



Peningkatan kapasitas pemimpin sekolah merupakan komponen penting lainnya. Pemimpin, seperti kepala sekolah, harus dipersiapkan untuk sepenuhnya memanfaatkan otonomi dan keterampilan manajemen sekolah. Selain itu, untuk memungkinkan pembelajaran yang bersifat individual dan memenuhi kebutuhan siswa, guru memerlukan dukungan prajabatan dan dukungan dalam jabatan. Ini termasuk peningkatan pengetahuan pedagogis mereka dan pemberian pelatihan yang peka terhadap budaya. Kesejahteraan guru juga harus diperhatikan, terutama di daerah 3T mengingat gaji yang rendah dan kondisi kerja yang buruk di daerah-daerah ini berkontribusi terhadap tingginya tingkat ketidakhadiran dan distribusi guru yang tidak merata. Memastikan kompensasi dan dukungan yang adil bagi guru sangat penting untuk mempertahankan bakat di daerah terpencil.



Selain meningkatkan kesejahteraan guru, kesejahteraan siswa juga harus diutamakan, terutama di daerah 3T yang sering menghadapi tantangan sosial, budaya, dan kesehatan. Rencana komprehensif untuk meningkatkan hasil pendidikan harus dapat mengatasi masalah ini dengan mengubah sekolah menjadi pusat yang menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan. Membekali guru dan kepala sekolah dengan keterampilan untuk mendukung kesejahteraan siswa juga akan memastikan bahwa reformasi pendidikan Indonesia mengambil pendekatan yang lebih holistik. Selain itu, melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan juga penting mengingat sekolah di daerah 3T dapat tumbuh dan berkembang ketika masyarakat berpartisipasi aktif dengan mengadaptasi pengelolaan sekolah agar sesuai dengan kebutuhan unik lingkungan pedesaan dibandingkan dengan lingkungan perkotaan.

Pemerintah juga harus memastikan akses yang adil terhadap pendidikan di semua tingkatan, dengan fokus khusus pada perluasan kesempatan untuk pendidikan tinggi. Sangat penting bahwa alokasi anggaran yang meningkat dikelola secara efisien, transparan, dan efektif untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional. Kolaborasi erat antara lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, kelompok agama, dan masyarakat setempat diperlukan untuk memperkuat kapasitas manusia melalui pendidikan. Lebih jauh lagi, memanfaatkan upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan akan semakin mendorong terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para pemangku kepentingan ini dapat secara efektif memfokuskan sumber daya mereka di setiap jenjang pendidikan untuk mencapai dampak yang lebih besar, berdasarkan pendorong utama perubahan. Program, bidang, dan pendekatan yang mendorong hasil yang baik di setiap jenjang pendidikan, serta inisiatif lintas sektor, diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 21. Langkah Kunci dan Inisiatif Pemangku Kepentingan Terkait

Jenjang Pendidikan	Ajakan untuk Bertindak	Inisiatif Pemangku Kepentingan yang Ada untuk Dimanfaatkan			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Sektor Swasta	Pimpinan Sekolah
Lintas sektoral 	<p>Membangun atau terlibat dalam komunitas guru untuk memilih dan melatih “changemakers”</p> <p>Fokus pada keterampilan pedagogi guru dan mengatasi kehilangan pembelajaran</p> <p>Fokus guru pada kesadaran sosial dan keterampilan menjalin hubungan</p> <p>Memperkuat kemampuan literasi dan numerasi dasar di samping pengembangan <i>soft skill</i></p> <p>Meningkatkan akses pendidikan untuk sekolah dan Perguruan Tinggi di daerah terpencil</p> <p>Mempromosikan hubungan industri dan relevansi kurikulum dengan industri</p>	<p>Pendidikan Guru Penggerak sebagai pintu masuk untuk membentuk keterampilan pedagogis dan karakter guru.</p> <p>Pelatihan di tingkat provinsi diberikan melalui Balai Guru Penggerak</p> <p>Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan guru dalam pendidikan inklusif</p> <p>Asesmen Nasional dan relevansi Kurikulum Merdeka berfokus pada pengukuran dan pencapaian kemampuan literasi dan numerasi dasar</p> <p>Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi</p>	<p>Merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan program lokal untuk mengatasi masalah-masalah spesifik di daerah</p> <p>Memimpin kerja sama “Link and Match” antara industri, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan</p>	<p>Pelatihan profesional untuk guru-guru sekolah dasar dan menengah</p> <p>Pelatihan kepemimpinan dan bimbingan untuk guru</p>	<p>Mengevaluasi pengetahuan pedagogis guru dengan mengamati kegiatan di kelas dan pencapaian hasil belajar siswa</p> <p>Merancang program yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi guru dan memberikan insentif</p>
Pendidikan Anak Usia Dini 	<p>Menawarkan pelatihan untuk guru PAUD di bidang TIK dan literasi digital.</p> <p>Meningkatkan kualifikasi guru PAUD.</p> <p>Meningkatkan akses di daerah pedesaan.</p>	<p>Bantuan Pemerintah sebagai program beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru.</p> <p>Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) untuk memperluas akses PAUD di daerah terpencil.</p>	<p>Mengelola APBD secara efektif untuk memastikan distribusi PAUD yang adil.</p> <p>Mendorong pemerataan PAUD melalui kebijakan daerah seperti program 1 Desa 1 PAUD.</p> <p>Membentuk lembaga yang serupa dengan Satuan PAUD Sejenis di daerah terpencil.</p>	<p>Menyediakan pelatihan teknologi TIK dan literasi digital.</p> <p>Pelatihan dan bimbingan untuk ujian kualifikasi PAUD.</p>	<p>Memberikan insentif untuk kesejahteraan guru</p> <p>Memberikan panduan pengembangan guru dan mendorong mereka untuk mengejar peluang pelatihan seperti Program Pendidikan Profesi Guru</p>

Jenjang Pendidikan	Ajakan untuk Bertindak	Inisiatif Pemangku Kepentingan yang Ada untuk Dimanfaatkan			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Sektor Swasta	Pimpinan Sekolah
Pendidikan Dasar dan Menengah 	<p>Membantu orang tua membuat keputusan yang tepat dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka.</p> <hr/> <p>Melengkapi sekolah-sekolah yang berkinerja buruk dengan alat dan sumber daya.</p> <hr/> <p>Membantu mendistribusikan perangkat TIK dan membantu guru memanfaatkan perangkat tersebut.</p> <hr/> <p>Mengatasi kekurangan guru.</p>	<p>Mempromosikan program Sekolah Penggerak dan merehabilitasi fasilitas sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.</p> <hr/> <p>Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan fasilitas TIK dan infrastruktur sekolah lainnya yang relevan.</p> <hr/> <p>Mendistribusikan kembali guru untuk mengajar mata pelajaran umum K-12 dan pemetaan distribusi guru secara strategis.</p> <hr/> <p>Meningkatkan Kompetensi TIK Guru dalam Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web melalui Program Berbasis TIK (PembaTIK).</p>	<p>Mengawasi alokasi Dana Alokasi Khusus dan BOS secara efisien untuk meningkatkan infrastruktur sekolah dan kualitas guru.</p> <hr/> <p>Berkolaborasi dengan sektor swasta dalam intervensi yang berfokus pada pengembangan infrastruktur sekolah.</p> <hr/> <p>Melakukan sosialisasi yang menargetkan orang tua untuk meningkatkan kesadaran akan pendidikan yang berkualitas.</p>	<p>Mendukung sekolah-sekolah yang berkinerja buruk dengan memberikan kontribusi pada infrastruktur sekolah, mendanai peralatan TIK, dan melaksanakan program pelatihan guru.</p> <hr/> <p>Mengawasi rencana anggaran sekolah dan melaksanakan perencanaan pengadaan yang tepat untuk memastikan kecukupan dana untuk pengembangan infrastruktur yang direncanakan.</p> <hr/> <p>Penerapan manajemen berbasis sekolah yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru dan kualitas pendidikan.</p>	<p>Mempraktikkan manajemen keuangan yang baik.</p> <hr/> <p>Mengawasi rencana anggaran sekolah dan melaksanakan perencanaan pengadaan yang tepat untuk memastikan kecukupan dana untuk pengembangan infrastruktur yang direncanakan.</p> <hr/> <p>Penerapan manajemen berbasis sekolah yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru dan kualitas pendidikan.</p>
Pendidikan Vokasi 	<p>Mempromosikan hubungan dengan industri.</p> <hr/> <p>Membantu mengembangkan kurikulum kejuruan yang lebih relevan dengan industri.</p> <hr/> <p>Membantu mengembangkan kompetensi industri bagi guru-guru kejuruan.</p>	<p>Mempromosikan program kolaboratif dengan sektor bisnis dan menawarkan pengalaman kerja praktik atau magang kepada lulusan SMK untuk memfasilitasi hubungan dengan industri dalam pendidikan kejuruan.</p> <hr/> <p>Merevitalisasi institusi pendidikan kejuruan.</p>	<p>Menetapkan peraturan tingkat daerah khusus untuk pendidikan kejuruan untuk memastikan integrasi sektor dan meningkatkan kemampuan guru.</p> <hr/> <p>Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk memastikan program-program yang sesuai.</p>	<p>Mendukung sekolah vokasi mengembangkan kurikulum vokasi yang lebih relevan dengan industri dan mengembangkan kompetensi industri untuk guru vokasi.</p> <hr/> <p>Menetapkan program pengembangan atau jalur karier tingkat pemula bagi lulusan SMK.</p>	<p>Secara proaktif menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri.</p> <hr/> <p>Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi guru, penyesuaian kurikulum, infrastruktur, kompetensi dan rekrutmen lulusan SMK.</p>

Jenjang Pendidikan	Ajakan untuk Bertindak	Inisiatif Pemangku Kepentingan yang Ada untuk Dimanfaatkan			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Sektor Swasta	Pimpinan Sekolah
Pendidikan Tinggi 	Mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan ramah mahasiswa berkebutuhan khusus.	Mendorong kebijakan pendidikan inklusif yang memenuhi berbagai kebutuhan siswa.		Meluncurkan inisiatif pengembangan karier untuk peserta yang beragam.	Menciptakan lingkungan yang inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
	Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur kampus bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus.	Mengoptimalkan Bidikmisi untuk memperluas akses kepada siswa yang ditargetkan berdasarkan kebutuhan finansial dan program beasiswa seperti LPDP dan IISMA.		Menawarkan program beasiswa untuk kelompok minoritas atau kelompok rentan.	Meningkatkan daya saing mahasiswa melalui kompetisi nasional, magang, dan pengembangan soft skill
	Mempromosikan hubungan dengan industri, terutama untuk perguruan tinggi yang lebih terpencil.	Mengembangkan kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan industri melalui Kedaireka.		Memimpin kemitraan untuk pengembangan teknologi untuk mengatasi tantangan masyarakat.	Mempromosikan usaha kewirausahaan dan mendukung inisiatif penelitian untuk memicu inovasi
	Menjembatani kesenjangan pendidikan antara perguruan tinggi terpencil dan menghubungkan mereka dengan sumber daya yang tersedia di kampus-kampus swasta yang lebih besar, terutama dari kota-kota besar, dan menghubungkannya dengan perguruan tinggi luar negeri.	Mendorong pendaftaran perguruan tinggi negeri di Indonesia melalui beasiswa LPDP.			
	Akses ke Perguruan Tinggi, terutama untuk daerah terpencil dan intervensi afirmatif dan last mile	Mengadaptasi kurikulum untuk mengembangkan <i>soft skill</i> dalam menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh Revolusi Industri 4.0			
	Program penghubung untuk siswa yang kurang beruntung sebelum masuk ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kesiapan	Memfasilitasi pendirian perguruan tinggi dan mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi.			
	Pengembangan <i>soft skills</i> .				

Jenjang Pendidikan	Ajakan untuk Bertindak	Inisiatif Pemangku Kepentingan yang Ada untuk Dimanfaatkan			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Sektor Swasta	Pimpinan Sekolah
Pendidikan non-formal 	<p>Membantu mengembangkan kurikulum dan standar pembelajaran yang lebih responsif terhadap anak berkebutuhan khusus.</p> <hr/> <p>Membantu memastikan guru-guru di SLB memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai untuk mendukung pendidikan inklusif.</p> <hr/> <p>Meningkatkan pendanaan untuk lembaga pendidikan non-formal.</p>	<p>Menciptakan jalur yang mudah diakses oleh siswa yang tidak bersekolah untuk mempromosikan inklusivitas di jalur non-formal.</p> <hr/> <p>Membentuk Pusat Belajar Guru di tingkat provinsi untuk mempersiapkan guru-guru bagi anak berkebutuhan khusus.</p> <hr/> <p>Mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (<i>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat</i>).</p>	<p>Memastikan distribusi guru yang berkualitas ke lembaga pendidikan non-formal melalui program relokasi guru</p>	<p>Mendanai program-program yang menargetkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengembangkan kurikulum dan standar pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan anak-anak berkebutuhan khusus</p> <hr/> <p>Mengadakan pelatihan guru non-formal untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan pembelajaran inklusif</p>	

Untuk memaksimalkan elemen pendorong yang diuraikan dalam Tabel 21, lembaga filantropi harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan utama seperti sektor publik dan swasta, orang tua, pendidik, dan pihak terkait lainnya. Penguatan lintasan pendidikan Indonesia ini memerlukan penerapan mekanisme alokasi anggaran yang transparan, memastikan bahwa kebijakan, terutama yang memiliki implikasi keuangan, didanai secara memadai dan dilindungi dari kegagalan program. Kebijakan pendidikan juga harus disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan daerah dan memprioritaskan inklusivitas, terutama bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok terpinggirkan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan—termasuk tenaga pendidik, orang tua, dan perwakilan daerah—dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan khusus masyarakat. Strategi komunikasi yang jelas harus ditetapkan untuk menginformasikan kepada publik dan pemangku kepentingan tentang perubahan kebijakan, didukung oleh kampanye kesadaran yang menyoroti tujuan, manfaat, dan tantangan potensial. Lebih jauh lagi, Peta Jalan Pendidikan saat ini, yang berlaku hingga tahun 2035, memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan visi “Indonesia Emas” Indonesia tahun 2045, yang memerlukan strategi jangka panjang untuk menjembatani kesenjangan ini. Selain menyesuaikan garis waktu untuk visi Indonesia tahun 2045, Peta Jalan Pendidikan juga perlu memperbaiki kesenjangan yang nyata dalam penekanan pada inklusivitas dan keberagaman. Dalam versi saat ini, Peta Jalan Pendidikan tampaknya masih mengabaikan kebutuhan daerah dan mengabaikan ketentuan bagi anak berkebutuhan khusus. Menjembatani kesenjangan ini diperlukan untuk mencapai tujuan ambisius dari visi Indonesia tahun 2045.

Dinamika Pendidikan Indonesia Saat Ini

Tiga prinsip dasar harus menjadi panduan strategi berbasis hak asasi manusia untuk mengatasi tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia. Pertama, non-diskriminasi sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah 3T menerima pendidikan berkualitas tinggi. Pemangku kepentingan utama harus memprioritaskan masalah ini. Kedua, meningkatkan aksesibilitas sangat penting, dengan fokus pada memastikan kehadiran guru di daerah terpencil. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan perekrutan guru, pelatihan, dan platform keterlibatan masyarakat. Ketiga, aksesibilitas ekonomi harus diprioritaskan untuk menjamin bahwa program pendidikan untuk kelompok yang kurang terwakili menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Ini berarti memastikan bahwa hambatan keuangan tidak menghalangi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses kesempatan pendidikan.

Sektor pendidikan menghadirkan banyak peluang yang belum dimanfaatkan yang memerlukan ketekunan, ketahanan, dan upaya bersama untuk menghasilkan hasil yang optimal. Kolaborasi yang lebih besar di antara semua pemangku kepentingan—lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi,

kelompok agama, dan masyarakat lokal—diperlukan untuk mengoptimalkan program yang ada. Dengan memetakan tanggung jawab, kontribusi, dan cakupan geografis, pemerintah dapat mengidentifikasi dengan lebih baik pencapaian setiap pemangku kepentingan dan tantangan yang tersisa.

Para pembuat kebijakan harus memprioritaskan perbaikan regulasi untuk pendidikan anak usia dini, khususnya dengan mendefinisikan standar pendidikan yang jelas untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sama pentingnya untuk mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang kurang terwakili, seperti penduduk asli dan keluarga berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi keunikan daerah, standar pendidikan harus disesuaikan, dengan guru dan pemangku kepentingan lokal memainkan peran penting dalam proses ini.

Peningkatan tata kelola dalam pendidikan dasar melibatkan perluasan kapasitas, penyalarsan peraturan, dan penanganan kesenjangan peraturan. Sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat sangat penting sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan menilai dampak kebijakan mereka, melakukan penyesuaian yang diperlukan, dan meminimalkan perubahan yang sering terjadi. Komunikasi dan pembagian data yang efektif di antara para pemangku kepentingan—terutama terkait pelatihan guru, lulusan universitas yang telah menyelesaikan program pelatihan guru dan merupakan pendidik masa depan, serta kebutuhan guru—sangat penting untuk memastikan upaya yang kohesif.

Baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, peningkatan kesadaran tentang pentingnya distribusi guru yang adil dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam penempatan. Sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi pendidikan, dukungan yang terarah bagi distrik dan sekolah yang berkinerja buruk sangat penting untuk memperkuat pendidikan di tingkat akar rumput. Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemendagri harus bekerja sama untuk mengatasi kesenjangan regional dalam akses ke pendidikan menengah. Reformasi dalam proses penerimaan siswa, termasuk pembentukan pusat pendidikan terpadu nasional, dapat mengatasi tantangan ini melalui kemitraan dengan pemerintah daerah.

Lebih jauh lagi, pengawasan terhadap sekolah kejuruan swasta sangat penting karena memerlukan kriteria yang ketat untuk mendirikan lembaga baru dan mengkonsolidasikan lembaga yang berkinerja buruk untuk meningkatkan kapasitas. Di sektor pendidikan tinggi, Kemendikbudristek harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan data pasar tenaga kerja dan sistem pengembangan keterampilan. Pemantauan lembaga yang gagal dan penguatan mekanisme pengendalian mutu yang ada sangat penting untuk kemajuan yang berkelanjutan.

Evaluasi berkelanjutan terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dengan tetap menghormati batasan akademis. Kemendikbudristek harus memberikan pedoman dan target yang jelas kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan program MBKM secara mandiri.

Dalam pendidikan tinggi, terobosan kebijakan utama harus difokuskan pada reformasi tata kelola yang bertujuan mengurangi hambatan birokrasi untuk memungkinkan fleksibilitas akademis dan mendorong adopsi teknologi. Kebijakan yang dibuat juga harus mendukung lembaga yang berjuang untuk mencapai otonomi, dengan pemerintah menyediakan sumber daya penting untuk penelitian dan inovasi.

Selain itu, upaya penguatan hubungan antara dunia akademis dan industri merupakan usaha yang signifikan. Mengintegrasikan magang, penempatan di perusahaan, dan pelatihan kewirausahaan ke dalam program universitas serta melibatkan profesional industri dalam pengembangan kurikulum akan meningkatkan relevansi pendidikan tinggi.

Terakhir, memprioritaskan pendanaan untuk inisiatif pendidikan di tingkat lokal juga tidak kalah penting, yang membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara semua tingkat pemerintahan. Selain itu, memastikan visibilitas dan komitmen jangka panjang dari pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi ini berlanjut melampaui periode pendanaan awal.

Peran Lembaga Filantropi dalam Pendidikan

Organisasi filantropi memainkan peran penting dalam memajukan pendidikan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi krisis literasi dan mendorong akses kepada pendidikan yang adil. Misalnya, mungkin awalnya mengejutkan mengetahui bahwa siswa sekolah dasar dan bahkan sekolah menengah di daerah terpencil kesulitan membaca. Namun, dengan memahami budaya dan praktik setempat, kita dapat mengungkap faktor-faktor yang lebih dalam yang berkontribusi terhadap kesulitan ini. Program pendidikan anak usia dini meletakkan dasar bagi anak-anak untuk mengembangkan rasa percaya diri, sementara kemauan politik dan kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk tata kelola pendidikan yang efisien.

Memperluas kesempatan melalui beasiswa dan menciptakan ruang bagi pemuda dan perempuan, seperti lingkungan belajar yang aman, sangat penting untuk mendorong akses yang setara terhadap pendidikan. Organisasi filantropi harus fokus pada upaya identifikasi tantangan keberlanjutan dan peningkatan kolaborasi. Selain memastikan akses yang adil, organisasi-organisasi ini harus memenuhi kebutuhan lokal, dan mendorong inovasi dalam metode pendidikan. Mengukur dampak dan keberlanjutan program sangat penting untuk memahami dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan masyarakat.

Untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan keterlibatan, organisasi filantropi harus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup mengoptimalkan kemitraan, membentuk aliansi yang kuat, dan memastikan pembelajaran antar teman untuk mengidentifikasi intervensi yang efektif. Pendekatan komprehensif yang menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan inisiatif filantropi juga dapat membantu mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu akses yang adil terhadap pendidikan serta memberdayakan semua anak untuk mencapai potensi penuh mereka. Komunitas Filantropi Pendidikan (KFP) dapat memainkan peran strategis dalam memajukan upaya kolaboratif ini.

Selain mempromosikan pendidikan berkelanjutan, organisasi filantropi merupakan salah satu pemangku kepentingan kunci dalam membina para pejuang dan mendorong reformasi kebijakan. Agar berhasil sebagai advokat, mereka harus membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan menerapkan praktik terbaik global, para filantropis dapat menciptakan proyek yang berdampak dan terukur. Lebih jauh lagi, mereka dapat memberikan bukti efektivitas program dan menyebarkan wawasan melalui beragam jaringan untuk berbagi pengetahuan.

Organisasi filantropi juga dapat mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan sumber daya dan memanfaatkan filantropi perantara untuk meningkatkan dukungan bagi kelompok pelaksana. Membangun kredibilitas dengan memiliki data yang kuat dari penelitian atau evaluasi juga diperlukan pada kegiatan advokasi karena organisasi filantropi harus dipandang sebagai pihak yang dihormati dan kredibel oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pendanaan berkelanjutan merupakan aspek penting lainnya. Entitas pendukung seperti donor, perusahaan milik negara, perusahaan asing, dan entitas swasta lainnya dalam industri terkait dapat membantu mengidentifikasi sumber pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang selaras dengan kebutuhan LSM. Memperluas jaringan dan memperkuat hubungan pemerintah melalui advokasi akan semakin mendukung upaya filantropis dalam pendidikan. Kebijakan publik yang afirmatif, seperti keringanan pajak dan bentuk dukungan pemerintah lainnya, juga dapat mendorong kerja sama antara organisasi filantropis internasional dan lembaga pendidikan. Misalnya, banyak negara *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menawarkan keringanan pajak untuk kegiatan filantropis yang memberikan insentif kepada donor.

Kemendikbudristek telah memperkenalkan pengurangan pajak untuk mempromosikan pendidikan kejuruan yang menyelaraskan permintaan industri dengan kemajuan pendidikan kejuruan. Organisasi filantropi dapat mendukung kemitraan antara lembaga pendidikan Indonesia dan mitra internasional dengan mendorong berbagi pengetahuan, penelitian kolaboratif, dan mendanai program pertukaran. Kolaborasi ini memperkenalkan para pendidik Indonesia pada praktik terbaik global dan pendekatan inovatif dalam pendidikan.

Dalam meningkatkan program teknologi pendidikan, para filantropis dapat mendanai proyek-proyek yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan akses ke pendidikan berkualitas tinggi, khususnya di daerah-daerah terpencil. Ini dapat mencakup pendanaan platform pembelajaran digital, menyediakan akses ke perangkat dan internet, serta mempromosikan literasi digital di kalangan guru dan siswa. Selain itu, filantropi dapat memainkan peran katalis dalam menjembatani sumber daya dan menawarkan kesempatan belajar sebagai bagian dari inisiatif pengembangan kapasitas.

Pendanaan filantropis juga dapat mengatasi kesenjangan sosial dalam pendidikan dengan mendukung inisiatif yang menawarkan kesempatan bagi populasi kurang mampu, seperti anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, daerah pedesaan, atau kelompok minoritas. Dengan mengatasi kesenjangan sosial, para organisasi filantropis dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

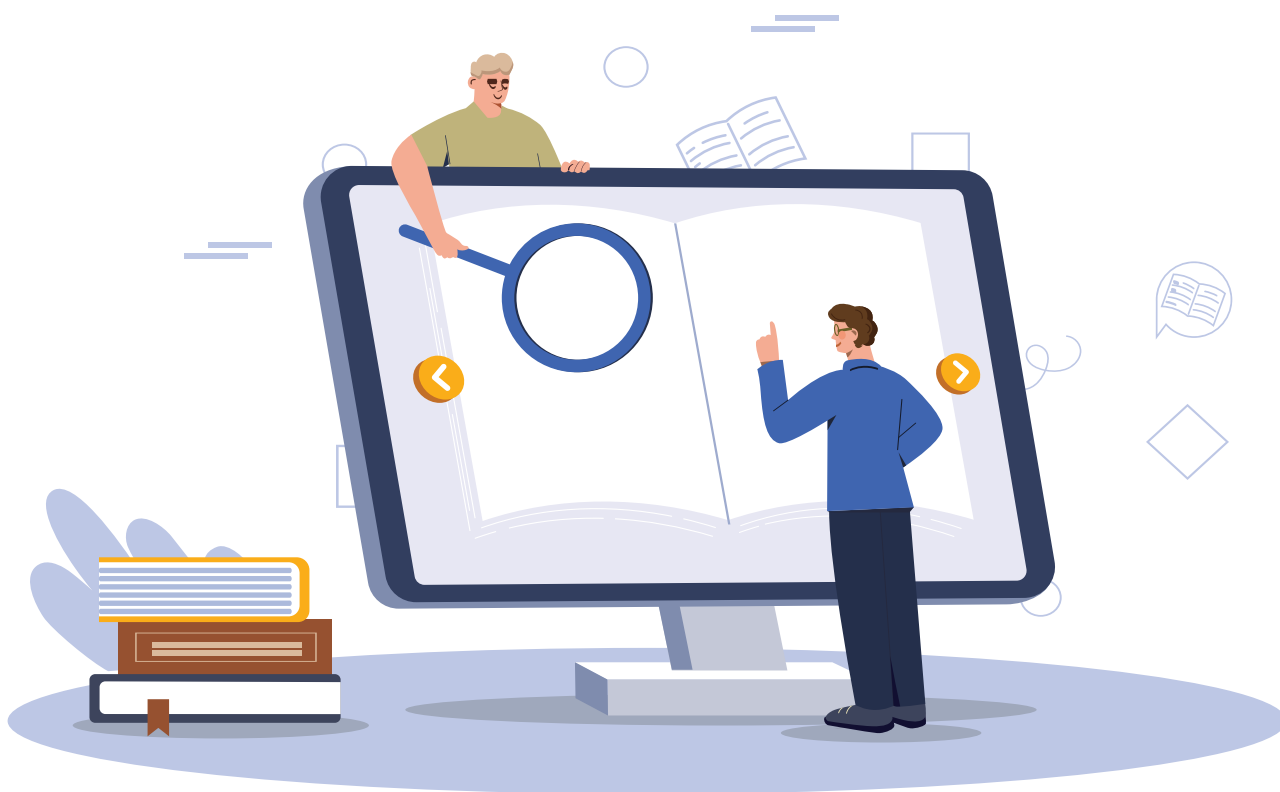
Lampiran

Penguatan Tiga Pilar: Kontribusi dan Kolaborasi Organisasi Filantropi di Bidang Pendidikan

Tabel berikut menyajikan beragam organisasi filantropi yang berkontribusi dalam mendukung sektor pendidikan di Indonesia melalui pendekatan strategis yang terbagi ke dalam tiga pilar utama Klaster Filantropi Pendidikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat merujuk pada Kolaborasi untuk Negeri (2024) yang dirancang oleh Filantropi Indonesia.

Setiap pilar menjadi dasar pelaksanaan berbagai inisiatif yang mencakup peningkatan akses pendidikan, pengembangan kualitas pembelajaran, revitalisasi sekolah, hingga penguatan tenaga kerja. Kolaborasi antara organisasi filantropi, perusahaan, dan lembaga internasional dalam kerangka pilar ini mencerminkan upaya bersama dalam mendukung transformasi pendidikan yang merata dan berdaya saing di Indonesia.



Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa organisasi filantropi memiliki peluang besar memperluas dampaknya di area yang diidentifikasi sebagai white spaces yang masih terdapat dalam tabel di bawah, khususnya dalam pengembangan tenaga kerja dan tata kelola. Dengan mengembangkan program-program yang ditargetkan untuk area ini, organisasi filantropi dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam mendukung hasil pendidikan yang adil.



Yayasan

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
<p>Akses Pendidikan</p> 	<p>Djarum Foundation: Djarum Scholarship Plus adalah beasiswa prestasi untuk mahasiswa program Strata 1 / Diploma 4 di universitas negeri atau swasta yang bekerja sama dengan Djarum Foundation.</p>	<p>Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (NEW Indonesia: Network for Education Watch Indonesia): Organisasi seperti Yayasan Pembinaan Anak dan Remaja Indonesia dan Yayasan Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia menyediakan perpustakaan keliling, pusat PAUD, dan beasiswa pendidikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.</p>	<p>Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (NEW Indonesia: Network for Education Watch Indonesia):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Akses Pendidikan yang Berkeadilan berfokus pada pemberdayaan dan advokasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. • Pendidikan Inklusif dan Responsif Gender berfokus pada perubahan persepsi terhadap siswa penyandang disabilitas, mengurangi kekerasan berbasis gender, dan mendorong kebijakan inklusif di bidang pendidikan.
	<p>Tanoto Foundation: Beasiswa TELADAN (Transformasi Edukasi untuk Pemimpin Masa Depan) memberikan dukungan pengembangan kepemimpinan, tunjangan kuliah, dan biaya hidup.</p>	<p>1000 Guru Foundation: Program Traveling and Teaching mengajak kaum muda mengunjungi destinasi wisata dari Aceh ke Papua sambil mengajar anak-anak di tingkat dasar dan menengah.</p>	<p>Tanoto Foundation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung inisiatif Kemendikbud terkait program Buku Bacaan Bermutu dengan mendistribusikan lebih dari 76.000 buku ke unit-unit PAUD dan SD yang tersebar di 12 kabupaten/kota. • Mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi akses semua anak terhadap PAUD.
	<p>Putera Sampoerna Foundation (PSF): Sampoerna Schools memberikan akses pendidikan berkualitas tinggi di Indonesia.</p>	<p>William & Lily Foundation (WLF): Kemitraan strategis untuk meningkatkan akses anak-anak ke program membaca dan numerasi berkualitas di Indonesia Timur.</p>	
	<p>Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama: Beasiswa NU yang berfokus pada pengiriman 20 pelajar NU ke luar negeri, beasiswa Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Perempuan NU untuk anggota Ikatan Pelajar NU, beasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan beasiswa santri nasional.</p>	<p>Wahana Visi Indonesia (WVI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan buku-buku bacaan yang menampilkan cerita-cerita daerah dan mempromosikan penggunaan APE yang dapat diakses secara lokal sebagai media utama. • 21 Rumah Baca dibangun di Papua, didukung oleh para tutor sukarelawan, yang menghasilkan guru-guru yang mempraktikkan pedagogis dan anak-anak yang menunjukkan kemampuan membaca yang baik di sekolah dasar. 	

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
<p>Akses Pendidikan</p> 	<p>Baznas: Basiswa Cendekia BAZNAS adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa p-perguruan tinggi yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia.</p>		
	<p>Yayasan Bakti Barito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa Barito Pacific diberikan untuk tingkat pendidikan menengah dan tinggi. • Program beasiswa Pendidikan Chandra Asri ditujukan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional Barito Pacific • Pada tahun 2022, Chandra Asri membangun lembaga PAUD dan memberikan beasiswa di tingkat Perguruan Tinggi. 		
	<p>Ancora Foundation: Pendidikan di Anambas dan Khazanah Asia menawarkan beasiswa nasional dan internasional untuk siswa SMK, sarjana, fellowship, dan pascasarjana.</p>		
	<p>Yayasan Pemimpin Anak Bangsa (YAPB): - Organisasi ini melaksanakan berbagai inisiatif, seperti Rumah Belajar, Pendidikan Kesetaraan, Ruang Baca, dan Literasi Dasar, untuk memberikan pendidikan non-formal kepada siswa-siswi putus sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.</p>		
	<p>Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA): Memberikan bantuan pendidikan dan donasi uang (dalam bentuk seragam, pakaian sekolah, alat tulis) untuk mendukung anak-anak yang kurang mampu di tingkat sekolah dasar dan menengah.</p>		
	<p>Adaro Foundation: Beasiswa Indonesia Bright Future Leader memberikan bantuan keuangan kepada siswa-siswi berpotensi tinggi di sekitar wilayah operasional yang memberikan mereka akses ke perguruan tinggi.</p>		

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Akses Pendidikan 	Yayasan Hadji Kalla: Meluncurkan beberapa beasiswa serta program untuk meningkatkan akreditasi PAUD di seluruh Sulawesi.		
	Yayasan Pelita Harapan (YPH): <ul style="list-style-type: none"> YPH membawahi berbagai sekolah, termasuk sekolah International Baccalaureate dan National Plus, serta sekolah-sekolah berbasis kebutuhan di daerah dengan akses rendah, yang semuanya menekankan pada pendidikan holistik. Yayasan YPH menawarkan berbagai sekolah seperti Lentera Harapan, Pelita Harapan, Dian Harapan, UPH College, Hope Academy, dan UPH, yang masing-masing memiliki tujuan pendidikan yang berbeda. 		
	Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB): <ul style="list-style-type: none"> Organisasi ini menawarkan bantuan keuangan untuk pendidikan, pelatihan kejuruan, dan prospek ekonomi yang secara khusus ditargetkan untuk kaum muda dan ibu yang kurang mampu. Rumah Belajar YCAB memberikan pendidikan yang terjangkau bagi anak muda yang kurang mampu dan putus sekolah, menyediakan pendidikan dasar, inklusi digital, dan kursus literasi bahasa Inggris. 		
Kualitas Pendidikan 	Tanoto Foundation: <ul style="list-style-type: none"> Tanoto Foundation mendanai inisiatif Alive and Thrive yang berfokus pada peningkatan gizi bagi ibu, bayi, dan anak. Rumah Anak SIGAP (RAS) dan Sekolah Anak SIGAP (SAS) dibangun sebagai bentuk komitmen terhadap pengasuhan anak. Berbagai layanan yang tersedia di Rumah Anak SIGAP adalah kegiatan bermain dan pengasuhan bersama, kegiatan individu/konsultasi keluarga (orang tua dan anak), kunjungan rumah, dan kegiatan pendukung lainnya. 	Tanoto Foundation: <ul style="list-style-type: none"> SIGAP Center Based Learning memberikan pendidikan dan sumber daya kepada orang tua untuk stimulasi yang efektif dalam rangka mendukung perkembangan awal yang optimal. Tanoto Foundation berkolaborasi dengan Bill & Melinda Gates Foundation melalui Multi-Donor Trust Fund (MDTF) dari Bank Dunia untuk meningkatkan upaya Indonesia dalam mengatasi stunting. Memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya nutrisi, menstimulasi perkembangan otak anak, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, pelatihan dan pengembangan kepemimpinan di komunitas lokal di daerah mitra, serta meningkatkan kualitas guru PAUD. 	Tanoto Foundation: <ul style="list-style-type: none"> Program SIGAP merupakan bentuk komitmen Tanoto Foundation untuk mendukung pemerintah dalam memajukan sumber daya manusia di Indonesia melalui peningkatan kualitas PAUD yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Program PINTAR bertujuan untuk membantu Indonesia masuk dalam peringkat lima besar negara dengan nilai PISA tertinggi pada tahun 2030 dan mendukung pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Bermitra dengan USAID dan organisasi terkemuka lainnya untuk mendukung program pengurangan stunting nasional pemerintah secara finansial.


	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Kualitas Pendidikan 	Djarum Foundation: Organisasi ini memberikan beasiswa berbasis prestasi, pelatihan soft skill (misalnya, pembangunan bangsa, pengembangan karakter, pengembangan kepemimpinan, paparan internasional), dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.	William & Lily Foundation (WLF): Organisasi ini memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan literasi dasar dan berkolaborasi dengan mitra regional untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan Indonesia Timur.	William & Lily Foundation (WLF): Organisasi ini melaksanakan kegiatan pendidikan, kesehatan, nutrisi, pengasuhan, dan perlindungan sosial yang terintegrasi, termasuk pelatihan untuk penyedia layanan dan membina lingkungan yang positif dengan pemerintah daerah untuk mendukung program PAUD-HI.
	Ancora Foundation: Program Pendidikan Maju Anak Bangsa berfokus pada pelatihan berbasis karakter untuk guru-guru PAUD di seluruh Indonesia.	Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (NEW Indonesia: Network for Education Watch Indonesia): Program Peningkatan Kualitas Pendidikan berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui kerja sukarela berbasis komunitas yang mendorong lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan partisipatif.	Ishk Tolaram Foundation: Melalui Ishk Peduli Anak Indonesia, para guru dari kota/kabupaten yang bermitra menerima 48 jam pelatihan daring dalam pedagogi yang berpusat pada anak dan dukungan mentor untuk berhasil dalam ujian sertifikasi guru PAUD.
	Surya Institute (SI): SI telah menyelenggarakan Perkemahan Sains, Klub Sains, program liburan, serta pelatihan guru dan siswa dengan fokus khusus pada masyarakat kurang mampu di daerah terpencil.		Surya Institute (SI): Organisasi ini berfokus pada reformasi dalam mata pelajaran matematika dan sains untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang menyenangkan.
	Yayasan Adaro Bangun Negeri: Lembaga ini berfokus pada program Pendidikan Holistik Berbasis Karakter yang menekankan pada pengembangan fisik, mental, dan spiritual anak, serta meningkatkan keterampilan guru PAUD.		Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (NEW Indonesia: Network for Education Watch Indonesia): JPPI merupakan koalisi dari 25 organisasi pendidikan dan serikat guru nasional yang berperan sebagai kelompok advokasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.



	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Kualitas Pendidikan 	<p>Indonesia Heritage Foundation (IHF) atau Yayasan Warisan Nilai Luhur Indonesia: Organisasi ini meliputi peningkatan hasil pendidikan dengan menekankan pengembangan karakter, soft skill seperti berpikir kritis, dan menargetkan masyarakat kurang mampu di tingkat PAUD, sekolah dasar, dan menengah. IHF juga memberikan pelatihan bagi guru, pimpinan sekolah, dan orang tua (untuk pendidikan orang tua).</p>		<p>Indonesia Heritage Foundation (IHF) atau Yayasan Warisan Nilai Luhur Indonesia: IIHF memprioritaskan pendidikan holistik berbasis karakter untuk jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas, khususnya bagi para pemimpin dan guru PAUD dan sekolah dasar melalui Program Semai Benih Bangsa dengan memberikan bantuan modul, alat pembelajaran, dan buku.</p>
	<p>Adaro Foundation:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melalui program Adaro Ignite Education, Adaro memberikan pendampingan dan pendidikan holistik berbasis karakter untuk pengembangan anak kepada lembaga-lembaga PAUD di sekitar wilayah operasionalnya. Pendampingan juga diberikan kepada pondok pesantren di bawah program Adaro Santri Sejahtera untuk mendukung kompetensi teknologi mereka. 		
	<p>Baznas: Sekolah Cendekia BAZNAS adalah sekolah asrama gratis untuk siswa berprestasi yang mendukung program pengembangan sekolah menengah dan sekolah menengah atas yang religius.</p>		
	<p>Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar: Dengan misi yang menekankan pada sistem pendidikan yang memadukan iman (IMTAK) dan ilmu pengetahuan (IPTEK), yang menjadi pusat pengembangan guru-guru berkualitas tinggi dan menjadi tolok ukur dalam kualitas lulusan, metodologi pengajaran, dan standar pengajar</p>		
	<p>Pertamina Foundation: Melalui Taman Kanak-kanak Patra, mereka menekankan pendidikan dasar yang kuat untuk anak-anak dalam rangka membangun fokus awal pada anak-anak personil Pertamina untuk melayani masyarakat yang lebih luas. Upaya mereka bertujuan mempersiapkan anak-anak untuk transisi ke pendidikan dasar dengan awal yang kuat.</p>		


	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Kualitas Pendidikan 	Putera Sampoerna Foundation (PSF): Pendekatan berbasis permainan yang dilakukan Putera Sampoerna Foundation dilakukan untuk mendorong perkembangan bahasa, kognitif, fisik, dan sosio-emosional, serta mendorong pembelajaran mandiri dan keterlibatan. Dengan mengintegrasikan permainan ke dalam pendidikan, mereka berusaha untuk membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan menyenangkan yang dapat membantu menumbuhkan kecintaan belajar seumur hidup.		
	Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB): Melalui program Rumah Belajar dan Pengembangannya: pendidikan yang terjangkau bagi anak muda yang kurang mampu dan putus sekolah dalam rangka menyediakan pendidikan dasar, inklusi digital, dan kursus literasi bahasa Inggris		
	SOS Children's Villages Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • SOS Children's Village Indonesia mendukung anak-anak melalui bantuan psikososial, pengasuhan kekeluargaan, dan pengasuhan yang disesuaikan, termasuk asesmen untuk anak yatim piatu dan anak-anak yang rentan. • Selain itu, ada juga pusat anak-anak untuk beragam kegiatan, termasuk pendidikan, waktu bermain, dan penyembuhan trauma. 		
	Wahana Visi Indonesia (WVI): <ul style="list-style-type: none"> • 14.000 anak menerima pendidikan tentang aktivitas fisik, gizi seimbang, dan gaya hidup sehat melalui proyek <i>Build Our Kids' Success</i>. • Lebih dari 3.000 anak menerima penguatan literasi, dan 684 guru di 268 sekolah dasar menjalani pelatihan terkait Wahana Literasi melalui Program Organisasi Penggerak. 		

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Revitalisasi Sekolah 	YAPPIKA-ActionAid: Organisasi ini meningkatkan literasi melalui inisiatif Bale Belajar yang bertujuan memperkuat hubungan antara masyarakat dan sekolah karena kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak-anak.	Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia): <ul style="list-style-type: none"> • GEKKO mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 dan penggalangan dana yang melibatkan aspek-aspek peningkatan sekolah seperti pusat pembelajaran jarak jauh, memberikan pelajaran bahasa Inggris menggunakan AI, dan membangun fasilitas olahraga. • GK Indonesia memberdayakan warga yang terkena dampak banjir di rusunawa melalui program-program berbasis komunitas di bidang kesehatan, nutrisi, digitalisasi, dan pengembangan pemuda di bidang pendidikan dan olahraga. 	William & Lily Foundation (WLF): <ul style="list-style-type: none"> • Program ini menekankan peningkatan kapasitas guru, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan advokasi untuk memperkuat kerangka kerja kebijakan yang terkait dengan bidang-bidang tersebut. • Inisiatif ini dilakukan di Indonesia Timur untuk meningkatkan keterampilan para pendidik dan administrator sekolah. • Inisiatif ini turut mendukung program PAUD-HI dengan mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, nutrisi, pengasuhan, dan perlindungan sosial, termasuk pelatihan untuk penyedia layanan dan membina lingkungan yang positif dengan pemerintah daerah.
	Yayasan Bakti Barito: Lembaga ini menyediakan perangkat pembelajaran tentang program pengelolaan sampah plastik dan secara langsung melatih siswa dan pendidik.	Yayasan Bakti Barito: Lembaga ini berkolaborasi dengan STIR Education, sebuah organisasi nirlaba internasional dalam meningkatkan lingkungan belajar mengajar bagi guru dan siswa sekolah dasar dengan menanamkan motivasi intrinsik untuk belajar kepada para peserta.	Yayasan Bakti Barito: Lembaga ini mendukung program Sekolah Adiwiyata (Sekolah Hijau) KLHK dengan melaksanakan kampanye kesadaran lingkungan di empat sekolah dasar.
	Yayasan Guru Belajar: <ul style="list-style-type: none"> • Temu Pendidik Nusantara (TPN) adalah forum tahunan untuk para guru, pengelola sekolah, dan siswa yang terdiri dari talkshow dan pelatihan, serta acara penutupan yang diikuti oleh para pendidik. • Cerita Guru Belajar adalah buletin yayasan tempat para guru dapat mempublikasikan cerita mereka tentang topik tersebut. 	Yayasan Guru Belajar: Yayasan Guru Belajar mengoperasikan Kampus Guru Cikal, sebuah program pendidikan yang lebih langsung untuk para guru. Program ini dibagi menjadi dua fokus yang berbeda: Teacher Talent mempertemukan calon guru dengan sekolah-sekolah swasta di Indonesia, sementara Buku Kerja Guru menyediakan silabus dan modul yang inovatif, disederhanakan, dan didigitalkan dengan biaya tertentu.	Yayasan Guru Belajar: Program Kampus Pemimpin Merdeka menyediakan konsultasi bagi sekolah untuk meningkatkan aspek pedagogis, kompetensi kepemimpinan, dan manajemen sekolah. Program ini juga menyediakan pelatihan untuk pendidik, orang tua, dan siswa.
	Ars86care Foundation: Space to Build didedikasikan untuk membangun sekolah dan fasilitas yang mendukung pembelajaran PAUD dan sekolah dasar, serta menyediakan alat tulis dan buku-buku untuk mendukung pembelajaran.		Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia): Organisasi ini mengadvokasi pendekatan holistik antara nutrisi, kesehatan, lingkungan bersih, dan pendidikan.

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Revitalisasi Sekolah 	Tanoto Foundation: Ketika kegiatan belajar mengajar tatap muka dihentikan karena pandemi, Tanoto Foundation memperkenalkan solusi inovatif: program e-PINTAR. Alat pelatihan jarak jauh ini membantu para guru menghadapi tantangan pandemi.		
	Yayasan Hadji Kalla: Program Parenting Islam mereka berupaya memberikan pendidikan pengasuhan anak untuk mengurangi kekerasan terhadap anak di Makassar.		
	Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia): Melakukan kegiatan pelatihan bagi administrator sekolah untuk memperkuat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan membangun sekolah tangguh atau Sekolah Tangguh.		
	1000 Guru Foundation: Membantu perbaikan infrastruktur sekolah dan meningkatkan kesadaran gizi di beberapa wilayah tertentu.		
	Rajawali Foundation (RF): Rajawali Corp menawarkan beasiswa bagi lulusan sekolah menengah atas untuk mengikuti program diploma di luar negeri dengan penekanan pada jurusan yang selaras dengan keahlian perusahaan.		
	Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB): Berkomitmen mempromosikan keadilan dan inklusivitas melalui program-program pendidikan yang inovatif dalam rangka memberikan kesempatan yang sama bagi semua.		
	Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah: <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi eduMU dikembangkan untuk mendukung integrasi TIK di sekolah, madrasah, dan pesantren. Muhammadiyah telah berhasil mengintegrasikan aplikasi ini di semua sekolah mereka. • Majelis Dikdasmen PP juga mengadakan konferensi pelatihan untuk para guru. 		



	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
<p>Pengembangan Tenaga Kerja</p> 	<p>Eka Tjipta Foundation: Lembaga ini menyediakan beasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, profesi, pasca sarjana, dan doktoral, revitalisasi SMK, dan dukungan untuk sekolah dasar dan menengah.</p>	<p>Eka Tjipta Foundation: Yayasan ini berkolaborasi dengan konsorsium kelompok bisnis dan pelaku industri untuk meningkatkan sektor pendidikan kejuruan di Indonesia.</p>	<p>Eka Tjipta Foundation: Program SMK mengikuti model link and match Kemendikbudristek, penyesuaian kurikulum, pengembangan keterampilan, pembelajaran berbasis proyek, kompetensi guru, dan menyediakan pabrik pengajaran.</p>
	<p>Tanoto Foundation: Program TELADAN: <i>Professional Preparation</i> adalah program yang diberikan kepada Tanoto Scholars di semester 7-8. Program ini diakhiri dengan acara "job dating" yang menghubungkan para penerima beasiswa dengan calon pemberi kerja.</p>	<p>Tanoto Foundation: Program TELADAN: Tanoto Foundation berkolaborasi dengan berbagai perusahaan dan organisasi terkemuka untuk menawarkan program magang bagi Tanoto Scholars.</p>	
	<p>Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB):</p> <ul style="list-style-type: none"> Lembaga ini fokus pada pemberdayaan generasi muda melalui pendidikan untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan kerja mereka. Program-program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja, mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tuntutan masa depan di industri digital dan memastikan mereka memiliki akses terhadap peluang kerja yang layak. <i>Hands on Operation for Entrepreneurship/ Employment (HopE):</i> Program ini bertujuan memberdayakan para lulusannya melalui pelatihan kewirausahaan dan mendukung para ibu dari para siswa yang menjalankan usaha kecil. 		
	<p>Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA):</p> <ul style="list-style-type: none"> Lembaga ini melaksanakan program pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran, dan fasilitasi pembiayaan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, ada juga program pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, disampaikan melalui kelas tatap muka dan daring yang bertujuan untuk memberikan konsep-konsep dasar kepada UMKM terkait materi yang diberikan. 		

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Pengembangan Tenaga Kerja 	Djarum Foundation: Mendukung pendidikan kejuruan yang selaras dengan kebutuhan industri, bermitra dengan para pelaku industri, mengembangkan kurikulum, melatih guru, menyediakan infrastruktur pembelajaran, mendirikan pabrik pembelajaran, dan menawarkan platform penempatan kerja. Kegiatan tersebut berfokus pada sektor-sektor utama yang meliputi industri kreatif (animasi, desain fashion, pengembangan game)		
	Yayasan Bakti Barito: Sebagai bagian dari Konsorsium Pengusaha Indonesia Peduli Sekolah Vokasi, Bakti Barito telah melaksanakan program Pembinaan Sekolah Vokasi di 7 SMK.		
Tata Kelola Pemerintahan 	Rajawali Foundation (RF): Yayasan ini mendukung para peneliti Indonesia dan pengembangan lembaga pemikir yang meningkatkan tata kelola dan kebijakan pendidikan.	Rajawali Foundation (RF): Program Transformasi Kepemimpinan di Indonesia menawarkan program pendidikan eksekutif untuk bupati dan wali kota yang baru terpilih untuk menjawab tantangan kepemimpinan dalam pelayanan publik	William & Lily Foundation Organisasi ini memanfaatkan koneksi yang sudah terbangun dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama di departemen pendidikan di seluruh wilayah Indonesia Timur.
	Tanoto Foundation: Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan Program Pengembangan Kepemimpinan.	Tanoto Foundation: Berkolaborasi dengan Bappenas dan UNDP untuk mendirikan SDG Academy Indonesia (SDG AI). SDG AI menasar semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. SDG AI bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas dalam tata kelola dan kebijakan, solusi inovatif, serta pemantauan dan pelaporan yang berfokus pada tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.	Tanoto Foundation: Kegiatan advokasi dilakukan oleh Tanoto Foundation menasar pemerintah daerah dan pusat di Indonesia.

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Tata Kelola Pemerintahan 	Eka Tjipta Foundation: Organisasi ini mendukung reformasi pendidikan pemerintah.	Jaringan Semua Murid Semua Guru (Perhimpunan Integrasi Inovasi Kolaborasi Pendidikan Indonesia): <ul style="list-style-type: none"> • Semua Murid Semua Guru adalah sebuah asosiasi yang terdiri dari 23 organisasi yang mengadvokasi kebijakan pendidikan yang lebih baik dan sistem aktivisme pendidikan yang terintegrasi, dan telah berkolaborasi dengan 700 organisasi dan komunitas lainnya. • Pesta Pendidikan adalah program tahunan yang diadakan setiap Hari Pendidikan Nasional ketika para pendidik dan tokoh pendidikan berkumpul mendiskusikan beragam topik terkait pendidikan. Acara tahun 2017 sendiri dihadiri oleh lebih dari 300.000 siswa, guru, dan orang tua. 	Ars86care Foundation: Program Words to Share secara aktif mempromosikan kesadaran publik untuk menciptakan kota yang ramah anak dan mengadvokasi penerapan gaya hidup ramah lingkungan dengan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa).
	Yayasan Bakti Barito Melakukan penelitian komprehensif tentang sistem pendidikan anak usia dini di Tiongkok, Singapura, Filipina, dan Indonesia untuk membantu para pemangku kepentingan memahami kebijakan saat ini dan membentuk perkembangan di masa depan.	Selama pandemi COVID-19, UNICEF, Yayasan Genius, WVI, Plan, Save the Children, dan Kemendikbud melakukan kajian terhadap pembelajaran jarak jauh untuk memastikan efektivitas program PAUD Holistik Integratif.	



Non-Profit

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
<p>Akses Pendidikan</p> 	<p>Dompot Duafa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan layanan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan terpinggirkan dengan menawarkan program beasiswa sekolah menengah, termasuk Program SMA SMART Ekselesia, Sekolah SMART Cibinong, dan Sekolah Universal Al-Syukro. Program ETOS ID bekerja sama dengan 16 universitas negeri untuk memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa yang memenuhi syarat. 		
	<p>Yayasan Hati Suci:</p> <p>Organisasi ini menawarkan pendidikan dari PAUD hingga SMA.</p>		
	<p>Edufor Papua:</p> <p>Edufor Papua bercita-cita meningkatkan kesempatan pendidikan yang setara bagi siswa di Jayapura, Papua melalui kegiatan sukarela, donasi keuangan, dan bantuan pendidikan dalam bentuk penyediaan peralatan sekolah.</p>		
	<p>Hoshizora Foundation:</p> <p>Program beasiswa yang diberikan oleh lembaga ini antara lain Beasiswa Mimpi Anak Negeri, Beasiswa Glow & Lovely Bintang, Beasiswa Bimasakti, Beasiswa Dian Sastro, dan Beasiswa Permata Bintang.</p>		
	<p>SOKOLA:</p> <p>Lembaga ini berupaya meningkatkan tingkat partisipasi dan menghilangkan hambatan finansial melalui berbagai program untuk menyediakan pendidikan yang dipersonalisasi dan responsif terhadap budaya bagi masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya di Indonesia.</p>		
	<p>Yayasan Literasi Anak Indonesia:</p> <p>Pengembangan Perpustakaan Sekolah bertujuan mengembangkan dan meningkatkan perpustakaan melalui pemeliharaan fasilitas dan partisipasi aktif anak-anak sekolah dalam memanfaatkan perpustakaan.</p>		



	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Akses Pendidikan 	Yayasan Usaha Mulia: Salah satu proyek tertua YUM adalah program Sponsor Sekolah yang mencakup buku-buku sekolah, peralatan, seragam, biaya administrasi, dan pemeriksaan kesehatan dua kali setahun untuk anak-anak terpilih di Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Tengah.		
	Human Initiative Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Program Rumah Belajar Anak HOME yang menyediakan rumah bagi anak-anak yatim, terlantar dan kurang mampu untuk belajar, bermain, dan mengeksplorasi kreativitas mereka, memberikan manfaat bagi lebih dari 1.000 anak di 13 provinsi. • Pondok Yatim dan Dhuafa yang juga mendukung anak-anak yang terkena dampak bencana alam untuk melanjutkan pendidikan agama mereka. • Pendidikan Anak Penyintas memungkinkan anak-anak pengungsi di luar negeri untuk mendapatkan pendidikan non-formal dengan kelas budaya, bahasa Inggris, komputer, dan lain-lain. • Program Orang Tua Asuh memberikan beasiswa dan pelatihan pembangunan karakter untuk anak asuh. 		
Kualitas Pendidikan 	Dompot Dhuafa: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga ini melaksanakan PAUD Pengembangan Insani untuk memastikan pendidikan anak usia dini yang terstruktur yang melayani berbagai kelompok usia dan menyediakan lingkungan belajar yang profesional dan inklusif bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. • Sekolah Literasi Indonesia berkonsentrasi pada peningkatan literasi dalam pendidikan formal dan informal. • Program Ceruk Ilmu diimplementasikan untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca siswa kelas awal, membimbing mereka dari pemahaman membaca dasar hingga menceritakan kembali. 		Edufarmers Foundation (sebelumnya JAPFA Foundation): Santosa untuk Anak Nusantara adalah program pencegahan stunting yang berfokus pada pendidikan pengasuhan anak untuk memberdayakan orang tua dan pengasuh anak dalam membuat pilihan tepat mengenai nutrisi dan kesehatan melalui penyediaan telur bersubsidi untuk anak-anak yang mengalami stunting.
	Yayasan Hati Suci: Lembaga yang berorientasi pada pembelajaran ini memprioritaskan penyediaan layanan pendidikan berkualitas tinggi serta		Yayasan Literasi Anak Indonesia: Program Pengembangan Bahan Penunjang, pada gilirannya, menyediakan program Membaca Berimbang dengan modul pembelajaran untuk guru, modul pembelajaran literasi dan numerasi, serta modul pengajaran untuk platform Merdeka Mengajar Kemendikbudristek.

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Kualitas Pendidikan 	Yayasan Literasi Anak Indonesia: Membaca Berimbang mengambil pendekatan dua arah dalam meningkatkan minat baca pada anak-anak sekolah dengan terlibat langsung dengan para siswa dan melatih para guru dengan metode pedagogi terbaru.		
	Yayasan Insan Sekolah Kasih (YISK): Orang tua menerima dukungan melalui program-program pendidikan mereka, termasuk webinar, seminar, dan retreat orang tua.		
	ProVisi: <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi ini menawarkan beberapa program pengembangan literasi yang mengembangkan bahan bacaan berkualitas, mendukung para kreator buku, dan membangun perpustakaan ramah anak untuk meningkatkan literasi. • Organisasi tersebut juga fokus pada peningkatan metode pengajaran-pembelajaran melalui penilaian dan pelatihan serta meningkatkan pengalaman belajar melalui penggunaan teknologi. 		
	Teach for Indonesia (TFI): <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi meningkatkan kualitas hidup di dalam masyarakat dengan fokus yang kuat pada kesejahteraan anak-anak. • Inisiatif utama mereka, program BIMBEL (Bimbingan Belajar), menyediakan bimbingan belajar untuk anak-anak di kampus BINUS yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik mereka di sekolah. 		
	SOKOLA: <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi ini berfokus pada pendidikan komunitas yang memberikan pendidikan yang dipersonalisasi dan responsif secara budaya untuk masyarakat adat dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya di Indonesia. • Terdapat beberapa program seperti Sokola Rimba, Sokola Pesisir, Sokola Humba, Sokola Tengger, Sokola Kaki Gunung, Sokola Kajang, Sokola Pulau, Sokola Tayawi, Sokola Asmat, Sokola Online, Sokola Pascabencana. 		
	Turun Tangan: Fokus pada pengayaan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan tujuan memperkuat karakter dan prestasi akademik siswa melalui partisipasi dalam program-program yang dijalankan secara sukarela.		



	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
<p>Revitalisasi Sekolah</p> 	<p>Dompot Dhuafa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Guru Indonesia, program pengembangan guru, menjangkau 4.914 guru di 34 provinsi di Indonesia • Komunitas Media Pembelajaran, sebuah inisiatif yang berpusat pada masyarakat yang berfokus pada pengembangan keterampilan guru dan mendorong pedagogi yang inovatif. • Program SGI Master Teacher (SMT) menawarkan pelatihan intensif dan bimbingan yang bertujuan untuk mengembangkan calon aktivis SGI. 	<p>INSPIRASI Foundation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Percontohan Karawang I, II, III menyelenggarakan lokakarya daring dan tatap muka untuk pengawas sekolah, pengurus K3S, dan kepala sekolah mitra. • Organisasi ini turut melaksanakan pendampingan langsung ke sekolah dan konsultasi informal secara berkala serta Kepemimpinan Responsif Gender melalui penyelenggaraan lokakarya dan pendampingan yang responsif gender. • Proyek ABDI memberikan pelatihan intensif kepada guru dan kepala sekolah untuk mengimplementasikan program remedial numerasi berbasis Pengajaran yang Tepat (<i>Teaching at the Right Level</i>) di setiap sekolah. 	<p>Human Initiative Indonesia:</p> <p>Lembaga ini berfokus pada pengembangan sumber daya lokal, program ini melatih guru-guru lokal dan mendorong partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan.</p>
	<p>Hoshizora Foundation:</p> <p>Organisasi ini melaksanakan program Pemberdayaan Guru, program Manajemen Alumni, dan Keterlibatan Orang Tua dan Pengembangan Kapasitas.</p>	<p>We the Teachers (WTT):</p> <p>Bermitra dengan perusahaan rintisan pendidikan daring Zenius dalam memberdayakan guru dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka dengan menyediakan Zen Box, lembaga ini menyediakan video pendidikan dan kuis ke sekolah-sekolah di daerah terpencil seperti Sambas, Sintang, dan Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>We the Teachers (WTT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga ini mengadvokasi peningkatan kualitas hidup guru, terutama di daerah yang sulit dijangkau karena terdapat hambatan fisik dan keuangan yang merupakan faktor utama dalam pengajaran sehari-hari. • Organisasi ini telah memfasilitasi pelatihan guru mengenai aspek-aspek administratif pendidikan seperti merancang rencana pembelajaran, menyusun lembar kehadiran, dan lain-lain.
	<p>Ikatan Guru Indonesia (IGI):</p> <p>Organisasi ini melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kompetensi guru yang diprakarsai oleh IGI yang berfokus pada peningkatan kompetensi profesional, pedagogis, kepemimpinan, sosial dan personal.</p>	<p>Yayasan Insan Sekolah Kasih (YISK):</p> <p>Organisasi ini memiliki program Pelatihan Indonesia Memimpin yang menargetkan kepala sekolah, program Pelatihan Manajemen Kaizen yang ditujukan untuk staf administrasi sekolah, Edutalk sebagai program webinar rutin, dan berbagai program pelatihan untuk guru yang didukung oleh BKS, Tanoto Foundation, dan lain-lain.</p>	<p>Yayasan Insan Sekolah Kasih (YISK):</p> <p>Saat ini YISK berfokus pada Program Organisasi Penggerak yang diprakarsai oleh Kemendikbudristek.</p>
	<p>Taman Bacaan Pelangi (TBP):</p> <p>Kegiatan ini memberikan perpustakaan gratis di wilayah timur Indonesia dan menawarkan pelatihan kepada para guru, terutama guru kelas 1 sampai 3, untuk meningkatkan literasi di kalangan siswa.</p>		<p>Taman Bacaan Pelangi (TBP):</p> <p>Kegiatan ini mempromosikan reformasi pendidikan dengan mengadvokasi kunjungan ke perpustakaan sebagai bagian dari kurikulum untuk meningkatkan literasi dan menumbuhkan kebiasaan membaca secara mandiri.</p>

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Revitalisasi Sekolah 	Human Initiative Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> Program Sekolah Tanpa Kekerasan mendidik dan melatih komunitas sekolah menerapkan kebijakan perlindungan anak, memasok kebutuhan infrastruktur, serta membangun sekolah dan ruang kelas di daerah tertinggal dan terdampak bencana. 		Turun Tangan: Program-program Turun Tangan dilaksanakan secara otonom oleh unit-unit lokal (seperti TurunTangan Surabaya), tergantung pada kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.
Pengembangan Tenaga Kerja 	Yayasan Hati Suci: Yayasan ini berlandaskan pada lingkungan yang mengayomi yang bertujuan memupuk kreativitas dan mendorong kemandirian, terutama melalui inisiatif kewirausahaan.		
	Yayasan Insan Sekolah Kasih: Yayasan ini melaksanakan program EqwipHubs yang menyediakan pelatihan kejuruan yang berfokus pada pengembangan tenaga kerja dan pelatihan kewirausahaan.		
	Yayasan Usaha Mulia: YUM menyediakan pelatihan kesiapan kerja dan pelatihan soft skill bagi kaum muda dan perempuan melalui program BLK mereka. YUM juga menyediakan kelas-kelas pelatihan menjahit, teknologi informasi, dan bahasa Inggris, serta pelatihan kerja khusus lainnya untuk orang dewasa seperti produksi makanan, barang pertukangan, dan pelatihan penjaga malam.		
	Edufarmers Foundation (sebelumnya JAPFA Foundation): Program Bertani untuk Negeri mengedukasi para petani, peternak, dan pemuda dilaksanakan untuk memproduksi komoditas pangan utama.		
	Hoshizora Foundation: Organisasi ini melaksanakan konseling karier, pencocokan pekerjaan, dan pengembangan bakat.		
	Indonesia Mengajar: Melalui program Pengajar Muda, Indonesia Mengajar memberikan kesempatan kepada lulusan Perguruan Tinggi untuk menjadi katalisator kemajuan di daerah dengan bekerja sebagai guru selama satu tahun.		
Tata Kelola Pemerintah 			Dompot Duafa: Makmal Pendidikan berfokus pada Pusat Kajian dan Advokasi Pendidikan, yang memprioritaskan advokasi pendidikan pada kebijakan dan program di seluruh Indonesia.

Lembaga Pemikir



	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Akses Pendidikan 			Center for Indonesian Policy Studies (CIPS): Penelitian CIPS tentang akses pendidikan telah meneliti UU Pesantren dalam sistem pendidikan Indonesia, dampak sekolah swasta berbiaya rendah dalam menyediakan akses ke pendidikan berkualitas, bagaimana pendirian perguruan tinggi luar negeri di Indonesia dapat bermanfaat bagi pendidikan tinggi, dan sebagainya.
			Centre for Strategic and International Studies (CSIS): CSIS berfokus pada pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan kesenjangan atau ketidaksetaraan pendidikan, serta menyelenggarakan seminar dan acara untuk mendiskusikan isu-isu pendidikan utama dengan para pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan.
Kualitas Pendidikan 	Article 33 Indonesia: Program BERSAMA berfokus pada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi siswa sekolah dasar di daerah tertinggal melalui pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah di Nusa Tenggara Timur	Article 33 Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Program Bersama juga didukung oleh William & Lily Foundation, Adaro, dan INSPIRASI. • Organisasi ini juga mendukung kegiatan-kegiatan INOVASI yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. 	Center for Digital Society (CfDS): - Inisiatif Proliner milik CfDS adalah program Training of Trainers (ToT) yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama menargetkan mahasiswa perguruan tinggi yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai daerah dengan masyarakat lokal di Indonesia.
	Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK): PSPK memandang individu sebagai anak, bukan sebagai siswa atau pembelajar, untuk memahami kompleksitas pembelajaran. Oleh karena itu, PSPK berfokus pada hubungan yang kompleks antara faktor sekolah dan luar sekolah yang menyebabkan kesenjangan kesempatan pendidikan yang sistematis.	Centre for Strategic and International Studies (CSIS): Melalui dukungannya terhadap penyelenggaraan G20 di Indonesia, CSIS telah mengembangkan perangkat literasi digital yang berimplikasi pada literasi digital anak-anak.	Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK): <ul style="list-style-type: none"> • PSPK melakukan penelitian dan advokasi kebijakan pendidikan yang memprioritaskan anak-anak sebagai penerima manfaat utama. • PSPK terus mempromosikan sistem pendidikan sebagai sistem terbuka, sebuah sistem yang membutuhkan tanggung jawab bersama.



	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
<p>Kualitas Pendidikan</p> 	<p>Southeast Asian Ministers of Education Organization Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP): CECCEP menyediakan pelatihan elektronik tentang PAUD dan pengasuhan anak yang terbuka untuk umum, praktisi pendidikan, pembuat kebijakan, dan keluarga. Modul tersebut terdiri dari pelatihan mandiri yang diambil oleh individu, Pelatihan Reguler yang dilaksanakan di kelas, dan Pelatihan Campuran yang menggabungkan pembelajaran daring dengan kelas luring.</p>	<p>SMERU Research Institute: - Program Research on Improving Systems of Education (RISE) di Indonesia bekerja sama dengan Amsterdam Institute for Global Health and Development dan Mathematica menghasilkan temuan-temuan dari studi tentang kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dasar siswa.</p>	
<p>Revitalisasi Sekolah</p> 	<p>Asian Development Bank Institute (ADBi): ADBi bekerja mengembangkan perangkat lunak berbasis AI dan pelatihan untuk guru dalam penggunaan High-Tech, serta mengembangkan program pelatihan untuk guru mengenai pendekatan pedagogis untuk mengembangkan keterampilan tingkat tinggi siswa (High Touch).</p>	<p>Center for Digital Society (CfDS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CfDS berkolaborasi dengan Google for Education dalam sebuah studi untuk memetakan kebutuhan, kesadaran, dan pemahaman (termasuk keterampilan digital) para pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan tentang penggunaan dan potensi EdTech. • Selain itu, organisasi tersebut membuat sebuah seri kuliah keterampilan digital yang berkolaborasi dengan UGM, Kemkominfo, dan berbagai perusahaan teknologi nasional dan internasional yang terbuka untuk umum dan mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. 	<p>SMERU Research Institute: Program RISE berfokus pada kebijakan reformasi guru, inovasi pendidikan, dan pembelajaran siswa selama pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap krisis pembelajaran yang berkepanjangan. Program ini dilakukan dengan menyebarluaskan temuan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan LSM.</p>
<p>Pengembangan Tenaga Kerja</p> 	<p>Southeast Asian Ministers of Education Organization Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP): CECCEP mengadakan kompetisi untuk mendapatkan hibah meneliti isu-isu PAUD dan pengasuhan anak, yang tersedia untuk dosen, peneliti, praktisi, dan cendekiawan di bidang ini dari negara-negara anggota SEAMEO. Selain itu, CECCEP juga menerbitkan laporan tahunan tentang topik pendidikan anak.</p>	<p>Article 33 Indonesia: - Studi yang dilakukan menggarisbawahi perlunya kolaborasi dan penyelarasan antara sektor pendidikan dan industri. Program ini didukung oleh Knowledge Sector Initiative, bagian dari Kemitraan Australia-Indonesia.</p>	
<p>Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI): - Belajar Kerja di PUSKAPA adalah program magang yang ditujukan bagi mahasiswa semester akhir untuk melatih mereka dalam bidang penelitian, advokasi, dan manajemen.</p>			

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Pengembangan Tenaga Kerja 		Center for Digital Society (CfDS): Berkolaborasi dengan Meta, CfDS telah melakukan kegiatan yang berfokus pada dukungan literasi digital yang terkait dengan pengembangan tenaga kerja.	
Tata Kelola Pe- metintahan 	Center for Indonesian Policy Studies (CIPS): <ul style="list-style-type: none"> • CIPS melakukan penelitian dan advokasi kebijakan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. • CIPS berfokus pada bagaimana inisiatif swasta, otonomi sekolah yang lebih besar, dan keterampilan yang tepat di antara siswa dan guru dapat membangun sistem pendidikan yang tangguh di Indonesia, memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan dan meningkatkan pilihan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. 	Article 33 Indonesia: Pada tahun 2021, Article 33 Indonesia memberikan bantuan menganalisis kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang kualitas sarana dan prasarana. Dalam memperkuat kerja sama dengan Kemendikbudristek, Article 33 Indonesia terlibat dalam kerja sama Swakelola untuk memfasilitasi pengelolaan program bagi Biro GTK dan Umum.	
		Southeast Asian Ministers of Education Organization Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP): Dalam bidang advokasi, CECCEP telah bekerja sama dengan 42 mitra yang terdiri dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri, dan LSM lainnya, serta menyelenggarakan acara rutin seperti webinar dan forum tahunan yang dihadiri oleh para ahli dan menteri.	
		Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI): PUSKAPA UI melakukan penelitian tentang peraturan perundang-undangan dan tren sosial terkini mengenai kesejahteraan anak, termasuk kualitas pendidikan mereka. Hal ini juga mencakup koordinasi dan kerja sama dengan LSM lain dan lembaga pemerintah seperti Kementerian PPPA.	
		Asian Development Bank Institute (ADBi): ADBi adalah lembaga pemikir yang berbasis di Tokyo dari Asian Development Bank (ADB) yang menyediakan penelitian kebijakan yang didorong oleh permintaan terhadap pengembangan kapasitas dan pelatihan yang membantu negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan


	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
<p>Akses Pendidikan</p> 	<p>Pertamina: Program pendidikan TJSL Pertamina pada tahun 2022 mencakup: beasiswa (reguler, afirmasi di daerah operasi Pertamina, dan vokasi) bagi mahasiswa melalui pemberian pendidikan, pelatihan, peluang kerja bagi penyandang disabilitas, dan bantuan infrastruktur pendidikan untuk penyandang disabilitas.</p>	<p>British Petroleum (BP): Pada tahun 2023, Tangguh LNG dan Yayasan Pendidikan Kristen menyediakan 10 guru kontrak untuk tingkat sekolah menengah pertama. Bantuan tersebut mencakup perencanaan dan perekrutan guru, pengembangan kapasitas guru, serta bantuan laboratorium dan buku.</p>	<p>Pertamina: Pertamina juga mendukung masyarakat adat di sekitar area operasinya—Suku Sakai dan Anak Dalam—melalui program sosial dan pendidikan. Ini mencakup bantuan beasiswa, program terkait karier, pencegahan stunting, peningkatan gizi, pemberdayaan ekonomi, keterampilan kreatif, dan kesadaran lingkungan.</p>
	<p>Freeport Indonesia: Didirikan oleh Freeport Indonesia, Yayasan Pendidikan Wijaya menyediakan pendidikan untuk PAUD, SD, dan SMP dengan mengintegrasikan kurikulum <i>International Baccalaureate</i> dan kurikulum nasional.</p>	<p>Freeport Indonesia: Freeport Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme & Komoro dan dinas pendidikan setempat meningkatkan akses pendidikan melalui beasiswa, penyediaan asrama, dan pelatihan guru.</p>	<p>Freeport Indonesia: Freeport Indonesia bersama pemangku kepentingan lainnya mendukung implementasi MBKM di enam provinsi di Papua untuk menciptakan lulusan yang relevan dan berkualitas tinggi, termasuk melalui bantuan teknis dan sosialisasi dialog multi-pemangku kepentingan untuk beberapa perguruan tinggi mengenai peningkatan teknis, penyesuaian kurikulum, dan peluang kemitraan.</p>
	<p>Bank Mandiri: Bank Mandiri memprioritaskan peningkatan akses pendidikan bagi siswa yang putus sekolah dari kalangan kurang mampu dan menyediakan kesempatan pendidikan setara. Mereka juga mendukung siswa dalam pembelajaran tatap muka kembali dengan memberikan sepatu dengan menyadari adanya keterbatasan finansial yang semakin parah akibat pandemi.</p>		
	<p>Telkom Indonesia: Telkom menyediakan Indihome fiber optic, Orbit, dan Satelit Mangoesky di 364 lokasi untuk membantu sekolah dan siswa mendapatkan akses internet dan komputer guna pengembangan keterampilan TIK dan tujuan belajar, termasuk di wilayah 3T.</p>		
	<p>British Petroleum (BP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan bantuan beasiswa untuk siswa lokal di tingkat SMA dan pendidikan tinggi. • Program Tangguh LNG turut menawarkan beasiswa dan dukungan teknis dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat setempat di Papua. 		



	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Akses Pendidikan 	HM Sampoerna: Melalui Putera Sampoerna Foundation, perusahaan ini bertujuan memberikan akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang berprestasi akademik baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.		
	Indosat: Fokus perusahaan terdapat pada bidang digital mencakup IDCamp yang menyediakan materi pembelajaran digital yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.		
	Unilever Indonesia: Beasiswa Glow & Lovely Bintang dari Unilever mendukung pendidikan inklusif dengan melaksanakan mentoring bagi perempuan muda.		
	Bank Central Asia (BCA): Melalui program Bakti BCA, dana sebesar Rp 54,7 miliar telah disalurkan untuk membiayai upaya peningkatan kualitas pendidikan yang bertujuan meningkatkan daya saing generasi muda.		
Kualitas Pendidikan 	ExxonMobil Indonesia: ExxonMobil Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di 90 sekolah di Jawa Timur dan meningkatkan pelatihan guru secara nasional.	Danone Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Taman Pintar di Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan program dari Danone untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial bagi anak usia 4-6 tahun dan orang tua mereka di PAUD. • Danone dan Yasminda mengadakan sosialisasi Isi Piringku melalui pelatihan parenting gizi untuk pelatih (Training of Trainer/TOT) bagi guru PAUD, kader Posyandu, dan kader PKK pada tahun 2022. • Bunda Mengajar bersama Kader Posyandu berfokus pada peningkatan kesadaran gaya hidup sehat di kalangan ibu muda. Urban farming juga dilaksanakan untuk membantu penyediaan nutrisi seimbang dan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat yang dapat menciptakan kader yang kompetitif dalam mengembangkan daerah mereka. 	Danone Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggap Gizi dan Kesehatan Anak Stunting (TANGKAS) adalah kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang mempromosikan kesadaran gizi di kalangan ibu, anak, dan semua sektor. • Inisiatif seperti Isi Piringku dan Bunda Mengajar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat. • Generasi Sehat Indonesia (GESID) berfokus pada menciptakan generasi bebas stunting di kalangan siswa SMP dan SMA. • Inisiatif urban farming juga dilaksanakan untuk menyediakan gizi seimbang dan sebagai sumber pendapatan bagi komunitas.

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Kualitas Pendidikan 	Japfa Comfeed Indonesia: Klub Catur Japfa berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi pemuda Indonesia dan telah mendukung siswa SD yang beberapa di antaranya telah meraih sukses di tingkat lokal dan lebih jauh.	Bank CIMB Niaga: Bank CIMB Niaga menyelenggarakan program literasi keuangan atas permintaan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan kesadaran tentang perbankan dan manajemen keuangan yang diterapkan untuk siswa dari tingkat SD hingga SMA.	
		British Petroleum (BP): Tangguh LNG mengadakan kursus bahasa Inggris untuk siswa sekolah menengah pertama yang berasal dari desa-desa yang terdampak langsung oleh operasi gas British Petroleum Tangguh.	
		Amman Mineral: Amman Mineral bersama Yayasan INSPIRASI meluncurkan program pengembangan kapasitas berbasis pemikiran yang berhubungan dengan teknologi komputer untuk guru PAUD dan kepala sekolah yang bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan abad ke-21 dan mempersiapkan siswa PAUD untuk pendidikan dasar.	
		Unilever Indonesia: Unilever bekerja sama dengan Universitas Indonesia melaksanakan manajemen air hujan di pesantren.	
Revitalisasi Sekolah 	ExxonMobil Indonesia: Perusahaan ini telah merenovasi 400 sekolah dan institusi pendidikan non-formal, menyediakan fasilitas penting, serta mengembangkan sekolah menengah pertama dan atas di Bojonegoro dan Tuban dengan menawarkan pelatihan komprehensif dan pengembangan kurikulum.	ExxonMobil Indonesia: Di Tuban dan Bojonegoro, ExxonMobil bersama dinas pendidikan setempat dan pelaku industri lainnya merenovasi sekolah dan menyediakan pengembangan profesional bagi guru dan kepala sekolah secara nasional, terutama di Bojonegoro dan Tuban.	ExxonMobil Indonesia: ExxonMobil Indonesia: Di Tuban dan Bojonegoro, ExxonMobil bersama dinas pendidikan setempat dan pemain industri lainnya mendukung pengembangan guru dan literasi siswa di Pusat Belajar Guru melalui program berbasis sekolah. Mereka mempromosikan gaya hidup sehat, terutama bagi perempuan, serta mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di 90 sekolah di Jawa Timur.



	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Revitalisasi Sekolah 	Bank Mandiri: <ul style="list-style-type: none"> • Program Mandiri Edukasi 101 fokus pada peningkatan kapasitas guru dan orang tua serta peningkatan kesadaran terkait pendidikan berbasis kesehatan. • Bank Mandiri mengadakan Sekolah 4.0, sebuah program yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kesiapan guru dalam mempersiapkan siswa menghadapi revolusi industri 4.0. 	HM Sampoerna: <p>Sampoerna bekerja sama dengan Waste4Change untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah di Karawang</p>	Freeport Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Memupuk kesadaran lingkungan di kalangan siswa, guru, dan pejabat, serta membantu pengembangan kurikulum. • Freeport juga mengadakan sosialisasi kebijakan hak asasi manusia dan sosial bagi karyawannya, termasuk bagi siswa.
	Mayora Indah: <p>Melalui Mayora Smart Education, Mayora mendukung pencapaian pendidikan berkualitas melalui serangkaian kegiatan CSR, termasuk membantu sekolah, peningkatan kapasitas guru, renovasi gedung sekolah untuk PAUD, serta pembangunan fasilitas seperti perpustakaan.</p>	Japfa Comfeed Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Japfa Comfeed Indonesia menyelenggarakan kompetisi dan memberikan penghargaan kepada siswa dan sekolah, bekerja sama dengan doctorSHARE untuk membantu sekolah-sekolah di Pulau Kei Besar, menyediakan komputer untuk sekolah yang membutuhkan, dan mengadakan program management trainee. • Japfa bekerja sama dengan universitas pada proyek seperti pengembangan jurnal asupan gizi siswa, proyek percontohan ekonomi hijau, dan pariwisata edukasi lingkungan. 	Japfa Comfeed Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Program unggulan CSR Japfa, Japfa for Kids, berfokus pada penanganan masalah gizi anak dan mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah dasar dengan dukungan guru, orang tua, dan anak-anak. • Kegiatan tersebut mencakup promosi perilaku hidup bersih dan sehat, gizi seimbang, serta mendukung layanan 10 Posyandu.
	Meta: <p>We Think Digital adalah program unggulan Meta dalam menyediakan modul pembelajaran yang dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah untuk meningkatkan kompetensi, pemikiran kritis, keterampilan empati, tanggung jawab, dan membangun komunitas menuju ranah digital.</p>	Meta: <p>Facebook meluncurkan Asah Digital pada tahun 2019 dengan bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), PGRI, dan Siberaksi, serta menjalin kemitraan dengan ECPAT Indonesia, SiBerkreasi, Sudah Dong, Love Frankie, dan USAID. Tujuan utama inisiatif ini adalah untuk menumbuhkan kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab di dunia digital.</p>	Pertamina: <p>Terkait dengan gizi dan kesehatan, Pertamina memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, akses Posyandu, perawatan gizi ibu dan anak, sanitasi, dan air bersih untuk para penerima manfaatnya.</p>
	Telkom Indonesia: <p>Telkom membantu digitalisasi pendidikan untuk sekolah berkebutuhan khusus (SLBN).</p>	Telkom Indonesia: <p>Telkom bekerja sama dengan BRI, Bahana PUI, Angkasa Pura II, Danareksa, dan PLN menyediakan 3.000 seragam sekolah, unit komputer, proyektor, jaringan internet, dan proyektor layar di Banten.</p>	Unilever Indonesia: <p>Royco bekerja sama dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan melaksanakan program Dapur Sehat Atasi Stunting untuk mendidik perempuan di masyarakat tentang pentingnya penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.</p>
	Bank Central Asia (BCA): <p>Program Bakti BCA menawarkan berbagai inisiatif, termasuk program pengelolaan sekolah dan pengembangan guru.</p>	Unilever Indonesia: <p>Program Unilever Future Leaders bersama INSEAD memberikan paparan kepada peserta dalam proyek-proyek perusahaan.</p>	

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Revitalisasi Sekolah 		Indosat: Indosat menyediakan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh dan bekerja sama dengan Kemdikbudristek untuk guru dan siswa PAUD, SD, dan SMP, memastikan keberlanjutan pembelajaran daring selama pandemi.	
Pengembangan Tenaga Kerja 	HSBC: <ul style="list-style-type: none"> • HSBC mengadakan Program Global Graduate dan Corporate Functions Graduate untuk mengembangkan talenta dari lulusan baru dan perguruan tinggi terbaik melalui pelatihan, pembelajaran lapangan, dan tugas proyek. • Bali Youth for Clean Energy bertujuan meningkatkan pendidikan SMK dan kualitas lulusan untuk peluang pekerjaan hijau dengan dukungan pendanaan lebih dari Rp 1 miliar. 	HSBC: Kompetisi Business Case HSBC meningkatkan keterampilan bisnis untuk siswa dan pendidik dari perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation.	HSBC: Sejalan dengan arahan OJK, HSBC melaksanakan program literasi keuangan dan pendidikan bisnis yang menargetkan perguruan tinggi, pendidik, siswa, komunitas, dan masyarakat umum.
	Amman Mineral: Amman menawarkan beasiswa dalam pelatihan terkait teknologi digital di Glints Academy.	Amman Mineral: <ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan sekolah United Tractors dan Universitas Pendidikan Indonesia, Amman memberikan pelatihan keterampilan bagi siswa vokasi dan pendidik di Sumbawa di bidang operasi alat berat dan STEM. • Bekerja sama dengan AstraTech, Amman memperkenalkan beasiswa untuk pendidikan vokasi tinggi, menawarkan program seperti rekayasa produksi dan manajemen informasi untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan finansial. 	
	Astra International: <ul style="list-style-type: none"> • Astra menyelenggarakan Astronauts 2022, sebuah kompetisi digital dan teknologi untuk siswa dan startup yang menuntun para peserta ke dalam program inkubasi Astra InnovLab. Astra memprioritaskan pengembangan talenta digital melalui berbagai inisiatif pelatihan. • Astra mengelola Politeknik Manufaktur yang menawarkan pendidikan formal di tingkat diploma. 	Astra International: <ul style="list-style-type: none"> • Astra mendukung KTT B20 untuk Akses Setara dan Kualitas Pendidikan di 2022 melalui pelaksanaan inisiatif link and match yang diinisiasi oleh B20 Future of Work and Education Task Force dengan KADIN. • Astra juga menyelenggarakan Program Showcase Nasional untuk sekolah vokasi, meningkatkan daya saing lulusan, terutama dalam kolaborasi dengan SMK Muhammadiyah 1 Kapanjen. 	

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
<p>Pengembangan Tenaga Kerja</p> 	<p>Bank Central Asia (BCA): Program Bakti BCA menawarkan berbagai inisiatif, termasuk pelatihan untuk tenaga kerja siap digital dan beasiswa.</p>	<p>Bank Central Asia (BCA): BCA berfokus pada pengembangan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja melalui program pendidikan CSR mereka. Program ini sejalan dengan upaya mereka untuk mendukung SDGs.</p>	
	<p>Bank CIMB Niaga: CIMB Niaga menawarkan beasiswa, literasi keuangan, magang Kampus Merdeka, dan lainnya. Program Be Smart memberikan penerima beasiswa dengan pengembangan diri yang berfokus pada manajemen keuangan dan kesadaran teknologi perbankan digital.</p>		
	<p>Freeport Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan ini menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa untuk mempersiapkan daya saing mereka. • Freeport Indonesia, melalui institusi pertambangannya (BLK), memberikan pelatihan kerja dan mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja terampil. 		
	<p>GoTo – Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB):</p> <ul style="list-style-type: none"> • YABB melaksanakan beberapa program pengembangan tenaga kerja dengan tujuan menciptakan talenta siap masa depan, terutama di pasar kerja digital. • Generasi GIGIH adalah program pengembangan talenta teknologi yang mempromosikan inklusivitas dengan menyediakan akses bagi individu dari berbagai latar belakang untuk memasuki industri teknologi di Indonesia yang memenuhi permintaan untuk peran seperti insinyur dan analis data. 		
	<p>HM Sampoerna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan ini mendukung pelatihan guru di tingkat vokasi. • Sampoerna juga berkomitmen mencegah keterlibatan pekerja di bawah umur melalui program intervensi on-farm dan off-farm. • Para istri petani, pekerja, dan pemerintah desa turut terlibat dalam mendukung realisasi tidak adanya anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pertanian tembakau Sampoerna 		

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Pengembangan Tenaga Kerja 	Telkom Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> Telkom menyediakan program sertifikasi digital untuk lulusan SMK atau SMA di 25 provinsi. Telkom menyebarkan perangkat aplikasi digital, perangkat lunak, pelatihan digital, dan sertifikasi untuk penyandang disabilitas di delapan wilayah. 		
	Indosat: Indosat mendukung guru dalam mengembangkan keterampilan digital, memfasilitasi mereka masuk ke pasar kerja digital melalui bantuan CSR.		
Tata Kelola Pemerintahan 	Meta: Meta mendukung modul pembelajaran yang dapat diakses dengan fleksibel, baik sebagai kurikulum atau modul terpisah, yang dapat disesuaikan untuk penggunaan formal maupun informal, seperti bagi keluarga, guru, remaja, atau anak-anak dari segala usia dengan berbagai topik yang dapat diakses pada koneksi internet rendah hingga tinggi.	Danone Indonesia: Bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Universitas Indonesia, dan Yayasan Lentera Anak, Danone Indonesia merumuskan modul pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak PAUD dan sekolah dasar.	
		ExxonMobil Cepu: ExxonMobil Cepu bermitra dengan Universitas Gadjah Mada untuk penelitian minyak dan gas dengan menawarkan kuliah, pelatihan, dan program magang. Mereka juga berkolaborasi dalam inisiatif pengabdian masyarakat dan menyediakan pelatihan bagi pejabat pemerintah di Desa Bojonegoro yang bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu terkait energi.	
		Japfa Comfeed Indonesia Untuk mempersiapkan bonus demografi Indonesia dan Indonesia Emas 2045, Japfa bekerja sama dengan pemerintah dan perguruan tinggi dalam berbagai inisiatif seperti Teaching Farm, program magang SAIL, dan berbagai pengetahuan di bidang akuakultur.	

Bantuan Luar Negeri

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Akses Pendidikan 	Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade): Sebagai program beasiswa luar negeri yang paling lama berjalan di Indonesia, Australia Awards menyediakan beasiswa dan kursus singkat bagi pembuat kebijakan dan profesional Indonesia, serta calon mahasiswa S2 dan S3 untuk melanjutkan studi di Australia dan kawasan sekitarnya.	Global Partnership for Education (GPE): Dalam kemitraan dengan Network for Education Watch, dana Education Out Loud bertujuan memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam mencapai pendidikan wajib 12 tahun yang adil, inklusif, dan responsif gender di Indonesia dengan fokus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah termasuk kelompok yang terpinggirkan.	UNESCO: Learning for Empathy: The Teacher Exchange and Support Programme for Bangladesh, Indonesia, Pakistan, and Sri Lanka bekerja sama dengan Jepang. Program ini bertujuan mempromosikan perdamaian, toleransi, dan harmoni antaragama/ budaya di lingkungan sekolah sebagai langkah pencegahan terhadap konflik, radikalisasi, dan ekstremisme kekerasan di lingkungan sekolah.
	Islamic Development Bank: IISDB menyediakan beasiswa untuk mahasiswa S1 dan S2 (Perguruan Tinggi) dalam Program Beasiswa untuk Komunitas Muslim.		
	USAID: USAID Technical and Management Support to the Indonesian Endowment Fund for Education (USAID Teman LPDP): memberikan dukungan beasiswa dan manajemen talenta bagi penyedia beasiswa di Indonesia untuk memperkuat tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas.		
Kualitas Pendidikan 	Asian Development Bank (ADB): Higher Education for Technology and Innovation (HETI) (2022-2027) berfokus pada memperkuat kapasitas riset di dua perguruan tinggi negeri (Institut Teknologi Sepuluh Nopember & Universitas Lampung) guna mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia.	Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade): Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI): Program INOVASI, kemitraan antara Australia dan Indonesia, bekerja sama dengan Kemdikbudristek, Kemenag, Bappenas, dan pemerintah daerah meningkatkan literasi dan numerasi dengan membangun kapasitas lokal dan menerapkan intervensi pendidikan (2016–2023).	UNICEF: Aksi Bergizi berupaya mengatasi beban ganda masalah gizi (stunting, anemia, dan obesitas) di kalangan remaja laki-laki dan perempuan melalui program yang terintegrasi dan responsif gender.
	ChildFund: ChildFund Indonesia mendukung anak-anak usia lima tahun ke bawah (tingkat PAUD) dalam pengembangan keterampilan fisik, sosial, dan intelektual, serta program keterlibatan keluarga dan modul pelatihan keluarga daring.	USAID: Higher Education Partnership Initiative (USAID HEPI): kolaborasi antara USAID dan Arizona State University ini bertujuan meningkatkan program STEM di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dengan menyelaraskan standar internasional dan kebutuhan industri.	USAID: Melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, pemerintah, dan industri, HEPI meningkatkan kurikulum, memenuhi standar akreditasi, dan memfasilitasi pengakuan kredit.

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Kualitas Pendidikan 	Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade): - Program BRIDGE (Building Relationships through Intercultural Dialogue and Growing Engagement) bertujuan mempererat hubungan antara sekolah dan komunitas sekolah di Indonesia dan Australia.		World Bank: Investing in Nutrition and Early Years: Program ini bertujuan meningkatkan gizi rumah tangga 1.000 hari di kabupaten prioritas melalui pendekatan “konvergensi” yang berfokus pada penyediaan pangan dan peningkatan kesadaran melalui edukasi.
	UNESCO: Aksi Deklarasi ASEAN untuk Anak yang Tidak Sekolah Fase II: Program ini berfokus pada peningkatan akses pendidikan dasar bagi anak-anak yang terpinggirkan dan kurang beruntung di beberapa kabupaten di tiga provinsi.		
Revitalisasi Sekolah 	Asian Development Bank (ADB): Proyek ini bertujuan memberikan pengetahuan dan bantuan teknis tentang cara mengoptimalkan EdTech di Indonesia dan memberikan bukti bagaimana penggunaannya yang efektif dapat mendorong revolusi industri keempat (4IR) di pasar tenaga kerja Indonesia.	Islamic Development Bank: Pada tahun 2017, IsDB dan Indonesia mendirikan Indonesia Medical and Education Research Center di Universitas Indonesia untuk memajukan pendidikan dan penelitian medis. IsDB juga mendukung Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan pembangunan delapan gedung baru, termasuk laboratorium, planetarium, observatorium, perpustakaan, dan fasilitas TIK.	UNICEF: Program unggulan WASH UNICEF mempromosikan praktik sanitasi dan kebersihan. Bekerja sama dengan Kemdikbudristek, GIZ Indonesia, CIS Timor, dan Save the Children, UNICEF membawa program ini ke sekolah-sekolah pedesaan di Indonesia.
	ChildFund: <ul style="list-style-type: none"> • ChildFund Indonesia mempromosikan Sekolah Ramah Anak untuk tingkat sekolah dasar dan menengah pertama dengan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan komunitas. • Meluncurkan SwipeSafe, program pelatihan penggunaan internet yang aman untuk anak-anak dan remaja, serta meningkatkan kesadaran bagi orang tua, profesional, dan penegak hukum mengenai risiko daring. 	UNESCO: Sustaining Our Oceans membangun hubungan yang sehat dengan lautan di Asia Tenggara melalui Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD). Program ini bertujuan memberikan pendidikan kepada siswa dan pengembangan kapasitas guru dalam pembangunan berkelanjutan dan konservasi laut untuk mengurangi sampah laut di negara-negara Asia Tenggara.	UNESCO: <ul style="list-style-type: none"> • Actions of ASEAN Declaration for Out-of-School Children Phase 2 melakukan pengembangan kapasitas bagi pejabat pemerintah, serta guru/fasilitator pusat pembelajaran masyarakat, disertai dukungan untuk implementasi program dan komunikasi/advokasi. • Empowering Learners Through Transformative Education for Sustainable Development in Asia and the Pacific berfokus pada promosi pendidikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan Tonga melalui dukungan teknis, pengembangan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
Pengembangan Tenaga Kerja 	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): <ul style="list-style-type: none"> • ISED mengembangkan pelatihan berorientasi pekerjaan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja dan memperkuat kerangka kerja untuk pekerjaan hijau yang berkelanjutan. • Selain itu, melalui TSR 2.0, GIZ mengajak sektor swasta untuk menyesuaikan Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Teknis (TVET) dengan kebutuhan industri, dengan fokus pada kesetaraan gender, digitalisasi, dan transformasi ekonomi hijau. 	Asian Development Bank (ADB): <ul style="list-style-type: none"> • Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project (AKSI) yang merupakan inisiatif ADB dan Kemdikbudristek pada 2019–2023 bertujuan meningkatkan kapasitas pengajaran dan kelembagaan di perguruan tinggi di Aceh, Jambi, dan Riau dengan program yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. • PRIME STeP mendukung Kemdikbudristek dalam mengomersialkan penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kesuksesan startup di taman ilmu pengetahuan dan teknologi di ITB, UGM, IPB, dan UI. 	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): <p>Technical and Vocational System Reform (TSR 2.0) bertujuan mendukung Strategi TVET Nasional Indonesia dengan memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga pemerintah yang terlibat dalam promosi TVET.</p>
		ChildFund: <p>Untuk tingkat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, organisasi ini bermitra dengan komunitas lokal untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, panduan karier, kesiapan kerja, dan akses TIK, khususnya bagi perempuan muda meningkatkan kompetensi dasar komputer.</p>	Islamic Development Bank: <p>IsDB mendukung perguruan tinggi Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dan kapasitas pengembangan sumber daya manusia melalui pembiayaan IsDB. Program ini menghasilkan peningkatan peringkat akreditasi, pencairan dana penelitian, publikasi ilmiah di jurnal internasional, dan mendorong inovasi serta penelitian.</p>
		Government of Australia (Department of Foreign Affairs and Trade): <p>Program Katalis mendukung pengembangan tenaga kerja dan TVET dengan (1) mengintegrasikan penyedia TVET Australia ke dalam platform digital Indonesia, (2) memfasilitasi pelatihan peningkatan keterampilan bagi pekerja Indonesia melalui kemitraan pelatihan Indonesia-Australia, dan (3) menghubungkan bisnis yang dipimpin perempuan dengan rekan-rekan regional untuk mempromosikan kesetaraan gender.</p>	USAID: <p>PADU bertujuan meningkatkan investasi penting di lembaga TVET dengan memperkuat kemitraan sektor swasta dengan BLK. Dalam hal ini, USAID memberikan layanan teknis dan penasihat kepada Kemenaker untuk membantu mengembangkan kemitraan sektor swasta yang lebih berkelanjutan dan melibatkan perempuan sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja di kalangan pemuda.</p>
		USAID: <p>TALENTA adalah program yang dipimpin USAID bekerja sama dengan Amazon Web Services dan Elitery, layanan IT Indonesia, untuk mempercepat transformasi digital berbasis cloud di Indonesia melalui pelatihan tenaga kerja dan dukungan teknologi bagi startup dan UKM.</p>	

	PILAR 1 Penguatan Kapasitas Lembaga Filantropi	PILAR 2 Pertukaran Praktik Baik	PILAR 3 Advokasi Kebijakan
<p>Tata Kelola Pemerintahan</p> 	<p>UNICEF: UNICEF Indonesia berfokus pada pengumpulan bukti untuk advokasi kebijakan melalui laporan Analisis Situasional tahunan, yang mencakup akses pendidikan, hasil belajar, dan pengembangan keterampilan remaja.</p>	<p>World Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KIAT Guru pertama kali diinisiasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di bawah Sekretariat Wakil Presiden (TNP2K) bekerja sama dengan Kemdikbud. • Bank Dunia akan menerapkan berbagai intervensi, seperti pemberian tunjangan profesi guru (TPG), untuk menentukan hubungan antara kebijakan baru untuk pembayaran guru dan peningkatan kinerja guru. • Bank Dunia bertujuan meningkatkan pengelolaan layanan pendidikan dasar dan menengah di bawah Kemenag. 	<p>UNICEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BERAN merupakan program kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, UNFPA, UNICEF, dan Kanada untuk meningkatkan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan dan remaja. • Mitra Muda & U-Report melaksanakan pemberdayaan pemimpin muda dalam advokasi, pembuatan kebijakan, dan pembuatan konten untuk UNICEF Indonesia. • P-OCSEA: Diluncurkan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan UNICEF untuk mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring. • Program UNICEF yang mengembangkan keterampilan remaja dalam inovasi, mengatasi isu seperti perundungan, kekerasan, dan perubahan iklim dengan dukungan mentor dari industri.
	<p>Global Partnership for Education (GPE): Organisasi ini mendukung pemerintah nasional dan organisasi masyarakat sipil dalam reformasi pendidikan, penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, dan mendukung pemerintah daerah dalam kebijakan pendidikan.</p>	<p>USAID: The Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia (PASTI) adalah inisiatif empat tahun yang didanai USAID oleh Wahana Visi Indonesia bersama mitra seperti Tanoto Foundation. Program ini mendukung upaya anti-gizi buruk Indonesia dengan meningkatkan praktik pemberian makan awal, nutrisi remaja dan pranikah, kapasitas kelembagaan, dan pelayanan kesehatan primer di lima provinsi.</p>	
		<p>UK Foreign Commonwealth and Development Office: Pemerintah Inggris mendukung kolaborasi pendidikan internasional dengan Indonesia melalui Turing Scheme yang merupakan kemitraan pendidikan transnasional, pelatihan bahasa Inggris bagi guru Indonesia, serta rencana memperbarui MoU Pendidikan tahun 2016. Pemerintah Inggris juga berupaya meningkatkan dialog pendidikan yang teratur.</p>	

Tanoto Foundation

Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No.31
Jakarta 10230

+62 21 392 3189

info@tanotofoundation.org

Singapore

80 Raffles Place
#50-01 UOB Plaza 1
Singapore 048624

+65 621 693 368

TF_singapore@tanoto-foundation.org

China

5th floor, East Fortune Time Plaza
11 Fortune Garden, Beijing China
100032

+86 1058 362 277

TF_China@tanotofoundation.org

 tanotoeducation

 Tanoto Foundation

 TanotofoundationOrgID

 tanotofoundation

 Tanoto Foundation

 info@tanotofoundation.org

 www.tanotofoundation.org

